



# LKPJ 2021

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
MUAARA SABAK, MARET 2022

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua telah dapat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur selama tahun 2021. Selama itu pula kami bersama DPRD dan segenap OPD serta komponen yang terkait telah dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung yang sama-sama kita cintai ini. Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam menjalankan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang merupakan kelanjutan dari Periode Sebelumnya dengan Visi Rakyat (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat).

Memenuhi amanat ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta memenuhi komitmen akuntabilitas satu tahun masa jabatan selaku Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026, maka dengan ini disampaikan dokumen mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah keberhasilan bersama dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat, dibawah koordinasi dan arahan Kepala Daerah.

Semoga dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini, akan semakin memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap seluruh upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok yang didukung DPRD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur. Prestasi kinerja yang diperoleh tidak lepas dari perkenan dan hidayah Allah SWT yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah. Sebaliknya kinerja program pembangunan daerah yang belum terealisasi secara optimal, dipengaruhi oleh faktor internal di pemerintah disamping tentunya faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta para pihak dan masyarakat yang telah turut serta memajukan pantai timur Jambi Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini.

*Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .....	4
1.4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	5
1.4.2. Prioritas Dan Pembangunan Tahun 2021.....	9
1.4.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	11
1.5. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	13
1.5.1. Kondisi Geografis Daerah .....	13
1.5.2. Kondisi Demografis .....	16
1.5.3. Kondisi Ekonomi.....	17
1.5.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
1.5.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	19
1.5.4.2. Struktur Ekonomi .....	20
1.5.4.3. PDRB per kapita .....	21
1.5.4.4. Indeks Gini (Gini Ratio).....	22
1.5.4.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan .....	23
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD.....	26
2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	26
2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan .....	26
2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan .....	27
2.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.1.2.2. Pendapatan Transfer .....	32
2.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	33
2.1.2.4. Pembiayaan.....	34
2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	35
2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .....	35
2.2.2. Target dan Realisasi Belanja.....	36
2.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Operasi.....	37
2.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Modal.....	39
2.2.2.3. Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga .....	41
2.2.2.4. Target dan Realisasi Belanja Transfer .....	41
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	42
3.1. DINAS PENDIDIKAN .....	42
3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	43
3.1.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah.....	58

3.1.3.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	59
3.2.	DINAS KESEHATAN.....	61
3.2.1.	Capaian Kinerja Program .....	61
3.2.2.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah .....	76
3.2.3.	Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	77
3.2.4.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	78
3.3.	RSUD NURDIN HAMZAH .....	82
3.3.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	82
3.3.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	94
3.3.3.	Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	94
3.3.4.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	95
3.4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .....	97
3.4.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	98
3.4.2.	PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN.....	110
3.4.3.	Tindak Lanjut Catatan Dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020.....	111
3.5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN .....	114
3.5.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	115
3.5.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	124
3.5.3.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	125
3.6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN .....	127
3.6.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	128
3.6.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	145
3.6.3.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	146
3.7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	148
3.7.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	148
3.7.2.	Permasalahan dan Penanganan Masalah.....	158
3.7.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	160
3.8.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	162
3.8.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	163

3.8.2.	PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN.....	173
3.8.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	174
3.9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .....	176
3.9.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	177
3.9.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	193
3.9.3.	Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	194
3.9.4.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020 .....	195
3.10.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	196
3.10.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	196
3.10.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	210
3.10.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	210
3.11.	DINAS KETAHANAN PANGAN .....	212
3.11.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	213
3.11.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	227
3.11.3.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	228
3.12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	230
3.12.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	231
3.12.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	245
3.12.3.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	246
3.13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	248
3.13.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	248
3.13.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	256
3.13.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	257
3.14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	261
3.14.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	261
3.14.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	268
3.14.3.	Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	271
3.14.4.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	272
3.15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	274
3.15.1.	Capaian Pelaksanaan Program.....	275
3.15.2.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	284

3.15.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	285
3.15.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	286
3.16. DINAS PERHUBUNGAN .....	287
3.16.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	288
3.16.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	294
3.16.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	295
3.16.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	295
3.17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	298
3.17.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	299
3.17.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	305
3.17.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	306
3.17.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	307
3.18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	309
3.18.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	310
3.18.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	320
3.18.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	321
3.18.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	322
3.19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	324
3.19.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	325
3.19.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	335
3.19.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	336
3.20. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	338
3.20.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	339
3.20.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	349
3.20.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	349
3.21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.....	351
3.21.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	351
3.21.2. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap	

Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	359
3.22. DINAS PERIKANAN .....	359
3.22.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	360
3.22.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	369
3.22.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	370
3.23. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.....	373
3.23.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	373
3.23.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	381
3.23.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	382
3.24. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN .....	383
3.24.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	384
3.24.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	395
3.24.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	397
3.25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....	398
3.25.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	398
3.25.2. Permasalahan dan Solusinya.....	406
3.25.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	407
3.26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) .....	408
3.26.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	408
3.26.2. Permasalahan dan Solusinya.....	419
3.26.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	420
3.26.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	421
3.27. INSPEKTORAT.....	422
3.27.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	423
3.27.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	432
3.27.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	432
3.28. BADAN KEUANGAN DAERAH.....	435
3.28.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	435
3.28.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	447
3.28.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	447
3.28.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap	

Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	449
3.29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH.....	451
3.29.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	452
3.29.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	459
3.29.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	460
3.30. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.....	462
3.30.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	463
3.30.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	469
3.30.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	470
3.31. SEKRETARIAT DAERAH .....	471
3.31.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	471
3.31.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	531
3.31.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN .....	531
3.31.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020. ....	533
3.32. SEKRETARIAT DPRD .....	538
3.32.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	538
3.32.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	550
3.32.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	551
3.32.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	551
3.33. 11 KECAMATAN.....	553
3.33.1. Capaian Pelaksanaan Program.....	554
3.33.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan .....	592
3.33.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020.....	594
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	600
4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .....	601
4.2. DANA DEKONSENTRASI.....	601
4.2.1. Satuan Kerja Pelaksana.....	601
4.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	601
4.2.1.2. Dinas Ketahanan Pangan .....	603
BAB V PENUTUP.....	606

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	6
Tabel 1.2.	Prioritas Pembangunan Daerah .....	10
Tabel 1.3.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	11
Tabel 1.4.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	14
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2020 dan 2021 .....	17
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2021.....	19
Tabel 1.7.	Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 – 2021 .....	23
Tabel 2.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 .....	28
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020–2021* .....	28
Tabel 2.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 .....	29
Tabel 2.4.	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 .....	30
Tabel 2.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 .....	31
Tabel 2.6 .	Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2021 .....	31
Tabel 2.7.	Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 .....	32
Tabel 2.8.	Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 .....	33
Tabel 2.9.	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021 .....	33
Tabel 2.10.	Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2021 .....	34
Tabel 2.11.	Perkembangan Pembiayaan Periode 2021 .....	35
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung .. Timur Tahun 2021 .....	37
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	37
Tabel 2.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	38
Tabel 2.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	39
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	40
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	41
Tabel 2.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer .....	41
Tabel 3.1.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021 .....	43
Tabel 3.2.	Capaian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	52
Tabel 3.3.	Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021 .....	57

Tabel 3.4.	Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021 .....	57
Tabel 3.5.	Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021 .....	57
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	58
Tabel 3.7.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	58
Tabel 3.8.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	59
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 .....	61
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	70
Tabel 3.11.	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	75
Tabel 3.12.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	76
Tabel 3.13.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	77
Tabel 3.14.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	79
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2021 .....	83
Tabel 3.16.	Capaian Program RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	89
Tabel 3.17.	Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020-2021 .....	92
Tabel 3.18.	Jumlah Pasien Perbulan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020-2021 .....	92
Tabel 3. 19.	Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2020-2021 .....	93
Tabel 3.20.	Data Efisiensi Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021 .....	93
Tabel 3. 21.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	94
Tabel 3.22.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	95
Tabel 3.23.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	95
Tabel 3.24.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 .....	98
Tabel 3.25.	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 .....	106
Tabel 3. 26.	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 .....	110
Tabel 3.27.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	111

Tabel 3.28.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2021 .....	115
Tabel 3.29.	Capaian Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	122
Tabel 3.30.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	124
Tabel 3.31.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	125
Tabel 3.32.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021 .....	128
Tabel 3.33.	Target, Realisasi dan Capaian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	136
Tabel 3.34.	Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2021 .....	138
Tabel 3. 35.	Kegiatan Pelatihan Linmas Tahun 2021 .....	139
Tabel 3.36.	Perda dan Perkada Yang di Tegakan Tahun 2021 .....	139
Tabel 3. 37.	Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/ Orang-Orang Penting Dan Penjagaan Aset-Aset Daerah Tahun 2021 .....	139
Tabel 3.38.	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Bangunan Rumah Penduduk dan Lahan Tahun 2021 .....	143
Tabel 3.39.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	145
Tabel 3. 40.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020 .....	146
Tabel 3.41.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	149
Tabel 3.42.	Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	156
Tabel 3. 43.	Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	159
Tabel 3.44.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	160
Tabel 3.45.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 .....	163
Tabel 3.46.	Pencapaian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	169
Tabel 3.47.	Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.....	173
Tabel 3.48.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	173
Tabel 3.49.	Tindak lanjut catatan dan Rekomendasi DPR terhadap LKPJ 2020 .....	174
Tabel 3.50.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021.....	177

Tabel 3.51.	Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	182
Tabel 3.52.	Kejadian Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2019, 2020 dan 2021 .....	185
Tabel 3.53.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	193
Tabel 3.54.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	194
Tabel 3.55.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	195
Tabel 3.56.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 .....	197
Tabel 3.57.	Pencapaian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	205
Tabel 3.58.	Capaian Kinerja Dinas Sosial PPA Tahun Anggaran 2021 .....	209
Tabel 3.59.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	210
Tabel 3.60.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	210
Tabel 3.61.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 .....	213
Tabel 3.62.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Ketahanan Pangan .....	219
Tabel 3.63.	Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH) .....	222
Tabel 3.64.	Rekapitulasi Laporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 .....	223
Tabel 3.65.	Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan pada Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Keadaan s/d Desember 2021) .....	224
Tabel 3.66.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	227
Tabel 3.67.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2021 .....	231
Tabel 3.68.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	237
Tabel 3.69.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup .....	245
Tabel 3.70.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	246
Tabel 3.71.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	249
Tabel 3.72.	Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	253

Tabel 3.73.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	256
Tabel 3.74.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenTanjung JabungTimur Tahun 2020 .....	257
Tabel 3.75.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	262
Tabel 3.76.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	265
Tabel 3.77.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	268
Tabel 3.78.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	268
Tabel 3.79.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	271
Tabel 3.80.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	272
Tabel 3.81.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB .....	275
Tabel 3.82.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB .....	281
Tabel 3.83.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	284
Tabel 3.84.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	286
Tabel 3.85.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	286
Tabel 3.86.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 .....	288
Tabel 3.87.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	292
Tabel 3.88.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	294
Tabel 3.89.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	295
Tabel 3.90.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	295
Tabel 3.91.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 .....	299
Tabel 3.92.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	304
Tabel 3.93.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	306
Tabel 3.94.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	307

Tabel 3.95.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	308
Tabel 3.96.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021 .....	310
Tabel 3.97.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	316
Tabel 3.98.	Jumlah KUD dan Non KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 .....	319
Tabel 3.99.	Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 .....	319
Tabel 3.100.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	320
Tabel 3.101.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	321
Tabel 3.102.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 .....	325
Tabel 3.103.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	329
Tabel 3.104.	Jumlah Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 .....	332
Tabel 3.105.	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	334
Tabel 3.106.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	335
Tabel 3. 107.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenTanjung JabungTimur Tahun 2020 .....	337
Tabel 3.108.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Parbudpora Tahun Anggaran 2021 .....	339
Tabel 3.109.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Parbudpora KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	346
Tabel 3. 110.	Situs dan Cagar Budaya yang ada di kabupaten tanjung Jabung Timur Sampai dengan tahun 2021 .....	348
Tabel 3. 111.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Parbudpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	349
Tabel 3.112.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	350
Tabel 3.113.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	352
Tabel 3.114.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	356
Tabel 3.115.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	358
Tabel 3.116.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah .....	359

Tabel 3.117.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	360
Tabel 3.118.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	365
Tabel 3.119.	Jumlah Produksi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	368
Tabel 3.120.	Perkembangan Mina Padi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	368
Tabel 3.121.	Data Rekapitulasi Kelompok dan Tenaga Perikanan Tahun 2021 .....	368
Tabel 3.122.	Jumlah UPI dan pemasaran ikan tahun 2021. ....	369
Tabel 3.123.	Data Kegiatan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	369
Tabel 3.124.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	370
Tabel 3.125.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	370
Tabel 3.126.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.....	373
Tabel 3.127.	Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	379
Tabel 3.128.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	381
Tabel 3.129.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	382
Tabel 3.130.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tahun Anggaran 2021 .....	384
Tabel 3.131.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	390
Tabel 3.132.	Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	393
Tabel 3.133.	Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	393
Tabel 3.134.	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	394
Tabel 3.135.	Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, 2020 dan 2021 .....	394
Tabel 3.136.	Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, 2020 dan 2021 .....	394
Tabel 3.137.	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan.....	394
Tabel 3.138.	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan.....	395
Tabel 3.139.	Kejadian Kebakaran lahan dan kebun tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Kecamatan .....	395
Tabel 3.140.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	396

Tabel 3.141.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	397
Tabel 3.142.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021 .....	398
Tabel 3.143.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	404
Tabel 3.144.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	406
Tabel 3.145.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	407
Tabel 3.146.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2021 .....	409
<b>Tabel 3.147.</b>	<b>Pencapaian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....</b>	<b>416</b>
Tabel 3.148.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	420
Tabel 3.149.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	421
Tabel 3.150.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	421
Tabel 3.151.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	423
Tabel 3.152.	Pencapaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	428
Tabel 3.153.	Jumlah Pemeriksaan Internal dan Review Tahun 2021 .....	430
Tabel 3.154.	Total Temuan hasil audit pemeriksaan Tahun 2013 – 2020 .....	431
Tabel 3.155.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	432
Tabel 3.156.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	433
Tabel 3.157.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	436
Tabel 3.158.	Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	444
Tabel 3.159.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	447
Tabel 3.160.	Kebijakan Strategis Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	448
Tabel 3.161.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	449
Tabel 3.162.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	452

Tabel 3.163.	Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	457
Tabel 3.164.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	460
Tabel 3.165.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	460
Tabel 3.166.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	463
Tabel 3.167.	Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	467
Tabel 3.168.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	469
Tabel 3.169.	Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	470
Tabel 3.170.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021 .....	472
Tabel 3.171.	Target, Realisasi dan Capaian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	480
Tabel 3.172.	Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan Tahun 2021 .....	484
Tabel 3.173.	Uraian Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2021 .....	485
Tabel 3.174.	Uraian Peraturan Bupati yang dihasilkan Tahun 2021 .....	485
Tabel 3.175.	Uraian Keputusan Bupati yang dihasilkan Tahun 2021 .....	487
Tabel 3.176.	Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	528
Tabel 3.177.	Rekap Lelang Tahun 2021 .....	530
Tabel 3.178.	Efisiensi Anggaran Lelang Tahun 2021 .....	530
Tabel 3.179.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	531
Tabel 3.180.	Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2021 .....	532
Tabel 3.181.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	533
Tabel 3.182.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 .....	539
Tabel 3.183.	Target, Realisasi dan Capaian Program Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	547
Tabel 3.184.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	550
Tabel 3.185.	Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2021 .....	551
Tabel 3.186.	Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 .....	552
Tabel 3.187.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Muara Sabak Barat Tahun Anggaran 2021 .....	557
Tabel 3.188.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	558

Tabel 3.189.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Muara Sabak Timur Tahun Anggaran 2021 .....	560
Tabel 3.190.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	562
Tabel 3.191.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Rantau Rasau Tahun Anggaran 2021 .....	564
Tabel 3.192.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	565
Tabel 3.193.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Berbak Tahun Anggaran 2021 .....	567
Tabel 3.194.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	568
Tabel 3.195.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	570
Tabel 3.196.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	571
Tabel 3.197.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Sadu Tahun Anggaran 2021 .....	573
Tabel 3.198.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	574
Tabel 3.199.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Dendang Tahun Anggaran 2021 .....	575
Tabel 3.200.	Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas/Badan/Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	577
Tabel 3.201.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Kuala Jambi Tahun Anggaran 2021 .....	579
Tabel 3.202.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	580
Tabel 3.203.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Geraga Tahun Anggaran 2021 .....	582
Tabel 3.204.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	583
Tabel 3.205.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Mendahara Tahun Anggaran 2021 .....	585
Tabel 3.206.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	586
Tabel 3.207.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Mendahara Ulu Tahun Anggaran 2021 .....	588
Tabel 3.208.	Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	590
Tabel 3.209.	Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Kecamatan Tahun 2021 .....	591
Tabel 3.210.	Target dan Realisasi PBB dan Retribusi Daerah Kecamatan Tahun 2021 .....	592
Tabel 3.211.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	592
Tabel 4. 1.	Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	602

Tabel 4.2.	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	602
Tabel 4.3.	Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TanjungJabung Timur.....	602
Tabel 4.4.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	603
Tabel 4. 5.	Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	604
Tabel 4. 6.	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dana Dekonstrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 .....	604
Tabel 4.7.	Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	605

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Luas Wilayah per kecamatan (%).....	15
Gambar 1.2.	Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	16
Gambar 1.3.	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	16
Gambar 1.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021 .....	18
Gambar 1.5.	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2017-2021.....	20
Gambar 1.6.	Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	21
Gambar 1.7.	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	22
Gambar 1.8.	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 .....	24
Gambar 1. 9.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 .....	25
Gambar 3.1.	Perkembangan Harga Beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 .....	226
Gambar 3.2.	Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.....	226
Gambar 3.3.	Perkembangan Harga Cabe dan Bawang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 .....	226

# BAB I PENDAHULUAN

*Bab ini menjelaskan dasar hukum tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangan lainnya yang diperlukan; gambaran umum daerah yang terdiri dari kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, dan kondisi ekonomi yang terdiri dari potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB.*

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sistem daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Hak dan kewajiban tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan kepada publik melalui instrumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ini, dijelaskan bahwa dokumen LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, capaian dari program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan. Selain itu dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ juga menggambarkan kebijakan

strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 ini sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
  13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 40);
  14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 71).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 disusun untuk :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Memberikan gambaran sejauh mana perencanaan program dapat dilaksanakan, tingkat capaian keberhasilan serta manfaatnya.
3. Sebagai evaluasi atas kinerja Bupati selama menjalankan tugas jabatan periode tahun 2021.

#### **1.4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya memuat program-program unggulan OPD yang terkait langsung dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategis, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap berbagai isu-isu strategis daerah

### **1.4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 – 2026.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, adalah :

#### **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Keempat misi tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan 5 (Lima) Agenda Pembangunan yaitu :

1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;

5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2021-2026) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
<b>MISI 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan</b>			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
		2	Peningkatan Produksi Perkebunan
		3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak
		4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
		5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan

<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	
		6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan
		7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan
		8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
<b>MISI 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing</b>			
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS
		2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
		3	Perbaiki Sanitasi Masyarakat
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
		2	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah
3	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja
		2	Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang
<b>MISI 3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari</b>			
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah
		2	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana
		3	Peningkatan PAD
		4	Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	1	Fasilitasi Pendirian Pabrik
		2	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik
		3	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja
		4	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik
3	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2	Pengendalian Tata Ruang
<b>Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis</b>			
1	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi
		2	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
		3	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
TUJUAN		SASARAN	
		4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
2	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat
		2	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat

Sumber : Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;
15. Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;

22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31. peningkatan Rasa Aman Bagi Ssemua Lapisan Masyarakat.

#### **1.4.2. Prioritas Dan Pembangunan Tahun 2021**

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2021 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Tabel 1.2.  
Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Agenda Pembangunan (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2021
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;</li> <li>2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;</li> <li>3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;</li> <li>4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;</li> <li>5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;</li> <li>2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;</li> <li>3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;</li> <li>6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;</li> <li>7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;</li> <li>8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.</li> </ol>

Sumber : RKPD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 1.4.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Tabel 1.3.  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB</b>	<b>3,23</b>	<b>0,8</b>
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,45%	-11,05%
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19%	45,72%
3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi hewan ternak	3,6%	0,73%
4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5,82%	-8,38%
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Panjang Jalan Menuju Klaster Lahan pertanian dalam kondisi mantap (Km)	0	29,14
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kelas Kelompok tani Pemula (Kelompok)	765	767
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Lanjut (Kelompok)	308	295
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Madya (Kelompok)	117	121
		Peningkatan Kelas Kelompok tani Utama (Kelompok)	4	4
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar (%)	16,09%	26,29%
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT</b>	<b>INDEKS KESEHATAN</b>	<b>0,688</b>	<b>0,689</b>
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Persentase Sarana Prasarana Faskes (%)	2,13%	2,13%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	119,88	122,68
		Persentase Pelayanan Air Bersih (%)	57,07%	71%
		Persentase Volume Sampah terangkut perhari (%)	88,37%	88,37%
11	Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak (%)	73,08%	82,51%
<b>3</b>	<b>MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS</b>	<b>INDEKS PENDIDIKAN</b>	<b>9,52</b>	<b>9,55</b>
12	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	12,17
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	6,71	6,92
13	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	Persentase Santri Havidz Qur'an (%)	0%	0%
<b>4</b>	<b>MENCIPTAKAN TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING</b>	<b>RASIO KESEMPATAN KERJA</b>	<b>71,54</b>	<b>98,44</b>
14	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi (%)	69,94%	55,04%
15	Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/magang	Persentase tenaga kerja magang (%)	0%	0%

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
5	<b>MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI PMDN/PMA</b>	<b>0</b>	<b>13,89</b>
16	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (Trilyun)	3,418	3,586
17	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	Persentase aksesibilitas antar desa dan kecamatan (%)	73,12%	72,04%
18	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD (%)	4,61%	16,73%
19	Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah	Persentase data dan informasi potensi investasi daerah (%)	0%	0%
6	<b>MENINGKATNYA DAYA SERAP TENAGA KERJA</b>	<b>RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA</b>	<b>74,18</b>	<b>71,22</b>
20	Fasilitasi Pendirian Pabrik	Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam (%)	50%	50%
21	Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik	Persentase informasi lapangan kerja berbasis elektronik (%)	0%	0%
22	Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja (%)	0%	0%
23	Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Pelayanan ketenagakerjaan	B	B
7	<b>MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>	<b>RASIO KETAATAN IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH, DAN PUU LH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	67,30
25	Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100,00%	100,00%
8	<b>Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
26	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3
27	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	54,4	71
		Indeks Reformasi Hukum	Baik	Baik
28	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2
		Indeks Perencanaan	Baik	Baik
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Kurang
		Nilai SAKIP	B	CC
		Opini BPK	WTP	WTP
29	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	2,6	3,27
9	<b>MENCIPTAKAN KONDISI DAERAH YANG AMAN, NYAMAN DAN HARMONIS</b>	<b>INDEKS RASA AMAN</b>	<b>0,49</b>	<b>NA</b>
30	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	71	81
31	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	98,83%	100%

Sumber : Perda No 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

## **1.5. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1.5.1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas wilayah 5.445,0 Km<sup>2</sup>.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031, luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 8.507,70 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 5.085,705 Km<sup>2</sup> dan lautan atau perairan seluas 3.421,995 Km<sup>2</sup>. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Apabila ditinjau dari sudut Kecamatan, wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kecamatan Berbak yaitu meliputi 22,99% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 2,24%.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.085,705 km<sup>2</sup> dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.  
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

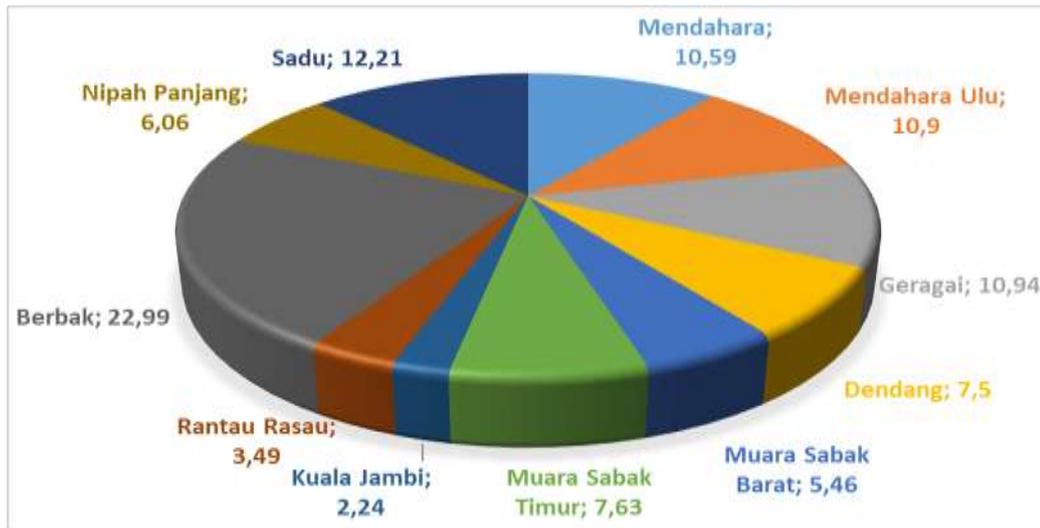
No	Kecamatan	Jumlah		Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km <sup>2</sup>	(%)
1.	Mendahara	1	8	538,578	10,59
2.	Mendahara Ulu	1	6	554,226	10,90
3.	Geragai	1	8	556,303	10,94
4.	Dendang	1	6	381,516	7,50
5.	Muara Sabak Barat	7	0	277,469	5,46
6.	Muara Sabak Timur	2	10	388,059	7,63
7.	Kuala Jambi	2	4	113,952	2,24
8.	Rantau Rasau	1	10	177,552	3,49
9.	Berbak	1	5	1.169,17	22,99
10.	Nipah Panjang	2	8	307,941	6,06
11.	Sadu	1	8	620,939	12,21
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>73</b>	<b>5.085,705</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berikut diagram pie dari luas wilayah per kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 1.1.  
Luas Wilayah per kecamatan (%)



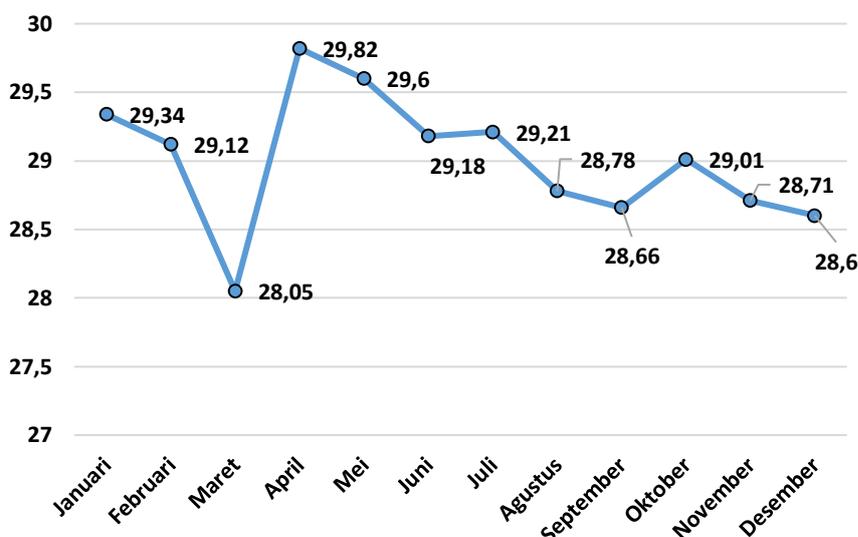
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat terhambat sampai terhambat sehingga menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (Bench Mark) BK 63.

Iklim merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil tidaknya pembangunan. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat.

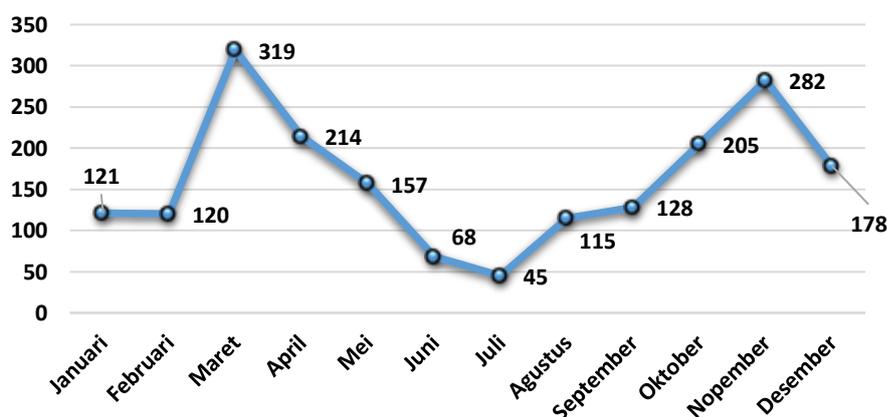
Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun. Pada Tahun 2020 Suhu udara rata-rata sebesar 29,6° Celsius dengan Suhu Maksimum sebesar 29,82° Celsius pada bulan April dan Suhu Minimum sebesar 28,05° Celsius pada bulan Maret. Curah Hujan rata-rata sebesar 162,6 mm per tahun. Curah Hujan maksimum sebesar 319 mm pada bulan maret dan minimum sebesar 45 mm pada bulan Juli. Kondisi Suhu dan Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.  
Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2021

Gambar 1.3.  
Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2020

## 1.5.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan 1,1 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2020 sebesar 45,00 jiwa/km<sup>2</sup> dan sex ratio 104,33.

Dari data pada tabel 1.5 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain.

Tabel 1.5.  
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	2020			2021		
	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
Mendahara	26.675	104,23	50,00	26.902	-	49,53
Mendahara Ulu	16.676	108,14	30,00	16.818	-	30,09
Geragai	26.202	105,82	47,00	26.425	-	47,10
Dendang	16.485	103,95	43,00	16.626	-	43,21
Ma Sabak Barat	21.409	103,22	77,00	21.591	-	77,16
Ma Sabak Timur	32.606	102,36	84,00	32.886	-	84,02
Kuala Jambi	14.485	106,54	127,00	14.608	-	127,12
Rantau Rasau	24.780	103,52	140,00	24.991	-	139,57
Berbak	10.591	106,45	9,00	10.681	-	9,06
Nipah	26.503	102,48	86,00	26.729	-	86,07
Sadu	13.401	105,35	22,00	13.515	-	21,58
<b>Jumlah</b>	<b>229.813</b>	<b>104,33</b>	<b>45,00</b>	<b>231.772</b>	<b>104,16</b>	<b>45,19</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2022

### 1.5.3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 ini akan menggunakan indikator ekonomi makro seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku pada tahun 2019. Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

### 1.5.4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 sebesar 0,13 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar -3,87 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori Real Estate sebesar 9,13 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif .

Gambar 1.4.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2022

Besaran kontribusi kategori lain dalam pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur sebagai berikut : 1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,24 persen; 2) Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,12 persen; 3) Konstruksi sebesar 6,87 persen; 4) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,26 persen; 5) Informasi dan Komunikasi sebesar 5,15 persen; 6) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,86 persen; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,03 persen; 8) Jasa Lainnya sebesar 3,02 persen; 9) Real Estate sebesar 2,86 persen; 10) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,80; 11) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,56 persen; 12) Jasa Perusahaan sebesar 2,46 persen; 13) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,75 persen; 14) Jasa Pendidikan sebesar 0,94 persen, 15) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,80 persen, 16) Pertambangan dan Penggalian sebesar -1,40 persen dan 17) Industri Pengolahan sebesar -0,57 persen.

Tabel 1.6.  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017–2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,41	4,11	2,95	2,68	0.80
B	Pertambangan dan Penggalan	0,87	1,53	4,38	-7,47	-1.40
C	Industri Pengolahan	1,93	4,35	0,28	1,25	-0.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,00	4,43	3,42	5,18	6.26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	7,24	5,46	6,81	4.86
F	Konstruksi	13,32	5,79	7,54	-0,09	6.87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,19	6,01	6,19	3,01	2.56
H	Transportasi dan Pergudangan	6,17	4,66	5,20	-1,25	7.12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,54	8,11	2,44	-7,24	4.03
J	Informasi dan Komunikasi	7,69	9,46	7,69	7,73	5.15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,40	1,24	3,85	3,42	2.80
L	Real Estate	8,81	8,48	9,13	-0,18	2.86
M,N	Jasa Perusahaan	5,32	4,51	3,33	-0,54	2.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	5,46	4,55	-0,34	1.75
P	Jasa Pendidikan	6,03	4,88	6,03	0,40	0.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,06	4,88	6,07	6,13	12.24
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,37	6,67	4,11	-1,52	3.02
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>3,07</b>	<b>2,94</b>	<b>4,25</b>	<b>-3,87</b>	<b>0,13</b>

Sumber : BPS Kab Tanjung Jabung Timur 2022

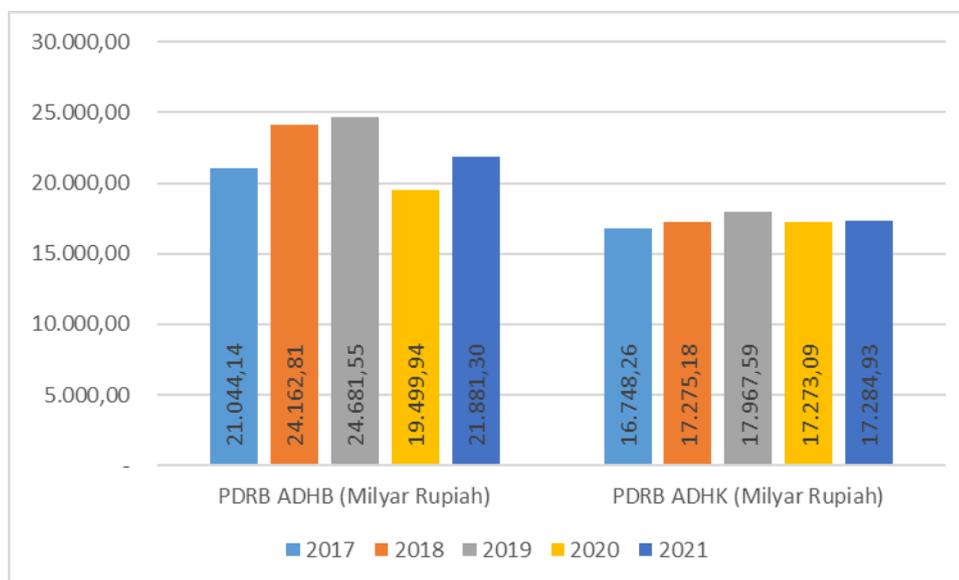
#### 1.5.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami Peningkatan dari tahun 2020, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2021 menurut lapangan usaha dalam satuan milyar sebesar Rp 21.881,30 meningkat sebesar Rp. 2.381,36 dari Rp. 19.499,94 pada tahun 2020.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2021 sebesar Rp. 17.284,93 meningkat sebesar Rp. 11,84 dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 17.273,09.

Gambar 1.5.  
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur 2022 (diolah)

#### 1.5.4.2. Struktur Ekonomi

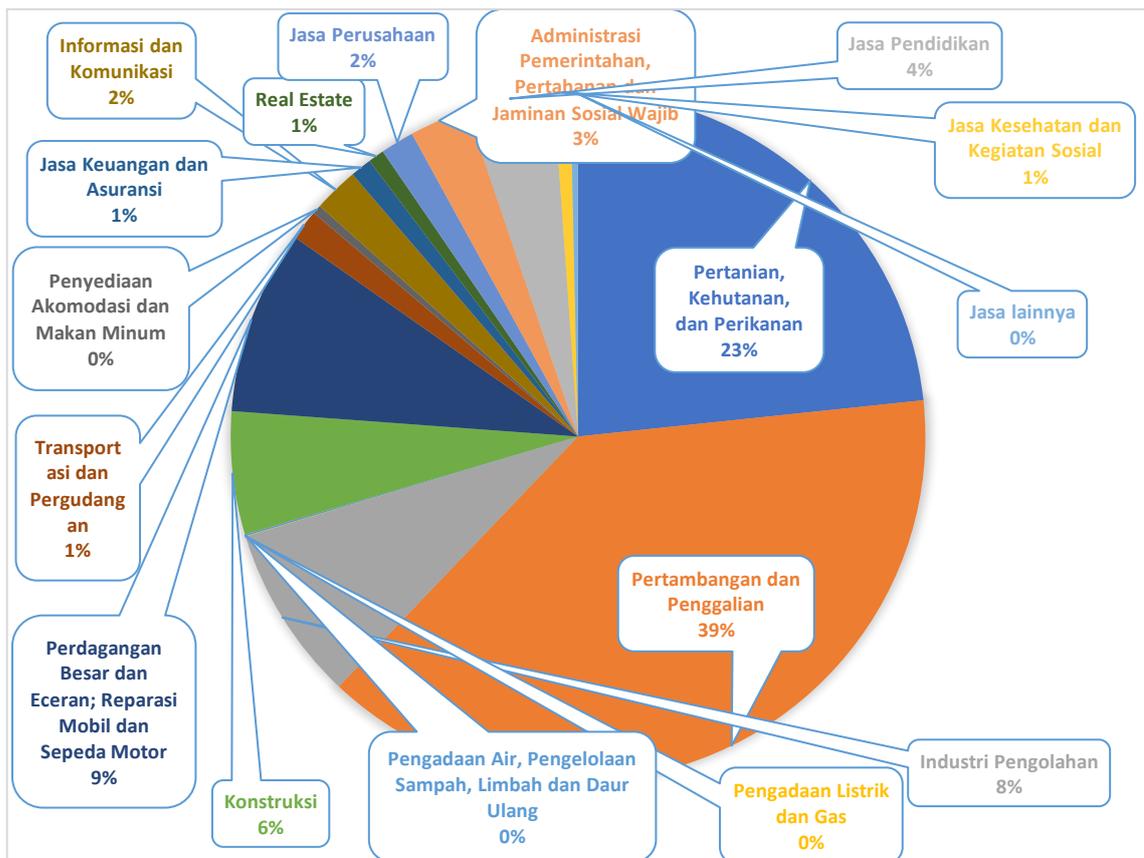
Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha. Di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sektor pengalihan dan pertambangan masih mendominasi dalam kontribusi struktur ekonomi.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 – 2020 didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2021 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 38,76 persen (angka ini naik dari 35,3 pada tahun 2020), urutan kedua yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,32 persen (turun dari 24,27 persen pada tahun 2020), urutan ketiga yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,64 persen (turun dari 9,2 persen pada tahun 2020), urutan keempat yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 8,23 persen (turun dari 9,00

persen pada tahun 2020), dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 5,76 persen (turun dari 5,88 persen pada tahun 2020).

Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan pada tahun 2021. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian kembali meningkat pada tahun 2021 setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2020.

Gambar 1.6.  
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2021



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur 2022

### 1.5.4.3. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2016-2020. Pada tahun 2020 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 112.262.791 naik sebesar 1,62 persen dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 110.477.719, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp. 81.815.169 Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 1.7.  
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### 1.5.4.4. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang Fluktuatif dan cenderung mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna. Data pada Tabel 1.7. disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2017 - 2021.

Tabel 1.7.  
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 – 2021

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Gini Ratio	0,28	0,29	0,29	0,25	0,25

Sumber : BPS, 2022

#### 1.5.4.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

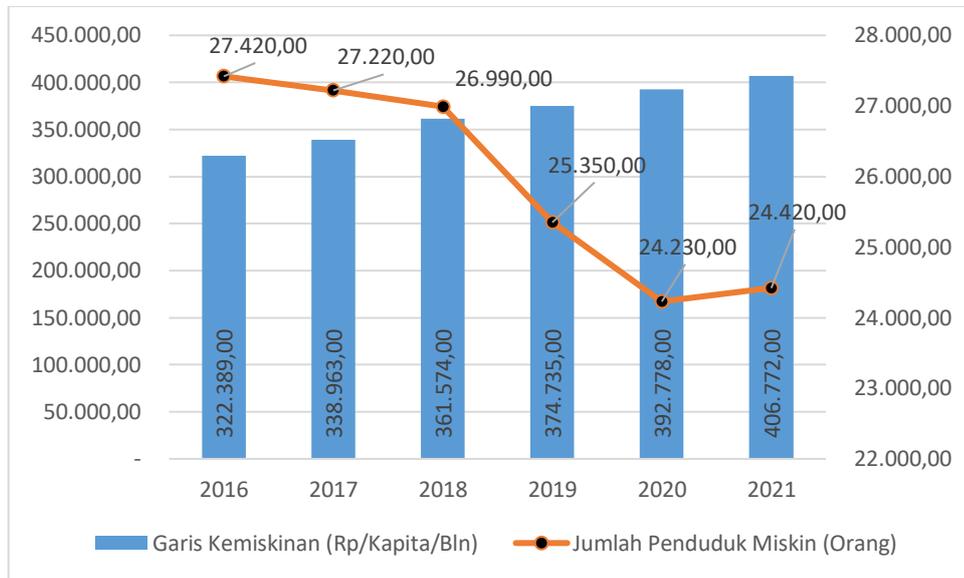
Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Saat ini Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2021 menunjukkan tren angka menurun, namun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 27.420 orang. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.220 orang pada tahun 2017, 26.990 pada tahun 2018, 25.350 pada tahun 2019, 24.230 orang pada tahun 2020. Pada Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 24.420 orang.

Berbeda dengan pendapatan keluarga miskin yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. pada tahun 2016 berjumlah Rp. 322.389,- kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 406.772,-. Grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode tahun 2016 - 2021 disajikan pada Gambar 1.8.

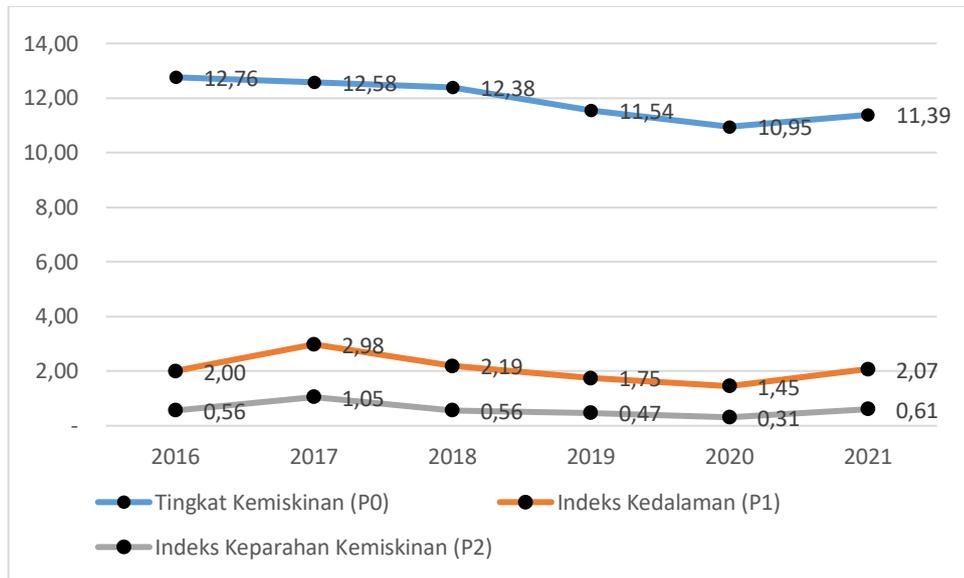
Gambar 1.8.  
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar 1.9.

Gambar 1. 9.  
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022 (diolah)

Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif cenderung menurun selama periode 2016 sampai dengan 2021, dimana pada tahun 2016 P1 berada di posisi 2,00 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,45 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,07. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,56 tahun 2016 menjadi 0,31 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 0,61 pada tahun 2021. Tingkat Kemiskinan (P0) pada tahun 2016 sebesar 12,76 persen menurun sampai dengan tahun 2020 menjadi 10,95 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 11,39 persen.

# BAB II

## PERUBAHAN PENJABARAN APBD

*Bab ini memuat laporan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang meliputi dari target dan realisasinya serta kebijakan keuangan daerah lainnya.*

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian suatu daerah.

Sampai dengan tahun 2021 sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergantung kepada dana perimbangan (yang bersumber dari APBN) seperti dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Meskipun begitu, secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2021 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan, ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan PAD dan serapan belanja daerah tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan**

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru

agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Garis besar kebijakan untuk penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi. Untuk itu, prinsip pengenaan retribusi haruslah dijaga, bahwa retribusi harus sesuai dengan pendefinisian, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak distortif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- b. Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat. Sebagai daerah yang relatif baru, dibutuhkan rancangan jangka panjang pemerintah daerah guna dapat menggali dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang bersumber dari daerah itu sendiri.
- c. Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Kebijakan tersebut diatas diambil sebagai upaya mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

- a. Masih ada wajib pajak/retribusi yang belum memahami tentang pajak dan retribusi serta rendahnya kesadaran kewajibannya terhadap pajak dan retribusi daerah.
- b. Dasar hukum berupa Perda yang menjadi payung hukum pemungutan pajak, retribusi daerah dan ada beberapa tarif yang belum direvisi/diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
- c. Masih rendahnya penerimaan BPHTB dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan turun waris.

Selain melaksanakan garis besar kebijakan untuk penerimaan, solusi yang diambil adalah penambahan personil yang khusus ditugaskan sebagai petugas pendata dan pemungut/penagih pajak dan retribusi daerah.

### **2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan**

Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 mencapai 106,92% dari target yang telah ditetapkan. Penyumbang kontribusi pendapatan Daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 83.151.030.599,45 atau meningkat sebesar 48,86% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baru terealisasi masing-masing 104,81% dan 99,60% dari target yang ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.089.315.889.549,00</b>	<b>1.164.679.495.736,45</b>	<b>106,92</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>55.858.703.734,21</b>	<b>83.151.030.599,45</b>	<b>148,86</b>
1.1.01.	Pajak Daerah	19.072.000.000,00	19.776.698.793,50	103,69
1.1.02.	Retribusi Daerah	2.277.371.000,00	1.855.564.808,43	81,48
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.794.487.721,66	7.088.808.214,73	104,33
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	27.714.845.012,55	54.429.958.782,79	196,39
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.001.890.935.814,79</b>	<b>1.050.089.360.137,00</b>	<b>104,81</b>
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	953.046.093.840,00	994.128.081.892,00	104,31
1.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.844.841.974,79	55.961.278.245,00	114,57
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>31.566.250.000,00</b>	<b>31.439.105.000,00</b>	<b>99,60</b>
1.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	31.566.250.000,00	31.439.105.000,00	99,60

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Jika dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,65%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020–2021\*

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Bertambah/Berkurang	% Peningkatan
1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.052.623.668.826,01</b>	<b>1.164.679.495.736,45</b>	<b>112.055.826.910,44</b>	<b>10,65</b>

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

### 2.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 mencapai 148,86% yaitu sebesar Rp 83.151.030.599,45 dari Target sebesar Rp. 55.858.703.734,21 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Pendapatan Pajak Daerah** tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 19.776.698.793,50 atau 103,69% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 19.072.000.000,00.

Komponen pendapatan pajak daerah yang telah melebihi target berasal dari komponen Pajak Reklame sebesar 231,23%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 107,00% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 143,93%. Komponen Pajak yang Lain belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Pajak Hotel sebesar 71,60%, Pajak Restoran sebesar 94,75%, Pajak Hiburan sebesar 26,00%, Pajak Air Tanah sebesar 84,18%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 84,85%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 58,19% dan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 82,19%. Secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.1.01.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>19.072.000.000,00</b>	<b>19.776.698.793,50</b>	<b>103,69</b>
1.1.01.06.	Pajak Hotel	6.000.000,00	4.296.000,00	71,60
1.1.01.07.	Pajak Restoran	3.170.500.000,00	3.004.177.830,50	94,75
1.1.01.08.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.300.000,00	26,00
1.1.01.09.	Pajak Reklame	105.500.000,00	243.951.864,00	231,23
1.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	9.855.000.000,00	10.544.927.678,00	107,00
1.1.01.12.	Pajak Air Tanah	45.000.000,00	37.882.700,00	84,18
1.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	110.000.000,00	93.333.000,00	84,85
1.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.075.000.000,00	625.517.017,00	58,19
1.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	2.054.766.725,00	82,19
1.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.200.000.000,00	3.166.545.979,00	143,93

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

**Pendapatan Retribusi Daerah** terealisasi 81,48% yaitu sebesar Rp. 1.855.564.808,43 dari target sebesar Rp. 2.277.371.000,00. Komponen yang realisasi melebihi target pendapatan Retribusi daerah terbesar berasal dari komponen Retribusi Perizinan Tertentu yang mencapai 159,37% terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai 159,37%. Komponen selanjutnya yang belum mencapai target adalah Retribusi Jasa Umum sebesar 83,94% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 59,31%. Secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.1.02.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.277.371.000,00</b>	<b>1.855.564.808,43</b>	<b>81,48</b>
<b>1.1.02.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.196.821.000,00</b>	<b>1.004.574.900,00</b>	<b>83,94</b>
1.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	409.500.000,00	484.258.600,00	118,26
1.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	117.343.000,00	167,63
1.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.250.000,00	7.600.000,00	144,76
1.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	73.500.000,00	74.900.000,00	101,90
1.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	-	-
1.1.02.01.08.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.071.000,00	2.400.000,00	224,09
1.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.500.000,00	25.695.500,00	48,94
1.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	285.000.000,00	292.377.800,00	102,59
<b>1.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>870.550.000,00</b>	<b>516.308.948,00</b>	<b>59,31</b>
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	691.000.000,00	413.823.000,00	59,89
1.1.02.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	4.200.000,00	5.030.000,00	119,76
1.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	42.000.000,00	4.975.000,00	11,85
1.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	42.000.000,00	28.855.000,00	68,70
1.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	42.000.000,00	10.108.000,00	24,07
1.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	26.250.000,00	32.712.948,00	124,62
1.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.100.000,00	20.805.000,00	90,06
<b>1.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>334.680.960,43</b>	<b>159,37</b>
1.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	210.000.000,00	334.680.960,43	159,37

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** terealisasi sebesar Rp. 7.088.808.214,73 atau setara 104,33% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang melebihi target tersebut berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.  
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Yang Dipisahkan Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.1.03.</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6.794.487.721,66</b>	<b>7.088.808.214,73</b>	<b>104,33</b>
1.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.794.487.721,66	7.088.808.214,73	104,33

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

**Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah** terealisasi sebesar Rp. 54.429.958.782,79 atau setara 196,39% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan terjadinya Pelampauan dari target pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut berasal dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar 174,03%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 204,42%, Pendapatan BLUD sebesar 469,12% dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar 102,93%. Secara rinci realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6  
.Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.1.04.</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>27.714.845.012,55</b>	<b>54.429.958.782,79</b>	<b>196,39</b>
1.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.374.000.000,00	2.391.132.081,00	174,03
1.1.04.05.	Jasa Giro	4.290.872.919,00	1.768.232.423,95	41,21
1.1.04.07.	Pendapatan Bunga	4.005.939.568,55	2.977.375.552,41	74,32
1.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.000.000.000,00	2.251.719.941,21	75,06
1.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	53.998.885,00	-
1.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	204.000.000,00	417.021.912,00	204,42
1.1.04.16.	Pendapatan BLUD	8.000.000.000,00	37.529.703.980,22	469,12
1.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.840.032.525,00	7.040.774.007,00	102,93

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

## 2.1.2.2. Pendapatan Transfer

Selama tahun 2021 penerimaan dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 1.050.089.360.137,00 atau mencapai 104,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.001.890.935.814,79. secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 994.128.081.892,00 atau 104,31% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 953.046.093.840,00. Semua Komponen pendapatan transfer pemerintah pusat telah mencapai target yang ditetapkan, berasal dari komponen Dana Perimbangan sebesar 104,85%, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) yang masing-masing sebesar 100,00%. Komponen Dana Perimbangan yang telah mencapai target berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing sebesar 139,82% dan 100%, sedangkan komponen Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik belum mencapai target yaitu masing-masing sebesar 95,90% dan 96,16%. Secara rinci realisasi Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.  
Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.2.01.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>953.046.093.840,00</b>	<b>994.128.081.892,00</b>	<b>104,31</b>
<b>1.2.01.01.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>846.482.218.840,00</b>	<b>887.564.206.912,00</b>	<b>104,85</b>
1.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	123.937.788.840,00	173.289.619.839,00	139,82
1.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	514.767.343.000,00	514.767.343.000,00	100,00
1.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	114.067.293.000,00	109.392.700.502,00	95,90
1.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.709.794.000,00	90.114.543.571,00	96,16
<b>1.2.01.02.</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>29.915.703.000,00</b>	<b>29.915.703.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.2.01.02.01.	DID	29.915.703.000,00	29.915.703.000,00	100,00
<b>1.2.01.05.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>76.648.172.000,00</b>	<b>76.648.171.980,00</b>	<b>100,00</b>
1.2.01.05.01.	Dana Desa	76.648.172.000,00	76.648.171.980,00	100,00

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

**Pendapatan Transfer Antar Daerah** tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 55.961.278.245,00 atau 114,57% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 48.844.841.974,79. Semua Komponen pendapatan transfer antar daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu berasal dari komponen Pendapatan Bagi Hasil sebesar 116,45% dan Bantuan Keuangan sebesar 100,00%. Secara rinci realisasi Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8.  
Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.2.02.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>48.844.841.974,79</b>	<b>55.961.278.245,00</b>	<b>114,57</b>
<b>1.2.02.01.</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>43.264.841.974,79</b>	<b>50.381.278.245,00</b>	<b>116,45</b>
1.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.264.841.974,79	50.381.278.245,00	116,45
<b>1.2.02.02.</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.580.000.000,00</b>	<b>5.580.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	100,00

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

### 2.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2.9.  
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>31.566.250.000,00</b>	<b>31.439.105.000,00</b>	<b>99,60</b>
<b>1.3.03.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>31.566.250.000,00</b>	<b>31.439.105.000,00</b>	<b>99,60</b>
1.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	31.566.250.000,00	31.439.105.000,00	99,60
1.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	31.566.250.000,00	31.439.105.000,00	99,60

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 31.439.105.000,00 atau 99,60 persen dari target

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 31.566.250.000,00, komponen yang belum mencapai target tersebut adalah Pendapatan Hibah Dana BOS .

Selanjutnya Target pendapatan daerah pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 24 organisasi Perangkat Daerah Pemungut dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.10.  
Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1	Dinas Kesehatan	409.500.000,00	484.258.600,00	118,25
2	Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah	8.000.0000.000,00	38.069.332.606,09	475,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	431.571.000,00	40.400.000,00	9,36
4	Dinas Perhubungan	373.500.000,00	45.287.948,00	12,13
5	Dinas Lingkungan Hidup	126.000.000,00	175.658.000,00	139,41
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	168.000.000,00	129.450.500,00	77,05
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	204.200.000,00	199.156.399,00	97,53
8	Dinas Perikanan	25.000.000,00	2.500.000,00	10,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga	23.100.000,00	20.805.000,00	90,06
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	49.000.000,00	50.910.000,00	103,90
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.152.500.000,00	2.295.914.579,00	155,48
12	Badan Keuangan Daerah	37.578.800.209,21	34.682.349.788,80	92,29
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	285.000.000,00	292.377.800,00	102,59
14	Kecamatan Muara Sabak Barat	14.708.971,00	12.020.000,00	81,72
15	Kecamatan Muara Sabak Timur	14.522.962,00	729.000,00	5,02
16	Kecamatan Mendahara	15.384.478,00	0,00	0,00
17	Kecamatan Mendahara Ulu	14.855.822,00	8.250.000,00	55,53
18	Kecamatan Geragai	7.920.078,00	107.586,00	1,36
19	Kecamatan Kuala Jambi	13.994.304,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Dendang	18.595.586,00	3.887.599,43	20,91
21	Kecamatan Berbak	11.922.622,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Rantau Rasau	25.654.147,00	11.466.696,00	44,70
23	Kecamatan Nipah Panjang	25.389.818,00	901.000,00	5,85
24	Kecamatan Sadu	19.545.212,00	1.450.000,00	7,42

Sumber : LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

#### 2.1.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Tabel 2.11.  
Perkembangan Pembiayaan Periode 2021

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	$5=4/3*100$
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55.500.000.000,00</b>	<b>38.295.149.755,44</b>	<b>69,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>38.295.149.755,44</b>	<b>69,63</b>
<b>3.1.01.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>38.295.149.755,44</b>	<b>69,63</b>
3.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	564.000.000,00	-	-
3.1.01.05.	Penghematan Belanja	32.470.584.063,00	35.626.770.106,48	109,72
3.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000.000,00	-	-
3.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	4.965.415.937,00	2.668.379.648,96	53,74
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2.02.</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>54.500.000.000,00</b>	<b>38.295.149.755,44</b>	<b>70,27</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>153.047.191.885,06</b>	<b>-</b>

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2021, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 terealisasi Rp. 38.295.149.755,44 atau mencapai sebesar 69,63%. Dari sisi pengeluaran pembiayaan tahun 2021, anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00 namun tidak terealisasi atau mencapai 0%. sehingga pembiayaan netto tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 38.295.149.755,44 atau 70,27%.

## 2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

### 2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu)

tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran, dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

### **2.2.2. Target dan Realisasi Belanja**

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2021, anggaran belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan sebesar Rp. 1.143.815.889.549,00 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Operasi sejumlah Rp. 738.531.449.577,62 atau sebesar 64,57%, Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 244.544.117.910,00 atau sebesar 21,38%, Alokasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 14.743.138.683,38,00 atau sebesar 1,29% dan Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp. 145.997.183.378,00 atau sebesar 12,76% dari total alokasi belanja daerah. Dari alokasi belanja daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.049.927.453.606,83 atau sebesar 91,79%, terdiri dari Belanja Operasi terealisasi sejumlah Rp. 674.314.634.400,70 atau sebesar 91,30%, Belanja Modal terealisasi sejumlah Rp. 229.985.510.379,13 atau sebesar 94,05%, Belanja Tidak Terduga terealisasi sejumlah Rp. 280.866.511,00 atau sebesar 1,91% dan Belanja Transfer terealisasi sejumlah Rp. 145.346.442.316,00 atau sebesar 99,55% dari target anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12.  
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.143.815.889.549,00</b>	<b>1.049.927.453.606,83</b>	<b>91,79</b>
2.1.	Belanja Operasi	738.531.449.577,62	674.314.634.400,70	91,30
2.2.	Belanja Modal	244.544.117.910,00	229.985.510.379,13	94,05
2.3.	Belanja Tidak Terduga	14.743.138.683,38	280.866.511,00	1,91
2.4.	Belanja Transfer	145.997.183.378,00	145.346.442.316,00	99,55

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

### 2.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Operasi

Tahun 2021 belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 738.531.449.577,62 dan terealisasi sebesar Rp. 674.314.634.400,70 atau 91,30% lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit). Belanja pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai, Tunjangan Jabatan/Fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp. 429.378.846.370,62 terealisasi sebesar Rp. 407.563.061.948,00 atau 94,92%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 284.638.454.608,00 terealisasi sebesar Rp. 242.812.980.041,70 atau 85,31%. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menganggarkan Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 23.367.748.599,00 terealisasi sebesar Rp. 22.809.147.411,00 atau 97,61%. Selain itu juga dianggarkan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 1.146.400.000,00 terealisasi sebesar 1.129.445.000,00 atau 98,52%.

Tabel 2.13.  
 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>738.531.449.577,62</b>	<b>674.314.634.400,70</b>	<b>91,30</b>
2.1.01.	Belanja Pegawai	429.378.846.370,62	407.563.061.948,00	94,92
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	284.638.454.608,00	242.812.980.041,70	85,31
2.1.05.	Belanja Hibah	23.367.748.599,00	22.809.147.411,00	97,61
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.146.400.000,00	1.129.445.000,00	98,52

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022  
 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Belanja Operasi menurut OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi menurut OPD  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)		
		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1	DINAS PENDIDIKAN	262.843.139.765,00	251.170.108.095,00	95,56
2	DINAS KESEHATAN	105.964.873.419,00	89.038.533.015,00	84,03
3	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	32.242.367.726,00	30.245.312.579,00	93,81
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.855.485.675,00	27.497.436.629,70	92,10
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	34.424.134.964,00	32.659.928.652,00	94,88
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.544.389.482,00	5.379.301.456,00	82,20
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.760.771.174,07	3.613.615.094,00	96,09
8	DINAS PERHUBUNGAN	5.487.021.020,00	4.663.633.785,00	84,99
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.851.704.672,00	5.674.790.897,00	96,98
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.291.704.489,00	4.971.966.006,00	93,95
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.432.123.316,00	4.910.526.741,00	90,40
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.934.134.658,03	4.720.103.573,00	95,66
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.077.174.864,00	5.578.557.689,00	78,82
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.382.380.454,00	4.215.275.459,00	96,19
15	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAHRAGA	12.569.345.995,00	9.223.803.052,00	73,28
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.759.191.459,00	5.319.836.813,00	92,37
17	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK	4.637.580.557,00	4.263.149.760,00	91,93
18	SEKRETARIAT DPRD	36.615.002.054,00	31.931.327.450,00	87,21
19	SEKRETARIAT DAERAH	30.415.165.191,00	28.114.068.682,00	92,74
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	18.904.354.052,44	14.801.488.636,00	78,30
21	INSPEKTORAT	7.560.020.655,00	7.424.131.074,00	98,20
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	9.853.959.637,00	8.008.444.427,00	81,27
23	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.707.743.098,00	3.449.215.823,00	93,03
24	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	9.513.256.318,00	9.057.768.786,00	95,21
25	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	5.349.927.095,00	5.314.441.197,00	99,34
26	KECAMATAN MENDAHARA	2.990.014.090,92	2.910.645.170,00	97,35
27	KECAMATAN MENDAHARA ULU	2.854.068.335,00	2.400.553.956,00	99,38
28	KECAMATAN GERAGAI	3.280.485.180,00	3.007.812.891,00	91,69
29	KECAMATAN KUALA JAMBI	2.896.845.700,00	2.586.130.974,00	89,27
30	KECAMATAN DENDANG	2.794.721.008,83	2.559.749.266,00	91,59
31	KECAMATAN BERBAK	2.625.636.432,14	2.468.019.271,00	94,00
32	KECAMATAN RANTAU RASAU	3.397.789.796,00	3.095.516.980,00	91,10
33	KECAMATAN NIPAH PANJANG	5.332.321.293,00	5.265.845.760,00	98,75
34	KECAMATAN SADU	2.811.047.889,08	2.691.643.271,00	95,75
35	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.787.712.853,00	4.475.385.097,00	93,48

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)		
		Target	Realisasi	%
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.450.173.850,01	4.179.959.646,00	93,93
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.385.161.286,00	3.304.552.713,00	97,62
38	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	14.505.125.766,00	12.991.311.565,00	89,56
39	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	7.380.787.577,53	6.939.169.145,00	94,02
40	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.823.199.952,00	7.960.906.047,00	89,53
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.543.371.989,00	4.336.216.716,00	95,44
42	DINAS PERIKANAN	7.157.901.248,00	6.698.330.375,00	93,58
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.980.094.247,57	4.754.724.418,00	95,28

Sumber : LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 2.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Modal

Selanjutnya belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 244.544.117.910,00 dan terealisasi sebesar Rp. 229.985.510.379,13 atau 94,05 % lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit).

Tabel 2.15.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>244.544.117.910,00</b>	<b>229.985.510.379,13</b>	<b>94,05</b>
2.2.01.	Belanja Modal Tanah	685.000.000,00	433.812.965,00	63,33
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.528.359.491,00	51.449.865.400,00	94,35
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.253.760.263,00	47.749.272.485,93	93,16
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.631.434.561,00	126.096.460.538,20	94,36
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.445.563.595,00	4.256.098.990,00	95,74

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 01 Maret 2022

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Untuk belanja modal tanah dalam belanja modal yang ditargetkan sebesar Rp. 685.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 433.812.965,00 atau 63,33%, Belanja modal peralatan dan mesin ditargetkan sebesar Rp. 54.528.359.491,00 terealisasi sebesar Rp. 51.449.865.400,00 atau 94,35%. Selanjutnya belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp. 47.749.272.485,93 dari target sebesar Rp. 51.253.760.263,00, sedangkan untuk belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang ditargetkan sebesar Rp. 133.631.434.561,00 terealisasi sebesar Rp. 126.096.460.538,20 atau 94,36% dan untuk belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang ditargetkan Rp. 4.445.563.595,00 terealisasi

sebesar Rp. 4.256.098.990,00 atau 95,74%. untuk lebih jelasnya belanja langsung pada masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1	DINAS PENDIDIKAN	46.198.189.079,00	42.916.611.954,15	94,95
2	DINAS KESEHATAN	16.226.149.285,00	14.701.829.366,00	90,61
3	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	13.995.149.832,00	13.041.832.979,00	93,19
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	123.332.018.187,00	115.825.803.345,20	93,91
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22.400.397.271,00	21.123.596.993,00	94,30
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	166.022.265,00	165.755.000,00	99,84
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0
8	DINAS PERHUBUNGAN	565.990.000,00	90.782.632,00	16,04
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.713.880,00	21.963.500,00	92,62
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	196.972.500,00	196.789.000,00	99,90
11	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	53.290.000,00	53.290.000,00	100,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	46.500.000,00	46.000.000,00	98,92
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	218.985.369,00	210.371.440,00	96,06
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10.200.000,00	9.950.000,00	97,55
15	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAHRAGA	547.588,223,00	467.787,378,00	85,43
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	25.800.000,00	0,00	0,00
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.548.401,00	35.540.878,00	99,89
18	SEKRETARIAT DPRD	991.115.964,00	915.699.172,00	92,39
19	SEKRETARIAT DAERAH	2.926.800.000,00	2.924.255.000,00	98,76
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	814.400.000,00	793.435.840,00	97,43
21	INSPEKTORAT	1.238.755.537,00	1.225.780.033,00	98,95
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	301.460.402,00	298.191.850,00	98,92
23	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	69.567.617,00	66.470.100,00	95,55
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	174.500.000,00	174.150.000,00	99,80
25	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	970.675.137,00	938.395.900,00	96,67
26	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	370.333.162,00	370.205.000,00	99,97
27	KECAMATAN MENDAHARA	244.142.500,00	237.486.025,00	97,27
28	KECAMATAN MENDAHARA ULU	114.740.500,00	114.030.000,00	84,70
29	KECAMATAN GERAGAI	217.782.116,00	85.860.000,00	39,42
30	KECAMATAN KUALA JAMBI	554.884.916,00	554.773.000,00	99,99
31	KECAMATAN DENDANG	109.650.400,00	69.420.000,00	63,31
32	KECAMATAN BERBAK	184.818.438,00	182.569.000,00	98,78
33	KECAMATAN RANTAU RASAU	72.593.760,00	72.505.000,00	99,88
34	KECAMATAN NIPAH PANJANG	308.364.960,00	308.274.314,00	99,97
35	KECAMATAN SADU	195.116.901,00	182.569.000,00	94,36

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	28.939.752,00	25.600.000,00	88,46
38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	342.416.676,00	339.000.500,00	99,00
39	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	478.582.341,00	470.403.000,00	99,39
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	73.692.300,00	70.493.000,00	95,66
41	DINAS PENGENDAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	623.100.000,00	619.646.500,00	99,44
42	DINAS PERIKANAN	30.211.678,00	29.800.000,00	98,64
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.264.686.256,00	1.226.182.873,78	96,96

Sumber : LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

### 2.2.2.3. Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

Selanjutnya belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 14.743.138.683,38 dan terealisasi sebesar Rp. 280.866.511,00 atau 1,91% jauh lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit).

Tabel 2.17.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
<b>2.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>14.743.138.683,38</b>	<b>280.866.511,00</b>	<b>1,91</b>
2.3.01.	Belanja Tidak Terduga	14.743.138.683,38	280.866.511,00	1,91

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 12 Februari 2020

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

### 2.2.2.4. Target dan Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 145.997.183.378,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.346.442.316,00 atau 99,55 % lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit).

Tabel 2.18.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5
<b>2.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>145.997.183.378,00</b>	<b>145.346.442.316,00</b>	<b>99,55</b>
2.4.01.	Belanja Bagi Hasil	2.138.231.061,00	1.930.294.681,00	90,28
2.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	143.858.952.317,00	143.416.147.635,00	99,69

\* Data Sementara (unaudit) per tanggal 12 Februari 2020

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

# BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

*Bab ini memuat laporan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2021. Laporan bab ini memberikan gambaran Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan solusi penyelesaian masalah, Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPRD atas LKPP Tahun 2020 dan Kebijakan Strategis yang dilaksanakan. Secara umum bab ini terdiri dari :*

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*
- 2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*
- 3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*
- 4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan*
- 5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;*
- 6. Unsur Kewilayahan; dan*
- 7. Unsur Pemerintahan Umum*

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Program dan kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

### 3.1. DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan dasar dan menengah pertama;
4. Penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pendidikan. Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 3 (Tiga) program 12 (Dua Belas) kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan  
Tahun Anggaran 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	REALISASI			
		ANGGARAN 2021	PENYERAPAN	SISA	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3 *100)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>211,846,376,558.00</b>	<b>201,121,690,928.00</b>	<b>10,724,685,630.00</b>	<b>94.94</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>175,676,015.00</b>	<b>113,397,220.00</b>	<b>62,278,795.00</b>	<b>64.55</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133,236,015.00	80,117,220.00	53,118,795.00	60.13
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,440,000.00	33,280,000.00	9,160,000.00	78.42
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>211,105,957,972.00</b>	<b>200,457,173,903.00</b>	<b>10,648,784,069.00</b>	<b>94.96</b>
1.2.1	Bantuan dan Tunjangan ASN	209,965,798,172.00	199,346,473,903.00	10,619,324,269.00	94.94
1.2.2	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,140,159,800.00	1,110,700,000.00	29,459,800.00	97.42
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>145,949,961.00</b>	<b>140,478,472.00</b>	<b>5,471,489.00</b>	<b>96.25</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	REALISASI			
		ANGGARAN 2021	PENYERAPAN	SISA	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3 *100)
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,574,400.00	6,502,000.00	72,400.00	98.90
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,019,461.00	65,114,222.00	1,905,239.00	97.16
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,556,100.00	14,202,250.00	353,850.00	97.57
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,800,000.00	19,660,000.00	3,140,000.00	86.23
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60,074,610.00</b>	<b>58,385,000.00</b>	<b>1,689,610.00</b>	<b>97.19</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,074,610.00	58,385,000.00	1,689,610.00	97.19
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>106,050,000.00</b>	<b>100,041,733.00</b>	<b>6,008,267.00</b>	<b>94.33</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103,800,000.00	97,791,733.00	6,008,267.00	94.21
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>252,668,000.00</b>	<b>252,214,600.00</b>	<b>453,400.00</b>	<b>99.82</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	78,900,000.00	78,741,600.00	158,400.00	99.80
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	5,000,000.00	4,950,000.00	50,000.00	99.00
1.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168,768,000.00	168,523,000.00	245,000.00	99.85
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>95,893,276,227.00</b>	<b>92,683,835,136.00</b>	<b>3,209,441,091.00</b>	<b>96.65</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>47,235,739,278.00</b>	<b>46,062,820,766.00</b>	<b>1,172,918,512.00</b>	<b>97.52</b>
2.1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	80,000,000.00	79,800,000.00	200,000.00	99.75
2.1.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	722,295,000.00	698,100,862.00	24,194,138.00	96.65
2.1.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,299,922,000.00	1,298,930,600.00	991,400.00	99.92
2.1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,339,668,000.00	1,331,312,200.00	8,355,800.00	99.38
2.1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2,510,570,000.00	2,503,618,900.00	6,951,100.00	99.72
2.1.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7,384,352,000.00	6,678,861,417.00	705,490,583.00	90.45
2.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	248,500,000.00	248,070,000.00	430,000.00	99.83
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	291,000,000.00	290,245,000.00	755,000.00	99.74
2.1.9	Rehabilitasi Sedang /Berat sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	59,100,000.00	58,899,000.00	201,000.00	99.66
2.1.10	Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah	374,000,000.00	373,337,000.00	663,000.00	99.82
2.1.11	Pengadaan Mebeluer Sekolah	409,155,000.00	378,900,000.00	30,255,000.00	92.61

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	REALISASI			
		ANGGARAN 2021	PENYERAPAN	SISA	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3 *100)
2.1.12	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	5,825,000,000.00	5,762,076,275.00	62,923,725.00	98.92
2.1.13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	75,129,418.00	62,848,550.00	12,280,868.00	83.65
2.1.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	189,000,000.00	77,345,000.00	111,655,000.00	40.92
2.1.15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	154,997,860.00	59,800,560.00	95,197,300.00	38.58
2.1.16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3,033,500,000.00	3,022,550,000.00	10,950,000.00	99.64
2.1.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23,239,550,000.00	23,138,125,402.00	101,424,598.00	99.56
<b>2.2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>35,965,426,077.00</b>	<b>34,292,125,999.00</b>	<b>1,673,300,078.00</b>	<b>95.35</b>
2.2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	310,000,000.00	77,300,000.00	232,700,000.00	24.94
2.2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	100,000,000.00	99,850,000.00	150,000.00	99.85
2.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	23,137,258,000.00	21,886,174,650.00	1,251,083,350.00	94.59
2.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	100,000,000.00	99,900,000.00	100,000.00	99.90
2.2.5	Pengadaan Meubeler Sekolah	451,650,000.00	444,984,000.00	6,666,000.00	98.52
2.2.6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	187,849,512.00	187,676,648.00	172,864.00	99.91
2.2.7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	361,194,797.00	349,609,797.00	11,585,000.00	96.79
2.2.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	120,433,834.00	79,053,700.00	41,380,134.00	65.64
2.2.9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,747,250,000.00	2,747,250,000.00	-	100.00
2.2.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	123,089,934.00		123,089,934.00	0.00
2.2.11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8,326,700,000.00	8,320,327,204.00	6,372,796.00	99.92
<b>2.3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>10,457,656,426.00</b>	<b>10,304,805,571.00</b>	<b>152,850,855.00</b>	<b>98.54</b>
2.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200,019,500.00	172,543,900.00	27,475,600.00	86.26
2.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,122,580,860.00	1,121,053,000.00	1,527,860.00	99.86
2.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD	1,433,011,550.00	1,423,619,600.00	9,391,950.00	99.34
2.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	173,354,090.00	125,239,100.00	48,114,990.00	72.24
2.3.5	Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa PAUD	260,000,000.00	259,290,000.00	710,000.00	99.73
2.3.6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	80,743,971.00	80,743,971.00	-	100.00
2.3.7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2,258,030,000.00	2,232,885,000.00	25,145,000.00	98.89
2.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	56,116,455.00	23,131,000.00	32,985,455.00	41.22
2.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,873,800,000.00	4,866,300,000.00	7,500,000.00	99.85

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	REALISASI			
		ANGGARAN 2021	PENYERAPAN	SISA	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3 *100)
<b>2.4</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2,234,454,446.00</b>	<b>2,024,082,800.00</b>	<b>210,371,646.00</b>	<b>90.59</b>
2.4.1	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	144,301,055.00	144,065,000.00	236,055.00	99.84
2.4.2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68,320,400.00	61,215,400.00	7,105,000.00	89.60
2.4.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,599,500,000.00	1,599,500,000.00	-	100.00
2.4.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal /Kesetaraan	55,032,991.00	54,902,400.00	130,591.00	99.76
2.4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	367,300,000.00	164,400,000.00	202,900,000.00	44.76
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>301,676,059.00</b>	<b>291,266,059.00</b>	<b>10,410,000.00</b>	<b>96.55</b>
<b>3.1</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>301,676,059.00</b>	<b>291,266,059.00</b>	<b>10,410,000.00</b>	<b>96.55</b>
3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	301,676,059.00	291,266,059.00	10,410,000.00	96.55
<b>JUMLAH</b>		<b>308,041,328,844.00</b>	<b>294,096,792,123.00</b>	<b>13,944,536,720,85</b>	<b>95,47</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan.
- 3) Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase administrasi Kepegawain Daerah
- 3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan .
- 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor
- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar
- 3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan Makan Minum Tamu
- 3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator (Output) adalah Tersedianya Barang Milik Daerah
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai
- 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara

6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Peralatan Mesin dan Lainnya yang dipelihara (Mesin Kantor)

6.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Peralatan Mesin dan Lainnya yang dipelihara (Mesin Kantor)

## B. Program Pengelolaan Pendidikan

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Pendidikan adalah : 1) Angka Harapan Lama Sekolah, 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1.1 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru

1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang guru /Kepala Sekolah/TU Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun

1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun

1.4 Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Bangun

1.5 Sub Kegiatan Pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun

1.6 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab

1.7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehab

1.8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Rehab

- 1.9 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Rehab.
- 1.10 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah yang di Rehab
- 1.11 Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah
- 1.12 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga Siswa Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- 1.13 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 1.14 Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- 1.15 Sub Kegiatan Pembinaan Minat bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 1.16 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 1.17 Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Sekolah Dasar
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Pesentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 2.1 Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun
- 2.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

- 2.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah

- 2.5 Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah

- 2.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

- 2.7 Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 2.8 Sub Kegiatan Pembinaan Minat bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- 2.9 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 2.10 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah

Indikator Sub Kegiatan (Out Put) Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

- 2.11 Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 3.1 Sub Kegiatan Pembangunan Gedung /ruang Kelas/Ruang Guru PAUDI

Indikator (output) Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

- 3.2 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di Bangun

- 3.3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang di Rehab
- 3.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD (Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD yang di Rehab
- 3.5 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Pengadaan Alat peraktek dan Peraga Siswa PAUD
- 3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Pelaksanan Proses Belajar PAUD
- 3.7 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 3.8 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Pelaksanan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 3.9 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Sub Kegiatan (OutPut) adalah Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 4 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Indikator Kegiatan (Output) adalah Terlayannya Pendidkan Non Formal/Kesetaraan
  - 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan indikator (output) Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
  - 4.2 Sub Kegiatan Penyiapan Tinadak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan/ indikator (output) Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
  - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan/ indikator (output) Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

4.4 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan/ indikator (output) Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan.

4.5 Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan/ indikator (output) Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Program (Outcome) Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah 1) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S.1/D-IV dan 2) Persentase Guru Yang Bersertifikat Pendidik Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Fomal/Kesetaraan

Indikator Kegiatan (Output) adalah : Pesentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

1.1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar.PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Indikator Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pelaksanan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.  
Capaian Program Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>INDEK PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>82,50</b>	<b>81,86</b>	<b>99,22</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	12	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	89	89	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	1	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3	3	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	12	100
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	12	100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12	12	100
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	26	26	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	225	225	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	9	9	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Peralatan Mesin dan Lainnya yang dipelihara (Mesin Kantor)	1	1	100
1.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	5	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH</b>	<b>12,33</b>	<b>12,17</b>	<b>98,94</b>
		<b>ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH</b>	<b>6,71</b>	<b>6,92</b>	<b>103,13</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	1	1	100
2.1.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun	3	3	100
2.1.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	17	17	100
2.1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Bangun	6	6	100
2.1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	17	17	100
2.1.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab	36	36	100
2.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehab	2	2	100
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di Rehab	3	3	100
2.1.9	Rehabilitasi Sedang /Berat sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Rehab	3	3	100
2.1.10	Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga Sekolah yang di Rehab	3	3	100
2.1.11	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah	840	840	100
2.1.12	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	75	75	100
2.1.13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	1	100
2.1.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1	1	100
2.1.15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	206	206	100
2.1.16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12	12	100
2.1.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar	206	206	100
<b>2.2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	3	3	100
2.2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Bangun	1	1	100
2.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	28	28	100
2.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	7	7	100

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.2.5	Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubeler Sekolah	555	555	100
2.2.6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	1	100
2.2.7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	1	100
2.2.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45	45	100
2.2.9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12	12	100
2.2.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128	128	100
2.2.11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45	45	100
<b>2.3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	2	100
2.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di Bangun	9	9	100
2.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang di Rehab	16	16	100
2.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD yang di Rehab	14	14	100
2.3.5	Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat praktek dan Peraga Siswa PAUD	13	13	100
2.3.6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Pelaksanaan Proses Belajar PAUD	1	1	100
2.3.7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	12	12	100
2.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1	1	100
2.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	290	290	100
<b>2.4</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.4.1	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	100

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.4.2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	100
2.4.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	12	100
2.4.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal /Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1	1	100
2.4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	1	100
3	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S.1/D-IV</b>	<b>99,30</b>	<b>99,66</b>	<b>100,36</b>
		<b>PERSENTASE GURU YANG BESERTIFIKAT PENDIDIK</b>	<b>81,57</b>	<b>90,51</b>	<b>110,96</b>
3.1	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>102,52</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Angka Melek Huruf mencapai 153.746 yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk usia diatas 15 tahun keatas sebagian besar telah dapat membaca dan menulis, ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Angka melek huruf di 11 kecamatan sebesar 99,66%, angka melek huruf terendah di Kecamatan Mendahara Ulu yaitu 99,07% sedang tertinggi di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Rantau Rasau yaitu 99,96% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3.  
Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15 Th yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 th Keatas	Angka Melek Huruf (%)	Angka Melek Huruf
1	Muara Sabak Barat	11,572	11,592	99.83	11.522
2	Muara Sabak Timur	23,056	23,066	99.96	23.056
3	Mendahara	19,006	19,032	99.86	18.916
4	Mendahara Ulu	11,417	11,524	99.07	11.332
5	Geragai	16,051	16,131	99.50	15.956
6	Dendang	10,738	10,829	99.16	10.668
7	Kuala Jambi	10,225	10,310	99.18	10.185
8	Sadu	8,985	8,998	99.86	8.985
9	Nipah Panjang	18,532	18,619	99.53	18.362
10	Berbak	7,014	7,018	99.94	7.014
11	Rantau Rasau	17,150	17,157	99.96	17.150
<b>Jumlah</b>		<b>153,746</b>	<b>154,276</b>	<b>99.66</b>	<b>153,746</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pembebasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP selalu diatas 95%.

Tabel 3.4.  
Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021

NO	Uraian	2021		%
		Peserta	Siswa Lulus	
1	SD/M1	4,270	4,260	99.77
2	SMP/MTs	3,402	3,375	99.21

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.5.  
Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021

NO	Uraian	Siswa Lulus	Siswa Melanjutkan	%
1	SD ke SMP	4,260	4,075	95.66
2	SMP Ke SMA	3,375	3,241	96.03

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dari berbagai kombinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2021, tergambar capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.  
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	88.23
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	64.73
3	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	4,34
4	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	3,97
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.77
6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.21
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95.66
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96.03
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92.14
10	Persentase Rasio Ideal rombel SD	76,65
11	Persentase Rasio Ideal rombel SMP	83,67

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.1.2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurang meratanya Penyebaran Guru	Pemetaan Guru
2	Banyaknya Guru yang memasuki usia Pensiun	Usulan Penambahan guru Honorer
3	Masih ada guru yang belum memiliki sertifikat Pendidik	Melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu, dalam peningkatan Kompetensi guru
4	Guru yang Belum Memiliki S1	Diadakan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan Kualifikasi Guru PAUD
5	Sarana Prasarana sekolah belum terpenuhi	Melakukan penambahan usulan Dana DAK dan Revitalisasi PUPR

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.1.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.8.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perangkat Daerah agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.	Telah Melakukan efisiensi dan efektifitas dari setiap program dan Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022	Agar kegiatan lebih terarah dan terukur sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah
2	Dinas Pendidikan agar berupaya dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah terutama tingkat sekolah dasar khususnya saat pandemi.	Perbup Nomor 58 Tahun 2018, Percepatan wajib belajar 12 tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersumber dari dana CSR, sudah berjalan 3 tahun</li> <li>- Baznas dan bank jambi</li> </ul>	Agar Angka Putus Sekolah semakin Berkurang
3	Dinas Pendidikan Melakukan sosialisasi atau pembinaan melalui parenting atau lembaga yang ada kaitannya dengan dinas terkait seperti bina keluarga balita dan bina keluarga remaja.	Telah dilakukan Sosialisasi Parenting di Setiap desa dan Kelurahan, Melalui Keluarga Balita dan Binas Keluarga Remaja	Agar Kesadaran orang tua akan pentingnya terlibat dalam upaya pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini
4	Dinas pendidikan agar lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana belajar siswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan Perbaikan data DAPODIK.</li> <li>- Hasilnya dana DAK meningkat dari 40 M menjadi 80 m</li> </ul>	Agar siswa dapat belajar dengan baik

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
5	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019	Supaya Mudah dipahami dan dapat tercapai Laporan Pertanggung Jawaban
6	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Telah dilaksanakan sesuai dengan usulan awal sebelum refocusing, kecuali Sarpras Karen Tidak ada refocusing sesuai petunjuk dari Pusat, jadi tetap dilaksanakan	Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tidak menjadi permasalahan untuk kegiatan selanjutnya
7	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	Telah dilakukan kerja sama dengan beberapa OPD terkait dalam rangka untuk pencapaian Program dan Kegiatan dan secara berkesinambungan Seperti BAPEDA, BKD Kesehatan dan Dinas PUPR	Agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik
8	Menata kembali pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lebih dari 1 tahun tidak melaksanakan tatap muka bagi siswa dan gurunya, sehingga ketertinggalan pelajaran dapat diatasi.	Telah dilaksanakan tatap Muka (PTM) sesuai dengan Kondisi zona Wilayah masing-masing Kecamatan sesuai dengan instruksi dari kemendikbud	Agar siswa dapat belajar dan terhindar dari COVID 19

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 3.2. DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2.1. Capaian Kinerja Program

Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dengan bidang urusan Kesehatan Pada Tahun 2021 Dinas melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Kesehatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan  
Tahun Anggaran 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49,943,395,462</b>	<b>48,466,149,900</b>	<b>1,477,245,562</b>	<b>97.04</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>297,145,100</b>	<b>227,242,049</b>	<b>69,903,051</b>	<b>76.48</b>
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	297,145,100	227,242,049	69,903,051	76,48
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>48,425,384,469</b>	<b>47,141,766,483</b>	<b>1,283,617,986</b>	<b>97.35</b>
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45,950,494,469	44,706,666,483	1,243,827,986	97.29
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2,474,890,000	2,435,100,000	39,790,000	98.39
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>164,095,212</b>	<b>152,772,692</b>	<b>11,322,520</b>	<b>93.10</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	41,446,000	36,995,000	4,451,000	89.26
1.3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	122,649,212	115,777,692	6,871,520	94.40
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190,145,106</b>	<b>179,191,650</b>	<b>10,953,456</b>	<b>94.24</b>
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	42,673,500	42,519,850	153,65	99.64
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	74,650,606	74,001,200	649,406	99.13
1.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,341,000	31,341,000	-	100.00
1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4,800,000	2,100,000	2,700,000	43.75
1.4.5	Fasilitasi kunjungan tamu	6,780,000	6,780,000	-	100
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29,900,000	22,449,600	7,450,400	75.08
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>711,115,575</b>	<b>647,498,500</b>	<b>63,617,075</b>	<b>91.05</b>
1.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	571,700,000	520,600,000	51,100,000	91.06
1.5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	139,415,575	126,898,500	12,517,075	91.02
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>68,400,000</b>	<b>55,259,324</b>	<b>13,140,676</b>	<b>80.79</b>
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	68,400,000	55,259,324	13,140,676	80.79
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>87,110,000</b>	<b>52,321,702</b>	<b>34,788,298</b>	<b>60.06</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	87,110,000	52,321,702	34,788,298	60.06
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT</b>	<b>60,564,809,486</b>	<b>49,128,904,562</b>	<b>11,435,904,924</b>	<b>81.12</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :</b>	<b>17,524,505,500</b>	<b>16,060,716,252</b>	<b>1,463,789,248</b>	<b>91.65</b>
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	5,283,279,638	4,619,552,400	663,727,238	87.44
2.1.2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	979,370,000	764,780,000	214,590,000	78.09
2.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9,079,828,362	8,538,693,477	541,134,885	94.04
2.1.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99,016,500	97,767,850	1,248,650	98.74
2.1.5	Pengadaan Obat, Vaksin	1,523,336,000	1,480,290,885	43,045,115	97.17
2.1.6	Pengadaan Bahan Pakai Habis	559,675,000	559,631,640	43,36	99.99
<b>2.2</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :</b>	<b>43,040,303,986</b>	<b>33,068,188,310</b>	<b>9,972,115,676</b>	<b>76.83</b>
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,173,028,250	861,904,993	311,123,257	73.48

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34,140,000	23,302,000	10,838,000	68.25
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan atau berpotensi bencana	1,685,100,000	1,292,372,500	392,727,500	76.69
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	609,622,964	310,551,600	299,071,364	50.94
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42,481,830	35,387,320	7,094,510	83.30
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	718,824,520	547,601,050	171,223,470	76.18
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	232,793,790	153,403,300	79,390,490	65.90
2.2.8	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40,786,900	23,786,900	17,000,000	58.32
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	74,560,000	57,890,000	16,670,000	77.64
2.2.10	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4,975,236,600	3,431,209,353	1,544,027,247	68.97
2.2.11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,458,914,500	896,633,829	562,280,671	61.46
2.2.12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5,181,249,800	5,071,944,600	109,305,200	97.89
2.2.13	Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (PUSKESMAS)	25,752,630,875	19,591,192,665	6,161,438,210	76.07
2.2.14	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	471,795,057	411,010,100	60,784,957	87.12
2.2.15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	455,949,900	238,159,000	217,790,900	52.23
2.2.16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	133,189,000	121,839,100	11,349,900	91.48
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>10,254,887,667</b>	<b>5,225,141,669</b>	<b>5,029,745,998</b>	<b>50.95</b>
<b>3.1</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota :</b>	<b>10,254,887,667</b>	<b>5,225,141,669</b>	<b>5,029,745,998</b>	<b>50.95</b>
3.1.1	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10,228,965,087	5,205,575,519	5,023,389,568	50.89
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25,922,580	19,566,150	6,356,430	75.48
<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>547,583,400</b>	<b>420,915,000</b>	<b>126,668,400</b>	<b>76.87</b>
<b>4.1</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>65,393,400</b>	<b>55,910,000</b>	<b>9,483,400</b>	<b>85.50</b>
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65,393,400	55,910,000	9,483,400	85.50
<b>4.2</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>482,190,000</b>	<b>365,005,000</b>	<b>117,185,000</b>	<b>75.70</b>
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	482,190,000	365,005,000	117,185,000	75.70

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>880,346,689</b>	<b>509,348,750</b>	<b>370,997,939</b>	<b>57.86</b>
5.1	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>880,346,689</b>	<b>509,348,750</b>	<b>370,997,939</b>	<b>57.86</b>
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	880,346,689	509,348,750	370,997,939	57.86
	<b>Jumlah</b>	<b>122,191,022,704</b>	<b>103,740,362,381</b>	<b>18,450,660,323</b>	<b>84.90</b>

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Indikator Program (Outcome) penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah indeks pelayanan instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 3.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas (Stel)
  - 3.2. Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)
4. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
- 4.1 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan alat listrik (bulan)
  - 4.2 Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Bulan)
  - 4.3 Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)
  - 4.4 Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)
  - 4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu (bulan)
  - 4.6 Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
- 5.1 Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit).
  - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit).
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah,
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah.

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara (Unit).

B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Indikator Program (Outcome) pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat adalah 1) Jumlah Kematian Ibu, 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 KH, 3) Angka Kematian Neonatal per 1.000 KH, 4) Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.

1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan.

1.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Ketersediaan prasarana dan pendukung Kesehatan di FKTP

1.3 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di FKTP

1.4 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah alat Kesehatan yang dilakukan kalibrasi

1.5 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah item Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan

1.6 Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Pakai Habis. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah item Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah 1) Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan, 2) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, 3) Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita, 4) Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita, 5) Persentase Ibu Hamil KEK dan 6) Persentase Desa UCI,

2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan atau berpotensi bencana.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana

2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif, 2) Jumlah balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang mendapatkan PMT, Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT

2.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Indikator

Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja, 2) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga

2.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Pengawasan kualitas sarana air minum, 2) Jumlah Rumah Tangga dengan layanan air bersih, 3) Jumlah Desa/Kelurahan terhadap sanitasi layak, 4) Jumlah Desa/Kelurahan bebas buang air besar sembarangan (ODF).

2.7 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Jumlah Posyandu Aktif

2.8 Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan

- 2.9 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 2.10 Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Desa Kriteria Sangat Terencil yang dilakukan pelayanan kesehatan secara mobile, 2) Jumlah Event Khusus Pelayanan jasa Medis, 3) Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Operasi Katarak, 4) Jumlah Pembiayaan PMI dan Organisasi Profesi di Kabupaten Tanjung Jabung
- 2.11 Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar, 2) Persentasi angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Sukses Rate), 3) Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar, 4) Persentase cakupan penemuan dan penanganan HIV, 5) Prevalensi Penyakit Kusta per 10.000 penduduk, 6) Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat, 7) Angka Kesakitan DBD, 8) Persentase Ibu hamil dilakukan deteksi dini Hepatitis (DDH), 9) Persentase anak dan balita mendapatkan obat cacing, 10) Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok, 11) Jumlah Penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 12) Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun, 13) Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 2.12 Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan
- 2.13 Sub Kegiatan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (PUSKESMAS).  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan
- 2.14 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan
- 2.15 Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

2.16 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi puskesmas (SIP)

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Indikator Program (Outcome) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan adalah 1) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten, 2) Jumlah Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK),

1.1 Sub Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Nakes Penanganan Covid-19 yang mendapat insentif

1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan SDMK

D. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

Indikator Program (Outcome) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan,

1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan

2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan no p-irt

2.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin dan diawasi

E. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Indikator Program (Outcome) pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah Persentase Rumah Tangga PHBS. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor,

1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Posyandu aktif

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.  
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>89,25</b>	<b>96,54</b>	<b>108,16%</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	2	2	100%
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>96,23</b>	<b>96,23</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	53	49	92,45%
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	36	36	100%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan (Jenis)	9	9	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100%
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak (Jenis)	1	1	100%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	12	100%
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	12	100%
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-4 (Unit)	2	2	100%
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	5	5	100%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	12	12	100%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	10	10	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>JUMLAH KEMATIAN IBU,</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>85,71</b>
		<b>ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN HIDUP (KH),</b>	<b>19</b>	<b>22,26</b>	<b>85,35</b>
		<b>ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP</b>	<b>8,5</b>	<b>22,26</b>	<b>38,19</b>
		<b>PERSENTASE PELAYANAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>67</b>	<b>69,33</b>	<b>103,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :</b>	<b>Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP</b>	<b>100</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan	1	1	100%
2.1.2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan prasarana dan pendukung Kesehatan di FKTP	48%	51,56%	107,42%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di FKTP	43%	58,81%	136,77%
2.1.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat Kesehatan yang dilakukan kalibrasi	216	115	53,24%
2.1.5	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item Ketersediaan Obat dan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan	45	45	100%
2.1.6	Pengadaan Bahan Pakai Habis	Jumlah item Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan	47	47	100%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	*Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan,	100%	100%	100%
		*Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita,	4,65%	20,70%	22,64%
		*Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita,	3,50%	8,50%	41,17%
		*Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita,	19,05%	25,60%	74,41%
		*Persentase Ibu Hamil KEK,	7,20%	7,79%	92,42%
		*Persentase Desa UCI	93%	87,09%	93,64%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	4.146	3.577	86,28%
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	36.520	30.496	83,50%
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	100%	100%	100%
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif,	1.330	1.570	100%
		*Jumlah balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang mendapatkan PMT,	1.011	1.189	100%
		Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapatkan PMT	218	273	100%
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja	10	14	100%
		*Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	10	12	100%
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Persentase pengawasan kualitas sarana air minum	70%	73%	104,29%
		*Persentase rumah tangga dengan layanan air bersih	63,30%	71%	112,16%
		*Persentase desa/ kelurahan terhadap sanitasi layak	35%	74,30%	212,29
		*Jumlah desa/ kelurahan bebas buang air besar sembarangan (ODF)	46	16	34,78%
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS),	3	4	100%
2.2.8	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan	2.968	2.845	95,85%
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	413	394	95,40%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.2.10	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1) Jumlah Desa Kriteria Sangat Terpencil yang dilakukan pelayanan kesehatan secara mobile,	4	4	100%
		2) Jumlah Event Khusus Pelayanan jasa Medis,	17	16	94,11%
		3) Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Operasi Katarak,	20	20	100%
		4) Jumlah Kegiatan PMI Kabupaten (Tahun)	1	1	100
2.2.11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1) Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar,	2.738	532	19,43%
		2) Persentase angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Sukses Rate),	96%	93,22%	97,10%
		3) Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar,	5.361	3.014	56,22%
		4) Persentase cakupan penemuan dan penanganan HIV,	0,50%	0	0
		5) Prevalensi Penyakit Kusta per 10.000 penduduk,	2	1,5	100%
		6) Persentase cakupan penemuan kasus baru Kusta tanpa cacat,	100%	85%	85%
		7) Angka Kesakitan DBD,	65/100rb	0,9/100rb	100%
		8) Persentase Ibu hamil dilakukan deteksi dini Hepatitis (DDH),	100%	70,69%	70,69%
		9) Persentase anak dan balita mendapatkan obat cacing,	95%	98%	100%
		10) Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok,	80%	43,32%	54,15%
		11) Jumlah penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar,	869	662	76,18%
		12) Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun,	18.307	5.713	100%
		13) Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	55.239	13.144	23,79%
2.2.12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	92.361	92.361	100%
2.2.13	Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (PUSKESMAS)	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan	17	17	100%
2.2.14	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan	17	17	100%
2.2.15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	0	0	0
2.2.16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi puskesmas (SIP)	17	17	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<b>*PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK) YANG KOMPETEN</b>	<b>100%</b>	<b>91,90%</b>	<b>91,90%</b>
		<b>JUMLAH PUSKESMAS DENGAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota :	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Fasyankes sesuai standar (9 jenis nakes)	35,29	35,29	75%
3.1.1	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes Penanganan Covid-19 yang mendapat insentif	134	116	86,56%
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	17	17	100%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS	100%	100%	100%
		PERSENTASE SARANA KEFARMASIAN YANG MEMENUHI STANDAR	49%	50%	100%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek dan Toko Obat yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	49%	50%	100%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	13	13	100%
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan no p-irt	54	54	100%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	71	35	49,29%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS	49,98%	55%	100%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	93	93	100%
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyandu Aktif	231	169	73,16%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>88,78</b>

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada indikator sasaran yaitu Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tertuang dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun realisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11.  
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	86,28	86,28
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	68,33	68,33
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir umur 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	97,05	97,05
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	77,57	77,57
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	83,50	83,50
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	27,79	27,79
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase WNI usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun	100	30,64	30,64
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	23,79	23,79
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes mellitus usia $\geq$ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	76,18	76,18

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	95,40	95,40
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100	19,43	19,43
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	56,22	56,22

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan alat kesehatan (USG) untuk pemeriksaan ibu hamil</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana akses rujukan</li> <li>• Pemenuhan SDM kesehatan khususnya tenaga dokter spesialis obstetri ginekologi</li> <li>• Peningkatan kompetensi nakes (bidan) melalui program magang dan pelatihan</li> <li>• Memperkuat peran serta lintas program lintas sektor terhadap hasil pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP)</li> </ul>
2	Masih tingginya prevalensi angka stunting	Memperkuat konvergensi lintas sektor yang sudah berjalan

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sesuai dengan harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019</li> <li>• Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM</li> <li>• Peningkatan peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten</li> </ul>
4	Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan sarpras dan alkes diusulkan melalui dana DAK, APBD, atau pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan aplikasi aspak dengan selalu melakukan updating data</li> <li>• Melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan secara berkala</li> </ul>
5	9 jenis tenaga kesehatan belum terpenuhi untuk 17 puskesmas	Pemenuhan 19 jenis tenaga diusulkan melalui program nusantara sehat, rekrutmen nakes dengan pemanfaatan dana DAK non fisik melalui pembiayaan BOK Puskesmas, serta dana APBD

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.2.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.

Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Jaminan kesehatan masyarakat	Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Penetapan nama peserta penerima bantuan iuran
2	Pelayanan kapitasi puskesmas	Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2021	Alokasi dana kapitasi jkn
3	Kemampuan pelayanan dan karakteristik wilayah kerja puskesmas	Keputusan Bupati Nomor 252 Tahun 2021	Peningkatan status faskes
4	Pencegahan kecurangan pelaksanaan jkn	Keputusan Bupati Nomor 253 Tahun 2021	Pencegahan kecurangan (fraud)
5	Puskesmas Poned	Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2021	Peningkatan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar
5	Sumber daya kesehatan	Keputusan Bupati Nomor 504 Tahun 2021	Peningkatan ketersediaan nakes

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.2.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.14.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perangkat Daerah agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.	Penyusunan anggaran untuk tahun 2021 sudah mengacu pada target indikator yang akan dicapai berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019	Anggaran yang dikeluarkan difokuskan dalam pencapaian target
2	Puskesmas agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.	melaksanakan peningkatan monitoring dan evaluasi di setiap Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.	terlaksana monitoring dan evaluasi peningkatan mutu Puskesmas dgn membentuk tim peningkatan mutu internal Puskesmas oleh Dinkes.
3	Pemerataan bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan pada puskesmas masing-masing kecamatan.	Memperbaiki Aplikasi Sarana dan prasarana atau ASPAK, sehingga kebutuhan Alkes setiap Puskesmas bisa terpenuhi terutama anggaran yg bersumber dari DAK kementerian	memperbaiki sistem pengisian ASPAK dan tepat waktu
4	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan kualitas dan kuantitas khususnya puskesmas perawatan.	Tahun 2021 kebutuhan 9 jenis tenaga khususnya pada Puskesmas Ranap sebagian sudah terpenuhi	Pelayanan kesehatan sesuai standar

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		dari tenaga nusantara sehat dan kontrak daerah	
5	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan LKPJ sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Sistematika LKPJ telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
6	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Selama tahun 2021 masih dilaksanakan refocusing anggaran sebanyak 4 kali khusus untuk penanganan pandemi covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19	2021 masih prioritas penanganan pandemi covid-19
7	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Sudah melaksanakan koordinasi lintas sektor antar OPD dalam penanganan : 5 Covid-19 6 Stunting 7 ODF 8 Jiwa	Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
8	Memberikan pemahaman yang luas tentang vaksin untuk masyarakat agar tidak terjadi informasi yang salah tentang vaksin COVID-19.	Sudah melaksanakan sosialisasi ke seluruh kecamatan terkait vaksinasi covid-19	Masyarakat memahami tentang pentingnya vaksinasi covid-19
9	Melaksanakan langkah-langkah strategis dan inovasi yang mengarah pada kesadaran masyarakat dengan bentuk Gerakan Masyarakat (Germas) yang memudar sejak wabah Covid-19 serta perlu program yang berkelanjutan menjadi rutinitas keseharian.	Memotivasi seluruh tenaga kesehatan baik di dinas maupun di puskesmas untuk melaksanakan germas di lingkungan pekerjaan dengan melakukan aktifitas fisik/ peregangan minimal 30 menit sehari	Kesehatan dan kebugaran tubuh tetap terjaga
10	Memberikan tindakan tegas terkait penegakan aturan protokol kesehatan dan transparan dalam penyampaian informasi perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ke publik	Melaksanakan razia di jalan raya dan terhadap kerumunan masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian, satpol pp, perhubungan, bppd. Yang melanggar diberikan sanksi sosial	Timbul kesadaran masyarakat dalam melaksanakan proses
11	Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga PD dapat menjelaskan potensi-potensi yang menjadi sumber PAD dan diharapkan mampu berinovasi dan kreatif dalam mencari peluang dan mengelola serta mengembangkan	Peningkatan PAD melalui perbaikan mutu pelayanan sesuai standar dengan peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan	Realisasi pendapatan retribusi Kesehatan tahun 2021 melebihi target (118,25%)

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru.		

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.3. RSUD NURDIN HAMZAH

RSUD Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RSUD Nurdin Hamzah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
2. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;
4. Penyelenggaraan layanan rujukan;
5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
7. Pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.3.1. Capaian Pelaksanaan Program

Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan bidang kesehatan Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah melaksanakan 3 ( Tiga ) program, 13 ( Tiga Belas ) kegiatan dan 37 ( Tiga Puluh Tujuh ) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebagaimana tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15.  
 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum  
 Daerah Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27.018.439.768</b>	<b>26.696.201.928</b>	<b>322.237.840,00</b>	<b>98,8</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>72.579.954</b>	<b>71.082.121</b>	<b>1.497.833,00</b>	<b>97,9</b>
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30.977.230	30.088.621	888.609,00	97,1
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.638.800	14.157.500	481.300,00	96,7
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.975.900	2.975.000	900,00	99,9
1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	1.818.500	1.817.000	1.500,00	99,9
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.774.600	2.774.000	600,00	99,9
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.394.924	19.270.000	124.924,00	99,3
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.217.903.053,00</b>	<b>17.031.156.839</b>	<b>186.746.214,00</b>	<b>98,9</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.483.423.053,00	13.472.526.839	10.896.214,00	99,9
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.734.480.000	3.558.630.000	175.850.000,00	95,2
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60.683.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>38.383.000,00</b>	<b>36,7</b>
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.683.000	22.300.000	38.383.000,00	36,7
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>336.855.761</b>	<b>332.805.140</b>	<b>4.050.621,00</b>	<b>98,7</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.610.000,00	78.551.600	58.400,00	99,9
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.096.245,00	220.043.339	52.906,00	99,9
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.214.516	25.850.201	364.315,00	98,6
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.800.000,00	3.900.000	900.000,00	81,2
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.135.000,00	4.460.000	2.675.000,00	62,5
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>281.700.000,00</b>	<b>281.600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99,9</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.700.000,00	281.600.000	100.000	99,9
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.000.000</b>	<b>469.547.337</b>	<b>46.452.663,00</b>	<b>90,9</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000	0	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	511.200.000,00	464.747.337	46.452.663,00	90,9
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>532.818.000,00</b>	<b>505.201.600</b>	<b>27.616.400,00</b>	<b>94,8</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.800.000	104.710.100	27.089.900,00	79,4
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.383.000,00	266.891.500	491.500,00	99,8
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.635.000,00	133.600.000	35.000,00	99,97
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>7.982.508.891</b>	<b>17.491.109,00</b>	<b>99,7</b>
1.8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.000.000.000,00	7.982.508.891	17.491.109,00	99,7
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>18.585.678.890,00</b>	<b>15.999.140.730</b>	<b>2.586.538.160,00</b>	<b>86,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM Dan</b>	<b>10.478.377.050,00</b>	<b>10.109.178.314</b>	<b>369.198.736,00</b>	<b>96,4</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
	<b>UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.292.399.056,00	9.971.368.900	321.030.156,00	96,8
2.1.1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	185.977.994,00	137.809.414	48.168.580,00	74,09
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.089.879.910,00</b>	<b>5.872.570.916</b>	<b>2.217.308.994,00</b>	<b>72,5</b>
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.308.950,00	3.663.600	645.350,00	85,02
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	6.965.499.000,00	4.818.343.208	2.147.105.792,00	69,1
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	273.368.400,00	260.150.948	13.217.452,00	95,1
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.800.000,00	15.800.000	0	100
2.2.5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.134.800,00	7.349.800	21.785.000,00	25,2
2.2.6	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	795.218.760,00	760.663.360	34.555.400,00	95,6
2.2.7	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	6.600.000	6.600.000	0	100
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>17.421.930,00</b>	<b>17.391.500</b>	<b>30.430,00</b>	<b>99,8</b>
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	17.421.930,00	17.391.500	30.430,00	99,8
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>633.298.900</b>	<b>591.802.900</b>	<b>41.496.000,00</b>	<b>93,4</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>576.870.000,00</b>	<b>544.820.000</b>	<b>32.050.000,00</b>	<b>94,4</b>
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	576.870.000,00	544.820.000	32.050.000,00	94,4
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56.428.900,00</b>	<b>46.982.900</b>	<b>9.446.000,00</b>	<b>83,2</b>
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.428.900,00	46.982.900	9.446.000,00	83,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.237.417.558,00</b>	<b>43.287.145.558,00</b>	<b>2.950.272.000,00</b>	<b>94</b>

Sumber : LKPJ RSUD NH Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen RKA
- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perubahan RKA
- 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen DPA
- 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perubahan DPA
- 1.6 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Evaluasi
2. Kegiatan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah  
Indikator Kegiatan (Output) Adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
  - 4.1 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan alat listrik (bulan)
  - 4.2 Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Bulan)

- 4.3 Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)
- 4.4 Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)
- 4.5 Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)
- 5 Kegiatan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
- 5.1. Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit).
- 6 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6.1 Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai (Lembar)
- 6.2 Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 7.1 Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)
- 7.2 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  
Indikator sub kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Bulan)

- 7.3 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  
Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)
8. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD  
Indikator kegiatan (output) adalah Cost recovery rate (CRR) total
- 8.1 Sub Kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Cost recovery rate (CRR) partial
- B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat  
Indikator Program (Outcome) adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai RS kelas C
- 1.1 Sub Kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Unit)
- 1.2 Sub Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pemeliharaan alat kesehatan (bulan)
2. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan
- 2.1 Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre eklamsi dan sepsis
- 2.2 Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Waktu Penanganan pasien akibat pandemi (Bulan)
- 2.3 Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah media promosi rumah sakit

2.4 Sub Kegiatan pengelolaan surveillance kesehatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (bulan)

2.5 Sub Kegiatan operasional pelayanan rumah sakit

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit (bulan)

2.6 Sub Kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota rumah sakit

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penilaian akreditasi (kali)

3. Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi indikator kegiatan (output) adalah Persentase pelaksanaan sistem informasi rumah sakit

3.1 Sub Kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan SIRS online dan profil RS (dokumen)

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota

Indikator kegiatan (output) adalah Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C

1.1 Sub Kegiatan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah dokter spesialis kemitraan (orang)

2. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota

Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.1 Sub Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah Pelaksanaan Inhouse Training

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16.  
Capaian Program RSUD Nurdin Hamzah  
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>86,91</b>	<b>111.4</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	3	100
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	100
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1	1	100
1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	1	100
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi	3	3	100
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	12	100
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	20	3	15,00
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	11	11	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	8	8	100

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	12	100
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	12	12	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	1	1	100
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	600	600	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	10	10	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	8	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	35	35	100
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Cost recovery rate (CRR) total</b>	<b>20,28</b>	<b>17,32</b>	<b>85,4</b>
1.8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) partial	49,36	35,02	70,94
<b>2</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>87</b>	<b>88,27</b>	<b>101.45</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai RS kelas C</b>	<b>66,52</b>	<b>66.4</b>	<b>99.81</b>
2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Unit)	94	94	100
2.1.2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan alat kesehatan (bulan)	12	12	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan</b>	<b>100</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase kematian ibu melahirkan karena perdarahan, pre eklamsi dan sepsis	1	1,03	97,09
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Waktu Penanganan pasien akibat pandemi (Bulan)	12	12	100
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah medis yang diangkut pihak ketiga (kg/liter)	8.400	8.400	100
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi rumah sakit (jenis)	4	4	100
2.2.5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (bulan)	12	12	100
2.2.6	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Ketersediaan bahan habis pakai di rumah sakit (bulan)	12	12	100
2.2.7	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan penilaian akreditasi (kali)	1	1	100
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase pelaksanaan sistem informasi rumah sakit (kali)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen laporan SIRS online dan profil RS (dokumen)	5	5	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR RS KELAS C (%)</b>	<b>66,22</b>	<b>66,22</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C (%)</b>	<b>75</b>	<b>71,42</b>	<b>71,42</b>
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis kemitraan (orang)	7	5	71,42
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>100</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pelaksanaan Inhouse Training	6	5	83,33
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>104,28</b>

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Jumlah data pasien yang mendapatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17.  
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan  
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2020-2021

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien (orang)		(+/-)
		2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
1	Instalasi Gawat Darurat	3190	2830	-360
2	Poliklinik Penyakit Dalam	2484	2633	149
3	Poliklinik Anak	259	252	-7
4	Poliklinik Kebidanan	2127	1615	-512
5	Poliklinik Umum	502	728	226
6	Poliklinik gigi	169	96	-73
7	Poliklinik Bedah	722	830	108
8	Poliklinik THT	632	640	8
9	Poliklinik Mata	697	759	62
10	Poliklinik Paru	692	611	-81
11	Poliklinik Syaraf	422	693	271
12	Rawat Inap Penyakit Dalam	546	484	-62
13	Rawat Inap Kebidanan	403	207	-196
14	Rawat Inap Anak	168	100	-68
15	Rawat Inap Bedah	343	384	41
16	Rawat Inap VIP	96	0	-96
17	Perinatologi	218	79	-139
18	ICU	127	145	18
19	Rawat Inap Paru	53	0	-53
20	Rawat Isolasi Covid-19	110	416	306
	<b>Jumlah</b>	<b>13960</b>	<b>13502</b>	<b>-458</b>

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.18.  
Jumlah Pasien Perbulan RSU Nurdin Hamzah  
Tahun 2020-2021

No.	Bulan	Jumlah Pasien (orang)				+/-
		2020	Covid 2020	2021	Covid	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Januari	1659	0	888	27	-744
2	Februari	1435	0	996	59	-380
3	Maret	1318	0	1157	30	-131
4	April	957	1	1175	62	279
5	Mei	580	6	780	52	246
6	Juni	980	4	1144	52	212

No.	Bulan	Jumlah Pasien (orang)				+/-
		2020	Covid 2020	2021	Covid	
7	Juli	1047	5	1056	55	59
8	Agustus	1037	5	874	469	-99
9	September	1230	4	1001	810	-223
10	Oktober	1193	8	1023	0	-178
11	November	1291	41	1428	0	96
12	Desember	1123	36	1564	0	405
	<b>Jumlah</b>	<b>13850</b>	<b>110</b>	<b>13502</b>	<b>416</b>	<b>-238</b>

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3. 19.  
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan  
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2020-2021

No.	Jenis Pelayanan	2020	2021	+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
1	Rawat Jalan	11896	11687	-209
2	Rawat Inap	1954	1399	-555
3	Ruang Isolasi Covid	110	416	306
	<b>Jumlah</b>	<b>13960</b>	<b>13502</b>	<b>-458</b>

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Berikut kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20.  
Data Efisiensi Pelayanan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2021

NO.	INDIKATOR PELAYANAN	SATUAN	ANGKA IDEAL	REALISASI	
				2020	2021
1	BOR ( Bed Occupancy Rate)	%	60-85 %	29.31%	18.79%
2	AVLOS (Average Length of Stay)	hari	6-9 hari	4 hari	5 hari
3	BTO (Bed Turn Over)	kali	50 kali	28 kali	14 kali
4	TOI ( Turn Over Interval)	hari	1-3 hari	9 hari	21 hari
5	NDR ( Net Death rate)	per 1000	≠ > dari 55/1000	18.25 ‰	52.05 ‰
6	GDR (Gross Death Rate)	per 1000	< 25/1000	60.94 ‰	84.16 ‰
	Jumlah Kematian			117	152
	Kunjungan Rawat Jalan			11.896	11.687
	Kunjungan Rawat Inap			1.954	1.815

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.3.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 21.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan maksimal	Melakukan kerjasama dengan dinas kominfo untuk menyiapkan SIM-RS
2	Ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan	Merekrut tenaga kontrak
3	Standar Pelayanan Minimal yang belum terlaksana dengan baik	Menyiapkan SOP, Meningkatkan kompetensi SDM dan peralatan pendukung yang diperlukan
4	Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar	Mengusulkan pengadaan peralatan

Sumber : LKPJ Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.3.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 2 (Dua) SK Bupati dan 1 (satu) Peraturan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	SK Bupati tentang Tarif Rapid Test Anti Body	SK Bupati Nomor 125 Tahun 2021	Tarif Rapid Test Anti Gen
2	SK Bupati tentang Tarif Rapid Test Anti Gen dan PCR	SK Bupati Nomor 45 Tahun 2021	Tarif Rapid Test Anti Gen dan PCR
3	Peraturan Bupati tentang Pinjaman Jangka pendek	Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021	Pinjaman Jangka pendek

Sumber : LKPJ Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.3.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.23.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perangkat Daerah agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.	OPD telah berupaya menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas	Efisiensi anggaran
2	Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan tidak ragu untuk berobat ke RSUD NH yang nantinya dapat meningkatkan PAD	Peningkatan jenis pelayanan dengan mengontrak dokter yang tidak dimiliki oleh RSUD Nurdin Hamzah dan menambah jumlah hari kunjungan dokter spesialis	Peningkatan pelayanan
3	Penambahan tempat tidur pasien sebagai persyaratan dalam	Telah ditindaklanjuti dengan penambahan tempat tidur dari	Persyaratan 100 tempat tidur

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	mempertahankan status RSUD dengan tipe C	semula 68 menjadi 112 tempat tidur	sebagai kelas C telah terpenuhi
4	Melaksanakan pemeliharaan rehab gedung, sarana dan prasarana Rumah Sakit yang dianggap penting dan mendesak	Telah dilaksanakan sesuai prioritas dan anggaran yang tersedia	Beberapa ruangan telah direhab
5	Penanganan terhadap pasien positif Covid-19 bagi petugas medis harus benar sehat yang ditunjang dengan hasil swab	Telah dilakukan pengobatan dan perawatan pasien covid dan pada akhir November semua pasien sudah sembuh.	Pasien covid kosong sejak bulan november
6	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Struktur laporan LKPJ telah dirinci dan komprehensif	LKPJ telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Program kegiatan tersebut telah di anggarkan pada tahun 2021	Program dan kegiatan dapat berjalan pada tahun anggaran berikutnya
8	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	RSUD telah melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan	Sasaran dapat terlaksana tepat waktu
9	Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga PD dapat menjelaskan potensi-potensi yang menjadi sumber PAD dan diharapkan mampu berinovasi dan kreatif dalam mencari peluang dan mengelola serta mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru	Mengembangkan jenis pelayanan sebagai upaya peningkatan PAD	Peningkatan PAD dapat direalisasikan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
10	Memberikan standar khusus terkait pembagian insentif tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tepat waktu dan perhitungan yang tetap dan tidak berubah-ubah	Peraturan Bupati tentang pembagian insentif tenaga kesehatan telah ditetapkan	Perhitungan tetap dan sesuai peraturan yang berlaku
11	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat kurang mampu sehingga terlayani dengan baik	RSUD memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu dengan pelayanan yang sama kepada pasien lain	Tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien lain

Sumber : LKPJ Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
3. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.

### 3.4.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.24.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	$6=4/3 \times 100$
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.992.793.703,00</b>	<b>12.159.347.349,00</b>	<b>833.446.354,00</b>	<b>93,59</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>190.342.000,00</b>	<b>128.315.000,00</b>	<b>62.027.000,00</b>	<b>67,41</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.552.000,00	33.476.000,00	26.076.000,00	56,21
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.140.000,00	4.864.000,00	276.000,00	94,63
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.140.000,00	-	5.140.000,00	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.140.000,00	4.840.000,00	300.000,00	94,16
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.140.000,00	-	5.140.000,00	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	20.080.000,00	20.080.000,00	-	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.150.000,00	65.055.000,00	25.095.000,00	72,16
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.149.693.627,00</b>	<b>8.771.936.952,00</b>	<b>377.756.675,00</b>	<b>95,87</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.441.254.927,00	6.156.958.452,00	284.296.475,00	95,59
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	2.701.948.700,00	2.612.228.500,00	89.720.200,00	96,68
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.490.000,00	2.750.000,00	3.740.000,00	42,37
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>195.140.000,00</b>	<b>188.321.000,00</b>	<b>6.819.000,00</b>	<b>96,51</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.140.000,00	119.821.000,00	319.000,00	99,73
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	68.500.000,00	6.500.000,00	91,33
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>417.126.189,00</b>	<b>325.860.094,00</b>	<b>91.266.095,00</b>	<b>78,12</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.097.000,00	12.097.000,00	-	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	92.047.479,00	91.968.069,00	79.410,00	99,91
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.014.040,00	-	20.014.040,00	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.977.670,00	42.386.000,00	5.591.670,00	88,35
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.950.000,00	50.000,00	99,17
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.500.000,00	36.300.000,00	1.200.000,00	96,8
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.490.000,00	137.159.025,00	64.330.975,00	68,07
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.741.966.872,00</b>	<b>1.499.240.500,00</b>	<b>242.726.372,00</b>	<b>86,07</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	137.936.000,00	120.655.000,00	17.281.000,00	87,47
1.5.2	Pengadaan Mebel	167.450.825,00	166.762.000,00	688.825,00	99,59
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	771.653.247,00	603.077.500,00	168.575.747,00	78,15
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	664.926.800,00	608.746.000,00	56.180.800,00	91,55
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.100.000,00</b>	<b>72.269.000,00</b>	<b>5.831.000,00</b>	<b>92,53</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	60.169.000,00	5.831.000,00	91,17
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.220.425.015,00</b>	<b>1.173.404.803,00</b>	<b>47.020.212,00</b>	<b>96,15</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.890.000,00	215.609.954,00	12.280.046,00	94,61
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	120.880.000,00	93.656.599,00	27.223.401,00	77,48
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.050.000,00	58.244.250,00	3.805.750,00	93,87
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	809.605.015,00	805.894.000,00	3.711.015,00	99,54
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>33.399.038.500,00</b>	<b>30.089.822.127,20</b>	<b>3.309.216.372,80</b>	<b>90,09</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>944.810.900,00</b>	<b>894.606.709,00</b>	<b>50.204.191,00</b>	<b>94,69</b>
2.1.1	Normalisasi /Restorasi/Pemeliharaan Sungai	944.810.900,00	894.606.709,00	50.204.191,00	94,69
<b>2.2</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.454.227.600,00</b>	<b>29.195.215.418,20</b>	<b>3.259.012.181,80</b>	<b>89,96</b>
2.2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.204.485.000,00	2.161.582.572,00	42.902.428,00	98,05
2.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	29.089.030.450,00	26.012.123.276,20	3.076.907.173,80	89,42
2.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.160.712.150,00	1.021.509.570,00	139.202.580,00	88,01
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>104.778.514.784,00</b>	<b>99.373.307.895,00</b>	<b>5.405.206.889,00</b>	<b>94,84</b>
3.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	104.778.514.784,00	99.373.307.895,00	5.405.206.889,00	94,84

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategis dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	1.919.200.000,00	1.868.414.310,00	50.785.690,00	97,35
3.1.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	525.049.779,00	7.285.000,00	517.764.779,00	1,39
3.1.3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	963.824.175,00	935.330.000,00	28.494.175,00	97,04
3.1.4	Pembangunan Jalan	61.763.519.531,00	58.640.613.384,00	3.122.906.147,00	94,94
3.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.020.391.776,00	17.917.907.646,00	1.102.484.130,00	94,2
3.1.6	Pembangunan Jembatan	13.359.004.062,00	13.011.093.394,00	347.910.668,00	97,4
3.1.7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100
3.1.8	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.200.325.461,00	3.180.461.236,00	19.864.225,00	99,38
3.1.9	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	3.027.200.000,00	2.812.202.925,00	214.997.075,00	92,9
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>371.579.257,00</b>	<b>243.646.234,00</b>	<b>127.933.023,00</b>	<b>65,57</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>172.569.294,00</b>	<b>115.500.552,00</b>	<b>57.068.742,00</b>	<b>66,93</b>
4.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	172.569.294,00	115.500.552,00	57.068.742,00	66,93
<b>4.2</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>199.009.963,00</b>	<b>128.145.682,00</b>	<b>70.864.281,00</b>	<b>64,39</b>
4.2.1	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator Sipil	46.409.963,00	29.228.682,00	17.181.281,00	62,98
4.2.2	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	152.600.000,00	98.917.000,00	53.683.000,00	64,82
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.645.577.618,00</b>	<b>1.457.116.369,70</b>	<b>188.461.248,30</b>	<b>88,55</b>
<b>5.1</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>1.394.823.705,00</b>	<b>1.303.334.156,70</b>	<b>91.489.548,30</b>	<b>93,44</b>
5.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.394.823.705,00	1.303.334.156,70	91.489.548,30	93,44
<b>5.2</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.753.913,00</b>	<b>153.782.213,00</b>	<b>96.971.700,00</b>	<b>61,33</b>
5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	250.753.913,00	153.782.213,00	96.971.700,00	61,33
<b>JUMLAH</b>		<b>153.187.503.862,00</b>	<b>143.323.239.974,90</b>	<b>9.864.263.887,10</b>	<b>93,56</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan
- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen RKA
- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perubahan RKA
- 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen DPA
- 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perubahan DPA
- 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan
- 1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan
2. Kegiatan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
  - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (Stel)
  - 3.2 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah  
Indikator Kegiatan (Output) Adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah

- 4.1 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan
- 4.2 Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Bulan)
- 4.3 Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pameran yang dilaksanakan
- 4.4 Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)
- 4.5 Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)
- 4.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makanan dan minuman tamu
- 4.7 Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)
- 5. Kegiatan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
  - 5.1. Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit).
  - 5.2 Sub Kegiatan pengadaan Mebel  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis pengadaan mebel yang dilaksanakan (unit).
  - 5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan
  - 5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah gedung kantor yang di bangun
- 6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1 Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai (Lembar)

6.2 Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara

7.2 Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)

7.3 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Bulan)

7.4 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator program (outcome) adalah :

- a. Cakupan luas irigasi pertanian dalam kondisi baik,
- b. Cakupan luas saluran dan tanggul perkebunan dalam kondisi baik ,

Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan adalah Panjang sungai yang di normalisasi

1.1 Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi/Pemeliharaan Sungai

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah normalisasi sungai yang dilaksanakan

2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan adalah : 1) Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab, 2) Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan.

2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Indikator Sub Kegiatan adalah : 1) Jumlah Data Base E-Paksi DIR yang disusun, 2) Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul yang dihasilkan, 3) Jumlah Dokumen Pengawasan yang dihasilkan

#### 2.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Saluran dan Tanggul yang di rehab

#### 2.3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan

### C. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator program (outcome) adalah persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap. Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

#### 1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah 1) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik, 2) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

##### 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategis dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan yang dihasilkan

##### 1.2 Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Indikator Sub Kegiatan adalah Luas Lahan yang dibebaskan

##### 1.3 Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Indikator Sub Kegiatan adalah : 1) Panjang jalan yang dilaksanakan survey kondisi, 2) Jumlah jembatan yang dilaksanakan survey kondisi

##### 1.4 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Indikator Sub Kegiatan adalah 1) Panjang Jalan Kabupaten Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan, 2) Jumlah Pembangunan Box Culvert

##### 1.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator Sub Kegiatan adalah : 1) Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat, 2) Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD-Alkal

##### 1.6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

Indikator Sub Kegiatan adalah Panjang Jembatan yang dibangun

##### 1.7 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan

##### 1.8 Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

Indikator Sub Kegiatan adalah Pelaksanaan penanggulangan bencana/tanggap darurat

1.9 Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan

D. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Indikator program (outcome) yaitu Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi.

Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Kegiatan adalah Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga kerja terampil

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan adalah Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan

2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator Sipjaki

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI

E. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator kinerja program (outcome) yaitu rasio ketaatan terhadap RTRW dengan target capaian sebesar 100%. Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan adalah Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani

2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota

Indikator Sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan.

Adapun target, realisasi dan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25.  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2021				
			Target		Realisasi		Capaian %
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEK PELAYANAN INSTANSI</b>	78		82,15		105,32
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	100	%	71,42	%	71,42
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dok	3	Dok	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	Dok	1	Dok	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	Dok	-	Dok	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	Dok	1	Dok	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	Dok	-	Dok	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	4	Dok	4	Dok	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	Bulan	12	Bulan	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	%	100	%	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1	Tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	12	Bulan	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	1	Dok	1	Dok	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2021				
			Target		Realisasi		Capaian %
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	191	Stel	191	Stel	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan formal	30	Orang	30	Orang	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>85,71</b>	<b>%</b>	<b>85,71</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	13	Jenis	13	Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1	Tahun	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1	Kali	-	Kali	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	5	Jenis	5	Jenis	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	12	Bulan	100
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12	Bulan	12	Bulan	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	Bulan	12	Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2	6	Unit	6	Unit	100
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel yang dilaksanakan	3	Jenis	3	Jenis	100
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan	19	Jenis	19	Jenis	100
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	2	Unit	2	Unit	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1.210	Materai	1.210	Materai	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	Bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6	Unit	6	Unit	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2021				
			Target		Realisasi		Capaian %
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara	16	Unit	16	Unit	100
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Tahun	1	Tahun	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang Gedung/kantor yang terpelihara	3	Gedung	3	Gedung	100
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Cakupan luas irigasi pertanian dalam kondisi baik</b>	<b>50,12</b>	<b>%</b>	<b>51,55</b>	<b>%</b>	<b>102,85</b>
		<b>Cakupan luas saluran dan tanggul perkebunan dalam kondisi baik</b>	<b>55,26</b>	<b>%</b>	<b>55,55</b>	<b>%</b>	<b>100,52</b>
2.1	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang sungai yang di normalisasi</b>	<b>2.750</b>	<b>meter</b>	<b>2.750</b>	<b>Meter</b>	<b>100</b>
2.1.1	Normalisasi /Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Jumlah normalisasi sungai yang dilaksanakan	1	Lokasi	1	Lokasi	100
2.2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Saluran dan Tanggul yang di rehab</b>	<b>109.850</b>	<b>meter</b>	<b>109.850</b>	<b>Meter</b>	<b>100</b>
		<b>Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan</b>	<b>897.600</b>	<b>meter</b>	<b>816.000</b>	<b>Meter</b>	<b>90,90</b>
2.2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Data Base E-Paksi DIR yang disusun	9	DIR	9	DIR	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Saluran dan Tanggul yang dihasilkan	5	Dok	5	Dok	100
		Jumlah Dokumen Pengawasan yang dihasilkan	12	Dok	12	Dok	100
2.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran dan Tanggul yang di rehab	24	Lokasi	24	Lokasi	100
2.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	22	Lokasi	20	Lokasi	90,91
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dengan kondisi mantap</b>	<b>73,12</b>	<b>%</b>	<b>72,04</b>	<b>%</b>	<b>98,52</b>
3.1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik</b>	<b>20,99</b>	<b>%</b>	<b>19,59</b>	<b>%</b>	<b>93,33</b>
		<b>Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik</b>	<b>34,48</b>	<b>%</b>	<b>34,48</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategis dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan/Jembatan yang dihasilkan	18	Dok	18	Dok	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2021				
			Target		Realisasi		Capaian %
3.1.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	18,5	Ha	-	Ha	-
3.1.3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan yang dilaksanakan survey kondisi	1.177,77	Km	1.177,77	Km	100
		Jumlah jembatan yang dilaksanakan survey kondisi	525	Unit	525	Unit	100
3.1.4	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Kabupaten yang dilakukan peningkatan kondisi jalan	29,141	Km	29,141	Km	100
		Jumlah Pembangunan Box Culvert	16	Box Culvert	16	Box Culvert	100
3.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Capaian PAD dari Sewa Alat Berat	100	%	9,36	%	9,36
		Panjang ruas jalan (fungsional) yang di perbaiki dengan menggunakan alat berat UPTD-Alkal	34,10	Km	82,950	Km	243,26
3.1.6	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	118	meter	118	meter	100
3.1.7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dilaksanakan pemeliharaan	15	Unit	15	Unit	100
3.1.8	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Pelaksanaan penanggulangan bencana/tanggap darurat	1	Tahun	1	Tahun	100
3.1.9	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Jumlah Paket Pengawasan Pekerja Pembangunan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan	30	Paket	30	Paket	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi</b>	<b>86</b>	<b>%</b>	<b>85,35</b>	<b>%</b>	<b>99,24</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi</b>	<b>86</b>	<b>%</b>	<b>85,35</b>	<b>%</b>	<b>99,24</b>
4.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga kerja terampil	50	Peserta	50	Peserta	100
<b>4.2</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
4.2.1	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator Sipjaki	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	20	Peserta	20	Peserta	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Rasio Ketaatan terhadap RTRW</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
5.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Persentase Kesesuaian	100	%	100	%	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tahun 2021				
			Target		Realisasi		Capaian %
	<b>dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota</b>					
5.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun	7	Dok	7	Dok	100
5.2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan	12	Bulan	12	Bulan	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>							<b>101,08</b>

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.4.2. PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan yang telah dihadapi beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 26.  
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	Pembangunan sarana jalan, jembatan dan irigasi memerlukan biaya yang sangat tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwilayah berawa dan dataran rendah serta lahan gambut.	Melaksanakan survey kondisi serta memprioritaskan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan berdasarkan kondisi jalan, jembatan dan irigasi dengan mempedomani azas manfaat dan target kinerja
2	Terbatasnya alokasi anggaran dan refocusing anggaran tahun 2021 akibat pandemic covid 19 untuk kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, sehingga capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.	Menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah berdasarkan target indikator kinerja Dinas PUPR serta tetap mengupayakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk pendanaan kegiatan melalui APBD Provinsi maupun APBN
3	Lambatnya penunjukan penyedia mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Mendorong serta memotivasi penyedia agar pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi serta

No	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan fisik
4	Kondisi lokasi dan cuaca sangat mempengaruhi lamanya pelaksanaan pekerjaan fisik dan kondisi alam yang menyebabkan banjir di beberapa titik jalan kabupaten menyebabkan penurunan kondisi jalan.	Menambah waktu pelaksanaan pekerjaan (addendum)
5	Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dalam pemanfaatan ruang	Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan RTRW Kabupaten Tanjung Tabung timur dan alur-alur pengeluaran rekomendasi pemanfaatan ruang bagi pemangku kepentingan berdasarkan hasil keputusan tim TKPRD

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.4.3. Tindak Lanjut Catatan Dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Tahun 2020 dengan Pansus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat catatan dan rekomendasi dari Pansus DPRD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terhadap rekomendasi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.27.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi  
DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Dinas PUPR Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/ Masalah yang di selesaikan
1	Perangkat Daerah agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%	Dinas PUPR dalam penyusunan program, kegiatan dan target kinerja telah mempedomani RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026, Renstra Dinas PUPR Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas PUPR guna pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan	Penyusunan Program dan Kegiatan telah mempedomani RPJMD, Renstra dan Target Kinerja
2	Dalam penyusunan	Dalam penyusunan Rencana	Mengusulkan Kembali

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Dinas PUPR Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/ Masalah yang di selesaikan
	perencanaan anggaran agar mengutamakan kegiatan yang telah selesai perencanaannya atau kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 karena refocusing dan gagal lelang	Kerja dan Anggaran Dinas PUPR telah mengusulkan kembali program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 akibat refocusing anggaran pada Rencana Kerja APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021	program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas PUPR telah mempedomani pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan LKPJ telah mempedomani PP No 13 Tahun 2019 dan Permendagri No 18 Tahun 2020
4	Terhadap program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Untuk program dan kegiatan pada tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran dan telah dilaksanakan perencanaannya, Dinas PUPR telah mengusulkan kembali dalam Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya	Mengusulkan Kembali program dan kegiatan pada tahun berikutnya

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Dinas PUPR Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/ Masalah yang di selesaikan
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Dalam penyusunan program dan kegiatan, Dinas PUPR mempedomani RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Renstra dan Renja Dinas PUPR, dan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahunan Dinas PUPR mempedomani usulan-usulan prioritas yang disampaikan dari musrenbang kecamatan, pikir dewan dan usulan-usulan top down yang mendukung visi misi Kepala Daerah. Seiring terbatasnya alokasi anggaran pada dinas PUPR usulan-usulan tersebut dibahas kembali dengan skala prioritas bersama tim TAPD dan Banggar DPRD guna mendukung program dan kegiatan yang memberikan azas manfaat dalam rangka mewujudkan Tanjung Jabung Timur Rakyat	Sudah melaksanakan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT
6	Melakukan tindakan preventif sementara dalam skala kewenangan daerah kabupaten terhadap infrastruktur jalan kecamatan Muara Sabak Timur hingga Nipah Panjang demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terhadap jalan layak	Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung sudah melaksanakan tindakan preventif sementara infrastruktur jalan Kecamatan Muara Sabak Timur hingga Nipah Panjang. Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi akan ditangani secara fungsional oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui UPTD Alkal Provinsi Jambi dan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten telah melaksanakan kegiatan fisik jalan melalui kontraktual dan pemeliharaan rutin jalan melalui UPTD Alkal untuk memperbaiki ruas jalan menggunakan alat berat dan	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi terkait penanganan jalan kewenangan provinsi dan melalui UPTD Alkal PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pemeliharaan ruas jalan dengan alat berat UPTD Alkal

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Dinas PUPR Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/ Masalah yang di selesaikan
		material UPTD	
7	Mengevaluasi Bidang Bina Marga agar bekerja baik dan profesional sehingga kegiatan gagal lelang tahun 2019 dan 2020 tidak terulang dan dapat dilaksanakan	Dinas PUPR telah memberikan teguran secara lisan dan tertulis dan akan mengevaluasi Kembali kinerja bidang bina marga lebih lanjut agar dapat bekerja lebih baik dan profesional, dan untuk kegiatan gagal lelang kedepannya diusahakan agar tidak terjadi Kembali	Mengevaluasi kinerja bidang agar kegiatan gagal lelang tidak terjadi kembali di tahun mendatang

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.5. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
3. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
4. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yang

diberikan oleh Bupati.

### 3.5.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.28.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	100,00
1.1.	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	100,00
1.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	100,00
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	10.566.208.316,00	10.337.590.369,00	199.752.977,00	100,00
2.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	10.566.208.316,00	10.337.590.369,00	199.752.977,00	100,00
2.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	720.495.532,00	651.118.784,00	69.541.748,00	92,55
2.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.936.034.970,00	3.907.005.000,00	29.029.970,00	100,00
2.1.3	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5.459.677.814,00	5.329.466.585,00	130.211.229,00	97,04
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	8.576.943.560,00	8.571.200.000,00	5.743.560,00	100,00
3.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	8.576.943.560,00	8.571.200.000,00	5.743.560,00	100,00
3.1.2	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	8.576.943.560,00	8.571.200.000,00	5.743.560,00	100,00
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	595.935.605,00	522.055.990,00	73.879.615,00	100,00
4.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	595.935.605,00	522.055.990,00	73.879.615,00	100,00
4.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	595.935.605,00	522.055.990,00	73.879.615,00	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>15.124.111.179,00</b>	<b>14.430.313.551,00</b>	<b>693.797.628,00</b>	<b>97,58</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>15.124.111.179,00</b>	<b>14.430.313.551,00</b>	<b>693.797.628,00</b>	<b>97,58</b>
5.1.2	Pembangunan Jalan	15.124.111.179,00	14.430.313.551,00	693.797.628,00	97,58
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.924.267.310,00</b>	<b>11.347.863.936,00</b>	<b>1.575.853.374,00</b>	<b>90,08</b>
<b>6.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.294.800,00</b>	<b>31.912.000,00</b>	<b>28.382.800,00</b>	<b>58,01</b>
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800,00	4.896.500,00	103.300,00	100,00
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.350.000,00	27.015.500,00	334.500,00	100,00
6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.945.000,00	0	27.945.000,00	0
<b>6.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.220.454.139,00</b>	<b>5.419.482.178,00</b>	<b>800.971.961,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.757.282.039,00	3.179.012.178,00	578.269.861,00	100,00
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.463.172.100,00	2.240.470.000,00	222.702.100,00	100,00
<b>6.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>112.027.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.300.000,00	88.077.000,00	2.223.000,00	100,00
6.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	23.950.000,00	1.050.000,00	98,08
<b>6.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>558.766.514,00</b>	<b>477.109.463,00</b>	<b>63.114.051,00</b>	<b>90,08</b>
6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.586.600,00	6.513.500,00	73.100,00	100,00
6.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.041.191,00	88.399.710,00	1.641.481,00	100,00
6.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.102.723,00	31.099.650,00	3.073,00	100,00
6.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
6.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	392.201.000,00	356.335.000,00	35.866.000,00	90,86
6.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.435.000,00	7.904.603,00	25.530.397,00	25,82
<b>6.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.309.235.857,00</b>	<b>2.783.726.922,00</b>	<b>524.958.935,00</b>	<b>86,30</b>
6.5.1	Pengadaan Mebel	27.910.857,00	27.100.000,00	810.857,00	100,00
6.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.325.000,00	44.775.000,00	550.000,00	100,00
6.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.236.000.000,00	2.711.851.922,00	524.148.078,00	85,00
<b>6.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.850.000,00</b>	<b>36.177.073,00</b>	<b>14.672.927,00</b>	<b>73,32</b>
6.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000,00	2.270.000,00	580.000,00	81,83
6.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	33.907.073,00	14.092.927,00	70,64
<b>6.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.609.366.000,00</b>	<b>2.468.886.300,00</b>	<b>140.479.700,00</b>	<b>96,80</b>
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	815.740.000,00	711.685.300,00	104.054.700,00	89,40
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.470.000,00	15.450.000,00	20.000,00	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
6.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.778.156.000,00	1.741.751.000,00	36.405.000,00	100,00
7	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>304.185.420,00</b>	<b>244.945.228,00</b>	<b>59.240.192,00</b>	<b>82,70</b>
7.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>304.185.420,00</b>	<b>244.945.228,00</b>	<b>59.240.192,00</b>	<b>82,70</b>
7.1.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	304.185.420,00	244.945.228,00	59.240.192,00	82,70
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.103.680.845,00</b>	<b>7.704.759.571,00</b>	<b>516.321.274,00</b>	<b>100,00</b>
8.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>8.103.680.845,00</b>	<b>7.704.759.571,00</b>	<b>398.921.274,00</b>	<b>100,00</b>
8.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.103.680.845,00	7.704.759.571,00	398.921.274,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>56.824.532.235,00</b>	<b>53.783.525.645,00</b>	<b>3.041.006.590,00</b>	<b>96,83</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur 2021

#### A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Indikator Program (Outcome) Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Sarana Umum Masyarakat Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Bersih

- 1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai.

#### B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Program (Outcome) Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- 1.1 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah
- 1.2 Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah
- 1.3 Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah
- 1.4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sambungan Rumah

#### C. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator Program (Outcome) Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota,  
Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
  - 1.1 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah Bersanitasi aman.

#### D. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Program (Outcome) Persentase Drainase dalam kondisi baik. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,  
Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
  - 1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Drainase yang terbangun.

#### E. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator Program (Outcome) Persentase Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Indikator kegiatan (Output) Persentase panjang Jalan Lingkungan.

1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah panjang Jalan yang dibangun.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)

1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Rencana Kerja, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,  
Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,  
Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya.

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan formal, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah.

- 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan.
- 4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara.
- 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak, jumlah penggandaan.
- 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.
- 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran makan minum rapat/tamu.
- 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,  
Indikator kegiatan (Output) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah.
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah mebel.
- 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya.
- 5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan yang dipelihara.

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara.

7.3 Sub Kegiatan Rehab Sedang./Berat Gedung Kantor,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah gedung kantor yang direhab.

#### G. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase pengurangan luas permukiman kumuh. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota,

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

1.1 Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rumah yang direhab.

#### H. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum. Untuk Mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase PSU yang dibangun.

1.1 Sub Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.29.  
Capaian Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PERSENTASE SARANA UMUM MASYARAKAT DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR BERSIH</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>88,89%</b>
1.1.	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai</b>	<b>100</b>	<b>88,89</b>	<b>88,89</b>
1.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Yang Dibangun	9	8	88.89
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM MELALUI JARINGAN PERPIPAAN</b>	<b>26,71</b>	<b>22,11</b>	<b>82,78</b>
2.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>	<b>100</b>	<b>101,25</b>	<b>101,25</b>
2.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	82	82	100
2.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	733	769	105
2.1.3	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	205	205	100
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah waktu operasional SPAM (Bulan)	12	12	100
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI LAYAK</b>	<b>73,08</b>	<b>82,51</b>	<b>112,90</b>
3.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.2	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Bersanitasi aman	1.164	1.164	100
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>PERSENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>60</b>	<b>89,35</b>	<b>148,92</b>
4.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang Drainase yang terbangun	175	175	100
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN KONDISI BAIK</b>	<b>66,75</b>	<b>74,70</b>	<b>111,91</b>
5.1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase panjang Jalan Lingkungan</b>	<b>100</b>	<b>102,75</b>	<b>102,75</b>
5.1.2	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun (meter)	5.564	5.717	102,75
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>70</b>	<b>89,74</b>
6.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	3	3	100
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	4	4	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	$\frac{6}{5} \times 100$
6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	1	1	100
6.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	1	1	100
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	1	100
6.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya (stel)	185	185	100
6.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)	5	0	0
6.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	7	7	100
6.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
6.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	6	6	100
6.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	12	100
6.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu (bulan)	12	12	100
6.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12	12	100
6.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (unit/buah)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (Unit)	5	5	100
6.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (Unit)	4	4	100
6.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun (gedung)	1	1	100
6.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (lembar)	285	285	100
6.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	100
6.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit)	56	56	100
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	2	2	100
6.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	2	2	100
7	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase pengurangan luas permukiman kumuh</b>	<b>119,88</b>	<b>122,68</b>	<b>97,71</b>
7.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
7.1.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah yang di rehab	60	60	100
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase LPJU terpasang</b>	<b>39,57</b>	<b>41,63</b>	<b>104,94</b>
		<b>Persentase Taman Kota terbangun</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>100</b>
8.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah LPJU yang terbangun	336	336	100
		Jumlah Taman kota yang terbangun	2	2	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>94,92</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.5.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.30.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum adanya data panjang jalan lingkungan	Koordinasi dengan aparat desa/kelurahan tentang status jalan di tingkat desa/kelurahan
2	Belum adanya updating data perumahan tidak layak huni	Meningkatkan koordinasi dengan aparat desa dan kelurahan
3	Belum adanya petugas pendataan rumah tidak layak huni di tingkat kelurahan/desa	Menambah tenaga ahli dalam pendataan rumah tidak layak huni
4	Kekosongan jabatan eselon III/ Kepala bidang sehingga terkendala dalam penyelesaian masalah dilapangan dan koordinasi antar OPD	Mengajukan pengusulan Kepala bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Bupati Tanjung Jabung Timur

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.5.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.31.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perangkat Daerah agar lebih selektif, efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi 100%.	Akan dilaksanakan sesuai seefektif dan seefisien mungkin dalam hal pelaksanaan penganggaran OPD dimasa yang akan datang	telah dilaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan untuk mencapai target kinerja pemerintah daerah
2	Mengoptimalkan kinerja SPAM dengan peningkatan statusnya menjadi PDAM.	Tidak dapat dipenuhi karena belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi PDAM (asset, SDM, SDA)	melakukan perbaikan dan pembenahan dalam pemenuhan untuk dapat ditingkatkan menjadi PDAM
3	Pemasangan lampu jalan agar lebih mengutamakan pemasangannya pada titik rawan untuk mengurangi dan menghindari resiko kecelakaan serta mencegah kriminalitas.	Sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD OPD, terkait penerangan yang ditangani oleh OPD adalah penerangan dimulai dari desa ke ibu kota kecamatan. Dalam hal ini telah dilaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan pada titik titik rawan di sepanjang jalan tersebut.	telah dilakukan pemasangan LPJU pada sebagian titik rawan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Akan dilaksanakan sesuai dengan sistematika penyusunan LKPJ OPD pada laporan berikutnya.	Sistematika LKPJ sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Telah dilaksanakan penganggaran kembali dana yang direfocusing, tetapi belum semuanya yang terealisasi dikarenakan minimnya pendanaan.	dilaksanakannya penganggaran kembali dana yang direfocusing, tetapi belum semuanya yang terealisasi dikarenakan minimnya pendanaan
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Telah melakukan koordinasi antar OPD maupun Mitra Kerja di DPRD, dan akan dilakukan lebih intensif lagi pada tahun berikutnya.	melakukan pendataan ulang pelanggan/wajib pajak untuk dapat dilakukan ekstensifikasi sumber PAD
7	Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga PD dapat menjelaskan	Akan berkoordinasi ke badan pengelolaan keuangan selaku coordinator dalam pemungutan PAD.	melakukan koordinasi antar OPD maupun Mitra Kerja di DPRD, dan akan dilakukan lebih intensif

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	potensi-potensi yang menjadi sumber PAD dan diharapkan mampu berinovasi dan kreatif dalam mencari peluang dan mengelola serta mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru.		lagi pada tahun berikutnya.

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan masyarakat;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Bupati.

### 3.6.1. Capaian Pelaksanaan Program

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.32.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.445.753.761,00</b>	<b>5.140.099.763,00</b>	<b>305.653.998,00</b>	<b>94,39</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.260.000,00</b>	<b>6.516.600,00</b>	<b>24.743.400,00</b>	<b>20,85</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.870.000,00	1.695.000,00	8.175.000,00	17,17
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.590.000,00	1.655.000,00	1.935.000,00	46,10
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	2.186.600,00	4.813.400,00	31,24
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.800.000,00	980.000,00	9.820.000,00	9,07
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.706.031.174,00</b>	<b>4.534.008.376,00</b>	<b>172.022.798,00</b>	<b>96,34</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.364.223.674,00	2.263.002.626,00	101.221.048,00	95,72
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.333.809.500,00	2.267.546.750,00	66.262.750,00	97,16
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.998.000,00	3.459.000,00	1.539.000,00	69,21
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>121.946.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>99,96</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122.000.000,00	121.946.000,00	54.000,00	99,96
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>182.397.587,00</b>	<b>122.651.227,00</b>	<b>59.746.360,00</b>	<b>67,24</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.049.000,00	3.290.000,00	6.759.000,00	32,74
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.281.072,00	39.244.500,00	28.036.572,00	58,33
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.216.110,00	3.832.230,00	3.383.880,00	53,11
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.571.405,00	16.210.497,00	10.360.908,00	61,01
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.770.000,00	30.000,00	99,38
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.960.000,00	45.300.000,00	6.660.000,00	87,18

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.520.000,00	10.004.000,00	4.516.000,00	68,90
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>-</b>
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.800.000,00	-	25.800.000,00	-
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>57.569.960,00</b>	<b>9.930.040,00</b>	<b>85,29</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	51.569.960,00	8.430.040,00	85,95
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.765.000,00</b>	<b>297.407.600,00</b>	<b>13.357.400,00</b>	<b>95,70</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.970.000,00	114.112.300,00	2.857.700,00	97,56
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.560.000,00	136.524.300,00	7.035.700,00	95,10
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.100.000,00	12.640.000,00	3.460.000,00	78,51
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.135.000,00	34.131.000,00	4.000,00	99,99
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>258.455.920,00</b>	<b>145.347.050,00</b>	<b>113.108.870,00</b>	<b>56,24</b>
<b>2.1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>227.258.580,00</b>	<b>137.528.750,00</b>	<b>89.729.830,00</b>	<b>60,52</b>
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	61.187.500,00	52.940.000,00	8.247.500,00	86,52
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	39.999.800,00	31.490.000,00	8.509.800,00	78,73
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	6.785.000,00	3.215.000,00	67,85
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.914.000,00	3.620.000,00	4.294.000,00	45,74
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	80.781.780,00	25.047.500,00	55.734.280,00	31,01
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.375.500,00	17.646.250,00	9.729.250,00	64,46
<b>2.2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>31.197.340,00</b>	<b>7.818.300,00</b>	<b>23.379.040,00</b>	<b>25,06</b>
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9.872.340,00	4.413.300,00	5.459.040,00	44,70
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	11.510.000,00	3.405.000,00	8.105.000,00	29,58

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.2,3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9.815.000,00	-	9.815.000,00	-
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>80.781.778,00</b>	<b>34.390.000,00</b>	<b>46.391.778,00</b>	<b>42,57</b>
<b>3,1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58.816.078,00</b>	<b>31.660.000,00</b>	<b>27.156.078,00</b>	<b>53,83</b>
3,1,1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.096.078,00	12.640.000,00	10.456.078,00	54,73
3,1,2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.800.000,00	19.020.000,00	7.780.000,00	70,97
3,1,3	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.920.000,00	-	8.920.000,00	-
<b>3,2</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>68,08</b>
3,2,1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.010.000,00	2.730.000,00	1.280.000,00	68,08
<b>3,3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>17.955.700,00</b>	<b>-</b>	<b>17.955.700,00</b>	<b>-</b>
3,3,1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.955.700,00	-	17.955.700,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>5.784.991.459,00</b>	<b>5.319.836.813,00</b>	<b>465.154.646</b>	<b>91,96</b>

Sumber : LKPJ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah,
  - 1.5 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan.
  - 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah.
  - 1.7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Realisasi.
  - 1.8 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.
  - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.
  - 3.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah,
  - 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan.
  - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah bahan logistik kantor/obat-obatan yang disediakan.

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak.

4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.

4.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan-minum tamu.

4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan-minum rapat SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-3.

5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan mebel.

5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara.
- 7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara.
- 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara.
- 7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara.

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikator Program (Outcome) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Persentase Penegakan Perda Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten,
  - 1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.
  - 1.2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penertiban yang dilaksanakan.
  - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan koordinasi
  - 1.4 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya

1.6 Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kerja sama antar lembaga dan kemitraan yang dilaksanakan

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada,

2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sosialisasi yang dilakukan.

2.2 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengawasan yang dilakukan.

2.3 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Indikator Program (Outcome) Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah Respon Time Rate Pada Daerah Layanan WMK Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota,

1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah hasil Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan.

1.3 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang dilakukan

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Indikator kegiatan (Output) adalah Cakupan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran,

2.1 Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran yang dilaksanakan.

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Indikator kegiatan (Output) adalah Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran,

3.1 Sub Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sosialisasi dan Edukasi masyarakat.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78,84</b>	<b>101,08%</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>81,25%</b>	<b>81,25%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	4 kali	4 kali	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	4 kali	1 Kali	25
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185 Stel	185 Stel	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	6 Jenis	6 Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor/obat obatan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0 %</b>
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	0 Unit	0
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90 %</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	750 Buah	600 Buah	80
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik	12 bulan	12 Bulan	100

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	6 unit	6 unit	100
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	32 unit	33unit	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	100
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PENEKAKAN PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2 Kali	2 Kali	100
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas nya	25 Orang	25 Orang	100
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerja sama antar lembaga dan kemitraan yang dilaksanakan	4 Lembaga	4 Lembaga	100
2.2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilakukan	1 Kali	1 Kali	100
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan	12 Bulan	12 Bulan	100
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN</b>	<b>RESPON TIME RATE PADA DAERAH LAYANAN WMK</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>166.67%</b>

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	<b>DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>				
<b>3,1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3,1,1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3,1,2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3,1,3	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>3,2</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3,2,1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Pendataan sarana Prasarana proteksi kebakaran yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>3,3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3,3,1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	1 Kali	0 kali	0
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>122,58</b>

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.34.  
Gangguan Ketertiban Umum Tahun 2021

NO	JENIS GANGGUAN KETERTIBAN UMUM	VOLUME KASUS/ PERTAHUN	KETERANGAN
1	Balapan Liar Di Area Perkantoran	10	
2	Pedagang Liar	24	
3	Minum Miras/ Tuak Di Tempat Umum	28	
4	Penyalahgunaan Obat-Obatan (Minum Komix Berlebihan dan Menghirup Lem)	10	
5	PERUSAKAN ASET DAERAH (Pencurian Lampu Taman 1 Kali Dan Perusakan Pot Kembang 2 Kali)	-	
6	Prostitusi/ Asusila	1	
7	Demonstrasi	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>78</b>	

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3. 35.  
Kegiatan Pelatihan Linmas Tahun 2021

NO	HARI/ TANGGAL	TEMPAT	PESERTA PELATIHAN	KETERANGAN
1	-	-	-	-

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.36.  
Perda dan Perkada Yang di Tegakan Tahun 2021

NO	PERDA DAN PERKADA	VOLUME PENERTIBAN	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perda No. 9 TH. 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	48	Pengecekan Izin Usaha dan tertib Fasilitas Umum.	
2	Perda No. 10 TH. 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol	10	Pengecekan, pengawasan Toko-toko dan Tempat Umum, Pembatasan Peredaran Miras	
3	Perda No. 02 Tahun 2015 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat	24	Tertib Tempat-tempat Umum	
4	Perda No. 03 Tahun 2016 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak	35	Penertiban Ternak	
	<b>JUMLAH</b>	117		

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3. 37.  
Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/ Orang-Orang Penting Dan Penjagaan Aset-Aset Daerah Tahun 2021

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	ACARA	TEMPAT	KETERANGAN
1	18 April 2021	Melaksanakan Pengamanan Pih. Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Safari Ramadhan	Kec. Rantau Rasau.	Terlaksana aman terkendali
2	21 April 2021	Melaksanakan Pengamanan Pih. Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Safari Ramadhan	Kec. Muara Sabak Timur	Terlaksana aman terkendali
3	22 April 2021	Melaksanakan Pengamanan Pih. Bupati Tanjung Jabung Timur beserta	Kec. Mendahara Ulu	Terlaksana aman terkendali

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	ACARA	TEMPAT	KETERANGAN
		rombongan dalam rangka acara Safari Ramadhan		
4	23 April 2021	Melaksanakan Pengamanan PIh. Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Safari Ramadhan	Kec. Geragai	Terlaksana aman terkendali
5	27 Mei 2021	Melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilih Ulang Gubernur Jambi	Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang	Terlaksana aman terkendali
6	27 Mei 2021	Melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilih Ulang Gubernur Jambi	Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang	Terlaksana aman terkendali
7	27 Mei 2021	Melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilih Ulang Gubernur Jambi	Desa Rantau Indah Kecamatan Dendang	Terlaksana aman terkendali
8	10 Juni 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Beserta Rombongan dalam rangka Kunjungan Wisata	Kec. Kuala Jambi	Terlaksana aman terkendali
9	30 Juni 2021	Melaksanakan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke SMA N 1 Tanjung Jabung Timur	Kec. Rantau Rasau.	Terlaksana aman terkendali
10	12 Juli 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Kegiatan Pembinaan Stunting dan PAU TP-PKK Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	Desa Lagan Ulu Kec. Geragai	Terlaksana aman terkendali
11	13 Juli 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Kegiatan Pembinaan Stunting dan PAUD TP-PKK Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	Desa Lagan Tengah Kec. Geragai	Terlaksana aman terkendali
12	15 Juli 2021	Melaksanakan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke SMA N 1 Tanjung Jabung Timur	Kec. Rantau Rasau	Terlaksana aman terkendali
13	16 Juli 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Jambi beserta rombongan ke Kab. Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan pertemuan dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat	Kec. Mendahara Ulu	Terlaksana aman terkendali
14	29 Juli 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara kegiatan Pembinaan Stunting dan	Desa Teluk Kijing. Kec. Nipah Panjang.	Terlaksana aman terkendali

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	ACARA	TEMPAT	KETERANGAN
		PAUD TP PKK Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021		
15	10 Agustus 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka SWAB di Gedung Bersama Kab. Tanjung Jabung Timur	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
16	25 Agustus 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka Vaksin di Gedung Bersama Kab. Tanjung Jabung Timur	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
17	06 September 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati dalam rangka Jambore PKK di Gedung PKK Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur.	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
18	14 September 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka Latihan Sirkuit Zabak di Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur.	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
19	16 September 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati dan Ibu Gubernur beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur.	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
20	17 September 2021	Melaksanakan Pengamanan Vaksinasi Massal di Polres Tanjung Jabung Timur.	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
21	29 September 2021	Melaksanakan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka Bimbingan Teknis PKK	Gedung PKK Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
22	06 Oktober 2021	Melaksanakan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Lomba Hadroh dan Shalawat Lagu Religi	Gedung PKK Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
23	13 Oktober 2021	Melaksanakan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka acara Merias Wajah dengan Baju Kurung Batik	Gedung PKK Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
24	21 Oktober 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka acara HUT Kab. Tanjung Jabung Timur yang ke-22 Tahun 2021	Gedung DPR Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
25	23 Oktober 2021	Melaksanakan Pengamanan Lomba Mancing dan Kicau Burung dalam rangka Rangkaian acara HUT Kab. Tanjung Jabung Timur yang ke-22 Tahun 2021.	Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
26	27 Oktober 2021	Melaksanakan Pengamanan Aksi Demo Masyarakat terhadap PT. Kaswari dalam rangka Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Lapangan Kantor Bupati Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	ACARA	TEMPAT	KETERANGAN
27	31 Oktober 2021	Melaksanakan Pengamanan dalam rangka acara Kajian Terbuka untuk muslim Tanjung Jabung Timur Masjid Agung Nur Ad-Darajat Kec. Muara Sabak Barat.	Masjid Agung Nur Ad-Darajat Kec. Muara Sabak Barat.	Terlaksana aman terkendali
28	01 November 2021	Melaksanakan Aksi Demo Masyarakat terhadap PT. Kaswari dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lapangan Kantor Bupati Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
29	15 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Demo Karyawan PT. Sawit Segam yang di PHK,.	Lapangan Kantor Bupati Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
30	17 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur dalam rangka acara Lomba Pemakaian Tengkuluk HUT DWP ke-22 Tahun 2021	Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
31	21 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Dalam Rangka Latihan Zabaq Nasional Sirkuit Balap Motor.	Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
32	22 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Dalam Rangka Latihan Zabaq Nasional Sirkuit Balap Motor Tanjung Jabung Timur.	Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
33	29 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Aksi Demo Masyarakat terhadap PT. Metro Yakin Jaya (MYK) dalam rangka Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lapangan Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur Kec. Muara Sabak Barat.	Terlaksana aman terkendali
34	30 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Dalam Rangka Latihan Zabaq Nasional Sirkuit Balap Motor Tanjung Jabung Timur.	Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
35	30 November 2021	Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur dalam rangka Supervisi dan Evaluasi TP.PKK Provinsi Jambi.	Gedung PKK Tanjung Jabung Timur Kec. Muara Sabak Barat	Terlaksana aman terkendali
36	01 Desember 2021	Melaksanakan Pengamanan Dalam Rangka Latihan Zabaq Nasional Sirkuit Balap Motor Tanjung Jabung Timur..	Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak	Terlaksana aman terkendali
37	02 Desember 2021	Melaksanakan Pengamanan Dalam Rangka Latihan Zabaq Nasional Sirkuit Balap Motor Tanjung Jabung Timur..	Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak	Terlaksana aman terkendali

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.38.

## Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Bangunan Rumah Penduduk dan Lahan Tahun 2021

NO	KEJADIAN KEBAKARAN	TANGGAL	TEMPAT	PENYEBAB	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KORBAN	KET
1.	kebakaran Tempat Pengopenan KOPRA	5 februari 2021	Jalan ASPOL Kel. Parit Culum 2	Tabung Gas	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kabupaten	NIHIL	Mobil damkar, personil 7 Orang
2.	Kebakaran Rumah An. Endang	3 Maret 2021	Rt 01 Jangga Desa Rantau Karya Kec. Geragai	Korsleting Listrik	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	Mobil damkar, personil 6 Orang
3.	Kebaran SD 16 Nipah Panjang	18 April 2021	Lokasi SD N 16 Rt 02 Rw 02, Kel. Nipah Panjang	Korsleting Listrik	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar yang ada di Kecamatan Nipah panjang dan di bantu oleh TNI, POLRI dan masyarakat setempat	NIHIL	1 Kendara an Roda 3, mesin floating pump, personil 14 Orang
4.	Kebakaran Rumah An. Pak Maman dan Pak Ramli	5 juni 2021	Rt.01 RW.02 Desa Bandar Jaya Puding Kec. Rantau Rasau	Korsleting Listrik	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar yang ada di Kecamatan Rantau Rasau dan masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 4 Orang
5.	Kebakaran 5 rumah dan, 5 di robohkan, dan 3 bangunan walet	7 juni 2021	Sungai Jabat, Kec. Sadu	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar yang ada di Kecamatan Sadu dan masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 4 Orang
6.	Kebakaran Rumah	8 juni 2021	Pasar Mendahara Tengah, Dusun Makmur dan Arifin	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kabupaten dan yang ada di	NIHIL	mesin floating pump, personil 15 Orang

NO	KEJADIAN KEBAKARAN	TANGGAL	TEMPAT	PENYEBAB	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KORBAN	KET
			Kec. Mendahara		Kecamatan Nipah panjang, di bantu oleh TNI, POLRI dan masyarakat setempat		
7.	Kebakaran Rumah	10 juni 2021	Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 4 Orang
8.	Kebakaran Rumah	31 juli 2021	Desa Rantau Jaya ,Sk 25, Kec. Rantau Rasau	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 3 Orang
9.	Kebakaran Rumah	15 Agustus 2021	Parit Sitong. Desa Bhakti Idaman. Kec, Mendahara	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 4 Orang
10.	Kebakaran Rumah	17 September 2021	Simpang Tuan, Rt.10, Rw.03 Kec. Mendahara	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 3 Orang
11.	Kebakaran Rumah	30 September 2021	Jalan Lintas Muara Sabak, Rt.03 Desa Pematang Rahim, Kec Mendahara Ulu	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 4 Orang
12.	Kebakaran Rumah	02 Oktober 2021	Rt. 15, Dusun 3 Parit Siau Dalam, Kec. Muara	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di	NIHIL	mesin floating pump,p ersonil 5 Orang

NO	KEJADIAN KEBAKARAN	TANGGAL	TEMPAT	PENYEBAB	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KORBAN	KET
			Sabak Timur		bantu masyarakat setempat		
13.	Kebakaran Rumah	21 Oktober 2021	Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang	Belum di ketahui	Dilakukan Pemadam Kebakaran oleh Personil Damkar Kecamatan dan di bantu masyarakat setempat	NIHIL	mesin floating pump, personil 5 Orang

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.6.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.39.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Sumber daya Manusia yang berlatar belakang ilmu hukum	Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dalam upaya penegakan Perda
2	Masih ada jabatan yang belum terisi pada Satpol PP dan Damkar	Mengalihkan tugas kepada ASN yang dianggap mampu dalam pelaksanaan tugas harian jabatan yang dimaksud secara tentative dan insidentil
3	Pelaksanaan kegiatan lapangan yang dibatasi oleh regulasi	Memanfaatkan sumber daya yang ada sebatas kewenangannya dan meminta bantuan kepada aparatur yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan tugas baik dari dalam instansi maupun diluar instansi
4	Sarana dan Prasarana yang relative minim dalam pelaksanaan tugas	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan meminta bantuan peminjaman peralatan pada instansi lain untuk pelaksanaan tugas

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.6.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3. 40.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD  
terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Memenuhi sarana dan prasarana guna penertiban dan penegakan Peraturan Daerah tentang hewan ternak	Berkoordinasi dengan instansi (Dinas Perkebunan dan Peternakan) terkait perihal pemenuhan sarana prasarana dalam penertiban, penegakan Perda tentang Hewan Ternak.	Hewan ternak yang ditertibkan ditampung di penampungan milik Dinas perkebunan dan Peternakan.
2	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam penyusunan LKPJ	Membuat laporan Laporan LKPJ yang sesuai dan mempedomani Peraturan Pemerintah yang dimaksud
3	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang relevan	Melakukan koordinasi dan asistensi kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan berdasarkan target yang telah ditetapkan	Membuat rencana kerja dan anggaran yang berkesesuaian dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
4	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam	Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait dan mitra kerja di DPRD	Akan terus melakukan koordinasi, konsultasi dan berkerja sama dalam upaya pencapaian kegiatan yang berazas manfaat dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT		
5	Melakukan penindakan dan penyegelan terhadap Loading Ramp (Tempat Pembelian Sawit) yang tidak memiliki izin di kelurahan Nibung Putih dan Desa Lambur 2 serta tidak tebang pilih dalam melaksanakan penindakan terhadap Loading Ramp yang tidak memiliki izin.	<p>1. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Desa Lambur 2.</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Nibung Putih.</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Simpang Tuan.</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Parit Culum II.</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Nibung Putih.</p> <p>6. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Sungai Toman.</p> <p>7. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Sungai Tering.</p> <p>8. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Lambur I.</p> <p>9. Melaksanakan kegiatan Penertiban Loading Ramp di Catur Rahayu.</p>	<p>1. Menutup Loading Ramp dengan nama usaha Bos Muda Sawit (BMS) sampai semua izin terpenuhi.</p> <p>2. Menutup Usaha Loading Ramp tersebut atas Nama Ucok dan diarahkan untuk mengurus perizinannya.</p> <p>3. Menutup Usaha Loading Ramp tersebut atas Nama Pengurus Aan, diarahkan agar mengurus perizinannya.</p> <p>4. Menutup Usaha Loading Ramp atas Nama Usaha CV. Tunas Makmur Sejahtera dengan Nama Pemilik Husin/Apek, diarahkan untuk mengurus perizinannya.</p> <p>5. Menutup Usaha Loading Ramp atas Nama Akiang, hingga memiliki perizinan usahanya.</p> <p>6. Menutup Usaha Loading Ramp atas Nama Tompson Harahap, diarahkan mengurus perizinannya untuk beroperasi.</p> <p>7. Menutup Usaha Loading Ramp atas Nama Muhammad Yunus, diarahkan mengurus perizinannya untuk beroperasi.</p> <p>8. Memeriksa Usaha Loading Ramp atas Nama Muhammad Efendi, diminta untuk tidak beroperasi sebelum perizinannya terbit.</p> <p>9. Memeriksa Usaha Loading Ramp atas Nama Doni, Beroperasi dan memiliki izin.</p>

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### **3.7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan hubungan antar organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga swadaya masyarakat;
4. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan demokrasi dan hubungan antar partai politik;
5. Penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik serta kerukunan umat beragama dan masyarakat
6. Penyelenggaraan penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.7.1. Capaian Pelaksanaan Program**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menyelenggarakan unsur Pemerintahan Umum, pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, 24 (Dua Empat) Sub Kegiatan secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.41.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.945.243.743,00</b>	<b>2.573.980.017,00</b>	<b>371.303.726,00</b>	<b>87,39</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>64.614.000,00</b>	<b>64.493.400,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>97,39</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	34.138.000,00	34.117.700,00	20.300,00	99,94
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	30.476.000,00	30.375.700,00	100.300,00	99,67
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>2.462.497.905,00</b>	<b>2.103.252.549,00</b>	<b>359.245.356,00</b>	<b>85,41</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.983.669.505,00	1.635.374.349,00	348.295.156,00	82,44
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	478.828.400,00	467.787.200,00	10.950.200,00	97,71
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16.800.000,00	16.800.000,00	0	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>178.883.437,00</b>	<b>178.764.070,00</b>	<b>69.367,00</b>	<b>99,98</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.644.500,00	4.643.600,00	900,00	99,98
1.4.2	Sub Kegiatan Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	81.063.985,00	81.062.520,00	1.465,00	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.847.952,00	18.812.950,00	35.002,00	99,81
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100
1.4.4	Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100
1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.227.000,00	60.245.000,00	32.000,00	99,95
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>35.548.401,00</b>	<b>35.540.878,00</b>	<b>7.523,00</b>	<b>99,98</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	35.548.401,00	35.540.878,00	7.523,00	99,98
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>39.316.220,00</b>	<b>11.683.780,00</b>	<b>77,09</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.000.000,00	39.316.220,00	11.683.780,00	77,09

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>135,950.000,00</b>	<b>135.712.900,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>99,83</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100.500.000,00	100.482.800,00	17.200,00	99,98
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	18.500.000,00	18.280.100,00	219.900,00	98,81
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.950.000,00	6.950.000,00	0	100
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>23.660.000,00</b>	<b>23.655.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>23.660.000,00</b>	<b>23.655.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	23.660.000,00	23.655.000,00	0	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>855.174.760,00</b>	<b>855.028.100,00</b>	<b>146.660,00</b>	<b>99,98</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</b>	<b>855.174.760,00</b>	<b>855.028.100,00</b>	<b>146.660,00</b>	<b>99,98</b>
3.1.1	Sub pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	801.475.200,00	801.475.200,00	0	100
3.1.2	Sub Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai	53.699.560,00	53.52.900,00	146.660,00	99,73

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah				
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>32.094.000,00</b>	<b>32.045.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>99,88</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>32.094.000,00</b>	<b>32.045.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>99,88</b>
4.1.1	Sub Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran ORMAS, Pemberdayaan ORMAS, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa ORMAS, Pengawasan ORMAS Dan ORMAS Asing Di Daerah	32.094.000,00	32.045.000,00	40.000,00	99,88
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>57.681.400,00</b>	<b>57.672.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>99,98</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>57.681.400,00</b>	<b>57.672.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>99,98</b>
5.1.1	Sub Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah	57.681.400,00	57.672.100,00	9.300,00	99,98
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>723.726.654,00</b>	<b>720.860.543,00</b>	<b>2.866.111,00</b>	<b>99,60</b>
<b>6.1</b>	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>	<b>723.726.654,00</b>	<b>720.860.543,00</b>	<b>2.866.111,00</b>	<b>99,60</b>
6.1.1	Sub pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	93.933.044,00	93.681.800,00	251.244,00	99,73
6.1.2	Sub pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	629.793.610,00	627.178.743,00	2.614.867,00	99,59
<b>Jumlah</b>		<b>4.637.580.557,00</b>	<b>4.263.149.760,00</b>	<b>374.430.797,00</b>	<b>91,93</b>

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program adalah (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi untuk mencapai indikator program tersebut melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 1.1 Sub penyusunan dokumen perangkat daerah  
indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perencanaan
  - 1.2 Sub koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
indikator sub kegiatan (output ) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan
  - 1.3. Sub Evaluasi kinerja perangkat daerah  
Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub penyediaan gaji dan tunjangan ASN  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Sub pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
  - 4.1 Sub komponen penyediaan alat instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan
  - 4.2 Sub penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor

- 4.3 Sub penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan
- 4.4 Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar
- 4.5 Sub fasilitasi kunjungan tamu indikator sub kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu
- 4.6 Sub penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD
- 5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
  - 5.1 Sub pengadaan peralatan mesin dan lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin
- 6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1 Sub penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 7.1 Sub penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
  - 7.2 Sub penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
  - 7.3 Sub Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin
  - 7.4 Sub Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara

ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Indikator Program Adalah (Outcome) Adalah Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasilan dan karakter kebangsaan

1.1 Sub pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah Peserta Rapat/Sosialisasi Wasbang yang dilaksanakan

iii. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator Program Adalah (Outcome) Adalah Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu

1. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, sertapemantauansituasipolitik

1.1 Sub pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Parpol

1.2 Sub Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Rapat/Sosialisasi Parpol

iv. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Indikator Program Adalah (Outcome) Adalah Persentase Ormas Yang Aktif

1. Kegiatan perumusan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Ormas Aktif

- 1.1 Sub pelaksanaan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Rapat/Sosialisasi Ormas

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya  
Indikator Program Adalah (Outcome) Adalah Persentase penurunan perkembangan penyakit masyarakat

1. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat yang ditangani

- 1.1 Sub pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kerukunan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama pengayat kepercayaan di daerah

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Peserta Rapat/sosialisasi

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Budaya

Indikator Program (Outcome) Adalah Persentase Konflik Yang Difasilitasi

1. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pematapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Konflik yang difasilitasi

- 1.1 Sub pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Rapat/Sosialisasi Penanganan Konflik, FKDM dan Pemantauan Orang Asing

- 1.2 Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten / kota

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimda

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42.  
Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>74,60</b>	<b>95,64</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5 dok	100
1.1.2	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi	5 dok	5 dok	100
1.2	<b>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi keuangan PD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Sub Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	40 stel	42 stel	100
1.4	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	6 Jenis	6 Jenis	100
1.4.2	Sub Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100
1.4.3	Sub Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	12 jenis	12 jenis	100
1.4.4	Sub Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100
1.4.5	Sub Fasilitas kunjungan tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 bulan	12 bulan	100
1.4.6	Sub Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan dan minum rapat SKPD	12 bulan	12 bulan	100
1.5	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	14 unit	14 unit	100
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa sumberdaya air, listrik	12 bulan	12 bulan	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	6 unit	6 unit	100
1.7.2	Sub Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang di pelihara	11 unit	11 unit	100
1.7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang pelihara	12 unit	12 unit	100
1.7.4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang di pelihara	1 gedung	1 gedung	100
2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILAN DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>Persentase Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	jumlah Peserta Rapat/Sosialisasi Wasbang yang dilaksanakan	50 orang	50 orang	100
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH MASYARAKAT YANG IKUT PEMILU</b>	<b>80,25</b>	<b>80,25</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</b>	<b>Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah penerima bantuan keuangan parpol	7 parpol	7 parpol	100
3.1.2	Sub Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan	Jumlah Peserta rapat/sosialisasi parpol	100 orang	100 orang	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
	umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah				
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>PERENTASE ORMAS YANG AKTIF</b>	<b>44,3</b>	<b>46,9</b>	<b>105,87%</b>
4.1	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Ormas Aktif</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>82,14</b>
4.1.1	Sub Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran ORMAS, Pemberdayaan ORMAS, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa ORMAS, Pengawasan ORMAS Dan ORMAS Asing Di Daerah	Jumlah Peserta Rapat/sosialisasi	50 Orang	50 orang	100
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT</b>	<b>58,5</b>	<b>61,54</b>	<b>105,2</b>
5.1	<b>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat yang ditangani</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100</b>
5.1.1	Sub Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Peserta Rapat/sosialisasi	100 orang	100 orang	100
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>PERSENTASE KONFLIK YANG DI FASILITASI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1	<b>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>	<b>Jumlah Konflik yang difasilitasi</b>	<b>8 kali</b>	<b>8 kali</b>	<b>100</b>
6.1.1	Sub pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah rapat/sosialisasi penanganan konflik, FKDM dan pemantauan orang asing	2 kali	2 kali	99,73
6.1.2	Sub pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi Forkopimda	6 kali	6 kali	99,58
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101,12</b>

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.7.2. Permasalahan dan Penanganan Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 43.  
Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Penanganan Masalah
1	Kurangnya Personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya	Mengajukan permintaan penambahan personil Aparatur Pegawai kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama struktural eselon IV/a yaitu 1 Kasubbid dan 2 Kasubbid
2	Kondisi ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpecah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubunginya	Menata dan Menginventarisir kontinyu keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan organisasi lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah
3	Masih terdapat rumah ibadah yang belum memiliki izin pendirian dan minimnya informasi dan laporan perkembangan kegiatan jemaah sehingga menyebabkan sulitnya pemantauan kegiatan umat beragama	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat Bersama Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadah

No	Permasalahan	Penanganan Masalah
4	Masih belum selesainya kesepakatan tapal batas antar wilayah, hak guna lahan antara warga dan perusahaan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian tapal batas antar wilayah dan hak guna lahan antar warga dan perusahaan.
5	Kendala akibat adanya Pandemi Covid 19 mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan dinas terkait penanganan pandemi Covid 19

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.7.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.44.

Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No.	Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati tahun 2020	Tindak lanjut yang di laksanakan	Tujuan/Masalah yang di selesaikan
1.	Berkoordinasi dengan Pihak BKPSDMD dalam pemenuhan kebutuhan pejabat dan staf di Badan Kesbangpol.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan pihak BKPSDMD untuk meminta penambahan staff</li> <li>Berkoordinasi meminta pengisian format jabatan struktural yang belum terisi beberapa tahun terakhir</li> </ol>	Untuk menambah efektivitas kinerja badan kesatuan bangsa dan politik tanjung jabung timur

No.	Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati tahun 2020	Tindak lanjut yang di laksanakan	Tujuan/Masalah yang di selesaikan
2.	Terus melakukan pendataan dan menertibkan dengan pihak terkait terhadap Ormas-ormas diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum memiliki legalitas/badan hukum yang sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring terhadap ormas yang berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> <li>2. Berkoordinasi dengan ormas-ormas yang aktif</li> <li>3. Melakukan pendataan ormas yang aktif dan terdaftar</li> <li>4. Melakukan pemantauan terhadap ormas yang berpotensi radikal dengan pihak kepolisian</li> </ol>	Mengevaluasi Perkembangan Ormas di kab. Tanjung Jabung Timur guna Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3.	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Kami sudah telah melaksanakan atau sudah membuat laporan LKPJ berdasarkan pedoman sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak BAPPEDA agar laporan LKPJ yang kami laporan sesuai dengan aturan yang ada	Memaparkan LKPJ dengan lebih Akurat dan Efisien
4.	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	1. Beberapa program yang sempat tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena refocusing anggaran telah kami laksanakan pada tahun 2021 namun tidak semua program dapat kami laksanakan	Meminimalisir Program yang Sempat tidak dapat di laksanakan pada tahun 2020 guna Tercapainya Target program yang maksimal

No.	Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati tahun 2020	Tindak lanjut yang di laksanakan	Tujuan/Masalah yang di selesaikan
		karena keterbatasan anggaran yang kami miliki pada tahun 2021	
5.	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	1. Membuat schedule untuk melakukan koordinasi dengan BAPPEDA yang berkaitan dengan perencanaan, DPRD berkaitan dengan penganggaran dan pengawasan, dan badan keuangan daerah tanjung jabung timur berkaitan dengan fungsi pengawasan	Melakukan koordinasi agar tercapai sinkronisasi yang sesuai terkait perencanaan dan keuangan

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial;
4. Penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengembangan ketransmigrasian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Bupati.

### 3.8.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintah Pilihan dengan Bidang Urusan Transmigrasi. Pada Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tabel berikut :

Tabel 3.45.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>4.322.395.358,00</b>	<b>4.150.222.273,00</b>	<b>172.173.085,00</b>	<b>99,93%</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>159.191.000,00</b>	<b>159.077.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>99,93%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.696.000,00	27.686.000,00	10.000,00	99,96%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.160.000,00	65.056.000,00	104.000,00	99,84%
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.335.000,00	66.335.000,00	-	100,00%
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.321.065.261,03</b>	<b>3.152.448.713,00</b>	<b>168.616.548,03</b>	<b>94,92%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.440.512.861,03	2.287.396.313,00	153.116.548,03	93,73%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	880.552.400,00	865.052.400,00	15.500.000,00	98,24%
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100%
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>375.041.097,00</b>	<b>374.775.523,00</b>	<b>265.574,00</b>	<b>99,93%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00%

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.530.117,00	82.528.220,00	1.897,00	99,77%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.845.400,00	23.845.400,00	-	100,00%
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.215.000,00	25.215.000,00	-	100,00%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.264.580,00	29.264.580,00	-	100,00%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000,00	6.461.495,00	38.505,00	99,41%
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.450.000,00	81.408.000,00	42.000,00	99,95%
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.136.000,00	114.952.828,00	183.172,00	99,84%
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99,00%</b>
1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	99,00%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.400.000,00</b>	<b>77.022.440,00</b>	<b>377.560,00</b>	<b>99,51%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.400.000,00	71.022.440,00	377.560,00	99,47%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>289.698.000,00</b>	<b>287.398.597,00</b>	<b>2.299.403,00</b>	<b>99,21%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.698.000,00	178.605.497,00	2.092.503,00	98,84%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.000.000,00	108.793.100,00	206.900,00	99,81%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>102.359.600,00</b>	<b>102.302.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit atau Lapangan</b>	<b>84.779.600,00</b>	<b>84.734.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>99,95%</b>
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	84.779.600,00	84.734.000,00	45.600,00	99,95%
<b>2.2</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.580.000,00</b>	<b>17.568.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>99,93%</b>
2.2.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	17.580.000,00	17.568.000,00	12.000,00	99,93%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN KERJA</b>	<b>48.015.000,00</b>	<b>47.911.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>48.015.000,00</b>	<b>47.911.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>99,78%</b>
3.1.1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.911.500,00	47.911.500,00	-	99,78%
<b>4</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>86.717.700,00</b>	<b>85.171.800,00</b>	<b>1.545.900,00</b>	<b>98,22%</b>
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.517.700,00	21.991.700,00	526.000,00	97,66%

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
4.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	22.517.700,00	21.991.700,00	526.000,00	97,66%
4.2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>64.200.000,00</b>	<b>63.180.100,00</b>	<b>1.019.900,00</b>	<b>98,41%</b>
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.065.000,00	35.661.500,00	403.500,00	98,88%
4.2.2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	28.135.000,00	27.518.600,00	616.400,00	97,81%
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>421.147.000,00</b>	<b>380.496.000,00</b>	<b>40.651.000,00</b>	<b>90,35%</b>
5.1	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>421.147.000,00</b>	<b>380.496.000,00</b>	<b>40.651.000,00</b>	<b>90,35%</b>
5.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	26.087.000,00	25.912.000,00	175.000,00	99,33%
5.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	395.060.000,00	354.584.000,00	40.476.000,00	89,75%
<b>Jumlah</b>		<b>4.980.634.658,03</b>	<b>4.766.103.573,00</b>	<b>214.531.085,03</b>	<b>95,69%</b>

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA

Indikator program (output) adalah Indeks Pelayanan Instansi, untuk mencapai indikator program tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan.
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja.
  - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan.
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah,

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan

3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan.

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator Sub Kegiatan(Output) adalah Pengadaan Peralatan dan Kebersihan dan ATK.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga.

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pameran yang dilaksanakan.

4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan.

4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.

4.7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu

4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi dalam dan luar daerah.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan dan Peralatan mesin lainnya.
- 6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.
  - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara.
  - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.

## **B. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.**

Indikator program (output) adalah Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan, untuk mencapai indikator program tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - 1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi .

- 2) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Indikator Kegiatan (Output) adalah persentase Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja
  - 2.1 Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan produktivitas

#### **C. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

Indikator program (output) adalah Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan, untuk mencapai indikator program tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pengelolaan informasi pasar kerja
  - 1.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kartu pencari kerja yang diterbitkan.

#### **D. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Indikator program (output) adalah Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), untuk mencapai indikator program tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

- 2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial
- 2.2 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah perusahaan yang dibina

#### E. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Indikator program (output) adalah Persentase Eks Transmigrasi yang Dikembangkan yang Dibina/dilatih, untuk mencapai indikator program tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian,  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
- 1.1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sosialisasi.
- 1.2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Lahan KTM/KPB Geragai yang dibina.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46.  
Pencapaian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	78%	79,88	102,41
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Orang	10 Orang	100%
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	6 Jenis	6 Jenis	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan ATK	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	15 Buah	15 Buah	100%
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	100%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100%
1.4.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan/Minum Tamu	12 bulan	12 bulan	100%
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Peralatan mesin lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 lembar	600 Lembar	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN</b>	<b>69,94%</b>	<b>72,79%</b>	<b>104,52%</b>
<b>2.1</b>	<b>Proses Pelaksanaan Pendidikan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>137,5%</b>	<b>137,5%</b>
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	160 Orang	220 Orang	<b>137,5%</b>
<b>2.2</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
2.2.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan produktivitas	50 orang	20 orang	40%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>BESARAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</b>	<b>40%</b>	<b>45,18%</b>	<b>112,95%</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase pengelolaan informasi pasar kerja</b>	<b>100%</b>	<b>237%</b>	<b>237%</b>
3.1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kartu Pencari Kerja yang diterbitkan	300 AK	711 AK	237%
<b>4</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA(PB)</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>142,85%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100%
4.2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial	5 Kasus	3 Kasus	60%
4.2.2	Penyelenggaraan Verikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang dibina	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>PERSENTASE EKS TRANSMIGRASI YANG DIBINA/DILATIH</b>	<b>70%</b>	<b>42%</b>	<b>60%</b>
5.1	<b>Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>Persentase Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1.1	Penguatan SDM dalam Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Sosialisasi	1 Kali	1 kali	100%
5.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Luas Lahan KTM/KPB Geragai yang dibina	50 Ha	50 Ha	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>104,55</b>

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2021, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47.  
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-58 th) Tahun 2021	164.764
2	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2021	117.349
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021	1,56 %

Sumber :LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.8.2.PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.48.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya sarana dan prasarana pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Tanjung Jabung Timur seperti Peralatan, Tempat ibadah, Gedung Workshop Pelatihan, parkir kendaraan dan kendaraan dinas.	Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelatihan di BLK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.	Masih kurangnya instruktur pelatihan ASN	Penambahan instruktur untuk mengisi jabatan instruktur
3.	Jaringan internet sering mengalami gangguan sehingga menghambat pelayanan pencaker dan pelaporan pencaker secara online	Pemeliharaan jaringan internet.
4.	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pencaker online	Penambahan sarana dan prasarana pelayanan pembuatan kartu pencari kerja.
5.	Kurangnya identifikasi dan inventarisir kebutuhan-kebutuhan yang menunjang program kegiatan pelatihan.	Melakukan identifikasi dan inventarisir jumlah kebutuhan alat dan bahan pelatihan serta sarana kegiatan pelatihan.
6.	Kurangnya informasi dan koordinasi dari pusat dan provinsi terkait kegiatan dan aturan baru tentang ketenagakerjaan.	Adanya kunjungan atau konsultasi pihak pusat dan provinsi terkait ketenagakerjaan.

No	Permasalahan	Solusi
7.	Kurangnya pembinaan di perusahaan terkait pandemic Covid 19.	Tetap melaksanakan pembinaan ke perusahaan dengan mematuhi protocol Kesehatan Covid 19.
8.	Kurangnya perangkat elektronik untuk mengolah data dan informasi.	Penambahan perangkat elektronik untuk mengolah data.
9.	Masih tingginya penyebaran virus covid menyebabkan keterbatasan interaksi dan koordinasi, komunikasi langsung OPD dan pihak terkait dalam permasalahan di bidang Transmigrasi.	Menggunakan media online dalam berinteraksi, koordinasi dan komunikasi.
10.	Beberapa kegiatan tertunda akibat penyerapan anggaran yang terfokus dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Memaksimalkan kegiatan dengan memanfaatkan ketersediaan dana yang ada di Bidang Transmigrasi.
11.	Beberapa usulan-usulan proposal untuk pendanaan kegiatan baik ke Pemerintah pusat dan pihak swasta yang masih tertunda dan belum teralisasi.	Mengusulkan Kembali proposal kegiatan ditahun berikutnya.
12.	Penyelesaian dalam penerbitan sertifikat di Kawasan eks Transmigrasi di desa pandan sejahtera Sebagian belum bisa untuk diterbitkan karena proses administrasi di Sebagian lokasi yang belum clear dan clean.	Difasilitasi proses administrasi bersama BPN di tahun 2022
13.	Pengamanan asset-aset di kawasan kebun buah yang masih mendapatkan gangguan dari luar.	Akan lebih ditingkatkan penjagaan dan pengamanan dalam penjagaan.

Sumber :LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.8.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.49.  
Tindak lanjut catatan dan Rekomendasi DPR terhadap LKPJ 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Memberikan pelatihan agar lebih tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.	Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja (BLK) adalah Pelatihan yang dilaksanakan dan jenis pelatihannya telah mengacu kepada pedoman dan skema yang telah diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang pelaksanaannya di biayai oleh APBN.	Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari Kenetrian Ketenagakerjaan RI.
2.	Mengusulkan menggunakan anggaran Kementerian dalam pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja	Hasil Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI bahwa untuk pembuatan bangunan dan gedung pembiayaannya diharapkan dari Dana APBD dan untuk peralatan pelatihan bisa diusulkan melalui Kementerian. Adanya Bangunan dan Gedung yang merupakan tempat peralatan pelatihan merupakan salah satu syarat wajib yang dimiliki oleh daerah untuk mengusulkan peralatan dan pelatihan.	Pembangunan Gedung BLK diharapkan dari dana APBD, Bantuan Peralatan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
3.	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.	Struktur Pelaporan LKPJ disampaikan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.	Pelaporan LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
4.	Terhadap program dan Kegiatan TA. 2020 yang tertunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang relevan.	Akan dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi.	Program/Kegiatan yang belum masuk dalam perencanaan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
5.	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait kegiatan ketenagakerjaan maupun untuk pengembangan kawasan transmigrasi khususnya Pengembangan KTM/KPB Geragai.	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kegiatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Sumber :LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.

### 3.9.1. Capaian Pelaksanaan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.50.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>4.268.299.568</b>	<b>4.013.131.786</b>	<b>255.167.782</b>	<b>94,02%</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.847.200</b>	<b>76.486.100</b>	<b>51.361.100</b>	<b>59,83%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.237.200	55.679.350	24.557.850	69,39%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.610.000	20.806.750	26.803.250	43,70%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.459.443.693</b>	<b>3.299.063.370</b>	<b>160.380.323</b>	<b>95,36%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.874.403.693	2.714.023.370	160.380.323	94,42%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	585.040.000	585.040.000	-	100%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>46.525.000</b>	<b>35.575.000</b>	<b>10.950.000</b>	<b>76,46%</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.025.000	35.575.000	450.000	98,75%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.600.000	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>112.628.306</b>	<b>111.033.793</b>	<b>1594.513</b>	<b>98,58%</b>
1.4.1	Penyedia Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	4.784.400	4.784.400	-	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.780.135	26.776.279	3.856	99,99%
1.4.3	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	14.227.771	14.227.771	607	100%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	3.500.000	-	100%
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.100.000	4.100.000	-	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.236.000	57.645.950	1.590.050	97,32%
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>111.427.049</b>	<b>102.965.000</b>	<b>8.462.049</b>	<b>92,41%</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.930.000	34.000.000	1.930.000	94,63%
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesinnya	75.497.049	68.965.000	6.532.049	91,35%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>59.260.000</b>	<b>45.721.673</b>	<b>13.538.327</b>	<b>77,15%</b>
1.6.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	2.860.000	2.860.000	-	100%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	56.400.000	43.861.673	13.538.327	76,00%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>351.168.320</b>	<b>342.286.850</b>	<b>8.881.470</b>	<b>97,47%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dias Atau Kendaraan Dias Jabatan	240.690.000	231.960.000	8.729.590	96,37%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.580.000	6.580.000	-	100%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.898.320	103.746.440	151.880	99,85%
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>3.027.860.665</b>	<b>1.775.797.343</b>	<b>1.252.063.322</b>	<b>56,65%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>34.565.389</b>	<b>24.863.650</b>	<b>9.701.739</b>	<b>71,93%</b>
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana/Kota (Perjenis Bencana)	34.565.389	24.863.650	9.701.739	71,93%
<b>2.2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>335.070.276</b>	<b>238.519.193</b>	<b>96.551.083</b>	<b>71,18%</b>
2.2.1	Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	176.689.660	140.161.000	36.528.660	71,18%
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	90.208.366	62.840.450	27.367.918	69,66%
2.2.3	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	27.390.000	9.401.950	17.988.050	34,33%
2.2.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	40.782.250	26.115.793	14.686.457	64,04%
<b>2.3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>2.570.918.000</b>	<b>1.434.818.250</b>	<b>1.136.099.750</b>	<b>55,81%</b>
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	685.768.000	642.580.4650	43.187.350	93,70%
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44.895.0	31.603.350	13.291.750	70,39%
2.3.3	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1.840.255.000	760.634.000	1.079.620	41,38%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>87.307.000</b>	<b>77.596.250</b>	<b>9.710.750</b>	<b>88,88%</b>
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	87.307.000	77.596.250	9.710.750	88,88%
<b>JUMLAH</b>		<b>7.296.160.233,00</b>	<b>5.788.929.129,00</b>	<b>1.507.231.104,00</b>	<b>79,34</b>

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan;
  - 1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian dinas Harian (PDH).
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.
- 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun).
- 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak.
- 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar.
- 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan biaya makan dan minuman Tamu.
- 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator  
Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3.
- 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan Mesin.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jumlah Materai
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator  
Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara.

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan Yang Terpelihara.

7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara.

## **B. Program Penanggulangan Bencana**

Indikator Program (Outcome) Penanggulangan Bencana adalah Respon Time Penanganan Tanggap Darurat Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Desa Tangguh Bencana yang mendapatkan sosialisasi,

1.1 Sub Kegiatan .Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah sosialisasi

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.

2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana.

2.2 Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Waktu Patroli Kesiapsiagaan Bencana, dan 2) Jumlah Sosialisasi Karhutla

2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Media Informasi.

2.4 Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3.1 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah hari tanggap darurat Karhutla, dan 2) Jumlah hari darurat bencana

### 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Waktu Operasional Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

### 3.3 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Waktu Pengadaan Alat penanganan Bencana Non Alam.

## 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase orang yang mengikuti asuransi.

### 1.1 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Orang yang mengikuti Asuransi.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.51.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>77,93</b>	<b>99,91</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>84,85</b>	<b>84,45</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	16 Dokumen	11 Dokumen	69,69%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
2.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
3.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Harian (PDH)	58 Stell	58 Stell	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 orang	-	0 %
<b>4.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Penyedia Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	100%
4.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
4.1.3	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	12 Jenis	12 Jenis	100%
4.1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>5.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>95,83%</b>	<b>95,83%</b>
5.1.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2/Roda 4/Roda 3	1 Unit	1 Unit	100 %
5.1.2	Pengadaan Peralatan dan Mesinnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	24 Unit	22 Unit	91,66%
<b>6.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	286 Lembar	286 Lembar	100%
6.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>7.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dias Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan Yang Terpelihara	11 Unit	11 unit	100%
7.1.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)	10 Unit	10 Unit	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1 Unit	1 Unit	100%
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>RESPON TIME PENANGANAN TANGGAP DARURAT</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Desa Tangguh Bencana yang mendapatkan sosialisasi</b>	<b>2 desa</b>	<b>2 desa</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah sosialisasi	2 kali	2 kali	100
<b>2.2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66</b>
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Patroli Kesiapsiagaan Bencana	30 hari	10 hari	33,33 %
		Jumlah Sosialisasi Karhutla	4 kali	4 kali	100 %
2.2.3	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Media Informasi	2 jenis	0 Jenis	0,00 %
2.2.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>2.3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hari tanggap darurat Karhutla	60 Hari	60 Hari	100 %
		Jumlah hari tanggap darurat Bencana	30 Hari	30 Hari	100
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Operasional Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1 Tahun	1 Tahun	100%
2.3.3	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Waktu Pengadaan Alat penanganan Bencana Non Alam	1 Tahun	1 Tahun	100%
<b>2.4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase orang yang mengikuti asuransi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Asuransi	27 orang	27 orang	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,95</b>

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.52.  
Kejadian Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	Kebakaran Pemukiman	1.	17 April 2019	Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur	1 kk/3 jiwa
		2.	23 April 2019	Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur	9 kk/39 jiwa
		3.	31 Juli 2019	Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak Barat	1 kk/4 jiwa
		4.	08 Februari 2019	Kelurahan Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi	3 kk/11 jiwa
		5.	28 Desember 2019	Kelurahan Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi	2 kk/6 jiwa
		6.	09 November 2019	Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai	1 kk/4 jiwa
		7.	16 Maret 2019	Kelurahan Mendahara Ilir, Kec. Mendahara	2 kk/4 jiwa
		8.	08 April 2019	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	3 kk/8 jiwa
		9.	09 Mei 2019	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	73 kk/214 jiwa
		10.	28 Juli 2019	Kelurahan Mendahara Tengah Kec. Mendahara	15 kk/56 jiwa
		11.	13 Oktober 2019	Kelurahan Mendahara Ilir Kec. Mendahara	2 kk/7 jiwa
		12.	01 April 2019	Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu	1 kk/4 jiwa
		13.	01 April 2019	Kelurahan Rantau Rasau II, Kec. Rantau Rasau	1 kk/5 jiwa
		14.	03 Oktober 2019	Kelurahan Bandar Jaya, Kec. Rantau Rasau	1 kk/5 jiwa
		15.	15 Maret 2019	Kelurahan Sungai Lokan, Kec. Sadu	2 kk/6 jiwa
		16.	03 November 2019	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	1 kk/3 jiwa
		17.	21 Oktober 2019	Desa Sungai Itik, Kec. Sadu	1 kk/1 jiwa
		18.	29 Oktober 2019	Kelurahan Sungai Cemara, Kec. Sadu	2 kk/5 jiwa
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.	20 Maret 2019	Desa Jati Mulyo, Kec. Dendang	0,04 ha
		2.	10 Juli 2019	Parit 2 Kiri, Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu	3 ha
		3.	13 Juli 2019	Dusun Kemang RT. 30 Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	¼ ha

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
		4.	18 Juli 2019	Kelurahan Muara Sbaka Ulu Kec. Muara Sabak Timur	0,2270 ha
		5.	18 Juli 2019	Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu	100 m <sup>2</sup>
		6.	20 Juli 2019	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	-
		7.	28 Juli 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	20,5 ha
		8.	29 Juli 2019	Kelurahan Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi	0,10 ha
		9.	30 Juli 2019	Desa Air Hitam Laut, Kec. Sadu	-
		10.	04 Agustus 2019	Desa Merbau, Kec. Mendahara Tengah	1.9473 Ha
		11.	06 Agustus 2019	Desa Suka Maju, Kec. Geragai	8,5 Ha
		12.	09 Agustus 2019	Desa Sungai Dusun, Kec. Rantau Rasau	-
		13.	10 Agustus 2019	Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0.6452 ha
		14.	13 Agustus 2019	Desa Sungai Dusun, Kec. Rantau Rasau	-
				Desa Air Hitam Laut, Kec. Sadu	243,577 ha
				Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu (Kiri)	87,435 ha
				Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu (Kanan)	256 ha
				Parit Baru Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	146,332 ha
				Desa Ramau Baku Tuo Kec. Sadu	556 ha
		15.	19 Agustus 2019	Kelurahan Simpang, Kec. Berbak	37,3 ha

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
		16.	21 Agustus 2019	Desa Jati Mulyo Kec. Dendang	221,8 ha
				Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	128,8 ha
		17.	24 Agustus 2019	Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu	-
				Desa Rano, Kec. Muara Sabak Barat	5 ha
		18.	08 s/d 13 September 2019	Kelurahan Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	124,13 ha
		19.	16 September 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	444,53 ha
				Desa Sungai Jeruk, Kec. Nipah Panjang	40 ha
		20.	18 September 2019	Desa Alang-Alang, Kec. Muara Sabak Timur	2 ha
		21.	18 s/d 20 September 2019	Desa Rantau Rasau, Kec. Berbak	262,52 ha
		22.		Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	14,7 ha
				Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	13,9 ha
		23.	19 s/d 24 September 2019	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	52,6 ha
				Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	212,93 ha
		24.	08 s/d 13 September 2019	Kelurahan Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	124,13 ha
		25.	16 September 2019	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	444,53 ha
		26.	16 September 2019	Desa Sungai Jeruk, Kec. Nipah Panjang	40 ha
		27.	18 September 2019	Desa Alang-Alang Kec. Muara Sabak Timur	2 ha

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
		28.	18 s/d 20 September 2019	Desa Rantau Rasau, Kec. Berbak	562,52 ha
				Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	14,7 ha
				Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak	13,9 ha
		29.	19 s/d 24 September 2019	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	52,6 ha
				Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	212,93 ha
3	Banjir	-	-	-	-
4	Abrasi	-	-	-	-
5	Putting Beliung	-	-	-	-

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2020			
		No	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	Kebakaran Pemukiman	1.	25 Februari 2020	Kelurahan Parit Culum Kec.Muara Sabak Barat	1 kk/5 jiwa
		2.	09 Juni 2020	Desa Teluk Kijing Kec. Nipah Panjang	2 kk/7 jiwa
		3.	25 Agustus 2020	Desa Pematang Rahim, Kec.Mendahara Ulu	12 kk/56 jiwa
		4.	28 Agustus 2020	Desa Sungai Beras Kec.Mendahara Ulu	1 kk/3 jiwa
		5.	13 November 2020	Kelurahan Parit Culum 1 Kec.Muara sabak Barat	1 kk
		6.	24 November 2020	Kelurahan Mendahara Ilir Kec.Mendahara	3 kk/15 jiwa
		7.	06 Desember 2020	Desa Pangkal Duri Kec.Mendahara	6 kk/28 jiwa
		8.	06 Desember 2020	Desa Tri Mulya kec. Rantau Rasau	1 kk/5 jiwa

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2019			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
		9.	30 Desember 2020	Kelurahan Muara Sabak Ulu Kec. Muara Sabak barat	11 kk
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.	18 Februari 2020	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,24 ha
		2.	01 Agustus 2020	Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat	0,21 Ha
		3.	24 Agustus 2020	Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	0,016 Ha
		4.	02 Maret 2020	Desa Rantau Karya Kec.Geragai	0,62 Ha
		5.	04 Maret 2020	Desa Sinar Wajo Kec.Mendahara Ulu	0,36 Ha
		6.	13 Maret 2020	Kel. Simpang Tuan Kec.Mendahara Ulu	5,22 Ha
		7.	08 Maret 2020	Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	1,00 Ha
		8.	15 Agustus 2020	Kelurahan Simpang Tuan Kec.Mendahara Ulu	0,50 Ha
		9.	07 Maret 2020	Desa Air Hitam Laut Kec,Sadu	90,22 Ha
		10.	15 Maret 2020	Desa Sungai Cemara Kec.Sadu	1,87 Ha
3	Banjir	1.	06 Januari 2020	Desa Koto Baru Kec.Geragai	12 kk
		2.	06 Desember 2020	Desa Telago Limo,Dsa Rantau Makmur, Desa Rawasari, Desa Sungai Rambut, Desa Rantau Rasau dan Kelurahan Simpang Berbak	167 Unit Rumah terendam
		3.	08 Desember 2020	Desa Telago Limo,Dsa Rantau Makmur, Desa Rawasari, Desa Sungai Rambut, Desa Rantau Rasau dan Kelurahan Simpang Berbak	370 unit Rumah Terendam
4	Abrasi	1.	06 Januari 2020	Desa Koto Baru Kec.Geragai	12 kk
5	Putting Beliang	1.	18 November 2020	Kel. Nipah Panjang	2 kk/5 jiwa

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2021			
		No	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	Kebakaran Pemukiman	1.	04 Juni 2021	Rt.01 Dusun 01 Kelurahan Bandar Jaya Kec.Rantau Rasau	2 kk/ 6 jiwa
		2.	06 Juni 2021	Diparit 3 Kanan Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	11kk/41 jiwa
		3.	08 Juni 2021	Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara	142kk/471 jiwa
		4.	10 Juni 2021	Desa Lambunan Pering Kec.Sadu	1kk/ jiwa
		5.	11 Juni 2021	Rt.04 Sungai Kapas Desa Labuhan Perig Kec.Sadu	2 kk/ 0 jiwa
		6.	29 Juni 2021	Rt.08 Dusun Pasir Putih Desa Mencolok Kec.Mendahara Ulu	1 kk/0 jiwa
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.	28 Februari 2021	Desa Alang –Alang Rt.02 Dusun Makmur Jaya Kec.Muara Sbak Timur	1,00 ha
		2.	10 Februari 2021	Kelurahan Kampung Singkep Kec.Muara Sabak Barat	1,00 ha
		3.	06 Maret 2021	Desa Sido Mukti SK.2 Kec.Dendang	1,00 ha
		4.	16 Februari 2021	Rt.02 Parit Gantung Dusun Indah 4 Desa Sungai Tawar Kec.Mendahara	1,00 ha
		5.	22 Februari 2021	Distrik II Desa Mencolok Kec.Mendahara Ulu	2,00 Ha <sup>2</sup>
		6.	17 Februari 2021	Pantai Galang Parit 11 Rt.12 Rw.09 Kel.Nipah Panjang 1 Kec.Nipah Panjang	2,00 ha
		7.	02 Maret 2021	Rt.25 Rw.09 Pulau Burung Kelurahan Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang	2,00 ha
		8.	16 Februari 2021	Parit 5 Sungai Jawi Desa Sungai Sayang Kec.Sadu	1,0 ha
		9.	19 Februari 2021	Rt.13 Parit Dusun IV Desa Air Hitam Laut Kec,Sadu	1,00 Ha
		10.	01 Maret 2021	Parit 7 Desa Sungai Sayang Kec.Sadu Parit Lapis Sungai Sayang Kec,Sadu	16,92 Ha
3	Banjir	1.	01 Januari 2021	Kec.Muara Sabak Timur Kec.Mendaharaala Kec.Kuala Jambi Kec.Nipah Panjang Kec,Sadu	1.
		2.	16 Januari 2021	Desa Simpang Datuk Kec,Nipah Panjang	2.
4	Abrasi	1.	06 Januari 2020	Desa Koto Baru Kec.Geragai	12 kk

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2021			
		No	Tanggal	Tempat	Keterangan
5	Putting Beliung	1.	28 Oktober 2021	Rt.10 RW.02 Tanjung Kunig.Kelurahan Simpanhg Kec.Berbak	
		2.	29 November 2021	Rt,04 Rw,09 ,desa Rantau Raja Kec. Berbak Kab.Tanjab Timur	3 KK/12 Jiwa
6	Rumah Disambar Petir	1.	12 Desember 2021	Rt.36 Dusun Garuda Desa Simbur Naik Kec.Muara Sabak Timur	1 KK / 3 Jiwa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 2. Status Bencana

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 semuanya berskala lokal seperti kebakaran (Rumah maupun Lahan) dan banjir.

## 3. Pembiayaan dan Anggaran

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2021, baik bencana kebakaran (Rumah maupun Lahan) dan banjir, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA OPD teknis terkait dan pos pembiayaan dana tidak terduga pada PPKD.

## 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Dari Letak kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka dilakukan langkah penyusunan program dan kegiatan mengarah kepada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat :

- 1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan;
- 2) Upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 3) Merubah pendekatan responsive menjadi pendekatan preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana.

Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bias diupayakan/direncanakan, tidak gobyakan setelah terjadi bencana baru bertindak, Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka peluang yang bias dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal sebagai berikut :

- 1) Program pencegahan dini bersifat lintas Perangkat Daerah dimana semua Perangkat Daerah diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- 3) Program rehabilitasi dan konstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksanaan yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

#### 5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan fungsi Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, dan
- f. Dinas Kesehatan
- g. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan-Peraturan Kepala BNPB (Perka Kepala BNPB) dalam penanggulangan bencana dan kemudian menjadi pegangan daerah dalam penanganan bencana di daerah nya.

### 3.9.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.53.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif	Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2	Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kebencanaan
3	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, Gudang	Mengajukan Peralatan serta gedung melalui dana APBD II, APBD I dan APBN
4	Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi Tanggap Darurat serta Pasca Bencana	Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) serta relawan penanggulangan bencana sehingga TRC dan relawan ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur
5	Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang belum tercipta secara baik.	Mengoptimalkan seluruh jajaran serta peralatan untuk penanganan bencana sehingga penanganan bencana bisa dioptimalkan
6	Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.	Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7	Belum terciptanya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi	Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk penetapan standar penilaian pasca bencana
8	Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana dan personil.	Mengajukan penambahan anggaran untuk penanggulangan bencana, karena dana dari APBD sangat kurang untuk penanggulangan bencana ini.

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.9.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.54.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penetapan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)	SK Bupati Nomor; 19 Tahun 2021	Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) di Tanjung Jabung Timur
2	Penetapan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta pencegahan Bencana Kabut Asap	SK Bupati Nomor; 180 Tahun 2021	Pengendalian bencana Karhutla dan Pencegahan Kabut asap
3	Penetapan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pencegahan Bencana Kabut Asap	SK Bupati Nomor; 181 Tahun 2021	Penetapan Pos Komando, Pos Lapangan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta personil penanganan Kebakaran hutan dan lahan serta pencegahan Bencana Kabut Asap
4	Penetapan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Pemukiman Penduduk di Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara	SK Bupati Nomor; 375 Tahun 2021	Penanganan Darurat serta pemberian bantuan untuk korban Kebakaran Pemukiman di Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara
5	Penetapan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan	SK Bupati Nomor; 526 Tahun 2021	Tim Pengendali dan Pemantau dalam Percepatan penanganan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Anggaran Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)		Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.9.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.55.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Pusat perihal bantuan peralatan terutama bantuan peralatan terhadap pencegahan Karhutla maupun bantuan lain untuk Bencana.	Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait usulan peralatan karhutla dengan mengajukan proposal ke BNPB	Tahun 2021 BPBD mendapatkan Bantuan Trailer Tangki Air Bersih
2	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mengevaluasi kembali penyusunan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyusun LKPJ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
3	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Sudah di anggarkan kembali untuk kegiatan yang tertunda karena refocusing tahun 2020	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebakaran hutan dan lahan di 4 (empat) Kecamatan di tahun 2021, yang tertunda di tahun 2020 karena refocusing
4	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan koordinasi dengan dinas	Saling melakukan koordinasi dalam penanganan bencana

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	PMD, dinas Satpol PP dan Damkar serta pihak desa terkait pemenuhan kebutuhan peralatan pemadaman kebakaran Milik Desa.	

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### **3.10. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
3. Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
4. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Bupati.

#### **3.10.1. Capaian Pelaksanaan Program**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Sosial dan urusan pemerintahan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar dengan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2021 Dinas melaksanakan 9 (Sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.56.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	=3-4	=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>627.465.192,30</b>	<b>623.315.315,00</b>	<b>4.149.877,30</b>	<b>99,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>58.072.500,00</b>	<b>53.317.500,00</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>91,81</b>
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.421.000,00	7.421.000,00	0,00	100,00
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.221.500,00	15.221.500,00	0,00	100,00
1.1.3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	35.430.000,00	30,675.000,00	4.755.000,00	86,58
<b>1.2</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>3.428.127.545,00</b>	<b>3.368.286.036,00</b>	<b>59.841.509,00</b>	<b>98,25</b>
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.063.127.545,00	3.008.936.036,00	54.191.509,00	98,23
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	365.000.000,00	359.350.000,00	5.650.000,00	98,45
<b>1.3</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
<b>1.4</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>188.538.913,00</b>	<b>185.701.724,00</b>	<b>2.837.189,00</b>	<b>98,50</b>
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.503.200,00	2.503.200,00	0,00	100,00
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.171.817,00	68.162.924,00	8.893,00	99,99
1.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.595.296,00	9.595.000,00	296,00	100,00
1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	16.895.000,00	16.885.000,00	10.000,00	99,94
1.4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.103.600,00	31.103.600,00	0,00	100,00
1.4.6	Fasilitas kunjungan tamu	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	57.995.000,00	55.177.000,00	2.818.000,00	95,14
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>51.290.000,00</b>	<b>51.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	51.290.000,00	51.290.000,00	0,00	100,00
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>46.880.000,00</b>	<b>31.737.987,00</b>	<b>15.142.013,00</b>	<b>67,70</b>
1.6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	100,00
1.6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.600.000,00	27.457.987,00	15.142.013,00	64,46
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>147.220.000,00</b>	<b>145.578.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>98,88</b>
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	49.500.000,00	47.878.000,00	1.622.000,00	96,72

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	=3-4	=4/3*100
1.7.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	49.100.000,00	49.080.000,00	20.000,00	99,96
1.7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
1.7.4	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	40.460.000,00	40.460.000,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>11.278.800,00</b>	<b>11.278.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</b>	<b>11.278.800,00</b>	<b>11.278.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	11.278.800,00	11.278.800,00	0,00	100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>173.393.676,00</b>	<b>154.103.676,00</b>	<b>19.290.000,00</b>	<b>88,88</b>
<b>3.1</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</b>	<b>135.702.908,00</b>	<b>116.672.908,00</b>	<b>19.030.000,00</b>	<b>85,98</b>
3.1.1	Penyediaan per makanan	80.378.160,00	78.008.160,00	2.370.000,00	97,05
3.1.2	Penyediaan alat bantu	55.324.748,00	38.664.748,00	16.660.000,00	69,89
<b>3.2</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial</b>	<b>37.690.768,00</b>	<b>37.430.768,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>99,31</b>
3.2.1	Pemberian layanan rujukan	37.690.768,00	37.430.768,00	260.000,00	99,31
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>367.114.737,00</b>	<b>302.438.237,00</b>	<b>64.676.500,00</b>	<b>82,38</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengelola data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</b>	<b>367.114.737,00</b>	<b>367.114.737,00</b>	<b>64.676.500,00</b>	<b>82,38</b>
4.1.1	Pendataan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	327.755.412,00	265.608.912,00	62.146.500,00	81,04
4.1.2	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	39.359.325,00	36.829.325,00	2.530.000,00	93,57
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>38.860.000,00</b>	<b>38.130.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>98,12</b>
<b>5.1</b>	<b>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota</b>	<b>38.860.000,00</b>	<b>38.860.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>98,12</b>
5.1.1	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	38.860.000,00	38.860.000,00	730.000,00	98,12
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>55.113.900,00</b>	<b>54.573.900,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>99,02</b>
<b>6.1</b>	<b>Pelebagaan pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>55.113.900,00</b>	<b>54.573.900,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>99,02</b>
6.1.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.029.000,00	34.489.000,00	540.000,00	98,46
6.1.2	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.084.900,00	20.084.900,00	0,00	100,00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>393.764.974,00</b>	<b>343.739.810,00</b>	<b>50.025.164,00</b>	<b>87,30</b>
<b>7.1</b>	<b>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>343.739.810,00</b>	<b>343.739.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7.1.1	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	343.739.810,00	343.739.810,00	0,00	100,00
<b>7.2</b>	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak</b>	<b>50.025.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.025.164,00</b>	<b>0,00</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	=3-4	=4/3*100
	<b>anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</b>				
7.2.1	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	50.025.164,00	0,00	50.025.164,00	0,00
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>43.912.471,00</b>	<b>38.849.271,00</b>	<b>5.063.200,00</b>	<b>88,47</b>
<b>8.1</b>	<b>Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, Nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>43.912.471,00</b>	<b>38.849.271,00</b>	<b>5.063.200,00</b>	<b>88,47</b>
8.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	43.912.471,00	38.849.271,00	5.063.200,00	88,47
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>461.845.800,00</b>	<b>164.791.800,00</b>	<b>297.054.000,00</b>	<b>35,68</b>
<b>9.1</b>	<b>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota</b>	<b>45.459.800,00</b>	<b>45.459.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
9.1.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	45.459.800,00	45.459.800,00	0,00	100,00
<b>9.2</b>	<b>Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>416.386.000,00</b>	<b>119.332.000,00</b>	<b>297.054.000,00</b>	<b>28,66</b>
9.2.1	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	53.270.000,00	53.270.000,00	0,00	100,00
9.2.2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	363.116.000,00	66.062.000,00	297.054.000,00	18,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.485.413.316,00</b>	<b>4.963.816.741,00</b>	<b>521.596.575,00</b>	<b>90,49</b>

Sumber : LKPJ Dinas Sosial PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Realisasi
  - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasan Administrasi Keuangan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga.

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional

4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan.

4.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu.

4.7 Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator kegiatan (Output) adalah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.
  - 3.9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara.
  - 7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara.
  - 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara
  - 7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara

## **B. Program Pemberdayaan Sosial**

Indikator Program (Outcome) Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PSM yang mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sosial Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
  - 1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan

### C. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program (Outcome) Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penanganan masyarakat berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan

#### 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako, 2) Jumlah Kegiatan Komda Lansia

#### 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu.

- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan PMKS

#### 2.1 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Orang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan.

### D. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Indikator Program (Outcome) Perlindungan Dan Jaminan Sosial adalah Updating DTKS Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Terpenuhinya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

1.1 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Data yang dimutakhirkan

1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Perbaikan data

### E. Program Penanganan Bencana

Indikator Program (Outcome) Penanganan Bencana adalah Persentase Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

1.1 Sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kelompok rentan yang ditangani.

#### **F. Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Indikator Program (Outcome) Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

1.1 Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender.

1.2 Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG

#### **G. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Indikator Program (Outcome) Peningkatan Kualitas Keluarga adalah Persentase Peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Kegiatan DWP dan 2) Jumlah Sosialisasi

- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kegiatan GOW.

#### H. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program (Outcome) Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah Status Kabupaten Layak Anak Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kecamatan Layak Anak.

- 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sosialisasi.

#### I. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program (Outcome) Perlindungan Khusus Anak adalah Persentase Pembinaan anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pendampingan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak.

- 1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Fasilitas P2TP2A.

- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten /kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Media komunikasi, informasi dan edukasi anak (Jenis)

2.3 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan Pendampingan

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57.  
Pencapaian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>97,53</b>	<b>125,04</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	4 Orang	4 Orang	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	6 Jenis	6 Jenis	100
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	2 Jenis	100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional	2 Kali	2 Kali	100
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100
1.4.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit	100
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	428 Lembar	428 Lembar	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	100
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PSM YANG MENDAPATKAN KETRAMPILAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN SOSIAL</b>	<b>17,36</b>	<b>17,36</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	100	100
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial yang diberikan pelatihan	25 Orang	25 Orang	100
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENANGANAN MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	7	5,33	76,19
3.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan	21	16	76,19
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako	11 orang	0	0
		Jumlah Kegiatan Komda Lansia	1 Keg	1 Keg	100
3.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu	11 orang	0	0
3.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan PMKS	100	100	100
3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	40 Orang	40 Orang	100
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	UPDATING DTKS	100	82,18	82,18
4.1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	100	91,09	91,09
4.1.1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang dimutakhirkan	12.843 data	10.554 data	82,18
4.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Perbaikan data	93 desa	93 desa	100
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	100	184	184
5.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	100
5.1.1	Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	100 KK	184 KK	184
6	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	88	87,43	99,35
6.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender	Persentase Pelembagaan Pengarustamaan Gender	100	63,6	63,6

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
6.1.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Anggaran Responsif Gender	40 OPD	12 OPD	27,2
6.1.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang telah mendapatkan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	30 Orang	30 Orang	100
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>PERSENTASE PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>100</b>	<b>68,93</b>	<b>68,93</b>
<b>7.1</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan DWP	8 Keg	8 keg	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi Perda dan Pengembangan kualitas hidup keluarga	260 orang	260 orang	100
7.2	<b>Penguatan dan pengembangan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan GOW	1	0	0
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>STATUS KABUPATEN LAYAK ANAK</b>	<b>PRATAMA</b>	<b>PRATAMA</b>	<b>100</b>
<b>8.1</b>	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kecamatan Layak Anak</b>	<b>5 Kecamatan</b>	<b>4 Kecamatan</b>	<b>80</b>
8.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 orang	40 orang	100
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENDAMPINGAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>9.1</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan pada Pihak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9.1.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah Fasilitas P2TP2A (orang)	15 orang	15 orang	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
9.2	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Media komunikasi, informasi dan edukasi anak (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	100
9.2.2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan Pendampingan	16 orang	16 orang	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>103,97</b>

Sumber : LKPJ Dinas Sosial, PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.58.  
Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat perlindungan sosial	75 %	289,33 %
2	Persentase masyarakat miskin desil 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial	10 %	17 %
3	Cakupan masyarakat miskin yang memiliki jaminan sosial	70 %	130,79 %
4	Cakupan masyarakat Disabilitas mandiri	10 %	0 %
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70 %	68,93
6	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %
7	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Pratama

Sumber : Dinas Sosial, PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.10.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.59.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Lemahnya Koneksi Jaringan Internet dalam mengupdate DTKS	Diperlukan untuk penguatan jaringan internet dalam updating DTKS
2	Kurangnya SDM dalam Mengupdate DTKS	Penambahan SDM untuk mengupdate DTKS

Sumber : LKPJ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.10.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.60.

Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengupdate data keluarga mampu dan tidak mampu terkait pemberian bantuan sosial agar lebih tepat sasaran serta data yang mendapatkan bantuan	1. Telah Menunjuk Petugas Pemutakhiran DTKS Setiap Desa/Kelurahan.	1. Untuk Mengupdate/memverifikasi data rumah tangga didalam DTKS 11 Kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	untuk dipublikasikan dipusat pemerintahan (kantor desa, Kelurahan dan Kantor Camat).	<p>2. Telah menyurati Desa/Kelurahan untuk memajukan daftar penerima bansos di tempat umum atau balai/kantor pemerintah setempat.</p> <p>3. Telah menyurati Kades/Lurah untuk memverifikasi kelayakan dan ketidaklayakan penerima bansos.</p>	<p>2. Masyarakat dapat melihat daftar penerima bansos setempat.</p> <p>3. Bansos yang diterima tepat sasaran.</p>
2	Aktif turun kelapangan dan berkoordinasi dengan kepala desa terkait program kegiatan ke masyarakat.	Monitoring dan Evaluasi disaat penyaluran Bansos	Masyarakat dapat menyampaikan langsung terkait kelayakan dan penyaluran penerima bansos.
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Telah menyampaikan LKPJ dengan lebih terperinci dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaporan LKPJ tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang	Pada tahun 2021 anggaran Dinas Sosial PP dan PA masih sama karena masih adanya refocusing anggaran	Pada tahun 2021 Dinas Sosial PP dan PA melaksanakan Program/Kegiatan yang menyangkut urusan Bidang Sosial dan Urusan Bidang

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	sehingga tidak bisa melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Telah melakukan koordinasi antar OPD dan mitra kerja di DPRD terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan.	Koordinasi yang dilaksanakan antar OPD terkait antara lain : 1. BPBD terkait bencana alam. 2. PPKB terkait Stunting. 3. BAPEDA terkait Penanggulangan Kemiskinan. 4. PolPP terkait Penanganan Penertiban PSK. 5. BPJS terkait pengaktifan kartu kepesertaan. 6. Kepolisian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sumber : LKPJ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.11. DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.11.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan Pangan dengan bidang urusan Pangan Pada Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas/Badan/Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.61.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.547.753.828,00</b>	<b>3.352.622.244,00</b>	<b>195.131.584,00</b>	<b>94,50</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.955.100,00</b>	<b>13.381.300,00</b>	<b>2.573.800,00</b>	<b>83,87</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	63,64
1.1.2	Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	2.923.100,00	2.923.100,00	0	100
1.1.3.	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.932.000,00	9.758.200,00	2.173.800,00	81,78
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.967.657.625,00</b>	<b>2.853.078.232,00</b>	<b>114.579.393,00</b>	<b>96,14</b>
1.2.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.415.017.625,00	2.308.308.232,00	106.709.393,00	95,58
1.2.2.	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	552.640.000,00	544.770.000,00	7.870.000,00	98,58
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.331.103,00</b>	<b>89.587.603,00</b>	<b>4.743.500,00</b>	<b>94,97</b>
1.3.1	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	47.732.192,00	47.667.192,00	65.000,00	99,86
1.3.2	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	14.786.900,00	13.876.900,00	910.000,00	93,85
1.3.3	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.854.011,00	10.834.511,00	19.500,00	99,82
1.3.4	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.3.5	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	0	100
1.3.6	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	14.208.000,00	10.459.000,00	3.749.000,00	73,61
<b>1.4.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>335.250.000,00</b>	<b>263.244.909,00</b>	<b>72.005.091,00</b>	<b>78,52</b>
1.4.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	0	100
1.4.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	333.000.000,00	260.994.909,00	72.005.091,00	78,38
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>134.560.000,00</b>	<b>133.330.200,00</b>	<b>1.229.800,00</b>	<b>99,09</b>
1.5.1	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	0	100
1.5.2	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	13.120.000,00	13.120.000,00	0	100
1.5.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.840.000,00	110.610.200,00	1.229.800,00	98,90
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>607.225.724,00</b>	<b>582.449.000,00</b>	<b>24.776.724,00</b>	<b>95,92</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>607.225.724,00</b>	<b>582.449.000,00</b>	<b>24.776.724,00</b>	<b>95,92</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	21.110.724,00	11.534.000,00	9.576.724,00	54,64
2.1.2	Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	586.115.000,00	570.915.000,00	15.200.000,00	97,41
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>589.264.205,00</b>	<b>520.908.205,00</b>	<b>68.356.000,00</b>	<b>88,40</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan</b>	<b>256.628.100,00</b>	<b>219.797.100,00</b>	<b>36.831.000,00</b>	<b>85,65</b>
3.1.1	Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	82.989.500,00	77.688.500,00	5.301.000,00	93,61
3.1.2	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	15.915.000,00	5.075.000,00	10.840.000,00	31,89
3.1.3	Subkegiatan Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	70.938.500,00	58.593.500,00	12.345.000,00	82,60
3.1.4	Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	43.560.100,00	39.065.100,00	4.495.000,00	89,68
3.1.5	Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia	43.225.000,00	39.375.000,00	3.850.000,00	91,09
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota</b>	<b>39.874.800,00</b>	<b>35.619.800,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>89,33</b>
3.2.1	Subkegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	36.924.800,00	32.669.800,00	4.225.000,00	88,48
3.2.2	Subkegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.950.000,00	2.950.000,00	0	100
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>292.761.305,00</b>	<b>265.491.305,00</b>	<b>27.270.000,00</b>	<b>90,69</b>
3.3.1	Subkegiatan Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	41.644.400,00	41.564.400,00	80.000,00	99,81
3.3.2	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	199.686.905,00	188.471.905,00	11.215.000,00	94,38
3.3.3	Subkegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per tahun	51.430.000,00	35.455.000,00	15.975.000,00	68,94
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>46.439.696,00</b>	<b>22.376.248,00</b>	<b>24.063.448,00</b>	<b>48,18</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>22.989.848,00</b>	<b>10.024.848,00</b>	<b>12.965.000,00</b>	<b>43,61</b>
4.1.1	Subkegiatan Penyusunan , Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	22.989.848,00	10.024.848,00	12.965.000,00	43,61

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
4.2	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	23.449.848,00	12.351.400,00	11.098.448,00	52,67
4.2.1	Subkegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	23.449.848,00	12.351.400,00	11.098.448,00	52,67
5.	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	4.029.400,00	4.029.400,00	0	100
5.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.029.400,00	4.029.400,00	0	100
5.1.1	Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.029.400,00	4.029.400,00	0	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.794.712.853,00</b>	<b>4.482.385.097'00</b>	<b>312.327.756,00</b>	<b>93,49</b>

Sumber : LKPJ Dinas ketahanan pangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks pelayanan instansi dan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kegiatan (Output) Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)
  - 1.2 Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Realisasi ( Dokumen)
  - 1.3 Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa administrasi Keuangan (Bulan).
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun).
  - 3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang Cetakan (Jenis).

3.3. Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)

3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)

3.5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makanan dan minuman tamu(bulan).

3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya minum rapat SKPD (bulan)

4. ) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Materai (Lembar)

4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa sumber daya air, listrik (bulan)

5.) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan (Output) Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

5.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit).

5.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (unit)

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (unit).

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator Program (Outcome) adalah persentase penyediaan infrastruktur pangan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan .
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Indikator Sub Kegiatan (Output) terpetakannya potensi pengembangan komoditas pertanian/peta SDP (dok).
  - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan.

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Program (Outcome) adalah skor PPH dan konsumsi energi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dengan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah informasi harga pangan, data prognosa pada HBKN, harga pangan Pokok (dokumen)
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah biaya Koordinasi, Sinkronisasi, serta pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan kinerja kelompok kerja ketahanan pangan (tahun)
  - 1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Analisis ketersediaan pangan (Dokumen)
  - 1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah PLDPM (gapoktan) .
  - 1.5 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah LUPM (Gapoktan) .
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah persentase pengelolaan cadangan pangan.
  - 2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah biaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/kota (Tahun)

2.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah gudang pangan pemerintah yang terpelihara (gudang).

3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase capaian target konsumsi pangan .

3.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Konsumsi energi dan skor PPH

3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kader pangan B2SA .

3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita PerTahun

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah biaya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita PerTahun.

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase penanganan daerah rawan pangan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan Indikator kegiatan (Output) adalah persentase penyelesaian peta.

1.1. Sub Kegiatan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah peta FSVA (Peta)

2). Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota

Indikator kegiatan adalah persentase penanganan kerawanan pangan.

2.1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan daerah rawan pangan Kabupaten

Indikator sub kegiatan (output) adalah biaya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota.

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator program persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan persentase pelaksanaan pengawasan PSAT dan pangan lainnya.

1.1. Sub kegiatan Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan adalah jumlah sampel PSAT dan bahan pangan lainnya.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.62.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78,49</b>	<b>100,63</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen)	3	2	66,67
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi	12	12	100
1.1.3	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah monev yang dilaksanakan (bulan)	12	12	100
2.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100
2.1.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan)	12	12	100
3.1	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kentor	Pengadaan Peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (tahun)	1	1	100
3.1.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	2	2	100
3.1.4	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan (jenis)	15	15	100
3.1.5	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	10	10	100
3.1.6	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan dan minum tamu (bulan)	12	12	100
3.1.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Pembayaran koordinasi dalam didaerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (lembar)	260	260	100
4.1.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran jasa sumber daya air, listrik (bulan)	12	12	100
5.1	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1.1	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	1	100
5.1.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	18	18	100
5.1.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	10	10	100
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN</b>	<b>PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PANGAN</b>	<b>64,29</b>	<b>64,29</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang diberdayakan	13	13	100
2.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terpetakkannya potensi pengembangan komoditas pertanian/peta SDP (dok)	1	1	100
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>SKOR PPH (POIN) KONSUMSI ENERGI (KKAL/KAPITA/HARI)</b>	<b>90,5 2.125</b>	<b>90,9 2.215</b>	<b>100,44 104,24</b>
3.1	<b>Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan, data prognosis pada HBKN, harga pangan pokok (dok)	1	1	100
3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	biaya Koordinasi, Sinkronisasi, serta pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan kinerja kelompok kerja ketahanan pangan (tahun)	1	1	100
3.1.3	Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Analisis ketersediaan pangan (dok)	1	1	100
3.1.4	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah PLDPM (gapoktan)	8	8	100
3.15	Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan	Jumlah LUPM (Gapoktan)	5	5	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Masyarakat Dan Toko Tani Indonesia				
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan cadangan pangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Biaya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100
3.2.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah gudang pangan yang terpelihara (Gedung)	1	1	100
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Persentase capaian target konsumsi pangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.3.1	Sub kegiatan Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	Skor PPH Konsumsi Energi	90,5 2.125	90,9 2.215	100,44 104,24
3.3.2	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader pangan B2SA	450	477	106
3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per tahun	Biaya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per tahun(Tahun)	1	1	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN</b>	<b>93,55</b>	<b>96,77</b>	<b>103,44</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Peta</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Peta FSVA (Peta)	1	1	100
<b>4.2</b>	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Biaya Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Tahun)	1	1	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>100</b>	<b>172,50</b>	<b>172,50</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pusat Dan Pangan Lainnya</b>	<b>100</b>	<b>172,50</b>	<b>172,50</b>
5.1.1	Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pusat Dan Bahan Pangan Lainnya	40	69	172,50
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>113,54</b>

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH) tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.63.  
Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH)

No	Kelompok Pangan	Berat pangan gram/kapita/hari	Kkal/kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Padi-padian	294,7	1.212	54,7	57,7	0,5	27,4	28,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	57,9	66	3,0	3,1	0,5	1,5	1,6	2,5	1,6
3	Pangan Hewani	143,5	261	11,8	12,4	2,0	23,6	24,9	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	35,3	317	14,3	15,1	0,5	7,2	7,6	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	6,1	33	1,5	1,6	0,5	0,7	0,8	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	19,2	47	2,1	2,2	2,0	4,2	4,4	10,0	4,4
7	Gula	33,2	121	5,5	5,8	0,5	2,7	2,9	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	245,1	116	5,2	5,5	5,0	26,2	27,6	30,0	27,6
9	Lain-lain	80,4	42	1,9	2,0	-				
<b>Total</b>			<b>2.215</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>		<b>93,5</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Tabel 3.44.  
Persentase Kalori, Protein yang Tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KELOMPOK BAHAN MAKANAN	Kalori			Protein		
		Kkal/Hari	%	% AKE*)	Gram/Hari	%	AKP**)
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	Padi-padian	1.212	54,7	57,7	27,8	54,7	48,8
2.	Umbi-umbian	66,0	3,0	3,1	0,6	3,0	1,1
3.	Pangan Hewani	261,2	11,8	12,4	24,0	11,8	42,1
4.	Minyak dan Lemak	317,4	14,3	15,1	0,0	14,3	0,1
5.	Buah/Biji berminyak	33,2	1,5	1,6	0,4	1,5	0,6
6.	Kacang-kacangan	46,7	2,1	2,2	4,8	2,1	8,4
7.	Gula	120,9	5,5	5,8	0,0	5,5	0,0
8.	Sayur dan Buah	115,9	5,2	5,5	4,1	5,2	7,1
9.	Lain-lain	41,8	1,9	2,0	1,4	1,9	2,5
Total		2.215,0	100,0	105,5	63,1	100,0	110,7

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Tabel 3.64.  
 Rekapitulasi Laporan Cadangan Pangan Pemerintah  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018 (Kg)	2019 (Kg)	2020 (kg)	2021 (Kg)
1	Stok Awal	20.004,3	15396,3	9.093,3	19.093,3	17.455,06
2	Pengadaan	0	9000	10.000		
3	Penyaluran	4.608	15303	0	990,0	17.301,60
4	Stok Akhir	15.396,3	9.093,3	19.093,3	18.103,3	153,46

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.65.

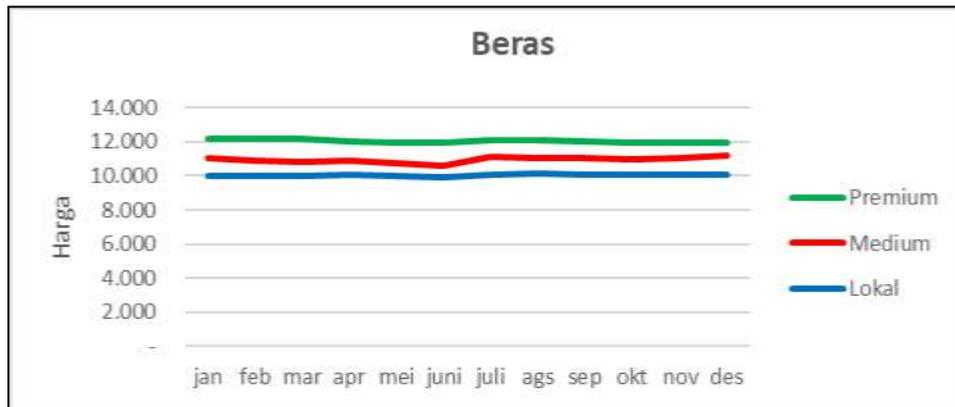
Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan pada Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Keadaan s/d Desember 2021)

NO	KECAMATAN/ DESA	THN PEMBA NGU NAN LUMB UNG	NAMA LUMBUNG	NAMA KETUA	JUMLAH BANSOS (Rp)	TAHUN PEMA MFAAT AN & BANS OS	NAMA PETUGAS PENDAMPING	PERKEMBANGAN PEMANFAATAN BANSOS					DANA ANGGARAN
								JML DANA KAS (Rp)	UNIT CADANGAN PANGAN		UNIT DISTRIBUSI		
									JML GAB AH (Kg)	JML BER AS (Kg)	JML GAB AH (Kg)	JML BER AS (Kg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NIPAH PANJANG</b>													
1	Nipah Panjang II	2010	Antara makmur	Agus Sobri	40.000.000	2010	Padhila ,A.Md					8.813	DAK
2	Simp. Datuk	2012	Pangan Lestari	Nursam	25.000.000	2013	Usep					2.000	APBD II
3	Pemusiran	2016	Riski Tani	M. Ahyar	25.000.000	2018	Sutowo					2.045	DAK
4	Sungai Raya	2018	Sinas Ase	Hasanuddin			Tingkos Promo, A.Md						APBD II
<b>RANTAU RASAU</b>													
5	Rantau Jaya	2010	Tirta Mulya	Dalijo	40.000.000	2010	Sumini, A.Md		4.000		1.600	2.930	DAK
6	Bandar Jaya	2016	Suka Maju	Nana Sumantri	25.000.000	2017	Ispriyatin Hidayah,SP		5.350	1.500			APBD II
<b>Muara sabak Timur</b>													
7	Siau Dalam	2013	Sinas Wajo	Jamaluddin	25.000.000	2016	Lidiawati, A.Md	22.500.000				100	APBD II
8	Simbur Naik	2013	Maminase	Heri Meriyanto	25.000.000	2016	Asmawati, S.Pt					2.700	APBD II
<b>Berbak</b>													
9	Telago Limo	2014	Sumber Rezeki	Mahyarudin	25.000.000	2017	Arief Eko Poetro					2.525	APBD II
10	Rantau Rasau	2014	Sri Makmur	Kuadi	25.000.000	2016	Anuar Abidin					2.800	APBD II

<b>5</b>	<b>Geragai</b>													
11	Desa Lagan Ulu	2018	Mekar Sari	Saipulloh			Suwito, A.Md						APBD II	
12	Desa Suka Maju	2021	Gapoktan Suka Maju	Imam			RTS. Ayu wulandari, A.Md						DAK	
<b>Dendang</b>														
<b>13</b>	Desa Koto Kandis	2019	Embun Pagi 1	Bakhtiar JH			Halijah,S.PKP						APBD II	
<b>JUMLAH</b>								22.500.000,-	9.350	1.500	1.600	2.913		

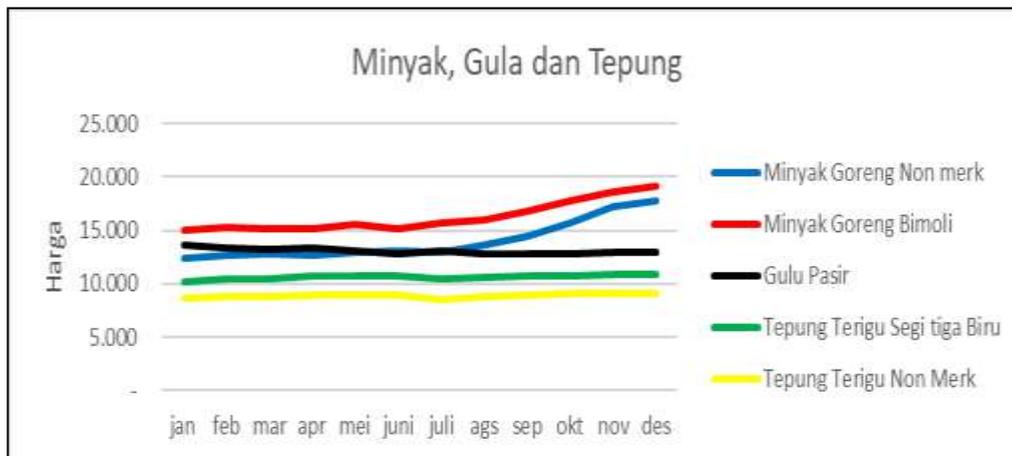
Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 3.1.  
Perkembangan Harga Beras  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021



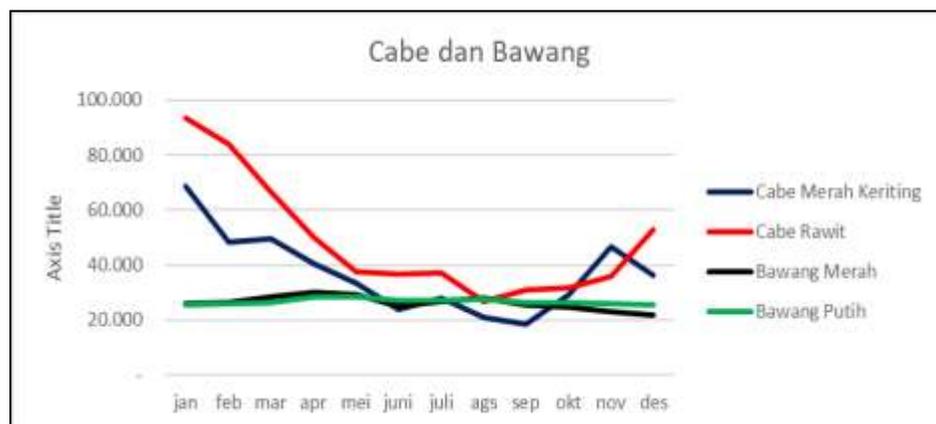
Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 3.2.  
Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikan  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021



Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Gambar 3.3.  
Perkembangan Harga Cabe dan Bawang  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.11.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.66.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Percepatan diversifikasi berjalan lambat hal ini disebabkan oleh karena pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan, demikian juga dengan konsumsi pangan yang beragam bergizi dan berimbang belum terlaksananya dengan baik	Melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan secara apresiasi, sosialisasi, pelatihan, penyebaran banner, leaflet dan penyuluhan ketahanan pangan sampai tingkat Desa/Kelurahan.
2	Sistem transportasi yang kurang memadai dan belum sepenuhnya terjangkau.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas /OPD terkait dan upaya antisipasi dini terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	Terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan dimasyarakat	Perlunya sosialisasi tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan.
4	Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan jumlah dukungan kegiatan untuk peningkatan pangan dan ketahanan pangan Kab. Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan di Kab. Tanjung Jabung Timur
5	Masih lemahnya koordinasi lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan dan stakeholder ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan	Melaksanakan secara intensif koordinasi lintas pelaku dan sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan terhadap penyelesaian masalah-masalah ketahanan pangan yang terjadi di masyarakat serta memfasilitasi peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder dalam mewujudkan ketahanan pangan.
6	Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah daerah	Mengoptimalkan dukungan anggaran maupun sarana untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana/ didaerah rawan pangan

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.11.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas TPH dalam mengatasi alih fungsi lahan yang saat ini telah mengalami penyusutan dari luasan sebelumnya sebagai upaya menjaga cadangan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Cadangan pangan melalui cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi kerugian petani akibat gagal panen padi yang disebabkan bencana alam seperti banjir/bencana alam termasuk serangan hama dan penyakit. Untuk tahun 2022 tidak dianggarkan dikarenakan setelah diajukan melalui nota dinas dan pembahasan di DPR belum disetujui karena keterbatasan anggaran	Untuk pengadaan beras CPPD tidak dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran
2	Mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran produksi petani dengan harga yang maksimal	Diperlukan adanya strategi yang tepat dan handal serta dukungan dari faktor-faktor internal dan strategi pemasaran merupakan sebuah kunci dari pencapaian keunggulan dan keberhasilan dalam suatu usaha tani	Dengan adanya satgas pangan dapat membantu menyelesaikan masalah harga pangan
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan	Pembuatan Laporan LKPJ akan lebih disempurnakan sesuai dengan sistematika PP Nomor 13 Tahun 2019	Akan dilaksanakan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah		
4	Terhadap program dan kegiatan pada Tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur sebagian terakomodir dengan adanya Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.</li> <li>- Khusus program Pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hal ni dimunculkan karena untuk memenuhi sarana prasarana kantor dalam melaksanakan pelayan publik</li> </ul>	Dengan adanya sarana prasarana tersebut dapat membantu menyelesaikan Administrasi perkantoran, serta membantu penyediaan sarana prasarana peningkatan Hasil Panen
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan member azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terutama yang berhubungan dengan Data yang ada di lingkungan Pertanian, begitu juga pada mitra di DPRD dengan mendampingi kunjungan kerja DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang berhubungan dengan program kerja Dinas Ketahanan Pangan	Sudah dilaksanakan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan BPTP Jambi dalam melakukan kajian dan penelitian untuk meningkatkan kualitas beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Jambi dalam menjaga keamanan dan mutu pangan untuk itu OKKPD melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi pangan diantaranya beras. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan selalu melakukan upaya melalui sosialisasi dalam penerapan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha	Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

### 3.12.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.67.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.188.580.520</b>	<b>5.022.936.954</b>	<b>165.643.566</b>	<b>96,81%</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>81.898.400</b>	<b>73.898.000</b>	<b>8.000.400</b>	<b>90,23%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.574.200	5.514.000	60.200	98,92%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.574.200	5.484.000	90.200	98,38%
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.750.000	62.900.000	7.850.000	88,90%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.894.136.335</b>	<b>3.779.348.041</b>	<b>114.788.294</b>	<b>97,05%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.067.486.335	2.004.918.041	62.568.294	96,97%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.826.650.000	1.774.430.000	52.220.000	97,14%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>78.100.000</b>	<b>76.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98,08%</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	67.600.000	67.600.000	-	100,00%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000	9.000.000	1.500.000	85,71%
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>165.454.753</b>	<b>154.525.662</b>	<b>10.929.091</b>	<b>93,39%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.018.600	4.018.600	-	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	70.034.103	69.481.299	552.804	99,21%
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.812.050	40.305.650	506.400	98,76%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	10.400.000	6.600.000	3.800.000	63,46%
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	40.190.000	34.120.113	6.069.887	84,90%
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41.091.032</b>	<b>38.713.500</b>	<b>2.377.532</b>	<b>94,21%</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.091.032	38.713.500	2.377.532	94,21%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.000.000</b>	<b>50.456.318</b>	<b>15.543.682</b>	<b>76,45%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	50.456.318	15.543.682	76,45%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>861.900.000</b>	<b>849.395.433</b>	<b>12.504.567</b>	<b>98,55%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	811.700.000	799.477.510	12.222.490	98,49%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.200.000	20.918.000	282.000	98,67%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000	28.999.923	77	99,99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>231.301.000</b>	<b>225.376.843</b>	<b>5.924.157</b>	<b>97,44%</b>
2.1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>231.301.000</b>	<b>225.376.843</b>	<b>5.924.157</b>	<b>97,44%</b>
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	231.301.000	225.376.843	5.924.157	97,44%
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>9.935.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>155.000</b>	<b>98,44%</b>
3.1	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>9.935.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>155.000</b>	<b>98,44%</b>
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.935.000	9.780.000	155.000	98,44%
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>92.850.000</b>	<b>92.800.000</b>	<b>50.000</b>	<b>99,95%</b>
A	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.850.000</b>	<b>92.800.000</b>	<b>50.000</b>	<b>99,95%</b>
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	34.920.000	34.920.000	-	100,00%
4.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.930.000	57.880.000	50.000	99,91%
5	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>65.332.400</b>	<b>61.985.000</b>	<b>3.347.400</b>	<b>94,88%</b>
5.1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.332.400</b>	<b>61.985.000</b>	<b>3.347.400</b>	<b>94,88%</b>
5.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.332.400	61.985.000	3.347.400	94,88%
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>287.419.632</b>	<b>283.875.600</b>	<b>3.544.032</b>	<b>98,77%</b>
6.1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>287.419.632</b>	<b>283.875.600</b>	<b>3.544.032</b>	<b>98,77%</b>
6.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	253.329.632	250.645.600	2.684.032	98,94%
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	34.090.000	33.230.000	860.000	97,48%
	<b>Jumlah</b>	<b>5.875.418.552</b>	<b>5.696.754.397</b>	<b>178.664.155</b>	<b>96,96%</b>

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator Program adalah Indeks Pelayanan Instansi. Adapun Program ini didukung oleh 7

Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja).

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan (LKPJ, LKJiP, LPPD).

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Jumlah Monev yang dilaksanakan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan yaitu Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Pembayaran jasa administrasi keuangan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu Jumlah Pakaian Dinas ASN.

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang mengikuti Diklat.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat, didukung oleh 5 sub kegiatan yaitu :

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.

4.2 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Alat Tulis Kantor.

4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Jenis Barang Cetak.

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan yaitu Pembayaran Tagihan Surat Kabar.

4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan yaitu Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan yaitu Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kegiatan yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan yaitu Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kegiatan yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6 dan Alat Berat)

7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan yaitu jumlah peralatan yang diperbaiki.

7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Gedung kantor yang direhab.

B. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Indikator Program ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator yaitu : Nilai Indeks Kualitas Air, Nilai Indeks Kualitas Udara, Nilai Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kepuasan Layanan laboratorium, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Sub Kegiatan yaitu : (1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, (2) Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan.

Selain itu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut juga mengakomodir Laboratorium Lingkungan yang digunakan untuk penelitian ilmiah beraneka ragam bentuknya karena perbedaan persyaratan spesialis pada berbagai bidang sains dan teknik. Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup saat ini baru bisa melakukan uji sampel air sungai, air sumur dan air limbah, dan udara ambien.

C. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Indikator Program ini yaitu Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani. Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Indikator Kegiatan yaitu Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan yaitu : Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Indikator Program ini yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan. Adapun Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator yang harus dicapai yaitu : 1) Persentase Usaha/Kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki, 2) Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan dan 3) Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan, dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Indikator Sub Kegiatan yang harus dicapai yaitu : Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan.

1.2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan yaitu : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Indikator Program ini yaitu Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan yaitu : Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/  
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD).

F. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Indikator Program ini yaitu Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari). Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Sampah

Indikator Kegiatan yaitu Volume Sampah Terangkut per hari (ton) dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1.1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.68.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Lingkungan Hidup  
KabupatenTanjungJabungTimurTahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	81	84,08	103,80
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	3	3	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	1	1	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	146	146	100
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3	3	100
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	6	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	1	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	9	9	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12	12	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	12	100
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100	100	100
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	8	100
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2)	10	10	100
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 3)	6	6	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 4)	3	3	100
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 6)	7	7	100
		Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Alat Berat)	1	1	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diperbaiki	40	40	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	2	2	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>66,03</b>	<b>67,30</b>	<b>101,92</b>
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Air	52,60	58,15	110,55
		Nilai Indeks Kualitas Udara	86,00	85,20	99,07
		Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,15	49,83	95,55
		Indeks Kepuasan Layanan laboratorium	79	86,95	106,43
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100
		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1	1	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>PERSENTASE PERSETUJUAN TEKHNIS (PERTEK) PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG DILAYANI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	100	100	100
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	1	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki	76	98,04	129
		Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan	100	100	100
		Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan	100	100	100
		Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan	79	84,08	106,43
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1	1	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51	51	100
5	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	1	1	100
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>VOLUME SAMPAH TERANGKUT PERHARI (TON/HARI)</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>113,16</b>
6.1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Volume Sampah Terangkut per hari (ton)</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>113,16</b>
6.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1	1	100
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>103,15</b>

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

**Sasaran** dari Program pelayanan administrasi perkantoran adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan. **Outcome** dari Sasaran Program pelayanan administrasi perkantoran adalah Indeks Pelayanan Instansi dengan target 81 dan realisasi 84,08. Adapun Program ini didukung oleh 7 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian antara lain yaitu :

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dengan target sebanyak 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen.
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan (LKPJ, LKJiP, LPPD) dengan target sebanyak 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen.
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Monev yang dilaksanakan dengan target 12 bulan dan realisasi 12 (bulan).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun.
  - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran jasa administrasi keuangan dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 bulan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Pakaian Dinas ASN dengan target 146 stel dan realisasi 146 stel.
  - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dengan target 3 orang dan realisasi 3 orang.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 5 sub kegiatan yaitu :
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan target 6 jenis dan realisasi 6 jenis.
  - 4.2 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pengadaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun.
  - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Jenis Barang Cetak dengan target 9 jenis dan realisasi 9 jenis.
  - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran Tagihan Surat Kabar dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.

- 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan **Outcome** Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :
- 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 8 unit dan realisasi 8 unit.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :
- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 kali dan realisasi 12 kali.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6 dan Alat Berat) dengan target Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2 = 10, Roda 3 = 6, Roda 4 = 3, Roda 6 = 7 dan Alat Berat = 1) dan realisasi Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2 = 10, Roda 3 = 6, Roda 4 = 3, Roda 6 = 7 dan Alat Berat = 1).
- 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu jumlah peralatan yang diperbaiki dengan target 40 unit dan realisasi 40 unit.
- 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Gedung kantor yang direhab dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit.
- B. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. **Sasaran** dari Program ini adalah 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. **Outcome** dari Program ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 66,03 dan realisasi 67,30. Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu 1) Menurunkan beban pencemaran air, udara, dan Tutupan Lahan, dan 2) Meningkatkan Pelayanan laboratorium Lingkungan Daerah, antara lain yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu :
  - > Nilai Indeks Kualitas Air dengan target 53 dan realisasi 58,15
  - > Nilai Indeks Kualitas Udara dengan target 86 dan realisasi 85,20
  - > Nilai Indeks Kualitas Lahan dengan target 65,21 dan realisasi 49,83
  - > Indeks Kepuasan Layanan laboratorium dengan target 79 dan realisasi 86,95

Dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan **Output** yang harus dicapai yaitu : (1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen, (2) Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Selain itu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut juga mengakomodir Laboratorium Lingkungan yang digunakan untuk penelitian ilmiah beraneka ragam bentuknya karena perbedaan persyaratan spesialis pada berbagai bidang sains dan teknik. Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup saat ini baru bisa melakukan uji sampel air sungai, air sumur dan air limbah, dan udara ambien.

#### C. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. **Sasaran** dari Program ini adalah 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. **Outcome** dari Program ini yaitu Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani dengan target 100 % dan realisasi 100 %.

Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, antara lain yaitu :

##### 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani, yaitu dengan target 100 % dan realisasi 100 %, dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- 1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan **Output** yang harus dicapai yaitu : Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. **Sasaran** dari Program ini adalah 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. **Outcome** dari Program ini yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan dengan target 100 % dan realisasi 100 %.

Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu (1) Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup, (2) Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan masyarakat, antara lain yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu :
  - > Persentase Usaha/Kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan Lingkungan sebagaimana persetujuan lingkungan yang dimiliki dengan target 76 dan realisasi ~~100%~~(98,04)
  - > Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan dengan target 100 % dan realisasi 100 %
  - > Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dengan target 100 % dan realisasi 100 %

Dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- 1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. Dokumen lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 sebanyak 40 dokumen, meliputi UKL UPL berjumlah 10 dan SPPL berjumlah 30. **Output** yang harus dicapai yaitu : Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

1.2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **Output** yang harus dicapai yaitu : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target 51 usaha/kegiatan dan realisasi 51 usaha kegiatan.

E. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. **Sasaran** dari Program ini adalah 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. **Outcome** dari Program ini yaitu Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %. Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu Meningkatnya Pelaksanaan penataan Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu : Persentase penyelesaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah target 100 % dan realisasi 100 %, dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD), dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

F. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat dan perairan, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. **Sasaran** dari Program ini adalah Peningkatan Pelayanan Persampahan. **Outcome** dari Program ini yaitu Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari) dengan target 38 ton/hari dan realisasi 38 ton/hari. Adapun Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan, antara lain :

1. Pengelolaan Sampah dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu Volume Sampah Terangkut per hari (ton) dengan target 38 ton/hari dan realisasi 38 ton/hari, dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1.1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan layanan pengangkutan persampahan di 7 (tujuh) Kecamatan, antara lain Kecamatan Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang, Geragai Kuala Jambi, Rantau Rasau, dan Nipah Panjang, adapun **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

### 3.12.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.69.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Adanya mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan yang belum akurat.	Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2	Masih minimnya informasi antar sektor.	Penguatan data dan informasi antar sektor sebagai media informasi dan up dating data.
3	Belum adanya fungsional khususnya PPLH dan PPNS.	Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang lingkungan untuk melakukan diklat fungsional khususnya PPLH dan PPNS.
4	Masih pemahaman pelaku usaha tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan.	Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah, pelaku usaha kegiatan dan skala rumah tangga tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan.
5	Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat.
6	Masih rendahnya koordinasi antara unit-unit kerja dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7	Minimnya pengaduan masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.	Dibentuknya pos pengaduan masyarakat sebagai salah satu wadah masyarakat/setiap orang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
8	Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Perlunya dukungan Sarana dan prasarana serta SDM demi mendukung Terakreditasinya laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.12.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.70.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Capaian PAD Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk kedepannya agar lebih ditingkatkan.	Menanggapi pada poin ke 1, Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian PAD sektor kebersihan telah melewati target PAD sektor kebersihan yang telah ditetapkan dan penerimaan PAD sektor kebersihan selalu mengalami peningkatan.	Pencapaian PAD sektor kebersihan telah melewati target PAD sektor kebersihan
		Menanggapi pada poin ke 1, Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian PAD Retribusi Pemakaian Laboratorium telah tercapai dan melebihi target, dan untuk meningkatkan PAD tersebut mohon agar dukungan peningkatan sarana prasarana serta peningkatan SDM laboratorium sehingga mempunyai daya saing dengan laboratorium lainnya.	Pencapaian PAD Retribusi Pemakaian Laboratorium telah tercapai dan melebihi target.
2	Bersinergi dengan Dinas terkait agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.	Menanggapi pada poin ke 2, Dinas Lingkungan Hidup kedepannya dalam menangani persampahan akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.	Dinas LH telah bersinergi dengan Instansi terkait guna menangani persampahan
3	Memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan pengelolaan limbah dan aturan membuang sampah	Menanggapi pada poin ke 3, Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan sosialisasi untuk menjaga kebersihan baik melalui kegiatan formal maupun informal, pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan inovasi sosialisasi untuk menjaga kebersihan melalui SMS Blast ditambah dengan telah	Dinas LH telah memberikan sosialisasi kebersihan melalui SMS Blast

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		menyiapkan Regulasi tentang pengurangan sampah plastik.	
4	Menyediakan TPS 3R/Daur ulang sampah yang dipisahkan	Menanggapi poin 4,5,6 dan 7 pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk dapat menjalani seluruh rekomendasi Banggar sepanjang anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan mencukupi untuk mengakomodir semua rekomendasi tersebut.	Dinas LH telah mengupayakan semaksimal mungkin penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk pelayanan persampahan
5	Dalam pengelolaan persampahan agar secepatnya menyediakan TPS yang merata serta kendaraan pengangkut sampah dari masyarakat.		
6	Melakukan penimbangan sampah setiap hari sebelum dibuang ke TPA agar volume sampah terukur		
7	Pengelolaan limbah sampah di TPA Parit Culum I agar dilakukan pemilahan organik dan Anorganik.		
8	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menanggapi pada poin ke 8, Dinas Lingkungan Hidup akan menyampaikan pelaporan LKPJ yang lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas LH telah menyampaikan laporan secara terinci pada LKPJ tahun 2021.
9	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Menanggapi pada poin ke 9, Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 telah mengalami refocusing, akan tetapi tidak ada program dan kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dan di dalam pelaksanaan penganggaran pada Program dan kegiatan mengacu kepada RPJMD.	Dinas LH telah melaksanakan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak relevan untuk dilaksanakan.
10	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat	Menanggapi pada poin 10, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga program, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan tepat waktu dan memiliki azas manfaat.	Dinas LH akan selalu berkoordinasi terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan bersama OPD terkait.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.		

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
2. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diberikan oleh Bupati.

#### 3.13.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*. Pada Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program, 12 (Dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.71.

## Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>108.327.300</b>	<b>103.262.300</b>	<b>5.065.000</b>	<b>95,32</b>
1.1	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>108.327.300</b>	<b>103.262.300</b>	<b>5.065.000</b>	<b>95,32</b>
1.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	17.070.000	14.600.000	2.470.000	85,53
1.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	6.510.000	5.300.000	1.210.000	81,41
1.1.3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	84.747.300	83.362.300	1.385.000	98,37
2	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>34.488.800</b>	<b>30.473.800</b>	<b>4.015.000</b>	<b>88,36</b>
2.1	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>34.488.800</b>	<b>30.473.800</b>	<b>4.015.000</b>	<b>88,36</b>
2.1.1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	34.488.800	30.473.800	4.015.000	88,36
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>54.165.000</b>	<b>52.585.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>97,08</b>
3.1	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>19.970.000</b>	<b>19.265.000</b>	<b>705.000</b>	<b>96,47</b>
3.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	19.970.000	19.265.000	705.000	96,47
3.1.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.195.000	33.320.000	875.000	97,44
3.1.3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.415.000	3.800.000	615.000	86,07
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	29.780.000	29.520.000	260.000	99,13
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>5.996.000</b>	<b>5.996.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4.1	<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>5.996.000</b>	<b>5.996.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4.1.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.996.000	5.996.000	0	100
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.285.699.889</b>	<b>4.976.437.906</b>	<b>309.261.983</b>	<b>94,15</b>
5.1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>176.850.000</b>	<b>78.792.684</b>	<b>98.057.316</b>	<b>44,55</b>
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	2.400.000	0	100
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	130.849.000	33.766.684	97.082.316	25,81
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.800.900	15.800.900	0	100
5.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.800.100	26.825.100	975.000	96,49
5.2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.829.262.515</b>	<b>3.799.700.312</b>	<b>29.562.203</b>	<b>99,23</b>
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.132.515	2.846.290.312	25.842.203	99,1
	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	957.130.000	953.410.000	3.720.000	99,61
5.3	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>96.899.800</b>	<b>96.899.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
5.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.899.800	96.899.800	0	100
5.4	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>932.858.074</b>	<b>769.342.663</b>	<b>163.515.411</b>	<b>82,47</b>
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.506.900	8.506.900	0	100
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	595.526.134	558.771.023	36.755.111	93,83
5.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.509.840	8.509.540	300	100
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	0	100
5.4.5	Kunjungan Tamu	10.575.000	10.560.000	15.000	99,86
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.096.000	151.352.200	126.743.800	54,42

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
5.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.144.200	28.143.000	1.200	100
<b>5.5</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>44.462.500</b>	<b>44.300.000</b>	<b>162.500</b>	<b>99,63</b>
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.462.500	44.300.000	162.500	99,63
<b>5.6</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>75.577.000</b>	<b>61.543.549</b>	<b>14.033.451</b>	<b>81,43</b>
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	5.100.000	0	100
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.475.000	54.441.549	14.033.451	79,51
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.002.000	2.002.000	0	100
<b>5.7</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>129.790.000</b>	<b>125.858.898</b>	<b>3.931.102</b>	<b>96,97</b>
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000	110.068.898	3.931.102	96,55
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.790.000	15.790.000	0	100
<b>JUMLAH</b>		<b>5.488.676.989</b>	<b>5.168.755.006</b>	<b>319.921.983</b>	<b>94,17</b>

Sumber : LKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari 1 (Satu) program rutin dan 4 (Empat) program teknis yang meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Program adalah Indeks pelayanan instansi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator nya adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator nya Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator nya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen berjalan dengan Lancar

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator nya Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen)

1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator nya Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator nya Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator nya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator nya Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikatornya Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator nya Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Indikator nya Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
    - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Indikatornya Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)
    - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Indikatornya Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)
    - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - Indikator nya Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)
    - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Indikator nya Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)
    - 4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
      - Indikator nya Penyediaan makan minum tamu (bulan)
    - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - Indikator nya Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)
    - 4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
      - Indikator nya Pelaksanaan FGD (kali)
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Indikator nya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Indikator nya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Indikator nya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Indikator nya Jumlah Materai (Lembar)
    - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Indikatornya Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)
    - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      - Indikator nya Fasilitas Pelayanan umum kantor
  7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Indikatornya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      - Indikator nya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara
    - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Indikator nya Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)
- B. Program Pendaftaran Penduduk
- Indikatornya adalah : 1) Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 2) Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak, 3) Cakupan Penerbitan Surat

Keterangan Pindah dan Datang, 4) Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Permanen, 5) Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan.

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator nya Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah

1.1 Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikatornya 1) Jumlah Pendataan Penduduk Non Permanen, 2) Pendaftaran SKTT Orang Asing, 3) Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan

1.2 Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Indikatornya Jumlah Cakupan KIA

1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikatornya Jumlah pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator nya adalah : 1) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian, 2) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, 3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian, 4) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun.

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator nya Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil

1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator nya Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator nya Persentase ketersediaan data Agregat kependudukan

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator nya Data Buku Agregat (2 Buku)

1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Indikator nya Data Buku Agregat (buku)

1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator nya Jumlah Perjanjian Kerjasama

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator nya Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.1 Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikatornya Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK

2.2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator nya 1 basis data kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikatornya Persentase ketersediaan data profil kependudukan, Persentase Pemanfaatan data kependudukan

1. Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator nya Dokumen Profil Kependudukan

1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Indikator nya Buku Profil Kependudukan

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.72.  
Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>98</b>	<b>98,10</b>	<b>A</b>
		<b>INDEKS KEPUASAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>80,68</b>	<b>B</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Perencanaan (Dokumen)	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen berjalan dengan Lancar	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dalam Daerah (Tahun)	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 buah	4 buah	100%
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%

No	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	100%
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Tahun)	12 kali	12 kali	100%
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Tahun)	1 tahun	1 tahun	100%
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Tahun)	1 tahun	1 tahun	100%
1.4.7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya FGD	1 Tahun	1 tahun	100%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	350 buah	350 buah	100%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 kali	12 kali	100%
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Pelayanan umum kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	12 Unit	12 Unit	100%
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	59 unit	59 unit	100%
<b>2</b>	<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>RASIO PENDUDUK BER KTP PERSATUAN PENDUDUK</b>	<b>168.194</b>	<b>173.364</b>	<b>103,07%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN KARTU KELUARGA</b>	<b>74.135</b>	<b>73.967</b>	<b>99,77%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK</b>	<b>64.008</b>	<b>21.581</b>	<b>33,71%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>100%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>100%</b>

No	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.1	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Cakupan Penerbitan KK, KTP, KIA dan Surat Pindah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk Non Permanen	0	259	100%
		Pendaftaran SKTT Orang Asing	0	4	100%
		Pendaftaran Penduduk Rentan dan Rentan Bencana Administrasi Kependudukan	0	0	100%
2.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan KIA	64.008	21.581	33.71%
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun	100%
3	<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>100%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
		<b>CAKUPAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		<b>CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 - 18 TAHUN</b>	<b>70.957</b>	<b>69.859</b>	<b>98,45%</b>
3.1	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
4	<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Data Buku Agregat (2 Buku)	2 Buku	2 Buku	100%
4.1.2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	41 OPD	16 OPD	39,02%
4.2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK	24 Unit	24 Unit	100%
4.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Basis Data Kependudukan	1 Basis Data	1 Basis Data	100%
5	<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
5.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	1 Buku	1 Buku	100%
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Buku Profil Kependudukan	1 Buku	1 Buku	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>93,37</b>

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.13.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.73.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Kebenaran data Kependudukan	Memberikan Sosialisasi dan Informasi Kepada Masyarakat Baik langsung, melalui Media masa dan sosialisasi kepada perangkat
2	Penguatan Infrastruktur system Informasi Pendaftaran Penduduk	Skema Strategi anggaran pendanaan dan pengadaan penguatan Infrastruktur system Informasi
3	Pengembangan Sistem Registrasi dalam Jaringan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi SIAK	Perlu di bentuk tim kajian teknis pengembangan system informasi administrasi kependudukan (sesuai dengan permendagri No. 95 Tahun 2019
4	Belum terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dokumen kependudukan dengan basis NIK Nasional	Tersedianya Desa tertib Adminduk dengan mengembangkan keserasian hubungan Pusat, Daerah dengan memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan tugas pembantuan kewenangan Sebagian urusan adminduk yang berpedoman kepada kewenangan tertuang dalam Perbup Tanjabtim tentang Tugas pembantuan adminduk tatacara Dafduk dan Capil (perpres

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		96 Tahun 2018 serta yang tiga substansi Baku dari Dirjen Dukcapil Kemendagri
5	Dukungan Jaringan Internet yang masih kurang memadai dalam mendukung pelayanan Adminduk	- Berkomunikasi dengan Dinas Kominfo - Mengajukan Permohonan Penambahan dari Kominfo
6	Tenaga Operator dari administrator Database yang berbasis	- Mengajukan permohonan untuk tenaga operator dan ADB yang berstatus ASN sehingga tanggung jawab pekerjaan Jelas
7	Masih Kurangnya dukungan terhadap anggaran pelayanan Adminduk belum bisa Maksimal	- Mengajukan penambahan Anggaran
8	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan adminduk masih sangat kurang	- Memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia - Mengajukan permohonan untuk penambahan alat-alat penunjang pelayanan adminduk seperti server, alat rekam, alat cetak, pc, printer Dll.

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.13.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.74.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenTanjung JabungTimur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan pelayanan serta berkoordinasi dengan dinas terkait perihal Kartu Identitas Anak yang bersekolah dibawah naungan Kementerian Agama.	Dukcapil akan berkoordinasi dengan kemenag untuk mendapatkan data sekda dibawah naungan kementrerian agama untuk mengetahui jumlah siswa dan penyusunan jadwal pelayanan keliling jemput bola di	Anak-anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan KIA sebagai Identitas Pribadi untuk mendapatkan Layanan Publik.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>tahun 2022 ini sebagaimana informasi bahwa dukcapil telah mendata sekolah dibawah naungan Diknas yang akan diberikan layanan keliling jemput bola ( telah terlaksana di beberapa sekolah SD dan SMP ). Pelayanan keliling jemput bola dilaksanakan sebagai upaya peningkatan angka pencapaian pencetakan KIA dimana pada tahun 2021 angka pencapaian KIA dari target nasional 30 % dukcapil telah melebihi target yaitu 33,71 %. Untuk meningkatkan kesadaran untuk memiliki KIA di masyarakat, dukcapil telah bekerja sama dengan gramedia jambi, jp store, toko buku Atlantik dan Pro AB Chiken dan Sheriff cafe muara sabak untuk memberikan diskon potongan harga bagi pelanggan yang menunjukkan KIA.</p>	
2	<p>Membenahi pelayanan terhadap data kependudukan dan dokumen lainnya yang masih menjadi keluhan masyarakat</p>	<p>Pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dari permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan serta tata cara yang telah sesuai dengan permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara</p>	<p>Pencapaian Target Pencetakan KIA yang di tetapkan oleh Dirjen Adminduk tercapai setiap tahunnya.</p>

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen dan kebenaran data pada dokumen kependudukan perlu ditingkatkan karena dokumen kependudukan akan digunakan di semua lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Sehingga kesamaan data pada dokumen kependudukan dan data pada dokumen yang dikeluarkan lembaga lainnya sangatlah perlu diperhatikan setiap individu masyarakat agar lancar untuk mendapatkan pelayanan publik baik urusan dalam negeri maupun luar negeri.</p>	
3	<p>Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019</p>	<p>Laporan LKPJ yang lebih terinci dan komprehensif</p>
4	<p>Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum</p>	<p>Munculnya Program/Kegiatan baru yang tidak masuk dalam perencanaan disebabkan karena program/kegiatan baru tersebut termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ketentuan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi</p>	<p>Dengan adanya Kebijakan Pemerintah maka Implementasi Pelaksanaan Adminduk yang sesuai dengan Perencanaan Skala Prioritas dan kebutuhan sehingga bisa sesuai kebutuhan</p>

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Khusus (DAK) non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan terbit di saat Forum Pembahasan (Asistensi) DAK di Jakarta di tahun berjalan 2020	
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	<p>Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan adminduk agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan melalui tahapan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan Pembuatan Aplikasi FireWall yang berfungsi melindungi jaringan komunikasi data adminduk yang terdapat pada system jaringan data yang di bangun Dinas Kominfo atau Provider.</li> <li>b. Membuat peraturan Bupati kab.tanjung Jabung timur terkait kegiatan peningkatan pelayanan Adminduk.</li> <li>c. Sinkronisasi data konsolidasi bersih dan big data kependudukan terpusat dengan data pelayanan SIAK daerah. Dengan demikian optimalisasi pelayanan akan tercapai.</li> <li>d. Merumuskan Perda pelaksanaan pelaksanaan Adminduk dgn menggunakan Perda inisiatif DPR Kab.tanjabt. yang mana adanya kepastian hukum</li> </ol>	<p>Dalam upaya melaksanakan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara Dafduk dan Capil tertuang dalam PMPN No. 108 tentang Jumlah Perpres tersebut yakni layanan berkualitas Disdukcapil Kab. Tanjung Jabung Timur akan menciptakan Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat Melalui Inovasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi Sampai ke Desa-Kelurahan sesuai Keabsahan Tindakan Pemerintahan (UU 30 Tahun 2014).</p>

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pelimpahan sebagian urusan Adminduk kpd desa kelurahan sesuai dengan PP Nomor 40 Th.2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang .nomor 23 th 2006 tentang adminduk dan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU.no.23 th 2006 tentang adminduk</p> <p>e. Membentuk kader Adminduk pada setiap desa dan kelurahan lingkup pemerintah kab. Tanjung Jabung Timur.</p>	

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
2. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi Desa;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang diberikan oleh Bupati.

#### 3.14.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melaksanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.75.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.053.529.802,01</b>	<b>2.999.869.486,00</b>	<b>53.660.316,01</b>	<b>98,24</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.285.000,00</b>	<b>34.770.000,00</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>78,51</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.050.000,00	6.810.000,00	240.000,00	96,60
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	7.205.000,00	6.425.000,00	780.000,00	89,17
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.030.000,00	21.535.000,00	8.495.000,00	71,71
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.666.300.549,01</b>	<b>2.644.986.278,00</b>	<b>21.314.271,01</b>	<b>99,20</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.264.731.949,01	2.251.966.278,00	12.765.671,01	99,44
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	401.568.600,00	393.020.000,00	8.548.600,00	97,87
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>33.100.000,00</b>	<b>33.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.324.253,00</b>	<b>118.994.030,00</b>	<b>14.330.223,00</b>	<b>89,25</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.810.200,00	2.810.200,00	0,00	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	42.991.161,00	42.795.150,00	196.011,00	99,54
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	25.668.892,00	25.614.000,00	54.892,00	99,79
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	54.279.000,00	40.199.680,00	14.079.320,00	74,06
1.5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>33.499.178,00</b>	<b>8.500.822,00</b>	<b>79,76</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	42.000.000,00	33.499.178,00	8.500.822,00	79,76
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>134.520.000,00</b>	<b>134.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	116.470.000,00	116.470.000,00	0,00	100,00
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>386.855.400,00</b>	<b>329.501.000,00</b>	<b>57.354.400,00</b>	<b>85,17</b>
2.1	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>386.855.400,00</b>	<b>329.501.000,00</b>	<b>57.354.400,00</b>	<b>85,17</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	278.395.200,00	241.224.000,00	37.171.200,00	86,65
2.1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	61.395.200,00	45.996.600,00	15.398.600,00	74,92
2.1.3	Pembinaan Dan Pemberdayaan Bumdesa Dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	47.065.000,00	42.280.000,00	4.785.000,00	89,83
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.038.728.400,00</b>	<b>876.189.160,00</b>	<b>162.539.240,00</b>	<b>84,35</b>
3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.038.728.400,00</b>	<b>876.189.160,00</b>	<b>162.539.240,00</b>	<b>84,35</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	43.165.850,00	41.486.250,00	1.679.600,00	96,11

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
3.1.2	Sub Kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	103.951.550,00	69.943.574,00	34.007.976,00	67,28
3.1.3	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga	891.610.000,00	764.759.736,00	126.850.664,00	85,77
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.479.113.602,01</b>	<b>4.205.559.646,00</b>	<b>273.553.956,01</b>	<b>93,89</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan

- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah monev yang dilaksanakan

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyelesaian administrasi keuangan daerah,

- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN

- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah,

- 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, Indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pakaian dinas ASN dan PHTT

- 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah,

- 4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan

1.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor

1.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah jenis barang cetakan

4.4 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar

4.5 Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Penyediaan makan minum rapat/tamu

4.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator

sub kegiatan (output) adalah Penyediaan makan minum rapat/tamu

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator

sub kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan Peralatan dan mesin

6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Indikator sub kegiatan (output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator Program (Outcome) Administrasi Pemerintahan Desa adalah Persentase Desa dengan adm baik, Persentase BUMDesa yang aktif. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa,

1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah monev yang dilaksanakan

1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah BUMDesa yang dibina

1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah desa/kelurahan binaan

C. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator Program (Outcome) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah Persentase PKK aktif, Persentase Inovasi Teknologi yang dihasilkan posyantek. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina,

1.1 Sub kegiatan Peningkatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kelembagaan yang dibina

1.2 Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah inovasi TTG

1.3 Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Binaan PKK.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>81,03</b>	<b>103,8%</b>
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah monev yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT	41 stel	41 stel	100%
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	2 orang	2 orang	100%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	7 jenis	7 jenis	100%
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	100%
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	8 jenis	8 jenis	100%
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan makan minum rapat/tamu	12 bulan	12 bulan	100%
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	12 unit	12 unit	100%
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Unit)	5 Unit	5 Unit	100%
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	1 gedung	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN ADM BAIK	75,34%	39,73%	52,73%
		PERSENTASE BUMDESA YANG AKTIF	68,49%	65,75%	95,99%
2.1	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah monev yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	50%
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	73 BumDesa	73 BumDesa	100%
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	jumlah desa/kelurahan binaan	6 desa/kel	6 desa/kel	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PRESENTASE PKK AKTIF	100%	100%	100%
		PERSENTASE INOVASI TEKNOLOGI YANG DIHASILKAN POSYANTEK	64,29%	71,43%	111%
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	100%	100%
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (rt, rw, pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah kelembagaan yang dibina	2 lembaga	2 lembaga	100%
3.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG	2 unit	2 unit	100%
3.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Binaan PKK	104 desa/kel	104 desa/kel	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>97,60</b>

Sumber : LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pada tahun 2021 Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diatur dalam Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 411 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 dengan pagu alokasi dana desa sebesar **Rp. 62.830.780.317,-** (*Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga*

puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) untuk 10 Kecamatan dan 73 desa. Alokasi ini terdiri dari Alokasi dasar (Pemerataan) dan Alokasi berdasarkan formula (Proporsional). Selain ADD Pemerintah Pusat, melalui APBN, telah menganggarkan Dana Desa (DD) yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Tahun 2021 tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021. Dana Desa untuk tahun 2021 sebesar **Rp. 76.648.172,-** ( *Tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah* ) untuk 10 Kecamatan dan 73 Desa dengan sistem pembagian didasarkan pada tiga alokasi yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi berdasarkan formula.

Tabel 3.77.  
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6)
1	PENDAPATAN	146.292.117.294,34	144.345.422.585,90	1.946.694.708,44	
2	BELANJA	143.335.650.974,74	129.184.308.955,42	14.151.342.019,32	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>2.956.466.319,60</b>	<b>15.161.113.630,48</b>	<b>12.204.647.310,88</b>	
3	PEMBIAYAAN	(2.367.166.527,57)	423.089.941,31	(1.944.076.586,26)	
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>589.299.792,03</b>	<b>14.738.023.689,17</b>	<b>(14.148.723.897,14)</b>	

Sumber : LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.14.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3 78.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	SDM pengurus BUMDesa yang masih rendah, sehingga sering terjadi pergantian pengurus dan pengurus yang tidak aktif	Salah satu faktor penting untuk mendukung kemajuan BUMDesa adalah pengurus BUMDesa yang kuat dan kompeten. Maka dalam pemilihan pengurus harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu seperti mempunyai jiwa wirausaha, tingkat pendidikan yang memadai, mempunyai pengalaman kerja dan integritas. Untuk meningkatkan kapasitas pengurus maka dilakukan

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		pembinaan dan pelatihan dalam pengelolaan BUMDesa
2	Usaha yang dijalankan tidak dilakukan melalui studi kelayakan usaha, sehingga usaha yang dikembangkan tidak produktif	Seringkali terjadi usaha yang dikembangkan BUMDesa tidak produktif sehingga tidak berkembang dan tidak menguntungkan. Kondisi ini diantaranya disebabkan pengurus BUMDesa tidak melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum melaksanakan usaha. Maka pengurus BUMDesa diharapkan melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan usaha, dengan memperhatikan potensi SDA, kebutuhan pasar, faktor resiko, infrastruktur pendukung dll
3	Masalah pengaturan organisasi, banyak BUMDesa yang kurang berkembang karena karena kurang pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDesa, meskipun kepengurusan sudah dibentuk, namun pada implementasinya pengurus BUMDesa belum bisa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan baik	Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja kepada pengurus BUMDesa
4	Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDesa seperti KUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan desa	Memberikan Sosialisasi terkait pentingnya BUMdesa bagi perekonomian desa serta mendorong desa agar memberikan penyertaan modal ke BUMDesa agar usaha BUMDesa dapat berjalan sesuai dengan unit usaha yang tertuang dalam AD/ART.
5	BUMDesa yang pengelolaannya sudah baik masih kesulitan dalam perihal promosi, oleh karena itu kepengurusan BUMDesa harus benar mampu melihat peluang dan mencari cara untuk melakukan promosi.	Melakukan promosi melalui media sosial, promosi atau memberikan produk secara gratis, menentukan lokasi yang strategis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan
6	Teknologi Tepat Guna yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat belum dimanfaatkan oleh masyarakat banyak	Teknologi yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat harus dipromosikan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BUMDesa, dinas terkait, swasta) agar teknologi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut
7	Pengurus Posyantek masih banyak yang belum aktif, masih adanya	Pembinaan keseluruhan posyantek agar aktif kembali dan bisa menggali serta

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	kecamatan yang belum membentuk sekretariat posyantek, serta kurangnya inovasi teknologi desa didesa	menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta Mendorong masyarakat agar lebih produktif dan jeli dalam menggali serta menciptakan inovasi teknologi tepat guna
8	Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat sehingga banyak BUMDesa yang strukturnya diisi oleh orang-orang terdekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri	Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja kepada pengurus BUMDesa dan aparatur desa
9	Belum optimalnya pemahaman aparatur dan lembaga yang ada di desa terutama dalam hal memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa ataupun prioritas penggunaan dana desa yang diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa seperti RKP Desa, APBDesa, DPA dan RAB sehingga berpengaruh pada keterlambatan dalam proses pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.	Pembinaan dan asistensi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa dan penyusunan dokumen perencanaan desa.
10	Sering terjadinya pergantian aparatur pemerintah desa, sehingga memperlambat dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, permasalahan intern lainnya di desa juga berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa.	Melakukan pembinaan ke desa supaya tidak melakukan pergantian aparat desa serta melakukan pembinaan terkait bagaimana menyelesaikan masalah intern supaya tidak berpengaruh pada kinerja yang lainnya
11	Perubahan kebijakan mengenai penyaluran dana desa sebagai respon atas pandemi covid 19	Pembinaan dan sosialisasi menyikapi kebijakan baru yang turun dari pemerintah pusat
12	Dalam menemukan dan mengembangkan potensi desa, banyak desa yang kurang mengenal potensi desa yang dapat dikembangkan untuk dikelola BUMDesa	Penguatan kapasitas pengurus BUMDes agar bisa mengelola potensi yang dimiliki desa pembinaan ke desa terkait pengembangan BUMDesa dengan melakukan pemetaan potensi ekonomi desa, diawali dengan dialog dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaku wirausaha desa lainnya tentang potensi desa, merancang inovasi dan pengembangan produk yang dapat dikelola oleh BUMDesa, sehingga keberadaan usaha BUMDesa benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan menjadi pesaing usaha yang telah ada didesa.

Sumber : LKPJ Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.14.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.79.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tatacara pembagian penetapan rincian dana desa	Perbup no.3 tahun 2021	Formula pembagian rincian alokasi dana desa untuk setiap desa
2.	Peran desa dalam konvergensi pencegahan stunting terintegrasi	Perbup no 21 tahun 2021	Peran desa dalam penanganan stunting
3.	Pedoman pengelolaan aset desa	Perbup no 58 tahun 2021	Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan aset desa
4.	Penetapan alokasi dana desa	SK nomor 35 tahun 2021	Menetapkan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa
5.	Penetapan standarisasi biaya belanja desa	SK nomor 84 tahun 2021	Menetapkan standarisasi biaya belanja desa yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran desa
6.	Pelimpahan kewenangan penandatanganan surat pengantar penyaluran dana desa kepada kepala dinas PMD	SK nomor 207 tahun 2021	Pelimpahan wewenang penandatanganan surat pengantar dari Bupati Ke Kepala Dinas PMD
7.	Tim pembahasan rancangan Perbup tentang peran desa dalam konvergensi pencegahan stunting terintegrasi	SK nomor 410 tahun 2021	Pembentukan tim penyusunan Perbup
8.	Perubahan atas keputusan Bupati nomor 35 tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa	SK nomor 411 tahun 2021	Penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
9.	Penetapan juara pos pelayanan TTG tingkat kabupaten	SK nomor 540 tahun 2021	Hasil Pemenang Juara Posyantek kecamatan
10.	Penetapan juara inovasi TTG tingkat kabupaten	SK nomor 541 tahun 2021	Hasil Pemenang Juara Inovasi TTG

Sumber : LKPJ Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.14.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.80.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Teknologi Tepat Guna yang ada pada salah satu Kecamatan agar dikembangkan juga ke Kecamatan yang lain dengan potensi yang sama	Akan dilakukan inventarisasi TTG yg ada, kemudian dilakukan pembinaan melalui kelompok pos pelayanan teknologi (Posyantek) untuk pengembangan TTG sesuai dengan potensi yg ada di Kecamatan dan desa	TTG yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang ada di kecamatan/desa
2	Mendorong BUMDES agar lebih inovatif dalam usahanya.	1. Penguatan dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDESA, dgn melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus.  2. Melakukan pendampingan BUMDESA utk melakukan study kelayakan usaha,	1. Pembinaan dan Monev BUMDes 2. Mengikuti BUMDes Expo Provinsi Jambi

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>sebelum melakukan usaha.</p> <p>3. Mengikutkan BUMDESA berbagai event yg berorientasi bisnis seperti : BUMDES EXPO, PAMERAN, DAN MAGANG.</p>	
3	Agar setiap desa memiliki perpustakaan desa	Akan melaksanakan koordinasi dgn Dinas Perpustakaan, melakukan sosialisasi kedesa utk merencanakan pembangunan perpustakaan desa melalui APBDES, dengan bantuan penyediaan buku-buku dari Dinas Perpustakaan	Melaksanakan koordinasi dengan dinas perpustakaan dan sosialisasi ke desa-desa
4	Dalam penyampaian Data agar dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembahasan dengan DPRD	Akan melaksanakan koreksi data terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembahasan dengan DPRD	Melaksanakan koreksi data dengan bidang terkait.
5	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Penyusunan Pelaporan LKPJ Dinas PMD akan mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019.	Penyusunan LKPJ akan mempedomani PP 13 Tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 Tahun 2020
6	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena	Dalam penyusunan rencana kerja anggaran, diupayakan agar kegiatan yg tidak	Mengusulkan kembali program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada APBD tahun berikutnya.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	terlaksana yang disebabkan refocusing anggaran, dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya jika anggaran memungkinkan dan tidak membuat kegiatan baru yg tdk relevan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mempedomani RPJMD, Renstra, Renja dan skala prioritas	
7	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Dinas PMD Mengupayakan untuk selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dgn OPD terkait setiap program dan kegiatan yg akan dilaksanakan. Masukan dan saran dari mitra kerja DPRD sangat diharapkan dan diperhatikan agar program dan kegiatan yg dilaksanakan tepat sasaran, efisien dan efektif.	Sudah melaksanakan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan.

Sumber : LKPJ Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Bupati.

### 3.15.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan bidang urusan Pengendalian Penduduk. Pada Tahun 2021 Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.81.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.968.368.860</b>	<b>3.867.534.647</b>	<b>100.834.213</b>	<b>97,46</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>33.467.000</b>	<b>31.255.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>93,39</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.000	12.600.000	-	100,00
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	-	100,00
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.867.000	11.655.000	2.212.000	84,05
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.608.041.436</b>	<b>3.566.893.668</b>	<b>41.147.768</b>	<b>98,86</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.634.441.436	2.603.093.668	31.347.768	98,81
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	973.600.000	963.800.000	9.800.000	98,99
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85.697.978</b>	<b>83.438.978</b>	<b>2.259.000</b>	<b>97,36</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1.572.200	1.572.200	-	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	39.999.678	39.999.678	-	100,00
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.121.100	14.121.100	-	100,00
1.3.4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.610.000	11.340.000	270.000	97,67
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.395.000	16.406.000	1.989.000	89,19
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.990.446</b>	<b>9.540.000</b>	<b>450.446</b>	<b>95,49</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.446	9.540.000	450.446	95,49
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.000.000</b>	<b>25.747.158</b>	<b>16.252.842</b>	<b>61,30</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	25.747.158	16.252.842	61,30
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>189.172.000</b>	<b>150.659.843</b>	<b>38.512.157</b>	<b>79,64</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.200.000	122.007.968	37.192.032	76,64
1.6.2	Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000	9.000.000	980.000	90,18
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.992.000	19.651.875	340.125	98,30
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>129.547.000</b>	<b>129.427.000</b>	<b>120.000</b>	<b>99,91</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>115.225.000</b>	<b>115.105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>99,90</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Pengendalian Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	115.225.000	115.105.000	120.000	99,90
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.322.000</b>	<b>14.322.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data	14.322.000	14.322.000	-	100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>4.077.256.924</b>	<b>3.574.746.400</b>	<b>502.510.524</b>	<b>87,68</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>970.418.074</b>	<b>888.714.100</b>	<b>81.703.974</b>	<b>91,58</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	167.859.884	123.814.600	44.045.284	73,76
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	802.558.190	764.899.500	37.658.690	95,31
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>446.400.000</b>	<b>446.400.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	446.400.000	446.400.000	-	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang</b>	<b>2.107.447.050</b>	<b>1.716.190.500</b>	<b>391.256.550</b>	<b>81,43</b>
3.3.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42.228.000	42.228.000	-	100,00
3.3.2	Sub Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	104.524.150	104.207.000	317.150	99,70
3.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.504.842.000	1.246.763.500	258.078.500	82,85
3.3.4	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	18.562.000	16.562.000	2.000.000	89,23
3.3.5	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	437.290.900	306.430.000	130.860.900	70,07
<b>3.4</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>552.991.800</b>	<b>523.441.800</b>	<b>29.550.000</b>	<b>94,66</b>
3.4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program di Kampung KB	552.991.800	523.441.800	29.550.000	94,66
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>648.027.168</b>	<b>389.198.000</b>	<b>258.829.168</b>	<b>60,06</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan</b>	<b>648.027.168</b>	<b>389.198.000</b>	<b>258.829.168</b>	<b>60,06</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	648.027.168	389.198.000	258.829.168	60,06
<b>Total</b>		<b>8.823.199.952</b>	<b>7.960.906.047</b>	<b>862.293.905</b>	<b>90,23</b>

Sumber : LKPJ Dinas PPKB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah,

##### 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

##### 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan,
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)
- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum
- 3.1 Sub Kegiatan Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)
- 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)
- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)
- 3.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu
- 3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara

6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja (Output) adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)

## B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Indikator Program (Outcome) Program Pengendalian Penduduk adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk,

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanapan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota.

Indikator kegiatan adalah Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Data dan Informasi Keluarga (SIGA) yang Tersedia.

## C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Indikator Program (Outcome) Program Pembinaan Keluarga Berencana adalah 1) Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 tahun, 2) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr, 3) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) dan 4) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Rate/ASFR 15-19 Tahun). Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

1.1 Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)

2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Indikator kegiatan adalah Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan Dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

2.1 Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerak Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang.

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota

3.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

3.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB

3.4 Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

3.5 Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

#### 4.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program di Kampung KB

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kampung KB Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB

### D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator Program (Outcome) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### 1.1 Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.82.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>88,80</b>	<b>113,85</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100%
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.2	<b>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Penyelesaian Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7 Jenis	7 Jenis	100%
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	100%
1.3.4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	8 unit	8 unit	100%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	132 unit	132 unit	100%
1.6.2	Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)	21 unit	21 unit	100%
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1 Gedung	1 Gedung	100%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>LPP (LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK)</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>	<b>98,18%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase Panduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Pengendalian Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.2.1	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data	Jumlah Data dan Informasi Keluarga (SIGA) yang Tersedia	11 Laporan	11 Laporan	100%
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,74	4	145,65%
		ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/ MCPR)	58	63,48	109,45%
		PRESENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED)	14	12,10	86,43%
		ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPESIFIC FERTILITY RATE/ ASFR 15-19 TAHUN)	37	74,14	200,38%
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	100%	100%
3.1.1	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan	100%
3.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan Dalam Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%
3.2.1	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	93 Kader	93 Kader	100%
3.3	Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota	100%	99,09%	100%
3.3.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Laporan	18 Laporan	100%
3.3.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.700 orang	25.628 orang	95,46%
3.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	62 unit	62 unit	100%
3.3.4	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	87 orang	87 orang	100%
3.3.5	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	11 Laporan	11 Laporan	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	100%
3.4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	14 Kampung KB	14 Kampung KB	100%
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)</b>	<b>64,43</b>	<b>54,43</b>	<b>84,48%</b>
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%
4.1.1	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	10 Laporan	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>119,77</b>

Sumber : LKPJ Dinas PPKB. Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.15.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.83.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,10% atau sebesar 98,18%	Meningkatkan penyuluhan KB serta sosialisasi program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)
2	Tingginya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19 Tahun) sebesar 74,14% atau sebesar 200,38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Penyuluhan pada Remaja dengan penguatan pendewasaan usia perkawinan</li> <li>b. Meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja</li> <li>c. Meningkatkan pelayanan KB bagi PUS muda agar dapat menunda terlalu muda melahirkan</li> <li>d. Meningkatkan kesertaan remaja dalam kegiatan kelompok kegiatan GenRe dan PIK-R</li> </ul>

No	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		e. Meningkatkan koordinasi dan jajaran Departemen Agama hingga ke kelurahan/desa berbentuk Toga Toma dalam rangka mendukung program Usia Ideal Menikah.
3.	Rendahnya jasa medis tindakan MOW, MOP serta keterbatasannya kegiatan IUD dan Implan, mengakibatkan banyaknya akseptor yang tidak terlayani. Hal ini berpengaruh terhadap capaian indikator jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hanya 25.628 orang atau tercapai hanya 94,86%	a. Penyesuaian jasa medis MOW dan MOP pada Kegiatan Pelayanan KB Bergerak b. Penambahan jumlah akseptor pada kegiatan IUD dan Implan c. Penambahan bahan habis pakai (BHP) untuk kegiatan pelayanan KB, serta penambahan biaya pendamping kegiatan BOKB Pelayanan KB Bergerak yang bersumber dari APBD
3	Pandemi Covid 19 selama tahun 2021 membatasi gerakan pelayanan KB hingga ke pedesaan	Kegiatan penyuluhan tetap dilakukan secara bertahap per area binaan
4	Terbatasnya dukungan kegiatan dan dana yang ada untuk mencapai wilayah binaan hingga ke kelurahan/desa	Peningkatan dukungan dana kegiatan diharapkan dapat membantu tercapainya indikator target kegiatan
5	Makin banyaknya administrasi yang harus diselesaikan oleh Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) ASN dalam urusan kepegawaian seperti naik pangkat, gaji berkala serta administrasi lainnya, sehingga tupoksi utama dalam penyuluhan terkadang tidak fokus terhadap sasaran.	Membuat urusan administrasi secara kolektif sehingga meringankan PKB/PLKB ASN dan Non ASN dalam kepengurusan berkas.

Sumber : LKPJ Dinas PPKB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.15.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.84.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2035	Tersedianya Proyeksi/Gambaran Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2035 sehingga dapat disusun perencanaan kependudukan dalam konteks mengantisipasi dan sekaligus untuk mengarahkan perkembangan kependudukan melalui kebijakan di bidang kependudukan.
2	Nama Desa dan Kelurahan Lokus Stunting Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 676 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokus Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	Tersedianya daftar nama desa dan kelurahan Lokus Stunting Tahun 2021 sehingga kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan tepat sasaran.

Sumber : LKPJ Dinas PPKB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.15.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.85.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021	Tindak Lanjut yang Dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat bahwa Ber-KB itu keren	Melakukan kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Masyarakat menyadari bahwa KB itu tidak hanya pembatasan jumlah anak, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dalam pola asuh anak, peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKA serta peningkatan kesejahteraan keluarga

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021	Tindak Lanjut yang Dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melakukan perbaikan penyusunan LKPJ secara lebih terinci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaporan LKPJ yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yang ditunda pelaksanaannya hanya sebagian kecil dapat dilaksanakan, karena keterbatasan dana yang ada	Hanya beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2020 yang dapat diakomodir tahun berikutnya, dikarenakan keterbatasan dana yang ada dan kebutuhan dana kegiatan lain yang lebih mendesak.
4	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Melakukan komunikasi, koordinasi antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD dalam beberapa kegiatan momentum pelayanan KB serta kegiatan penurunan stunting di kecamatan	Kegiatan Momentum pelayanan KB dan penurunan stunting di kecamatan melibatkan beberapa OPD dan mitra kerja terkait dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar serta tepat sasaran

Sumber : LKPJ Dinas PPKB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.16. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. penyelenggaraan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perhubungan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.16.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang urusan Perhubungan. Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 3 (Tiga) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 3.86.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>5.020.751.020,00</b>	<b>4.404.127.917</b>	<b>616.623.103,00</b>	<b>87,72</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.852.300,00</b>	<b>84.952.300,00</b>	<b>21.900.000,00</b>	<b>79,50</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000,00	10.090.000,00	3.910.000,00	72,07
1.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	16.827.300,00	16.377.300,00	450.000,00	97,33
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.025.000,00	58.485.000,00	17.540.000,00	76,93
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.659.039.769,00</b>	<b>3.259.394.477,00</b>	<b>399.645.292,00</b>	<b>89,08</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.503.609.769,00	2.152.124.477,00	351.485.292,00	85,96
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Skpd	1.155.430.000,00	1.107.270.000,00	48.160.000,00	95,83
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>217.248.951,00</b>	<b>185.969.833,00</b>	<b>31.279.118,00</b>	<b>85,60</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	98.710.250,00	98.590.250,00	120.000,00	99,88
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak Dan Pengandaan	24.999.701,00	24.999.701,00	0,00	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	73.739.000,00	42.579.882,00	31.159.118,00	57,74
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>86.510.000,00</b>	<b>86.360.632,00</b>	<b>149.368,00</b>	<b>99,83</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00	100,00
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	63.300.000,00	63.150.632,00	149.368,00	99,76
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>132.461.225,00</b>	<b>22.538.775,00</b>	<b>85,46</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	149.000.000,00	126.461.225,00	22.538.775,00	84,87
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>796.100.000,00</b>	<b>654.989.450,00</b>	<b>141.110.550,00</b>	<b>82,27</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	449.920.000,00	312.541.250,00	137.378.750,00	69,47
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	346.180.000,00	342.448.200,00	3.731.800,00	98,92
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>722.700.000,00</b>	<b>133.575.000,00</b>	<b>589.125.000,00</b>	<b>18,48</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>91.440.000,00</b>	<b>16,87</b>
2.1.1	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	110.000.000,00	18.560.000,00	91.440.000,00	16,87
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>5,56</b>
2.3.1	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	5.000.000,00	85.000.000,00	5,56
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota</b>	<b>122.700.000,00</b>	<b>110.015.000,00</b>	<b>12.685.000,00</b>	<b>89,66</b>
2.4.1	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	42.300.000,00	37.135.000,00	5.165.000,00	87,79
2.4.2	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	80.400.000,00	72.880.000,00	7.520.000,00	90,65
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>309.560.000,00</b>	<b>216.713.500,00</b>	<b>92.846.500,00</b>	<b>70,01</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau</b>	<b>234.560.000,00</b>	<b>216.713.500,00</b>	<b>17.846.500,00</b>	<b>92,39</b>
3.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	48.330.000,00	42.935.000,00	5.395.000,00	88,84
3.2.2	Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau	130.000.000,00	126.538.500,00	3.461.500,00	97,34
3.2.3	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	10.610.000,00	9.170.000,00	1.440.000,00	86,43
3.2.4	Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	45.620.000,00	38.070.000,00	7.550.000,00	83,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.053.011.020,00</b>	<b>4.754.416.417,00</b>	<b>1.298.594.603,00</b>	<b>78,55</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan;
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dan Keuangan;
- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev Yang Dilaksanakan;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
- 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN;
- 1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan;
- 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Alat Tulis Kantor;
- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak Dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak;
- 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar;
- 3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
- 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin;
- 1.2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Gedung Kantor;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai;
- 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara;
  - 6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.

#### B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator Program (Outcome) Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan
  - 1.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpelihara.
  - 1.2 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  - 1.3 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Paket Pekerjaan
- 2) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - 2.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Prasarana Jalan Yang Terpelihara.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
  - 3.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pelaksanaan Pam Posko Ditempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun;
  - 3.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengawasan / Pemanduan Rute Yang Aman Di tempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun.

### C. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Pelayaran adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Paket Pekerjaan;

1.2 Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Paket Perencanaan / Pekerjaan;

1.3 Sub Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun;

1.4 Sub Kegiatan Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pengawasan.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.87.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Pelayanan Instansi	78	78	100,00
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dok	4 dok	100,00
1.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Dan Keuangan	4 dok	4 dok	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Monev Yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	12 Jenis	12 Jenis	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Alat Tulis Kantor	01 Tahun	01 Tahun	100,00
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	07 Jenis	07 Jenis	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100,00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin	04 Unit	04 Unit	100,00
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	03 Paket	03 Paket	100,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.300 Buah	1.300 Buah	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	18 Unit	18 Unit	100,00
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	123 Unit	123 Unit	100,00
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas</b>	<b>100,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpelihara	3,00 Unit	0,00 Unit	0,00
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Paket Pekerjaan	1,00 Paket	0,00 Paket	0,00
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000 Buku	0,00 Buku	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Pam Posko Ditempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun	01 Tahun	01 Tahun	100,00
2.4.2	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Pengawasan / Pemanduan Rute Yang Aman Di tempat Yang Sudah Ditetapkan Selama Satu Tahun	01 Tahun	01 Tahun	100,00
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau</b>	<b>Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Pekerjaan	01 Paket	01 Paket	100,00
3.1.2	Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Paket Perencanaan / Pekerjaan	02 Paket	02 Paket	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1.3	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Operasional Dan Database Yang Disusun	01 Dok	01 Dok	100,00
3.1.4	Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Pengawasan	01 Dok	01 Dok	100,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>75,00</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.16.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.88.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih minimnya sumber daya manusia perhubungan yang handal dan area kerja yang cukup luas sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas baik secara administrasi maupun operasional	Meningkatkan Keikutsertaan ASN Bidang Perhubungan Untuk Mengikuti Diklat – Diklat Teknis Perhubungan dan perlunya dibentuk UPTD terminal angkutan desa dan UPTD LLASDP yang tersebar di kecamatan - kecamatan.
2	Masih Minimnya Sarana Prasarana Penunjang Yang Tersedia	Terus diupayakannya Peningkatan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan terminal barang / penumpang dengan dilengkapi fasilitas umum sebagai pelayanan masyarakat dan fasilitas teknis alat pengujian yang lengkap dan terkalibrasi secara berkala serta peningkatan sarana – sarana penunjang kegiatan lainnya
3	Minimnya anggaran yang tersedia sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional maupun sarana prasarana	Terus dijalinnya koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Pusat seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PDT dan lain-lain

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.16.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 1 (Satu) Peraturan Bupati sebagaimana terlihat pada Tabel 3.89 berikut;

Tabel 3.89.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	Pengaturan Dan Pengendalian Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017	Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.16.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.90.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengupayakan agar Jembatan Muara Sabak masuk dalam Peta Navigasi Pelayaran	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mengupayakan memasukkan	

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		jembatan Muara Sabak masuk dalam peta navigasi pelayaran dengan menyurati Distrik Navigasi Kelas I Palembang sesuai dengan surat nomor : 550 / 162 / Dishub tentang Peta Navigasi Pelayaran tanggal 6 April 2021 dan dilanjutkan dengan pertemuan di Distrik Navigasi Palembang namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya	
2	Berkoordinasi dengan TAPD agar kebutuhan kegiatan KIR kendaraan dapat dipenuhi sehingga dapat memberikan peningkatan PAD bagi daerah	Pada tahun 2020 pengadaan alat uji KIR sudah diusulkan, namun terkena refocusing	Alat uji KIR sudah diadakan pada tahun 2021 ( Break Tester ), namun pada perjalanannya ada uji kir yang error yaitu smoke tester untuk alat uji emisi bensin, sehingga baru terlaksana kalibrasi alat KIR, namun belum terlaksana akreditasinya karena kerusakan alat tersebut.
3	Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap portal liar khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur	Kegiatan pengawasan dan penertiban akan kami laksanakan, khususnya yang ada di Muara Sabak Timur	
4	Memfungsikan kembali portal untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang semakin parah dan merugikan masyarakat serta		

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terhadap pembatasan muatan kendaraan		
5	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Untuk periode berikutnya kami akan menyampaikan Laporan LKPJ sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan LKPJ yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Terhadap program / kegiatan TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program dan kegiatan baru yang tidak relevan	Ada beberapa program / kegiatan di tahun 2020 yang terkena refocusing yang telah dianggarkan kembali di Tahun 2021 seperti alat uji KIR	Agar terjadi peningkatan PAD sektor perhubungan
7	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas – luasnya dalam	Kami akan lebih meningkatkan lagi komunikasi dan koordinasi kami dengan OPD – OPD lainnya dan dengan mitra kerja di DPR untuk lebih meningkatkan pencapaian program kegiatan dinas sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas – luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT		
8	Memberikan solusi dalam mengatasi masalah transportasi serta sarana prasarana transportasi sehingga peningkatan ekonomi masyarakat dapat meningkat		

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

### 3.17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten;
3. penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
4. penyelenggaraan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;

6. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

### 3.17.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 3 bidang urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.91.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.099.710.090</b>	<b>2.988.363.644</b>	<b>111.346.446</b>	<b>96,41</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.498.000</b>	<b>24.032.000</b>	<b>13.466.000</b>	<b>64,09</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.141.000	2.094.000	1.047.000	66,67
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.293.000	8.803.000	3.490.000	71,61
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.064.000	13.135.000	8.929.000	59,53
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.581.854.249</b>	<b>2.523.368.726</b>	<b>58.485.523</b>	<b>97,73</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.574.249	1.840.708.726	41.865.523	97,78
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	699.280.000	682.660.000	16.620.000	97,62
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>32.200.000</b>	<b>28.200.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>87,58</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	28.200.000	28.200.000	0	100,00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	0	4.000.000	0,00
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>113.711.841</b>	<b>101.413.068</b>	<b>12.298.773</b>	<b>89,18</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.240.000	7.521.350	1.718.650	81,40
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.698.447	46.652.400	46.047	99,90
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.812.394	16.369.350	443.044	97,36
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	4.800.000	4.200.000	600.000	87,50
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.080.000	4.080.000	0	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.081.000	22.589.968	9.491.032	70,42
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>90.275.000</b>	<b>225.000</b>	<b>99,75</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.500.000	90.275.000	225.000	99,75
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.500.000</b>	<b>90.045.550</b>	<b>15.454.450</b>	<b>85,35</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	2.300.000	0	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.200.000	87.745.550	15.454.450	85,02
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>138.446.000</b>	<b>131.029.300</b>	<b>7.416.700</b>	<b>94,64</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.420.000	95.686.500	733.500	99,24
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.590.000	26.937.400	6.652.600	80,19
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.436.000	8.405.400	30.600	99,64
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>169.422.199</b>	<b>120.951.060</b>	<b>48.471.139</b>	<b>71,39</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.422.199</b>	<b>120.951.060</b>	<b>48.471.139</b>	<b>71,39</b>
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	24.381.000	13.217.360	11.163.640	54,21
2.1.2	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	145.041.199	107.733.700	37.307.499	74,28
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1.361.633.100</b>	<b>1.328.966.549</b>	<b>32.666.551</b>	<b>97,60</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan E - Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.361.633.100</b>	<b>1.328.966.549</b>	<b>32.666.551</b>	<b>97,60</b>
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.338.125.300	1.310.671.374	27.453.926	97,95
3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	23.507.800	18.295.175	5.212.625	77,83
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>79.565.500</b>	<b>66.510.500</b>	<b>13.055.000</b>	<b>83,59</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.565.500</b>	<b>66.510.500</b>	<b>13.055.000</b>	<b>83,59</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79.565.500	66.510.500	13.055.000	83,59
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>7.541.100</b>	<b>5.574.963</b>	<b>1.966.137</b>	<b>73,93</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.541.100</b>	<b>5.574.963</b>	<b>1.966.137</b>	<b>73,93</b>
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.541.100	5.574.963	1.966.137	73,93

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	(5=3-4)	(6=4/3*100)
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.717.871.989,00</b>	<b>4.510.366.716,00</b>	<b>207.505.273,00</b>	<b>95,60</b>

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah,
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Kinerja
  - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.4 Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah,
  - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan
  - 1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor

- 1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan
  - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar
  - 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu
  - 1.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah
  - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah,
    - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin
  - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
    - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai
    - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah,
    - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
    - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin
    - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara
- B. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan Perangkat Daerah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan Perangkat Daerah,
    - 1.1 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

1.2 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah KIM Desa/Kel yang di bina, Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Jumlah Pendapatan

C. Program Aplikasi Informatika

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah dan Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi,

1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah

1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Aplikasi terbangun

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang di Informasikan Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral,

1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Statistik Sektoral

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik,

1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandian

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.92.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78,62</b>	<b>101</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dok	2 Dok	66,67
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	7 Dok	5 Dok	71,43
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	44 stel	44 stel	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	1 Orang	0	0
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	9 Jenis	9 Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Pembayaran tagihan surat kabar	12	Bulan	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)	7 Unit	7 Unit	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	230 Lembar	230 Lembar	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	7 Unit	7 Unit	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	1 Gedung	1 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE INFORMASI PUBLIK YANG DI PUBLIKASIKAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>74,42</b>	<b>74,42</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>28 OPD</b>	<b>28 OPD</b>	<b>10</b>
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
2.1.2	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Jumlah KIM Desa/Kel yang di bina - Jumlah Pengendalian Menara Telekomunikasi - Jumlah Pendapatan (juta)	12 Desa/Kel 83 Menara Rp.285 juta	14 Desa/Kel 87 Menara Rp.292,3 juta	108
<b>3</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>PERSENTASE APLIKASI YANG MENGGUNAKAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH</b>	<b>72,73</b>	<b>77,27</b>	<b>106</b>
		<b>PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TIK</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan E - Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jaringan Intranet OPD yang terintegrasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (OPD)	1 OPD	1 OPD	100
3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terbangun (Aplikasi)	16 Aplikasi	17 Aplikasi	106
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>PERSENTASE DATA STATISTIK SEKTORAL OPD YANG DI INFORMASIKAN</b>	<b>50,00</b>	<b>56,25</b>	<b>113</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang menginformasikan data statistik sektoral</b>	<b>16 OPD</b>	<b>18 OPD</b>	<b>113</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	6 Dokumen	5 Dokumen	83
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23,26</b>	<b>9,3</b>	<b>40</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem elektronik yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik (OPD)</b>	<b>10 OPD</b>	<b>4 OPD</b>	<b>40</b>
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>93,33</b>

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.17.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.93.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum Optimalnya Standar Pelayanan Informasi Publik di OPD dan Website OPD yang tidak terupdate	Standar Pelayanan Informasi Publik di OPD untuk segera difungsikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi
2	Belum optimalnya pengelolaan PPID sebagai unit kerja pengelola dan penyelenggara keterbukaan informasi publik	Penguatan kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	Pemanfaatan system aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal	Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
4	Dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan akses internet pada ruang publik dan perkantoran yang masih belum optimal	Peningkatan jumlah anggaran dalam mendukung pelayanan akses internet pada ruang publik dan perkantoran
5	Kurang optimalnya perangkat daerah dalam memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam pelayanan informasi publik pemerintah	Melakukan sosialisasi dan peningkatan wawasan tentang pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik
6	Tingginya target sasaran strategi peningkatan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Melaksanakan evaluasi target sasaran strategi peningkatan keamanan informasi dengan tim perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak dapat terealisasi	Akibat dari Pandemi covid 19 maka Pendidikan dan pelatihan pegawai dilaksanakan secara daring

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.17.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 1 (Satu) SK Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.94.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	SK Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pegendalian Menara Telekomunikasi	SK Bupati Nomor 92 Tahun 2021	Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

#### **3.17.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020**

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.95.

Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Akses Internet yang berada di tiap kecamatan ditingkatkan kualitas jaringannya	Melakukan Kerjasama dan Koordinasi dengan pihak telkom terkait masalah Kapasitas Bandwitch dengan pagu anggaran yang sama setiap tahunnya. Namun seiring dengan peningkatan pengguna internet perlu ditambah alokasi anggaran untuk bandwitch.	Kapasitas Bandwitch semula 150 MBPS menjadi 250 MBPS pada Tahun 2021, dengan alokasi anggaran bandwitch tetap.
2	Mengupayakan jaringan internet pada daerah yang belum mendapatkan jaringan internet ( <i>Blank Spot Area</i> )	-Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengumpulkan data proposal desa yang masih termasuk area Blank Spot dan menyampaikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Provider serta Operator. -Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Koordinasi dengan Dinas PMPTSP, Dinas PUPR dan Dinas PERKIM terkait Perizinan Perusahaan yang akan membangun Menara telekomunikasi agar berfokus ke Arae Blank Spot di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Tahun 2017 Blank Spot Area sebanyak 37 Desa/Kelurahan pada Tahun 2021 menjadi 21 Desa/Kelurahan ini berarti berkurang sebesar 16 Desa/Kelurahan yang telah memiliki Jaringan seluler dan Internet
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Penyusunan pelaporan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 Tahun 2020
4	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya	Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2021 tetap melaksanakan Program kegiatan sesuai dengan Perencanaan yang ada meskipun keterbatasan pagu anggaran sesuai dengan Pagu Anggaran Refocusing.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan telah mencapai target kinerja yang direncanakan.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.		
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Dalam Penyusunan program dan Kegiatan Dinas KOMINFO telah mempedomani RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahunan Dinas KOMINFO mempedomani usulan-usulan prioritas yang disampaikan dari musrenbang kecamatan, pokir dewan dan usulan-usulan top down yang mendukung visi misi Kepala Daerah. Untuk program/kegiatan yang diusulkan bukan kewenangan daerah diusulkan pada Kementerian KOMINFO dan pihak swasta yang bergerak di bidang Telekomunikasi	Telah melaksanakan komunikasi, koordinasi secara insentif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD dan pihak lain agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pengawasan usaha koperasi;
3. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Bupati.

### 3.18.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 8 (Delapan) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.96.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.960.983.524,00</b>	<b>2.860.955.165,00</b>	<b>100.028.359.00</b>	<b>96.62</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.931.900,00</b>	<b>60.692.000,00</b>	<b>20.239.900.00</b>	<b>74.99</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.371.900,00	30.832.000.00	13.539.900.00	69.61
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	9.750.000,00	9.750.000.00	0	100
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.810.000	20.110.000	6.700.000	75,01
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.590.034.988</b>	<b>2.538.881.629</b>	<b>51.153.359</b>	<b>98,02</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.297.134.988	2.252.896,629	45.002.872	98,07
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	292.900.358	285.985.000	6.915.000	97,64
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.136.436</b>	<b>111.266.950</b>	<b>16.869.686</b>	<b>86,83</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.833.800	2.833.800	0	100
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	41.630.018	41.582.750	47.268	99,89
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.621.802	3.609.600	12.202	99,66
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.180.000	8.180.000	0	100
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.612.016	25.554.000	58.016	99,77
1.3.6	Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	0	100
1.3.7	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.520.000	11.435.000	85.000	99,26
1.3.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	29.339.000	12.671.800	16.667.200	43,19
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25.600.000</b>	<b>20.100.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>78,52</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.100.000	20.100.000	0	100
1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	5.500.000	0	5.500.000	0
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.200.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>97,55</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	10.200.000	9.950.000	250.000	97,55
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.300.000</b>	<b>8.417.186</b>	<b>882.814</b>	<b>90,51</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	0	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	6.600.000	5.717.186	0	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>116.780.000</b>	<b>11.647.400</b>	<b>5.132.600</b>	<b>95,60</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	111.400.000	106.267.400	5.132.600	95,39
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.380.000	5.380.000	0	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>53.822.898</b>	<b>44.307.098</b>	<b>9.515.800</b>	<b>82,32</b>
<b>2.1</b>	<b>Orientasi Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Sakal Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>53.882.898</b>	<b>44.307.098</b>	<b>9.515.800</b>	<b>82,32</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Fasillitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi	53.883.898	44.307.098	9.515.800	82,32
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBEDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.148.755.705</b>	<b>1.108.456.105</b>	<b>40.299.600</b>	<b>96,49</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.148.755.705</b>	<b>1.108.456.105</b>	<b>40.299.600</b>	<b>96,49</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	1.148.755.705	1.108.456.105	40.299.600	96,49
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>20.071.763</b>	<b>19.382.763</b>	<b>689.000</b>	<b>96,57</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Beranggotakannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.071.763</b>	<b>19.382.763</b>	<b>689.000</b>	<b>96,57</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.071.763	19.382.763	689.000	96,57
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>97.166.830</b>	<b>92.801.830</b>	<b>4.365.000</b>	<b>95,51</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>97.166.830</b>	<b>92.801.830</b>	<b>4.365.000</b>	<b>95,51</b>
5.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasiannya Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	97.166.830	92.801.830	4.365.000	95,51
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>72.471.136</b>	<b>61.974.300</b>	<b>10.496.836</b>	<b>85,52</b>
<b>6.1</b>	<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>72.471.136</b>	<b>61.974.300</b>	<b>10.496.836</b>	<b>85,52</b>
6.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.471.136	61.974.300	10.496.836	85,52
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>24.654.000</b>	<b>19.049.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>77,27</b>
<b>7.1</b>	<b>Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah</b>	<b>24.654.000</b>	<b>19.049.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>77,27</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	<b>Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
7.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.654.000	19.049.000	5.605.000	77,27
<b>8</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM</b>	<b>14.654.598</b>	<b>14.404.598</b>	<b>250.000</b>	<b>98,29</b>
<b>8.1</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.654.598</b>	<b>14.404.598</b>	<b>250.000</b>	<b>98,29</b>
8.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.654.598	14.404.598	250.000	98,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.392.580.454,00</b>	<b>3.819.620.214,34</b>	<b>572.960.239,66</b>	<b>86,96</b>

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan,

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monitoring Evaluasi Dalam Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa administrasi keuangan.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah

3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jenis komponen instalasi listrik/penerangan.

3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor

- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Alat Kebersihan dan pembersih Kantor
- 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pameran Pembangunan
- 3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah jenis barang cetak
- 3.6 Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran tagihan surat kabar.
- 3.7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah penyediaan makan minum tamu
- 3.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (tahun)
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (stell)
- 4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah,
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah pengadaan peralatan dan mesin.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah materai
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Sub kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 7) Pemeliharaan Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)

B. Program Pengembangan UMKM

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Usaha Mikro Aktif Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

0) Kegiatan Orientasi Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Usaha Mikro AKTif,

1.1 Sub Kegiatan Fasillitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah usaha mikro aktif

C. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Program (Outcome) Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi,

1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah UMKM yang di fasilitasi

D. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator Program (Outcome) Persentase Koperasi Mandiri adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Beranggotakannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,

1.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah koperasi mandiri.

E. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator Program (Outcome) Persentase Koperasi yang mendapatkan Diklat dan Latihan Perkoperasian adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Koperasi yang mendapatkan Diklat dan Latihan Perkoperasian,

1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasiannya Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian

F. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Koperasi Sehat Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP,

1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah pembinaan, pengawasan, dan penghargaan

G. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Program (Outcome) Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan Pemeriksaan,

1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan.

H. Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam

Indikator Program (Outcome) Persentase KSP/USP aktif adalah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Koperasi yang mendapatkan izin simpan pinjam ,

1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah koperasi yang mendapatkan izin simpan pinjam, pembukaan kantor cabang dan kantor kas.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.97.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	78	82,62	105,9
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	100	100	100
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan.	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	100
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.	6 Jenis	6 Jenis	100
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Alat Kebersihan dan pembersih Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran Pembangunan	1 kali	1 kali	100
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	9 Jenis	9 Jenis	100
1.3.6	Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar.	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (tahun)	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,</b>	100	50	50
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	29 stel	29 stel	100
1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)	3 Orang	0 Orang	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Miik Daerah,</b>	100	100	100
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin.	1 Unit	1 Unit	100
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,</b>	100	100	100
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	270 Lembar	270 Lembar	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100
1.7	<b>Pemeliharaan Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah.</b>	100	100	100
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit	100
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara (Gedung)	1 Gedung	1 Gedung	100
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>PERSENTASE USAHA MIKRO AKTIF</b>	64.04	105,9%	165,3%
2.1	<b>Orientasi Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Sakal Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Aktif,</b>	100	7171%	7171%
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro Aktif	100 UKM	7171 UKM	7171%
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>PERSENTASE USAHA MIKRO YANG DIFASITASI</b>	14.15	40,6%	286,9%
3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi</b>	100	209%	209
3.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah UMKM yang di fasilitasi	500 UKM	1.045 UKM	209%
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>PERSENTASE KOPERASI MANDIRI</b>	0	0	0
4.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Beranggotakannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	100	0	0
4.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Mandiri	1 Koperasi	0	0
5	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>PERSENTASE KOPERASI YANG MENDAPATKAN DIKLAT DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	51	56	109,80
5.1	<b>Kegiatan Pendiidkan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan Diklat dan Latihan Perkoperasian,</b>	100	162,5	162,5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasiannya Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Diklat Perkoperasian	8 Koperasi	13 Koperasi	162,5
6	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>PERSENTASE KOPERASI SEHAT</b>	56	59	105,3
6.1	<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP,</b>	100	137,5	137,5
6.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan	8 Koperasi	11 Koperasi	137,5
7	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	25	0,5	2%
7.1	<b>Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan Pemeriksaan</b>	100	20	20%
7.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Pengawasan Dan Pemeriksaan.	25 Koperasi	5 Koperasi	20%
8	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM</b>	<b>PERSENTASE KSP/USP AKTIF</b>	8	7	87,5
8.1	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Izin Simpan Pinjam</b>	100	50	50
8.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Izin Simpan Pinjam, Pembukaan Kantor Cabang Dan Kantor Kas.	2 Koperasi	1 Koperasi	50
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>107,84</b>

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pada tahun 2021, koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun non KUD berjumlah 279 unit, sebanyak 88 unit diantaranya termasuk koperasi aktif, selebihnya merupakan koperasi tidak aktif. Jumlah anggota sebanyak 25.455 orang yang terdiri dari 9.352 orang merupakan anggota KUD dan 16.103 orang merupakan anggota Non KUD.

Tabel 3.98.  
Jumlah KUD dan Non KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021

NO	Kecamatan	Koperasi		Aktif		Tidak Aktif		Anggota (orang)	
		KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD
1	Muara Sabak Barat	2	30		16	2	14	97	1.825
2	Muara Sabak Timur	5	28		10	5	18	3.227	1.492
3	Kuala Jambi	1	18		8	1	10	39	542
4	Dendang	6	28		12	6	16	675	4.863
5	Mendahara	3	31		5	3	26	182	1.683
6	Mendahara Ulu	1	15	1	2	-	13	2.260	1.298
7	Geragai	5	27		16	5	11	400	1.409
8	Rantau Rasau	8	12		5	8	7	1.166	483
9	Berbak	3	6		2	3	4	831	246
10	Nipah Panjang	4	28		7	4	21	254	1.488
11	Sadu	3	15		4	3	11	171	774
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>238</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>40</b>	<b>151</b>	<b>9.352</b>	<b>16.103</b>

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

KUD dan Non KUD di kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri sebesar Rp. 12.201.099.026 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) maupun pihak luar sebesar Rp. 11.308.899.649 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) volume usaha sebesar Rp. 27.875.162.066 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) dan sisa hasil usaha sebesar Rp. 2.018.040.110 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)

Tabel 3.99.  
Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

NO	KECAMATAN	KUD & Non KUD	MODAL		VOLUME USAHA (Rp)	SHU (Rp)
			SENDIRI (Rp)	LUAR (Rp)		
1	Muara Sabak Barat	32	427.863.812	540.154.250	2.484.632.321	103.525.286
2	Muara Sabak Timur	33	2.500.999.708	2.755.088.558	6.859.786.689	173.466.447
3	Kuala Jambi	19	1.097.142.969	207.681.000	1.179.512.361	325.852.385
4	Dendang	34	4.588.847.340	1.975.865.065	8.957.952.373	846.539.260
5	Mendahara	34	621.191.043	873.431.003	1.681.520.335	210.558.683
6	Mendahara Ulu	16	657.297.359	1.985.350.000	2.705.042.536	48.986.359
7	Geragai	32	1.620.118.359	135.228.000	1.045.162.203	127.500.000
8	Rantau Rasau	20	103.737.050	517.038.209	1.516.799.938	48.865.025
9	Berbak	9	35.956.800	749.668.037	296.351.720	12.014.500
10	Nipah Panjang	32	318.672.025	1.177.523.127	836.496.190	50.875.285
11	Sadu	18	229.272.525	391.822.400	311.895.340	69.856.880
	<b>JUMLAH</b>	<b>279</b>	<b>12.201.099.026</b>	<b>11.308.899.649</b>	<b>27.875.162.006</b>	<b>2.018.040.110</b>

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.18.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.100.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Dampak wabah virus covid-19 menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang seharusnya rutin dilaksanakan setiap tahun, dikarenakan adanya pembatasan <i>social distancing</i> .	Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan aturan protokol kesehatan yang berlaku sebagai dampak dari wabah virus covid-19
2	Wabah virus covid-19 menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi sehingga para pelaku usaha harus beradaptasi dengan kondisi yang ada yang mempengaruhi produktivitas usaha seperti penjualan mengalami penurunan, minimnya serta sulitnya akses permodalan, pesanan yang menurun, kesulitan bahan baku, serta kredit macet;	Melakukan upaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi tambahan bantuan modal bagi pelaku usaha yang terdampak covid-19 melalui anggaran Program PED untuk mendukung UMKM pada tahun 2021 sebagai bentuk dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi.
3	Adanya Pembatasan <i>Social distancing</i> menjadi permasalahan dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari masih rendahnya produktivitas serta daya saing Koperasi dan UKM.	Melaksanakan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dengan memberikan Pembinaan, Pelatihan dan Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM dengan menyesuaikan aturan yang berlaku terkait wabah virus covid 19
4	Adanya Pembatasan Aktivitas ( <i>Social distancing</i> ) dikarenakan Wabah Covid-19 dan refocusing anggaran menjadi permasalahan dalam Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI;	Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi ASN secara daring
5	Masih kurangnya kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN dan swasta yang seharusnya menjadi kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi sangat diharapkan, dimana kemitraan seharusnya menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien;	Melaksanakan secara intensif koordinasi lintas sektoral yang terkait dengan Koperasi dan UKM dalam upaya pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM dalam menumbuhkan struktur dunia usaha yang kokoh dan efisien

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.18.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.101.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penetapan Penerima Bantuan Stimulus Kepada Pelaku Usaha Mikro Terdampak <i>Corona Virus Disease-2019</i> (Covid-19) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 567 Tahun 2021	Untuk menciptakan penyaluran bantuan stimulus yang efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro terdampak Covid-19
2	Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Pelaku Usaha Mikro Penerima Bantuan Stimulus Terdampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 566 Tahun 2021	Untuk ketertiban administrasi serta tepat sasaran dan tepat guna dalam pengelolaan bantuan sosial
3	Kelompok Kerja Penyaluran Bantuan Stimulus Kepada Pelaku Usaha Mikro yang Terdampak <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 575 tahun 2021	Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan stimulus Pelaku Usaha Mikro terdampak Pandemi.
4	Penetapan Penerima Bantuan Stimulus Kepada Pelaku Usaha Mikro Terdampak <i>Corona Virus Disease-2019</i> (Covid -19) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 646 Tahun 2021	Untuk mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan bantuan stimulus bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak Covid-19

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.18.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

**Tabel 3.3.**  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenTanjung JabungTimur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi yang sudah ada untuk berusaha pada sektor Home Industri selain Produksi hasil laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi Koperasi dengan Wilayah Kerja yang mempunyai potensi untuk pengembangan dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan</li> <li>2) Revitalisasi Kelembagaan serta mendorong koperasi untuk menjalankan core bisnis peningkatan nilai tambah berbasis pertanian dan perkebunan</li> <li>3) Memberikan Penyuluhan dan bimbingan terhadap tata Kelola manajemen usaha koperasi</li> <li>4) Memfasilitasi Koperasi dan meningkatkan SDM koperasi dengan mengikutsertakan pengurus/pengelola koperasi dalam pelatihan dan bimbingan terkait manajemen pengelolaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi</li> <li>5) Memberikan Penyuluhan dan bimbingan terhadap tata Kelola manajemen usaha koperasi</li> </ol>	Dengan adanya pemberdayaan terhadap mendorong koperasi untuk dapat meningkatkan daya saing
2	Mensukseskan Program koperasi sehingga masyarakat terutama pelaku usaha dapat terbantu usahanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan program lintas sektor atau BPN ATR dengan Dinas Koperasi dan UKM dalam kegiatan sertifikat Hak atas tanah (SHAT) bagi pelaku usaha / UMKM</li> <li>2) Fasilitasi akses permodalan Koperasi dan Pelaku usaha anggota koperasi dalam mengakses kemudahan permodalan di Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank</li> </ol>	Dengan adanya Kerjasama lintas sektor dapat membuka peluang bagi pelaku usaha mengembangkan usahanya
3	Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD	Untuk mendorong dan memajukan pelaku usaha dalam memasarkan dan mempublikasikan produk unggulan melalui	Koordinasi sudah dilaksanakan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	terkait untuk mendorong dan memajukan pelaku usaha dalam memasarkan dan memajukan pelaku usaha dalam memasarkan dan mempublikasikan produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	kerjasama dengan OPD terkait dengan melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif maupun mitra agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah dan terukur, terpadu dan berkesinambungan serta menjadikan perbankan dan BUMN menjadi Mitra dalam pengembangan produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro.	dengan OPD Terkait
4	Struktur Pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah mempedomani pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan LKPJ telah mempedomani PP No 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020
5	Terhadap Program dan kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan <i>social distancing</i> pada saat pandemi covid-19, pada tahun 2021 dapat terlaksana dengan mematuhi aturan yang berlaku mengikuti protokol kesehatan pandemi covid-19.</li> <li>2) Program dan kegiatan terkait pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang pelaksanaannya pentingnya untuk dialokasikan merupakan salah satu upaya yang perlu diwujudkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM)</li> </ol>	<i>Refocusing</i> anggaran merupakan salah satu upaya yang perlu diwujudkan secara optimal untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sesuai kewenangan Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan BPOM dan MUI Provinsi Jambi terkait fasilitasi perizinan dan mutu produk UMKM, dalam memenuhi sertifikasi produk bagi UMKM	Melaksanakan Fasilitasi perizinan bagi produk UMKM

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.19.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan bidang penanaman modal, pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 5 (Lima) program, 11 (Kegiatan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.102.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.111.527.688</b>	<b>3.020.908.952</b>	<b>90.618.736</b>	<b>97,09%</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.080.000</b>	<b>800.000</b>	<b>86,39%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.200.000	800.000	73,33%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.880.000	2.880.000	0	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.507.745.198</b>	<b>2.480.612.230</b>	<b>27.132.968</b>	<b>98,92%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.192.745.198	2.180.972.230	11.772.968	99,46%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	315.000.000	299.640.000	15.360.000	95,12%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>35.352.000</b>	<b>34.080.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>96,40%</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.352.000	34.080.000	1.272.000	96,40%
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>239.312.873</b>	<b>202.680.148</b>	<b>36.632.725</b>	<b>84,69%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.323.200	2.323.200	0	100,00%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.612.448	47.594.314	18.134	99,96%
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.195.225	39.194.025	0	100,00%
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	0	100,00%
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	0	100,00%
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.282.000	103.668.609	36.613.391	73,90%
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>70.267.617</b>	<b>67.165.100</b>	<b>3.102.517</b>	<b>95,58%</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.267.617	67.165.100	3.102.517	95,58%
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.950.000</b>	<b>51.909.574</b>	<b>19.040.426</b>	<b>73,16%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	0	100,00%
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	46.959.574	19.040.426	71,15%
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182.020.000</b>	<b>179.381.900</b>	<b>2.638.100</b>	<b>98,55%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.640.000	128.001.900	2.638.100	97,98%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.380.000	11.380.000	0	100,00%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	100,00%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>81.433.920</b>	<b>72.191.264</b>	<b>9.242.656,00</b>	<b>88,65%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>81.433.920</b>	<b>72.191.264</b>	<b>9.242.656,00</b>	<b>88,65%</b>

2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	81.433.920	72.191.264	9.242.656,00	88,65%
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>157.586.853</b>	<b>126.417.553</b>	<b>31.169.300,00</b>	<b>80,22%</b>
3.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>157.586.853</b>	<b>126.417.553</b>	<b>31.169.300,00</b>	<b>80,22%</b>
3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.662.085	119.764.485	30.897.600	79,49%
3.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6.924.768	6.653.068	271.700	96,08%
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>384.408.314</b>	<b>255.069.614</b>	<b>129.338.700</b>	<b>66,35%</b>
4.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>384.408.314</b>	<b>255.069.614</b>	<b>129.338.700</b>	<b>66,35%</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.349.840	60.660.540	33.689.300	64,29%
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	193.458.474	144.007.274	49.451.200	74,44%
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000	50.401.800	46.198.200	52,18%
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>42.353.940</b>	<b>41.098.540</b>	<b>1.255.400,00</b>	<b>97,04%</b>
5.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.353.940</b>	<b>41.098.540</b>	<b>1.255.400,00</b>	<b>97,04%</b>
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.353.940	41.098.540	1.255.400,00	97,04%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.777.310.715</b>	<b>3.515.685.923</b>	<b>261.624.792</b>	<b>93,07%</b>

Sumber : LKPJ DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi adalah 88,31 Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah,

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Kinerja

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
    - 3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah,
    - 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan
    - 4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor
    - 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan
    - 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar
    - 4.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu
    - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD
  - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah,
    - 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin
  - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai
    - 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Unit)

7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Program (Outcome) Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia adalah 16,67% Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program (Outcome) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,31 Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator kegiatan (Output) adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Program (Outcome) Nilai Investasi (dalam juta rupiah) adalah 148.710 Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali),

1.1 Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Program (Outcome) Persentase Data Dan Informasi Yang Valid adalah 100% Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan,

1.1 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.103.  
Target, Realisasi dan Capaian Program  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI INDEKS PELAYANAN INSTANSI	88,31	88,356	100,05
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 Dok	4 Dok	66,67

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3 Dok	3 Dok	100%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96,77%</b>	<b>96,77</b>
1.2.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 Stel	30 Stel	96,77
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis	4 Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10 Jenis	10 Jenis	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 bulan	12 bulan	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>92,86%</b>	<b>92,86</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	14 Unit	13 Unit	92,86
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	495 Lembar	495 Lembar	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Tahun	1 Tahun	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>100</b>
2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi	1 Dok	1 Dok	100
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,31</b>	<b>88.467</b>	<b>100,18</b>
3.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,31</b>	<b>88.467</b>	<b>100,18</b>
3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	650 Izin	1.926 Izin	296.31
3.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	88.467	100,18
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Investasi (dalam juta rupiah)</b>	<b>148.710</b>	<b>315.864,7</b>	<b>212,4</b>
4.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>125,4</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	28 Kali	35 Kali	125
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	7 Kali	7 Kali	100
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	28 Kali	37 Kali	132,14
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data Dan Informasi Yang Valid</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan</b>	<b>16,67%</b>	<b>16,67%</b>	<b>100</b>
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	13 Dok	13 Dok	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>122,62</b>

Sumber : LKPJ DPMPSTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dalam Tahun 2021 diterbitkan 1.926 izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari, 1.491 Izin yang terbitkan melalui Aplikasi Perizinan Online OSS, 435 Izin diterbitkan melalui Aplikasi Perizinan Online SiCantik Cloud sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.104.  
Jumlah Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

NO	JENIS IZIN	JUMLAH TERBIT
<b>TOTAL IZIN USAHA</b>		<b>1.926</b>
<b>DATA IZIN SISTEM OSS RBA</b>		<b>1.491</b>
1	NIB NON UMK	149
2	NIB UMK	297
3	IZIN LOKASI	499
4	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	105
5	UKL-UPL	8
6	AMDAL	2
7	Standar Layak Fungsi (SLF)	-
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	169
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	158
10	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	10
11	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	-
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1
13	Izin Usaha Industri (IUI)	1
14	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	2
15	Izin Operasional Rumah Sakit	1
16	Tanda Daftar Gudang	-
17	SERTIFIKAT STANDAR	29
18	PKKPR	50
19	PKPLH	5
20	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	2
21	Izin Apotek	1
22	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	1
23	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	1
<b>DATA IZIN SISTEM SICANTIK CLOUD</b>		<b>435</b>
1	20. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK- TJT	-
2	33. Izin Dokter Hewan Praktek_TJT	1
3	21. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK- TJT	-
4	50. Izin Toko Obat_TJT	1
5	59. Surat Izin Kerja Optometris (SIK-O) - TJT	-
6	30. IZIN USAHA PETERNAKAN_TJT	-
7	58. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK.RO) - TJT	-
8	9. Tanda Daftar Gudang (TDG) - TJT	-
9	49. Izin Toko Alat Kesehatan_TJT	-
10	46. Surat Izin Apotek TJT	11
11	17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - TJT	1
12	12. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah - Tanjab Timur	-
13	60. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIP-F) - TJT	-
14	67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) - TJT	-
15	56. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat - TJT	-
16	57. Surat Izin Praktek (SIP) Bidan - TJT	120
17	Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) - TJT	6

NO	JENIS IZIN	JUMLAH TERBIT
18	52. Surat Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi_TJT	37
19	22 IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI-TJT	-
20	42 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D_ TJT	-
21	44 IZIN MENDIRIKAN KLINIK - TJT	-
22	39 IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) - TJT	-
23	43 IZIN OPERASIONAL PUSKESAMAS - TJT	-
24	11. Izin Usaha Industri (IUI) kecil - Tanjab Timur	-
25	19. Persetujuan ANDAL LALIN Untuk Jalan Kabupaten - TJT	2
26	54. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian - TJT	20
27	15. Surat Izin REKLAME_TJT	-
28	64. SERTIPIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT) TJT	43
29	63. Izin Pengobat Tradisional (SIPT)_TJT	-
30	62. Izin Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)_TJT	-
31	68. Izin Usaha Simpan Pinjam_TJT	-
32	51. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional_TJT	-
33	16. IZIN PENELITIAN_TJT	14
34	65. SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TJT	3
35	34. Izin Tenaga Kesehatan Hewan _TJT	-
36	48. Izin Penyelenggaraan Optikal_TJT	-
37	35. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner_TJT	-
38	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 - TJT	-
39	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA (IUJK)- TJT	20
40	03.1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PERUBAHAN - TJT	-
41	45. IZIN OPERASIONAL KLINIK - TJT	-
42	47. Izin Laboratorium_TJT	-
43	41. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D_ TJT	-
44	05. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN_TJT	-
45	04. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI_TJT	2
46	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) - TJT	-
47	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz) - TJT	-
48	04. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERUBAHAN DATA)_TJT	1
49	IZIN LINGKUNGAN - TANJUNG JABUNG TIMUR	-
50	PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN - TJT	1
51	03.2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH IBADAH_TJT	-
52	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)_TJT	1
53	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) - TJT	-
54	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) - TJT	-
55	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP_ATLM) - TJT	12
56	15. Surat Izin REKLAME_TJT- Kecamatan	-
57	18. Tanda Daftar Usaha Orang Perseroan Jasa Konstruksi - TJT	-
58	PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) - TJT	1
59	03.3 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) USAHA - TJT	47
60	IZIN PERSETUJUAN PERUBAHAN LUAS LAHAN IUP - TJT	3
61	55. Surat Izin Praktek (SIP) Perawat - TJT	25
62	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)- TJT	1
63	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) - TJT	1
64	PERSETUJUAN IZIN LOKASI- TJT	2

NO	JENIS IZIN	JUMLAH TERBIT
65	53. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) - TJT	25
66	03. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) - TJT	17
67	IZIN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TJT	1
68	52.1. Surat Izin Praktek Dokter Internsip_TJT	16

Sumber : LKPJ DPMPSTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Hasil Survei sebagai berikut :

- a. Semester I (pertama) : 88,384 atau kategori A (Sangat Baik)
- b. Semester II (kedua) : 88,467 atau kategori A (Sangat Baik)

Dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel berikut :

Tabel 3.105.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No.	Unsur Penilaian	Tahun 2021							
		Semester I				Semester II			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,550	0,394	9,851	A	3,550	0,394	9,851	A
2.	Prosedur	3,660	0,406	10,156	A	3,660	0,406	10,156	A
3.	Waktu Pelayanan	3,550	0,394	9,851	A	3,570	0,396	9,906	A
4.	Biaya/Tarif	3,510	0,390	9,740	B	3,510	0,390	9,740	B
5.	Produk Spesifikasi	3,520	0,391	9,768	B	3,520	0,391	9,768	B
6.	Jenis Pelayanan								
6.	Kompetensi Pelaksana	3,500	0,389	9,712	B	3,500	0,389	9,712	B
7.	Prilaku Pelaksana	3,490	0,387	9,684	B	3,500	0,389	9,712	B
8.	Penanganan	3,580	0,397	9,934	A	3,580	0,397	9,934	A
9.	Pengaduan, Saran dan Masukan	3,490	0,387	9,684	B	3,490	0,387	9,684	B
	Saran dan Prasarana								
<b>NILAI IKM</b>			<b>88,384</b>	<b>A</b>		<b>88,467</b>	<b>A</b>		
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>			<b>100</b>			<b>100</b>			

Sumber : LKPJ DPMPSTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 menargetkan nilai investasi sebesar **Rp. 148.710.000.000,-** dengan realisasi investasi sebesar **Rp. 315.864.712.512,-** dengan persentase 212,4%. Nilai investasi tersebut terdiri dari **Rp. 29.573.204.393,-** Penanaman Modal Asing (PMA) dan **Rp. 286.291.508.119,-** Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2021.

Dalam upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan pemantauan langsung kelokasi kegiatan penanaman modal dengan target sebanyak 28 Kali dan terealisasi sebanyak 35 Kali dengan persentase capaian 125%.

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Menargetkan pembinaan sebanyak 7 kali dengan terealisasi sebanyak 7 Kali dengan persentase capaian 100%. Pembinaan dilakukan melalui metode bimbingan teknis dan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal yang bertempat di ruang Aula Ratu Hotel Muara Sabak, selain metode bimbingan teknis dan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha.

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pengawasan sebanyak 28 kali dengan terealisasi sebanyak 37 Kali dengan persentase capaian 132.14%. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha, dalam pengawasan penanaman modal pelaku usaha ditekankan untuk selalu menjalankan kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan dan kewajibannya terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) kepada masyarakat.

### 3.19.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.106.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Adanya perubahan regulasi dan aplikasi sistem pelayanan penanaman modal diantaranya dengan peralihan dari Aplikasi OSS 1.1 diganti menjadi aplikasi OSS RBA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke BKPM RI atau Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi terkait perubahan regulasi dan Implementasi Aplikasi OSS-RBA</li> <li>2. Melakukan konsultasi dan koordinasi serta Update Aplikasi SiCantik Cloud ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOMINFO-RI)</li> <li>3. Mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman terkait implementasi Aplikasi OSS-RBA (berupa Sosialisasi dan Bimtek)</li> </ol>
2	Aplikasi Perizinan Online (OSS-RBA, SIMBG dan SiCantik Cloud) belum sepenuhnya dapat dipahami Masyarakat / Pelaku Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melakukan Pelayanan Perizinan Di Tempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang</li> </ol>

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<p>belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG</p> <p>2. Melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Masyarakat / Pelaku Usaha tentang pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang terintegrasi secara elektronik (perizinan online).</p>
3	<p>Masih mewabahnya Covid-19 pada tahun 2021 yang membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat, termasuk untuk datang mengurus perizinan secara langsung ke DPMPTSP.</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap Melakukan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan memperkuat pelayanan perizinan online. Sehingga pengurusan izin tidak perlu harus datang ke kantor tapi cukup melalui Aplikasi OSS-RBA, SiCantik Cloud dan SIMBG dengan Klik <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a>, <a href="https://sicantik.go.id">https://sicantik.go.id</a> dan <a href="https://simbg.pu.go.id">https://simbg.pu.go.id</a></p> <p>2. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyediakan layanan pengaduan/ konsultasi online via website <a href="https://dpmpptsp.tanjabtimgab.go.id">https://dpmpptsp.tanjabtimgab.go.id</a> dan media sosial whats app dengan nomor 082249513992 atau telp 0740-7370090</p>

Sumber : LKPJ DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.19.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3. 107.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
KabupatenTanjung JabungTimur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap izin-izin yang tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan serta pelaksanaan kewajiban dikeluarkannya izin tersebut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam perizinan online (OSS-RBA), masing-masing OPD Teknis telah diberikan Akun/User Aplikasi OSS-RBA sebagai sarana penyampaian kajian teknis masing-masing.	Terwujudnya transparansi perizinan.
2.	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Struktur pelaporan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyajian data secara terperinci	Format LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun	Sebagian Sub Kegiatan yang tertunda karena Refocusing telah dimasukkan pada penganggaran tahun 2022 dan sebagian lagi belum bisa, dikarenakan keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah	1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertunda karena Refocusing telah dianggarkan pada DPA

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	(APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022	DPMPTSP tahun 2022 dan. 2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah di anggaran pada Rancangan Awal RENJA DPMPTSP Tahun 2023
4.	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD.	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Sumber : LKPJ DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.20. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

2. penyelenggaraan pengelolaan, pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata serta dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
4. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
5. penyelenggaraan pembudayaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Bupati.

### 3.20.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dengan bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 10 (sepuluh) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.108.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Parbudpora Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,908,263,808</b>	<b>4,757,132,616</b>	<b>151,131,192</b>	<b>96,92</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30,999,900</b>	<b>30,987,900</b>	<b>12,000</b>	<b>99,96</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,999,900	30,987,900	12,000	99,96
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,016,908,965</b>	<b>3,897,811,580</b>	<b>119,097,385</b>	<b>97,03</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,590,088,865	3,497,931,580	92,157,285	97,43
1.2.2	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	426,820,100	399,880,000	26,940,100	93,69
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>67,942,452</b>	<b>61,647,100</b>	<b>6,295,352</b>	<b>90,73</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27,642,452	26,600,000	1,042,452	96,23
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,300,000	35,047,100	5,252,900	86,97
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>464,538,741</b>	<b>464,443,511</b>	<b>95,230</b>	<b>99,98</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,784,000	13,784,000	-	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,055,313	89,048,183	7,130	99,99
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27,306,128	27,306,128	-	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,623,300	49,623,300	-	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	-	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	26,500,000	26,500,000	-	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253,270,000	253,181,900	88,100	99,97
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50,473,750</b>	<b>50,473,750</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,473,750	50,473,750	-	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>96,300,000</b>	<b>79,199,875</b>	<b>17,100,125</b>	<b>82,24</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,300,000	6,300,000	-	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	90,000,000	72,899,875	17,100,125	81
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181,100,000</b>	<b>172,568,900</b>	<b>8,531,100</b>	<b>95,29</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165,200,000	156,668,900	8,531,100	94,84
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	15,900,000	15,900,000	-	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1,126,646,000</b>	<b>646,912,800</b>	<b>479,733,200</b>	<b>65,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, &amp; Pengembangan Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader Kab/Kota</b>	<b>26,000,000</b>	<b>24,985,800</b>	<b>1,014,200</b>	<b>96,10</b>
2.1.1	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	26,000,000	24,985,800	1,014,200	96,10
<b>2.2</b>	<b>Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,100,646,000</b>	<b>621,927,000</b>	<b>478,719,000</b>	<b>56,51</b>
2.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,100,646,000	621,927,000	478,719,000	56,51
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3,818,791,232</b>	<b>1,988,425,451</b>	<b>1,830,365,781</b>	<b>52,07</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,640,936,790</b>	<b>217,160,800</b>	<b>1,423,775,990</b>	<b>13,23</b>
3.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1,640,936,790	217,160,800	1,423,775,990	13,23
<b>3.2</b>	<b>Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>710,000,000</b>	<b>359,039,164</b>	<b>350,960,836</b>	<b>50,57</b>
3.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	710,000,000	359,039,164	350,960,836	50,57
<b>3.3</b>	<b>Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>573,772,429</b>	<b>573,770,487</b>	<b>1,942</b>	<b>100</b>
3.3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	573,772,429	573,770,487	1,942	100
<b>3.4</b>	<b>Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>894,082,013</b>	<b>838,455,000</b>	<b>55,627,013</b>	<b>93,78</b>
3.4.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	894,082,013	838,455,000	55,627,013	93,78
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	250,000,000	250,000,000	-	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>429,142,178</b>	<b>175,588,856</b>	<b>253,553,322</b>	<b>40,92</b>
<b>5.1</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah</b>	<b>309,142,000</b>	<b>67,410,000</b>	<b>241,732,000</b>	<b>21,81</b>
5.1.1	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	309,142,000	67,410,000	241,732,000	21,81
<b>5.2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120,000,178</b>	<b>108,178,856</b>	<b>11,821,322</b>	<b>73,56</b>
5.2.1	Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	120,000,178	108,178,856	11,821,322	73,56
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>1,154,682,000</b>	<b>849,365,948</b>	<b>305,316,052</b>	<b>73,56</b>
<b>6.1</b>	<b>Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>1,154,682,000</b>	<b>849,365,948</b>	<b>305,316,052</b>	<b>73,56</b>
6.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM dan Kesenian Tradisional	1,154,682,000	849,365,948	305,316,052	73,56
<b>7</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>357,972,000</b>	<b>290,174,382</b>	<b>67,797,618</b>	<b>81,06</b>
<b>7.1</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>357,972,000</b>	<b>290,174,382</b>	<b>67,797,618</b>	<b>81,06</b>
7.1.1	Pengembangan Cagar Budaya	299,582,000	232,509,382	67,072,618	77,61
7.1.2	Pemanfaatan Cagar Budaya	58,390,000	57,665,000	725,000	98,76
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>482,102,000</b>	<b>269,268,500</b>	<b>212,833,500</b>	<b>55,85</b>
<b>8.1</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>119,402,000</b>	<b>108,221,500</b>	<b>11,180,500</b>	<b>90,64</b>
8.1.1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119,402,000	108,221,500	11,180,500	90,64
<b>8.2</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>362,700,000</b>	<b>161,047,000</b>	<b>201,653,000</b>	<b>44,40</b>
8.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	362,700,000	161,047,000	201,653,000	44,40

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	495,477,000	394,197,077	101,279,923	79,56
9.1	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	495,477,000	394,197,077	101,279,923	79,56
9.1.1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	495,477,000	394,197,077	101,279,923	79,56
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	93,858,000	70,524,800	23,333,200	75,14
10.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar	93,858,000	70,524,800	23,333,200	75,14
10.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	93,858,000	70,524,800	23,333,200	75,14
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,116,934,218</b>	<b>9,691,590,430</b>	<b>3,425,343,788</b>	<b>73,89</b>

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora. Kab. TanjungJabungTimur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Program (Outcome) Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah adalah 100% Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan (Output) adalah persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan renja perangkat daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Perencanaan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Persentase Penyelesaian administrasi keuangan
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)
  - 2.2 Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa administrasi keuangan dan jasa kerja PHTT
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah pakaian dinas ASN
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat
4. Kegiatan Administrasi Umum  
Indikator Kegiatan (Output) adalah persentase terlaksananya administrasi umum
  - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah instalasi komponen listrik/penerangan
  - 4.3 Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
  - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

- Indikator sub kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)
- 4.5 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetakan
  - 4.6 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah pembayaran tagihan surat kabar
  - 4.7 Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah pembayaran makan minum/tamu
  - 4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah
5. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Indikator kegiatan (Output) adalah persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah
- 5.1 Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah materai
  - 6.2 Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7.1 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah kendaraan yang terpelihara
  - 7.2 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  
Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara

## B. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Organisasi Pemuda Aktif. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader

1.1 Sub Kegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kegiatan Hari Sumpah Pemuda

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Peserta Paskibraka

### C. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Indikator Program (Outcome) adalah : 1) Peringkat PORPROV, dan 2) Cakupan Pembinaan Olahraga. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten kota Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

1.1 Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) jumlah yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional dan 2) Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan

2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kab/kota

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga

3. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

3.1 Sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan

Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan

4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4.1 Sub kegiatan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi

Indikator sub kegiatan (Output) jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang tersedia

#### D. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Indikator Program (Outcome) adalah Cakupan Pembinaan Kepramukaan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Indikator kegiatan (Output) adalah persentase pembinaan kepramukaan kabupaten

1.1 Sub Kegiatan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Gugus Depan yang dibina

#### E. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah

1.1 Sub Kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar

2. Kegiatan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah persentase pembinaan lembaga adat kabupaten dan kecamatan

1.2 Sub Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah lembaga adat kabupaten dan kecamatan

#### F. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Indikator Program (Outcome) Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan adalah 3 kali Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah

1.1 Sub Kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) jumlah sanggar seni yang di beri bantuan peralatan dan 2) Jumlah Event yang diikuti

#### G. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Indikator Program (Outcome) Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Cagar Budaya

1.1 Sub Kegiatan pengembangan cagar budaya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah sosialisasi cagar budaya

1.2 Sub Kegiatan pemanfaatan cagar budaya

Indikator sub kegiatan (Output) adalah jumlah buku cagar budaya yang diperbaharui

H. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Indikator Program (Outcome) jumlah Persentase Destinasi Pariwisata Aktif. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

1.1 Sub Kegiatan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah KSPD

2) Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata

2.2 Sub Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah jumlah sarana di ODTW

I. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Indikator Program (Outcome) Persentase Kunjungan Wisatawan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan

1.1 Sub Kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten

J. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Indikator Program (Outcome) Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas di bidang pariwisata dan Ekraf. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1) Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar

1.2 Sub Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) jumlah Duta Wisata dan 2) Jumlah lomba kegiatan Home Stay.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.109.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Parbudpora  
KabupatenTanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Indeks Pelayanan Instansi</b>	78	88	112,82
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok	100%
1.2	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase Penyelesaian administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kerja PHTT	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Penyelesaian kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	38 stel	38 stel	100%
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	5 Orang	5 Orang	100%
1.4	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi komponen listrik/penerangan	7 Buah	7 Buah	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100%
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3 unit	3 unit	100%
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis-Jenis barang cetakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	2 unit	2 unit	100%
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	630 lembar	630 lembar	100%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	18 unit	18 unit	100%
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang terpelihara	7 ruangan	7 ruangan	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA</b>	<b>PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA AKTIF</b>	46,67%	46,67%	100%
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	100	100	100
2.1.1	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah kegiatan Hari Sumpah Pemuda	1 Kali	1 Kali	100
2.2	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah</b>	100	100	100%
2.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Paskibraka	36 orang	36 orang	100%
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>PERINGKAT PORPROV</b>	0	0	0
		<b>CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA</b>	0	0	0
3.1	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	100	-	-
3.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang berprestasi yang mengikuti event provinsi, nasional, internasional	15 orang	-	-
		Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan	31 Cabang	-	-
3.2	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>	100	50	50%
3.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Event Olahraga	6 event	3 Event	50%
3.3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	100	100	100
3.3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	1 organisasi	1 Organisasi	100
3.4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	100	100	100%
3.4.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang di pelihara	6 Unit	6 Unit	100%
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN</b>	100	100	100%
4.1	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Persentase Pembinaan Kepramukaan Kabupaten</b>	100%	100%	100%
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Gugus Depan yang dibina	118	118	100%
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>PERSENTASE KARYA BUDAYA YANG DIREVITALISASI DAN INVENTARISASI</b>	40%	40%	100%
5.1	<b>Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</b>	100	100	100%
5.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Budaya Mandi Syafar	1 Kali	1 Kali	100%
5.2	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan</b>	100%	100%	100%
5.2.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan	12 LAM	12 LAM	100%
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DIKEMBANGKAN</b>	36,36%	27,27%	75%
6.1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</b>	100	50	50
6.1.1		Jumlah Sanggar Seni yang di Beri Bantuan Peralatan	5 Sanggar	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Event yang diikuti	3 Event	3 Event	100
7	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN</b>	<b>3,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>113,51%</b>
7.1	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
7.1.1	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Sosialisasi Cagar Budaya	1 Kali	1 Kali	100%
7.1.2	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Buku Cagar Budaya	87 Buku	87 Buku	100%
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>PERSENTASE DESTINASI PARIWISATA AKTIF</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
8.1	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
8.1.1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSPD	1 KSPD	1 KSPD	100%
8.2	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50%</b>
8.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana di ODTW	2 Sarana	1 Sarana	50%
9	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Kunjungan Wisatawan</b>	<b>86,67</b>	<b>126,67 %</b>	<b>146,15</b>
9.1	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan</b>	<b>26.000 Orang</b>	<b>38.000 orang</b>	<b>146,15%</b>
9.1.1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event yang diikuti dalam kabupaten ataupun luar kabupaten	5 Kali	3 Kali	60%
10	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI KAPABILITAS DIBIDANG PARIWISATA DAN EKRAF</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>
10.1	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata	20 Orang	20 Orang	100
		Jumlah Kegiatan Lomba Home Stay	1 Kali	1 Kali	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>86,13</b>

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3. 110.  
Situs dan Cagar Budaya yang ada di kabupaten tanjung Jabung Timur  
Sampai dengan tahun 2021

NO	NAMA	LOKASI	DILESTARIKAN
1	Situs Rang Kayo Hitam	Kel. Simpang Kec. Berbak	Sudah di Lestarkan
2	Situs Lambur 1 Perahu Kuno	Desa Lambur 1 Kec. Muara Sabak Timur	Sudah di Lestarkan
3	Situs Makam Siti Hawa	Desa Trimulyo Kec. Rantau Rasau	Sudah di Lestarkan
4	Situs Makam Rang Kayo Pingai	Kel. Simpang Kec. Berbak	Sudah di Lestarkan
5	Situs Putri Julan	Kel. Simpang Kec. Berbak	Sudah di Lestarkan
6	Situs Makam Habib Salim	Kel. Singkep Kec. Muara Sabak Barat	Sudah di Lestarkan
7	Situs Lambur 2	Desa Lambur 2 Kec. Muara Sabak Timur	Belum di Lestarkan
8	Situs Kota Harapan	Desa Kota harapan Kec. Ma. Sabak Timur	Belum di Lestarkan
9	Situs Koto Kandis	Desa Koto Kandis Kec. Dendang	Belum di Lestarkan
10	Situs Nipah Panjang	Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang	Belum di Lestarkan
11	Situs Sungai Raya	Desa Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	Belum di Lestarkan
12	Situs Sungai Rambut	Desa Sungai Rambut Kec. Nipah Panjang	Belum di Lestarkan
13	Situs Air Hitam Laut	Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	Belum di Lestarkan

NO	NAMA	LOKASI	DILESTARIKAN
14	Situs Lingkup	Kel. Parit Culum 1 Kec. Ma. Sabak Barat	Belum di Lestarikan
15	Situs Tanjung Batu	Kel. Parit Culum 2 Kec. Ma. Sabak Barat	Belum di Lestarikan
16	Situs Penghanyut	Kel. Simpang Kec. Berbak	Belum di Lestarikan
17	Situs Lubuk Rengas	Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat	Belum di Lestarikan
18	Situs Sematang Bata	Kel. Simpang Kec. Berbak	Belum di Lestarikan
19	Situs Teluk Dawan	Kel. Teluk Dawan Kec. Ma. Sabak Barat	Belum di Lestarikan
20	Situs Rantau Rasau	Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau	Belum di Lestarikan
21	Situs Teluk Majelis	Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi	Belum di Lestarikan
22	Situs Parit Culum	Kel. Parit Culum 1 Kec. Ma. Sabak Barat	Belum di Lestarikan
23	Situs Sungai Buaya	Kecamatan Rantau rasau	Belum di Lestarikan
24	Situs Sungai Jeruk	Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang	Belum di Lestarikan
25	Situs Mendahara	Desa Lagan, Rantau Karya Kec. Geragai	Belum di Lestarikan

Sumber : LKPJ DinasParbudporakab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.20.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 111.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Parbudpora  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum Maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya	Memperbanyak pagelaran kesenian untuk menumbuhkan kreativitas seniman dan kelompok kesenian
2	Belum terdatanya benda peninggalan sejarah	Melakukan pendataan dan inventarisasi peninggalan sejarah
3	Rendahnya pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.
4	Rendahnya kualitas dan kuantitas pemasaran	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta melaksanakan festival wisata dan kebudayaan.

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.20.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.112.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Menggali Indikator kegiatan pariwisata dan mengembangkan kualitas pariwisata yang dapat di jadikan potensi PAD	Pengembangan Destinasi wisata dan memaksimalkan sport centre pada sirkuit zabak	Membangun dan merevitalisasi destinasi pariwisata yang ada
2	Meningkatkan Kerjasama dengan OPD terkait untuk memajukan Destinasi wisata dengan mengenalkan produk unggulan Kabupaten tanjung jabung timur	Sinergisitas kegiatan dengan lembaga swadaya masyarakat/ komunitas OPD dan Taman Nasional Berbak	Kerjasama kegiatan dengan OPD seperti TNB dan komunitas
3	Menjalankan kembali event besar pariwisata dan olahraga yang dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat kab. Tanjung jabung timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festival Sumbun</li> <li>- Kejurnas Balap Motor</li> <li>- Balap Sepeda</li> </ul>	Untuk memperkenalkan tanjabtimur pada umumnya dan daerah sekitar objek daya tarik wisata
4	Struktur pelaporan LKPJ di sampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada peraturan pemerintah no 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Bentuk pelaporan berikutnya akan lebih teliti dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan pelaporan pada penyelenggara pemerintah daerah	Menyajikan laporan yang lebih terperinci yang mengacu pada PP no 13 tahun 2019
5	Terhadap program dan kegiatan pada T.A 2020 yang di tunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Kegiatan yang tertunda dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dan di munculkan kembali	Dari hasil koordinasi, program kegiatan tersebut dapat diusulkan kembali

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPR agar Program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan di capai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Melaksanakan koordinasi dengan OPD yang terkait dalam program kegiatan yang ingin di capai pada visi misi MERAKYAT	Program dan kegiatan yang dicapai terealisasi tepat waktu

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. Penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi pelaporan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait bidang perpustakaan dan kearsipan yang diberikan oleh Bupati.

#### 3.21.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi

penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.113.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAREGT	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>3.413.691.618,00</b>	<b>3.336.755.263,00</b>	<b>76.936.355,00</b>	<b>97,75</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.355.000,00</b>	<b>31.605.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>97,68</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.200.000,00	5.450.000,00	750.000,00	87,90
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.375.000,00	5.375.000,00	-	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	20.780.000,00	20.780.000,00	-	100,00
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>2.723.909.467,00</b>	<b>2.709.821.194,00</b>	<b>14.088.273,00</b>	<b>99,48</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.249.467,00	2.286.241.194,00	10.008.273,00	99,56
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	427.660.000,00	423.580.000,00	4.080.000,00	99,05
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.721.175,00</b>	<b>78.874.185,00</b>	<b>8.846.990,00</b>	<b>89,91</b>
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.256.542,00	28.129.714,00	126.828,00	99,55
1.3.2	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	4.498.633,00	4.498.400,00	233,00	99,99
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan tamu	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.126.000,00	36.406.071,00	8.719.929,00	80,68
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>342.416.676,00</b>	<b>339.000.500,00</b>	<b>3.416.176,00</b>	<b>99,00</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	342.416.676,00	339.000.500,00	3.416.176,00	99,00
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.439.300,00</b>	<b>51.144.184,00</b>	<b>36.295.116,00</b>	<b>58,49</b>
1.5.1	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	5.710.800,00	5.710.700,00	100,00	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.728.500,00	45.433.484,00	36.295.016,00	55,59
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.850.000,00</b>	<b>126.310.200,00</b>	<b>13.539.800,00</b>	<b>90,32</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.500.000,00	119.960.200,00	13.539.800,00	89,86
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>217.658.162,00</b>	<b>213.396.750,00</b>	<b>4.261.412,00</b>	<b>98,04</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>187.058.900,00</b>	<b>185.898.100,00</b>	<b>1.160.800,00</b>	<b>99,38</b>
2.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Daerah	23.428.000,00	23.228.000,00	200.000,00	99,15
2.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	32.307.500,00	32.287.500,00	20.000,00	99,94
2.1.3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	52.016.300,00	51.965.500,00	50.800,00	99,90
2.1.4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	48.397.300,00	48.397.300,00	-	100,00
2.1.5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30.909.800,00	30.019.800,00	890.000,00	97,12
<b>2.2</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota</b>	<b>30.599.262,00</b>	<b>27.498.650,00</b>	<b>3.100.612,00</b>	<b>89,87</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAREGT	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
2.2.1	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.599.262,00	27.498.650,00	3.100.612,00	89,87
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>11.522.000,00</b>	<b>11.277.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>97,87</b>
<b>3.1</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.522.000,00</b>	<b>11.277.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>97,87</b>
3.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	11.522.000,00	11.277.000,00	245.000,00	97,87
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>84.706.182,00</b>	<b>82.124.200,00</b>	<b>2.581.982,00</b>	<b>96,95</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.199.882,00</b>	<b>42.398.900,00</b>	<b>800.982,00</b>	<b>98,15</b>
4.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	43.199.882,00	42.398.900,00	800.982,00	98,15
<b>4.2</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.226.700,00</b>	<b>19.709.700,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>92,85</b>
4.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	21.226.700,00	19.709.700,00	1.517.000,00	92,85
<b>4.3</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>20.279.600,00</b>	<b>20.015.600,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>98,70</b>
4.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	20.279.600,00	20.015.600,00	264.000,00	98,70
<b>J U M L A H</b>		<b>3.727.577.962,00</b>	<b>3.643.553.213,00</b>	<b>84.024.749,00</b>	<b>97,75</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan,
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 1.3 Sub Evaluasi Kinerja Perangkat daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah,
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah,
- 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor.
- 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.
- 3.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu.
- 3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran,
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah,
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.
- 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase pemeliharaan barang milik daerah,
- 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara.
- 6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin.

## B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indikator Program (Outcome) pembinaan perpustakaan adalah Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase peningkatan jumlah pengunjung,
  - 1.1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah keanggotaan perpustakaan.
  - 1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Rakor/seminar/Pertemuan Perpustakaan Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Nasional.
  - 1.3 Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perpustakaan yang telah dibina dan dikembangkan.
  - 1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun.
  - 1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi perpustakaan yang diinput.
- 2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Tingkat gemar membaca,
  - 2.1 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan Lomba Bercerita.

## C. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator Program (Outcome) pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno adalah persentase koleksi buku tersedia Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah persentase koleksi buku tersedia,
  - 1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase koleksi buku tersedia.

## D. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Arsip adalah Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah,  
  - 1.1 Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah OPD yang mengelola pengelolaan arsip dinamis.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis,  
  - 1.1 Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase layanan informasi kearsipan,  
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.114.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>88,35</b>	<b>88,35</b>	<b>100</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	5	3	60
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (Dokumen)	3	3	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (Bulan)	12	12	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	100
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
1.3.2	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	6	6	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	12	100
1.3.4	Fasilitasi Kunjungan tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	4	4	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan dan minum rapat SKPD (bulan)	4	4	100
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (Unit/buah)	27	27	100
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	240	240	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa sumber daya air, listrik (Bulan)	12	12	100
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara (Unit)	10	10	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	14	14	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>INDEKS MEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>	<b>19</b>	<b>12,88</b>	<b>67,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah pengunjung</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200</b>
2.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Daerah	Jumlah keanggotaan perpustakaan (Anggota)	100	33	33
2.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rakor / seminar / Pertemuan Perpustakaan Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Nasional (Kali)	1	1	100
2.1.3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang telah dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)	10	10	100
2.1.4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	8.650	6720	77,69
2.1.5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi perpustakaan yang diinput (Eksemplar)	39556	38556	97,47
<b>2.2</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase tingkat gemar membaca (persentase)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bercerita (orang)	20	20	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>PERSENTASE KOLEKSI BUKU TERSEDIA</b>	<b>53,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koleksi buku tersedia</b>	<b>53,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi buku tersedia	53,86	0	0
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH</b>	<b>23,26</b>	<b>23,26</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah</b>	<b>23,26</b>	<b>23,26</b>	<b>100</b>
4.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang mengelola pengelolaan arsip dinamis (OPD)	10	10	100
<b>4.2</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis (Kali)	1	1	100
<b>4.3</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan informasi kearsipan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan penyediaan informasi dan akses layanan kearsipan (Kali)	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>66,95</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.18.1 Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Inti permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 yaitu kurangnya dukungan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan. Sedangkan secara teknik pelaksanaannya permasalahan serta upaya mengatasinya, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.115.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Jumlah pengunjung masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi promosi layanan perpustakaan</li> <li>- Optimalisasi kunjungan perpustakaan keliling</li> <li>- Melaksanakan rotasi buku pada perpustakaan Desa dan Sekolah</li> <li>- Peningkatan layanan informasi (penambahan jumlah komputer layanan dan penambahan kapasitas wifi)</li> </ul>
2	Masih kurangnya koleksi buku dan tenaga pengelola perpustakaan (pustakawan)	Penambahan anggaran buku dan tenaga pengelola perpustakaan (pustakawan)
3	Jumlah perpustakaan yang ber-SNP masih minim di lingkup Kab. Tanjung Jabung Timur	Melaksanakan pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah
4	Sarana dan prasarana kearsipan yang belum diakomodir oleh perangkat daerah	Menerbitkan beberapa peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan
5	Penyelenggaraan arsip belum sesuai dengan norma dan kaidah kearsipan	Melakukan pembinaan serta pengawasan kearsipan secara bertahap
6	Minim nya SDM kearsipan di lingkungan pemerintah daerah	Menyampaikan rekomendasi ANRI hasil program inpasing kepada BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur serta menyurati perangkat daerah agar tiap dinas mempunyai aparatur yg ditunjuk sebagai pengelola arsip
7	Realisasi anggaran yang menurun dari tahun 2020	Dilaksanakan perubahan anggaran dan di alihkan sesuai dengan kebutuhan di tahun tersebut.

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.21.2. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.116.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menumbuh kembangkan minat baca melalui perpustakaan desa	Dana desa dapat digunakan untuk penguatan literasi desa, salah satunya melalui pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa.	Beberapa desa telah menganggarkan anggaran untuk perpustakaan desa
2	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan LKPJ sudah diperbaiki dan diperinci sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tersusunnya pelaporan LKPJ sesuai dengan PP no 13 Tahun 2019
3	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Program dan kegiatan pada TA 2020 yang tertunda sudah di laksanakan pada kegiatan TA. 2021	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan capaian kinerja perpustakaan
4	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Akan dilakukannya komunikasi, koordinasi secara intensif agar OPD maupun mitra kerja di DPRD	Guna tercapainya sasaran program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Bupati tanjung Jabung Timur

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.22. DINAS PERIKANAN

Dinas Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
3. Penyelenggaraan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
4. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.22.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan dengan bidang urusan kelautan dan perikanan Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.117.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perikanan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.699.477.135</b>	<b>4.395.239.131</b>	<b>304.238.004</b>	<b>93,53</b>
1.1	Kegiatan Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.445.000	171.780.000	11.665.000	93,64
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.040.000	68.690.000	7.350.000	90,33
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	28.800.000	28.800.000	0	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.605.000	74.290.000	4.315.000	95,51
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.107.026.346</b>	<b>3.895.552.669</b>	<b>211.473.677</b>	<b>94,85</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.814.686.300	2.619.402.669	195.283.631	93,06
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	1.306.200.000	1.276.150.000	30.050.000	97,70
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.798.111</b>	<b>139.994.603</b>	<b>44.803.508</b>	<b>75,75</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	3.932.100	3.932.100	0	100,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.774.758	67.774.758	0	100,00
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.390.253	19.183.176	7.207.077	72,67
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	0	100,00
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	13.500.000	0	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	68.401.000	30.804.569	37.596.431	32,66
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.211.678</b>	<b>29.800.000</b>	<b>411.678</b>	<b>98,64</b>
1.4.1	Pengadaan Mebel	29.211.678	28.900.000	311.678	98,93
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	900.000	100.000	90,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.600.000</b>	<b>22.158.809</b>	<b>5.441.191</b>	<b>80,29</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	0	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	17.358.809	4.641.191	76,14
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166.396.000</b>	<b>135.953.050</b>	<b>30.442.950</b>	<b>81,70</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.930.000	125.631.550	25.298.450	83,24
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.500.000	0	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.966.000	4.821.500	5.144.500	48,38
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>1.538.894.000</b>	<b>1.454.736.989</b>	<b>84.157.011</b>	<b>94,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.538.894.000</b>	<b>1.454.736.989</b>	<b>84.157.011</b>	<b>94,53</b>
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	70.794.000	62.692.089	8.101.911	88,56
2.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.468.100.000	1.392.044.900	76.055.100	94,82
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Budidaya Perikanan.</b>	<b>260.966.600</b>	<b>231.049.896</b>	<b>29.916.704</b>	<b>88,54</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>260.966.600</b>	<b>231.049.896</b>	<b>29.916.704</b>	<b>88,54</b>
3.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.880.000	193.272.096	27.607.904	87,50
3.1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.476.600	11.215.800	260.800	97,73
3.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	28.610.000	26.562.000	2.048.000	92,84
<b>4</b>	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Perikanan</b>	<b>157.394.832</b>	<b>142.074.000</b>	<b>15.320.832</b>	<b>90,27</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>157.394.832</b>	<b>142.074.000</b>	<b>15.320.832</b>	<b>90,27</b>
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	44.394.832	41.394.000	3.000.832	93,24
4.1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	113.000.000	100.680.000	12.320.000	89,10
<b>5</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>531.380.359</b>	<b>505.030.359</b>	<b>26.350.000</b>	<b>95,04</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>16.840.000</b>	<b>14.980.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>88,95</b>
5.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16.840.000	14.980.000	1.860.000	88,95
5.2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	514.540.359	490.050.359	24.490.000	95,24
5.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	51.343.103	47.623.103	3.720.000	92,75
5.2.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	463.197.256	442.427.256	20.770.000	95,52

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.188.112.925,00</b>	<b>6.728.130.375,00</b>	<b>459.982.551,00</b>	<b>93,60</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (output) adalah Persentase penyusunan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan

1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah

1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN

1.2.2 Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan OPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembayaran jasa administrasi keuangan

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar
- 1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah penyediaan makan minum tamu
- 1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat OPD
- 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
- 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Mebel
- 1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai yang terpenuhi
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan (output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
- 1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin
- 1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara
- B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**  
Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah persentase produksi perikanan tangkap. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
- 1.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan.
- 2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah terbentuknya kelompok Usaha Bersama (KUB) memiliki kartu nelayan

2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah tersedianya alat tangkap ikan (jaring) dan perlengkapannya

**C. PROGRAM PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN.**

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Budidaya Perikanan adalah persentase produksi perikanan budidaya. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah terbentuknya wadah budidaya perikanan dan kelompok petani budidaya ikan atau unit perikanan rakyat (UPR).

1.1.2 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah tersedianya wadah budidaya dan benih layak teknis budidaya perikanan.

1.1.3 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah tersedianya benih ikan dan pakan layak teknis.

**D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

Indikator Program (Outcome) Pengawasan Sumberdaya Perikanan adalah Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Terlaksananya pembinaan RTP.

4.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah RTP Tangkap yang terbina (org)

4.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah RTP budidaya yang terbina

**E. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

Indikator Program (Outcome) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Persentase produksi hasil perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat. Untuk

mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelaksanaan bimbingan (kali)

1.2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tersedianya bahan baku olahan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan.

1.2.2 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan.

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.118.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas perikanan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	78	74	94,87
1.1	Kegiatan Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dok)	6	6	100,00
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (dok)	3	3	100,00
1.1.3	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.2.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bln)	12 Bulan	12 Bulan	100,00
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan (jenis)	4	4	100,00
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	10	10	100,00
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat OPD (bln)	12 Bulan	12 Bulan	100,00
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (unit)	1	1	100,00
1.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (unit)	5	5	100,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang terpenuhi (lembar)	950	950	100,00
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	12	12	100,00
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Bln)	12	12	100,00
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	1	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (%)</b>	<b>85,06</b>	<b>76,57</b>	<b>90,02</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan</b>	<b>100</b>	<b>191,67</b>	<b>191,67</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang memiliki kartu nelayan (KUB)	1	1	100,00
2.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tersedianya alat tangkap ikan dan perlengkapannya (Unit)	6	17	283,33
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (%)</b>	<b>59,16</b>	<b>56,89</b>	<b>96,16</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6-5/4*100
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>100</b>	<b>91,66</b>	<b>91,66</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wadah budidaya perikanan dan UPR yang terbentuk (Unit)	6	5	83,33
3.1.2	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wadah budidaya dan benih layak teknis yang tersedia(unit)	6	5	83,33
3.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan layak teknis yang tersedia (ekor)	605.982	605.982	100,00
		Jumlah pakan ikan layak teknis yang tersedia (Kg)	12.000	12.000	100
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN</b>	<b>PERSENTASE PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (%)</b>	<b>18,18</b>	<b>90,9</b>	<b>500</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya pembinaan RTP (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah RTP Tangkap yang terbina (org)	10	10	100,00
4.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah RTP budidaya yang terbina (org)	10	10	100,00
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>PERSENTASE PRODUKSI HASIL PERIKANAN</b>	<b>50,00</b>	<b>45,99</b>	<b>91,98</b>
		<b>TINGKAT KONSUMSI IKAN MASYARAKAT</b>	<b>38,00</b>	<b>39,40</b>	<b>103,68</b>
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125,00</b>
5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan bimbingan (kali)	20	25	125,00
<b>5.2</b>	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>
5.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan	10	7	70,00
5.2.2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelak usaha perikanan	8	4	50,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>162,76</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.119.  
Jumlah Produksi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Subsektor	2019	2020	2021
1	Perairan Laut (ton)	25.014,06	26.834,44	24.503,61
2	Perairan Umum	346,17	347,91	321,54
3	Kolam + Bio flok (ton)	468,55	522,06	531,92
4	Tambak (ton)	220,48	273,18	275,92
5	Keramba Jaring Apung /KJA (ton)	-	-	-
6	Mina Padi	8,40	8,41	8,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.057,66</b>	<b>27.986,00</b>	<b>25.641,47</b>
7	Jumlah Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.018,43	901,50	9.198,60
8	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita)	39,58	37,55	39,40
9	Benih Ikan/ Ekor	580.300	594.100	605.982

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.120.  
Perkembangan Mina Padi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Mina Padi (Unit)	Luas Lahan Pertanian (Ha)	Produksi Ikan (Ton)
1	Berbak	2 Unit	20.000 M2 (2 Ha)	5,11
2	Rantau Rasau	1 Unit	10.000 M2 (1 Ha)	3,37

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.121.  
Data Rekapitulasi Kelompok dan Tenaga Perikanan Tahun 2021

NO	URAIAN JENIS USAHA	JUMLAH		KET
		KELOMPOK	TENAGA KERJA (Orang)	
1.	Perikanan Budidaya	93 Kelompok	945 Orang	
2.	Perikanan Tangkap	125 Kelompok	4.421 Orang	
3.	Pengolah Hasil Perikanan	473 Kelompok	4.730 Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>691 Kelompok</b>	<b>100.096 Orang</b>	

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

Untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperlukan strategi dan aspek pendukung yang harus diperhitungkan dengan baik, disamping dengan keterbatasan tenaga dilapangan, anggaran juga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam memberikan pembinaan dan bantuan baik berupa sarana prasarana kelompok maupun permodalan melalui rekomendasi koperasi. Dengan jumlah kelompok yang ada dan masih memungkinkan untuk tumbuh kelompok baru, untuk memberikan pembinaan dan bantuan tentu dibutuhkan anggaran. Dinas Perikanan untuk tahun 2021 bidang pengelolaan perikanan budidaya terealisasi 93 kelompok pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana budidaya, pengelolaan perikanan tangkap 125 kelompok KUB berupa sarana dan prasarana tangkap dan bidang pengolah sebanyak 473 kelompok UPI berupa sarana prasarana pengolahan. Jika dilihat dengan jumlah kelompok yang sudah ada, persentase pembinaan dan bantuan untuk belum dapat mencapai 100% atau hanya 15,01% dari 472 UPI Kelompok, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang alokasikan.

Tabel 3.122.  
Jumlah UPI dan pemasaran ikan tahun 2021.

NO	JENIS PRODUKSI	JUMLAH PRODUKSI	KETERANGAN
1.	Permentasi (Terasi)	19.200	
2.	Pelumatan Daging/ Surimi (Kerupuk kayu api, Stik Ikan)	122.400	
3.	Pelumatan Daging/Surimi (Tekwan, Pempek, Bakso, Naget Ikan).	31.200	
4.	Pelumatan Daging/Surimi (Kerupuk Ikan dan Udang)	216.060	
5.	Pembekuan (Finlet Daging Ikan Beku)	102.000	
6.	Penggaraman (Ikan Asin dan Ebi)	426.500	
7.	Pengolahan Lainnya (Abon Ikan dan Peyek udang)	2.400	
<b>Total Produksi/Tahun</b>		<b>919.860</b>	
Jumlah Pengolah Ikan (UPI)		473	
Jumlah Kelompok		71	
Jumlah Individu		473	

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.123.  
Data Kegiatan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	KECAMATAN	URAIAN KEGIATAN PERIKANAN							
		TAMBAK		KOLAM		BIOFLOK		MINAPADI	
		UNIT	LUAS (M2)	UNIT	LUAS (M2)	UNIT	LUAS (M2)	UNIT	LUAS (M2)
1.									
1.	MUARA SABAK TIMUR	35	135.000	43	10.804	30	180		
2.	MUARA SABAK BARAT			153	44.180	60	360		
3.	DENDANG			72	13.000	10	60		
4.	NIPAH PANJANG	8	4.120	10	4.200				
5.	MENDAHARA ILIR	15	36.000	12	2.400				
6.	MENDAHARA ULU			25	4.200	10	60		
7.	GERAGAI			65	19.470	20	120		
8.	S A D U			5	1.000				
9.	B E R B A K			25	1.250			2	20.000
10.	KUALA JAMBI	10	24.000	12	5.040	10	60		
11.	RANTAU RASAU			41	6.460			1	10.000
<b>J U M L A H</b>		<b>68</b>	<b>199.120</b>	<b>275,96</b>	<b>108.580</b>	<b>83</b>	<b>684,04</b>	<b>3</b>	<b>3.000</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.22.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.124.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perikanan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih Rendahnya tingkat kemandirian masyarakat penerima bantuan	Meningkatkan kerjasama yang baik dan sinergis antar nelayan, melibatkan petugas terkait dilapangan (Tenaga Penyuluh Perikanan, Pokmaswas) dan dikoordinasikan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah pesisir kurang berwawasan lingkungan, masyarakat masih menggunakan bahan/alat tangkap yang merusak lingkungan (deskruktif)	Menyeleksi/ inventarisir permintaan masyarakat dalam pengalokasian dana sesuai dengan kondisi lapangan dan kegiatan terkait bantuan kepada masyarakat

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.22.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.125.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Mengambil Langkah Mengambil langkah strategis penyelesaian masalah perikanan melalui pengelolaan budidaya ikan air laut sehingga tidak hanya mengandalkan pada pengembangan dan pengelolaan jenis ikan yang ada saat ini sebagai sumber pendapatan daerah	Mencari data pendukung pengembangan budidaya air laut bahwa karakteristik kondisi ekologis perairan Kab. Tanjung Jabung Timur pantai berlumpur, daerah estuari, kadar salinitas 5 -15 ppt (air payau), DO berkisar antara 4-6 ppm, dibeberapa tempat terdapat Fe, kisaran pasang surut / tidal range di kawasan pesisir pantai Kabupaten Tanjabtim antara 4 dan 5 meter	Menghasilkan PAD agar tidak selalu mengandalkan pengelolaan jenis ikan yang ada tetapi pengembangan budidaya air payau, diantaranya pembesaran budidaya ikan bandeng, pembesaran kakap putih, pembesaran bawal dan pembesaran kepiting, pembesaran nila salin
2.	Agar selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta perlunya regulasi yang baku yang dapat dipedomani sebagai kelengkapan persyaratan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah	Dinas Perikanan telah melakukan CPCL (Survei lokasi terhadap calon penerima dan calon lokasi). Sedangkan Regulasi yang dipakai adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan	Memprioritaskan kelompok yang masuk dalam musrenbang mulai dari tingkat desa sampai dengan musrenbang kabupaten, Hasil Reses/Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan. Jadi usulan tersebut merupakan usulan Button UP.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Permen KP No.17 /Permen-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah	
3.	Berkomunikasi secara intensif dengan Dinas Perikanan Provinsi Jambi agar melakukan kajian dan kerjasama dengan BBAT Jambi dalam upaya meningkatkan produksi benih ikan untuk meningkatkan PAD Dinas Perikanan	Dinas Perikanan telah melakukan kerjasama dalam perolehan calon indukan, pemeriksaan hama penyakit ikan, serta pemeriksaan kualitas air. Untuk kerjasama kajian telah dilakukan, hasil BBAT adalah dalam rangka peningkatan produksi benih diperlukan kualitas air yang baik. Untuk kondisi Balai Benih Ikan (BBI) untuk sumber air perlu dikelola terlebih dahulu.	Agar hasil benih ikan yang dihasilkan memenuhi standart kelayakan (SNI) sesuai yang disarankan BBAT. Monitoring Hama dan Penyakit ikan baik di wilayah pembenihan (BBI) maupun tempat pembudidaya ikan masyarakat tetap diawasi karantina dan BBAT Jambi.
4.	Menyayangkan Dinas Perikanan yang tidak mendampingi Pansus II dalam melakukan konsultasi di Dinas Perikanan dan Balai Benih Ikan Provinsi Jambi	Sayogyanya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun dalam Tugas dan segala hal yang terakit dengan kedinasan bahwa saat yang bersamaan dalam perjalanan dinas ke luar daerah, namun sewaktu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi saya langsung bersama 2 (dua) orang Kepala Bidang ke Dinas terkait.	Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana program kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2023 dan tindak lanjut Kalaju (Kampung Nelayan Maju) diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5.	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan dan penyusunan LKPJ dinas perikanan telah berpedoman dengan Peraturan pemerintah tersebut dan mengikuti acuan, arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dikoordinasikan baik hasil maupun sistematikanya sesuai yang disarankan, jadi untuk dilaporkan sebelumnya telah diperiksa baik dari target dan capaian maupun mekanismenya.	Menyinkronkan data baik program bidang kegiatan, target dan capaian kinerja. Kesesuaian sistematika dan dasar atau landasan hukum laporan LKPJ Penyesuaian hasil rekapan akhir sampai dengan hasil rekomendasi dari dewan.
6.	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat di laksanakan dan munculnya program/ kegiatan yang baru yang tidak relevan	Munculnya Program dan Kegiatan baru yang menyebabkan munculnya program/kegiatan yang baru tidak relevan dikarenakan adanya kebijakan atau aturan baku dan Nomenkaltur baru yakni <i>Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019</i> tentang Subtitusi Program kegiatan dan Sub kegiatan terbaru, sehingga dinas	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Subtitusi Program kegiatan dan Sub kegiatan terbaru sebagai Dasar acuan. Penyesuaian program kegiatan terjadi perampangan dari 11 (sebelas) program kegiatan menjadi 5 (lima) program kegiatan.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>perikanan sebelumnya memiliki 11 (sebelas program kegiatan yakni 7 program secretariat dan 4 program bidang) menjadi 5 (lima) program yakni 1 (satu) program sekretariat dan 4 (empat) program bidang (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumberdaya Perikanan, dan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan), menyebabkan pengalokasian anggaran kegiatan perlu penyederhanaan penyesuaian.</p>	<p>Menyederhanakan program kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran serta dapat mengakomodir kegiatan.</p>
7.	<p>Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT</p>	<p>Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD dengan Mitra di DPR agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan agar dapat terealisasi dalam hal ini telah dilakukan baik mengakomodir ajuan dan saran dari DPR selaku mitra kerja maupun antar OPD terkait bantuan sosial masyarakat (Bansos) agar tidak tumpang tindih kepentingan dan mengelompok pihak tertentu sehingga kesalahan dapat diminimalisir.</p> <p>Mengakomodir ajuan/proposal kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintahan dari kabupaten sampai tingkat desa, tetapi realisasi diukur dengan kekuatan anggaran yang diberikan, karena dalam hal tertentu, terutama program pengolahan harus melaksanakan program kementerian dan provinsi seiring sejalan dilaksanakan (Penas, Hari Krida, Gemar makan Ikan dan lainnya).</p> <p>Sedangkan program pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) keperuntukannya tidak bisa dipastikan satu program, artinya petunjuk teknis dan program diatur oleh pusat terkadang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat.</p>	<p>Tujuan melibatkan semua lapisan perangkat kerja dalam mengakomodir bansos adalah untuk mencegah dan menghindari salah sasaran bantuan.</p> <p>Dapat mengukur dan memprioritaskan kegiatan dengan tingkat kekuatan anggaran yang dilaksanakan oleh OPD, karena adanya program kegiatan yang harus selaras dengan kewenangan kementerian dan provinsi.</p> <p>Alokasi DAK sebagai alternatif dalam mengkomodir bantuan sosial yang sesuai dengan juknis pusat.</p>

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.23. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
2. Penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan prasarana sarana pertanian;
3. Penyelenggaraan pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyelenggaraan program penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Bupati.

#### 3.23.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (Lima) program 11 (Sebelas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh enam) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.126.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.295.552.708,00</b>	<b>9.222.972.322,00</b>	<b>1.072.580.386,00</b>	<b>89,58</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>188.269.200,00</b>	<b>159.253.700,00</b>	<b>29.015.500,00</b>	<b>84,59</b>
1.1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.647.200,00	121.077.200,00	9.570.000,00	92,67
1.1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	12.822.000,00	12.821.500,00	500,00	100,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.1.3	SUB KEGIATAN Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	44.800.000,00	25.355.000,00	19.445.000,00	56,60
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.713.123.481,00</b>	<b>8.712.586.604,00</b>	<b>1.000.536.877,00</b>	<b>89,70</b>
1.2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.497.300.081,00	6.566.663.804,00	930.636.277,00	87,59
1.2.2	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi SKPD	2.215.823.400,00	2.145.922.800,00	69.900.600,00	96,85
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.840.027,00</b>	<b>85.570.100,00</b>	<b>10.269.927,00</b>	<b>89,28</b>
1.3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (alat listrik)	994.800,00	991.500,00	3.300,00	99,67
1.3.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	56.632.428,00	56.375.500,00	256.928,00	99,55
1.3.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.711.799,00	5.548.100,00	163.699,00	97,13
1.3.4	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
1.3.5	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu	7.320.000,00	7.165.000,00	155.000,00	97,88
1.3.6	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20.981.000,00	11.290.000,00	9.691.000,00	53,81
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>120.250.000,00</b>	<b>112.150.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>93,26</b>
1.4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.250.000,00	112.150.000,00	8.100.000,00	93,26
<b>1.5</b>	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>3.898.018,00</b>	<b>3.091.982,00</b>	<b>55,77</b>
1.5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000,00	2.490.000,00	-	100,00
1.5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	1.408.018,00	3.091.982,00	31,29
<b>1.6</b>	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.080.000,00</b>	<b>149.513.900,00</b>	<b>21.566.100,00</b>	<b>87,39</b>
1.6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.180.000,00	145.613.900,00	21.566.100,00	87,10
1.6.2	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.682.789.447,00</b>	<b>1.615.539.391,00</b>	<b>67.250.056,00</b>	<b>96,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEGIATAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>1.682.789.447,00</b>	<b>1.615.539.391,00</b>	<b>67.250.056,00</b>	<b>96,00</b>
2.1.1	SUB KEGIATAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.682.789.447,00	1.615.539.391,00	67.250.056,00	96,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>2.021.719.459,00</b>	<b>1.736.673.252,00</b>	<b>285.046.207,00</b>	<b>85,90</b>
<b>3.1</b>	<b>KEGIATAN Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>56.719.459,00</b>	<b>37.850.352,00</b>	<b>18.869.107,00</b>	<b>66,73</b>
3.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	56.719.459,00	37.850.352,00	18.869.107,00	66,73
<b>3.2</b>	<b>KEGIATAN Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.965.000.000,00</b>	<b>1.698.822.900</b>	<b>266.177.100,00</b>	<b>86,45</b>
3.2.1	SUB KEGIATAN Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani (DAK)	270.780.376,00	270.750.000	30.376,00	99,99

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
3.2.2	SUB KEGIATAN Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit (DAK)	494.250.000,00	254.145.000,00	240.105.000,00	51,42
3.2.3	SUB KEGIATAN Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	1.199.969.624,00	1.173.927.900,00	26.041.724,00	97,83
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>182.111.000,00</b>	<b>142.622.700,00</b>	<b>39.488.300,00</b>	<b>78,32</b>
<b>4.1</b>	<b>KEGIATAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>182.111.000,00</b>	<b>142.622.700,00</b>	<b>39.488.300,00</b>	<b>72,03</b>
4.1.1	SUB KEGIATAN Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	144.921.100,00	106.252.800,00	38.668.300,00	73,32
4.1.2	SUB KEGIATAN Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	37.189.900,00	36.369.900,00	820.000,00	97,80
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>801.535.493,00</b>	<b>743.907.500,00</b>	<b>57.627.993,00</b>	<b>92,81</b>
<b>5.1</b>	<b>KEGIATAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>801.535.493,00</b>	<b>743.907.500,00</b>	<b>57.627.993,00</b>	<b>92,81</b>
5.1.1	SUB KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	136.364.059,00	113.356.500,00	23.007.559,00	83,13
5.1.2	SUB KEGIATAN Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	28.055.000,00	27.550.000,00	505.000,00	98,20
5.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	637.116.434,00	603.001.000,00	34.115.434,00	94,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.983.708.107,00</b>	<b>13.461.715.165,00</b>	<b>1.521.992.942,00</b>	<b>89,84</b>

Sumber : LKPJ Dinas TPH TJT Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (*Outcome*) Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Indikator kegiatan (*Output*) adalah Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (*Output*) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen).

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Indikator Sub Kegiatan (*Output*) adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan).

1.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (*Output*) adalah Jumlah Waktu Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan (Tahun).

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan (*Output*) adalah Persentase Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah.

- 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
- 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa administrasi keuangan
- 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat.
  - 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (alat listrik) Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis).
  - 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK ) Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Tahun).
  - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis).
  - 1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan).
  - 1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu (bulan)
  - 1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)
- 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai (Lembar).
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (Unit)

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)

#### B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Indikator Program (*Outcome*) Persentase Ketersediaan Benih dan Persentase Ketersediaan Pupuk Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dok)

#### C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indikator Program (*Outcome*) Persentase ketersediaan Alat Mesin Pertanian, Persentase Peningkatan Luas Tanam Melalui optimalisasi lahan, Persentase ketersediaan Jalan Usaha Tani dan Persentase Ketersediaan Dam Parit Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian

1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Luas Optimalisasi Lahan Pertanian

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian.

2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani (DAK)

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Jaringan Irigasi yang dipelihara (unit), 2) Panjang Jaringan Usaha tani yang dibangun (meter), 3) Panjang Jaringan Usaha Tani yang di pelihara (Meter)

2.2 Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit (DAK)

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah DAM Parit yang Dibangun (unit)

2.3 Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)

Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi (unit).

D. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Indikator Program (*Outcome*) Persentase Ketersediaan sarana Pengendalian Bencana Pertanian pada Brigade obat2an pertanian dan Persentase AUTP Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, yang Dikendalikan (ha).

1.2 Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Luas AUTP (ha)

E. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Indikator Program (*Outcome*) Cakupan Bina Kelompok tani mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

2. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan penyuluhan pertanian.

1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Kelembagaan BPP (Unit)

1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Kelompok tani yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator sub kegiatan (Output) adalah Jumlah UPTD yang menerima Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD).

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.127.  
Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8 Dok	8 Dok	100
1.1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	3 Dok	3 Dok	100
1.1.3	SUB KEGIATAN Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100
<b>1.2</b>	<b>KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi SKPD	Pembayaran Jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.3</b>	<b>KEGIATAN Administrasi umum Perangkat daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (alat listrik)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	100
1.3.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.3.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Jenis)	6 Jenis	6 Jenis	100
1.3.4	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12 bulan	12 bulan	100
1.3.5	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3.6	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.4</b>	<b>KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	3 Unit	100
<b>1.5</b>	<b>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	249 Lbr	249 Lbr	100
1.5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.6</b>	<b>KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (Unit)	37 Unit	37 Unit	100
1.6.2	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN BENIH</b>	<b>54,55</b>	<b>54,09</b>	<b>99,17</b>
		<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PUPUK</b>	<b>54,55</b>	<b>54,09</b>	<b>99,17</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	<b>KEGIATAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	SUB KEGIATAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (dok)	2	2	100
3	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN ALAT MESIN PERTANIAN</b>	<b>16,67</b>	<b>6,67</b>	<b>40,00</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN LUAS TANAM MELALUI OPTIMASI LAHAN</b>	<b>54,55</b>	<b>54,09</b>	<b>99,17</b>
		<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN USAHA TANI</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
		<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN DAM PARIT</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
3.1	<b>KEGIATAN Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Luas Optimalisasi Lahan Pertanian	300	285	95,00
3.2	<b>KEGIATAN Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	SUB KEGIATAN Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah Jaringan Irigasi Dipelihara (unit)	1	1	100
		Panjang Jaringan Usaha tani yang dibangun (meter)	500	500	100
		Panjang Jaringan Usaha Tani yng di pelihara (Meter)	200	200	100
3.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Dam Parit DAK)	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, (unit)	4	4	100
3.2.3	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan yang direhab/dibangun Sarana (unit)	3	3	100
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA PENGENDALIAN BENCANA PERTANIAN PADA BRIGADE OBAT2AN PERTANIAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
		<b>PERSENTASE AUTP</b>	<b>46,43</b>	<b>45,89</b>	<b>98,85</b>
4.1	<b>KEGIATAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>97,5</b>	<b>97,50</b>
4.1.1	SUB KEGIATAN Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, yang Dikendalikan (ha)	285	285	100
4.1.2	SUB KEGIATAN Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas AUTP (ha)	300	285	95,00
5	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI</b>	<b>43,93</b>	<b>71,96</b>	<b>158,33</b>
5.1	<b>KEGIATAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>100</b>	<b>119,44</b>	<b>119,44</b>
5.1.1	SUB KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan BPP	11	11	100
5.1.2	SUB KEGIATAN Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok tani yang-Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	12	19	158,33
5.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah UPTD yang menerima Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD)	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,47</b>

Sumber : LKPJ DinasTPH Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.23.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.128.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Alih Fungsi Lahan	Mengoptimalkan LP2B, skala prioritas ke petani tanaman pangan dan hortikultura serta pembangunan pertanian hilir (rumah produksi)
2	Luas Tanam IP.200 Masih Terbatas	Pada Tahun 2020 luas Tanam IP 200 sebanyak 1.500 ha, dan pada tahun 2021 bertambah 285 ha sehingga total 1.785 Ha, Dinas TPH menargetkan kenaikan luas tanam IP.200 s/d 2026 sebesar 10 – 20 % .
3	Jaringan irigasi Primer dan Sekunder Kurang Optimal (PUPR)	Dinas TPH mengadakan inventaris terhadap Jaringan irigasi Primer dan sekunder, dan berkoordinasi dengan instansi terkait
4	Tanggul-Tanggul & Pintu Air tidak berfungsi maksimal (Rusak)	Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi tanggul air dan pintu air untuk dilakukan upaya pemecahan masalah
5	Tata Air Mikro Belum Memadai	
6	Jalan Usaha Tani masih Terbatas	Pada renstra 2021 s/d 2026 Dinas TPH terus membangun JUT dan peningkatan kualitas JUT
7	Serangan Hama	Mengoptimalkan fungsi Petugas Pengawas OPT dan sub birigade
8	Terbatasnya Saprasi Pasca Panen	Pada renstra 2021 s/d 2026 Dinas TPH terus menyediakan Saprasi pasca panen berupa terpal plastik, rumah produksi
9	Terbatasnya Alsintan	Setiap tahunnya Dinas TPH selalu mengusulkan alat mesin pertanian ke kementerian pertanian bersumber APBD, Tahun 2021 dinas TPH dari dana APBD melaksanakan pengadaan 2 unit handtraktor
10	Jaringan Pemasaran Terbatas	Dinas TPH berkoordinasi dengan instansi terkait guna membentuk jaringan pemasaran
11	Stabilitas Harga	Khusus untuk tanaman pangan padi guna mengatur stabilitas harga Dinas TPH berkoordinasi dengan instansi terkait

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.23.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.129.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Melaksanakan pendampingan dalam mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran hasil pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian	Dilaksanakan Pendampingan oleh PPL dalam dalam mengoptimalkan peran kelompok tani terkait pemasaran hasil pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian	Meningkatkan Optimalisasi peran Kelompok Tani
2	Merevisi Perda LP2B yang jumlah luasannya mengalami penyusutan serta mengambil langkah strategis mengatasi alih fungsi lahan pertanian	Telah melaksanakan identifikasi pemetaan ulang terhadap lahan LP2B seluas 5.359,72 ha dari 17.000 ha guna diambil langkah selanjutnya	Akurasi jumlah lahan LP2B
3	Agar selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat serta perlunya regulasi yang baku yang dapat dipedomani sebagai kelengkapan persyaratan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah	Dilaksanakan sesuai arahan dilakukan regulasi selektif bantuan ke masyarakat harus terdaftar di data base simluhtan berdasarkan hasil musrenbang, hasil CPL,	Masyarakat yang menerima bantuan tepat sasaran dan lengkap administrasi.
4	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dilaksanakan sesuai arahan lebih terperinci sesuai dengan PP no 13 Tahun 2019, dan selalu berkoordinasi dengan Bappeda TJT	Akuntabilitas kinerja, terukur dan terarah secara detail.
5	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Rekomendasi dilaksanakan terhadap kegiatan yang prioritas, Penas Rp. 254.100.000 HKP Rp 130.550.00, Komisi Penyuluhan Rp, 126.024.300 dianggarkan kembali TA.2021 Saprodi Hortikultura (bibit nanas,	Terlaksananya program/kegiatan yang tertunda guna pembangunan di bidang pertanian.

		Dolomit, Pupuk, agen hayati) Rp.150.200.000 Saprodi Bibit unggul MT2 Saprodi sebanyak Rp.192.885.000	
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Dilaksanakan komunikasi koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	Terlaksananya Program dan Kegiatan terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan agar memberikan azas manfaat yang seluasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur Merakyat.

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.24. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;
3. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak;
5. Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.24.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan dengan bidang urusan Pertanian Pada Tahun 2021 Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan 6 (Enam) Program 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.130.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.907.512.746</b>	<b>5.634.081.346</b>	<b>273.431.400</b>	<b>95,37</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>41.687.100</b>	<b>33.917.300</b>	<b>7.769.800</b>	<b>81,36</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.350.000	0	3.350.000	0
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.862.100	17.897.300	2.964.800	85,79
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.475.000	16.020.000	1.455.000	91,67
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.304.079.767,53</b>	<b>5.057.843.983</b>	<b>246.235.785</b>	<b>95,36</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.789.729.767,53	3.597.293.983	192.435.785	94,92
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.514.350.000	1.460.550.000	53.800.000	96,45
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.808.578</b>	<b>127.454.978</b>	<b>4.353.600</b>	<b>96,70</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000	7.800.000	0	100
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.764.960	58.764.960	0	100
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.137.618	27.137.618	0	100
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.992.000	8000	99,84
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.490.000	2.490.000	0	100
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.616.000	26.270.400	4.345.600	85,81
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>63.797.300</b>	<b>60.768.000</b>	<b>3.029.300</b>	<b>95,25</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	17.405.000	2.595.000	87,03
1.4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.797.300	43.363.000	434.300	99,01
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.800.000</b>	<b>52.121.685</b>	<b>1.678.315</b>	<b>96,88</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000	5.800.000	0	100
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	46.321.685	1.678.315	96,50
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>297.340.000</b>	<b>286.975.400</b>	<b>10.364.600</b>	<b>96,51</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.140.000	282.775.400	10.364.600	96,46
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000	4.200.000	0	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.000.000	15.000.000	0	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>661.271.200</b>	<b>628.691.100</b>	<b>32.580.100</b>	<b>95,07</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>143.442.400</b>	<b>135.108.300</b>	<b>8.334.100</b>	<b>94,19</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	143.442.400	135.108.300	8.334.100	94,19
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan</b>	<b>112.454.800</b>	<b>106.085.800</b>	<b>6.369.000</b>	<b>94,34</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
	<b>Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	112.454.800	106.085.800	6.369.000	94,34
2.3	<b>Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>266.913.900</b>	<b>254.404.000</b>	<b>12.509.900</b>	<b>95,31</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	266.913.900	254.404.000	12.509.900	95,31
2.4	<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>138.460.100</b>	<b>133.093.000</b>	<b>5.367.100</b>	<b>96,12</b>
2.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih, Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	138.460.100	133.093.000	5.367.100	96,12
3	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>413.632.332</b>	<b>388.109.199</b>	<b>25.523.133</b>	<b>93,83</b>
3.1	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>267.632.732</b>	<b>249.352.485</b>	<b>18.280.247</b>	<b>93,17</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	267.632.732	249.352.485	18.280.247	93,17
3.2	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>145.999.600</b>	<b>138.756.714</b>	<b>7.242.886</b>	<b>95,04</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	145.999.600	138.756.714	7.242.886	95,04
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>214.333.400</b>	<b>213.830.500</b>	<b>502.900</b>	<b>99,77</b>
4.1	<b>Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Peryaratatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>65.558.600</b>	<b>65.333.500</b>	<b>225.100</b>	<b>99,66</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	65.558.600	65.333.500	225.100	99,66
4.2	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>148.774.800</b>	<b>148.497.000</b>	<b>277.800</b>	<b>99,81</b>
4.2.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	148.774.800	148.497.000	277.800	99,81
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>185.887.600</b>	<b>112.515.000</b>	<b>73.372.600</b>	<b>60,53</b>
5.1	<b>Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>185.887.600</b>	<b>112.515.000</b>	<b>73.372.600</b>	<b>60,53</b>
5.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	34.624.800	24.585.000	10.039.800	71,00
5.1.2	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	151.262.800	87.930.000	63.332.800	58,13
6	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>71.842.600</b>	<b>32.435.000</b>	<b>39.407.600</b>	<b>45,15</b>
6.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>71.842.600</b>	<b>32.435.000</b>	<b>39.407.600</b>	<b>45,15</b>
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	71.842.600	32.435.000	39.407.600	45,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.454.479.877,53</b>	<b>7.009.662.145</b>	<b>444.817.732,53</b>	<b>94,03</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi (Poin) Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)

##### 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah (%)
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah (%)
  - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)
  - 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)
  - 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah jenis barang cetak (Jenis)
  - 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator Sub Kegiatan Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)
  - 3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan Penyediaan makan minum tamu (bulan)
  - 3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)
  - 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)
  - 4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Materai (Lembar)
    - 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator Sub Kegiatan Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
    - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara
    - 6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)
  7. Kegiatan Penataan Organisasi  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penataan Organisasi (%)
    - 7.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana  
Indikator Sub Kegiatan Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)
- B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Indikator Program (Outcome) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu : 1) Persentase Inseminasi Buatan dan 2) Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)  
Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (%)
    - 1.1 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Sarana Pendukung Pertanian (Ton)
  8. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Dosis Inseminasi Buatan, 2) Jumlah Kelahiran Ternak Sapi hasil IB dan 3) Jumlah akseptor IB

9. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota  
 Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1 Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT  
 Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah produksi hijauan pakan ternak (ton)
10. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain  
 Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  
 Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (Ekor)
- C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Indikator Program (Outcome) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ada yaitu : 1) Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%), 2) Persentase Ketersediaan TAM (%) dan 3) Persentase Jalan Produksi.
- Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian  
 Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian (%)
    - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan  
 Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah bibit unggul yang disalurkan (batang)
  2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian  
 Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)
    - 2.1 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  
 Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Luas Pengembangan TAM (Ha)
- D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Indikator Program (Outcome) adalah Ada yaitu : 1) Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%) dan 2) Persentase Sampel Pangan Asal Hewan /Hasil Pangan Asal Hewan(%)  
 Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.  
 Indikator Sub Kegiatan adalah Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)
    - 1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pelayanan kesehatan ternak /ekor

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)

2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah sampel pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan yang diperiksa (sampel)

E. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator Program (Outcome) Ada 2 yaitu : 1) Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%) dan 2) Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Luas serangan hama tanaman perkebunan yang dikendalikan (Ha).

2.1 Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)

F. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator Program (Outcome) adalah Cakupan Bina Kelompok Tani (%)

Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina

1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah lembaga petani perkebunan yang dibina/kelompok

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.131.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI(POIN)</b>	<b>87</b>	<b>78,41</b>	<b>90,13</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	67
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	12	12	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	132	132	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak (Jenis)	14	14	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	100
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100
1.4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	1	1	100
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	18	18	100
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	580	580	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan (Laporan)	12	12	100
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	59	59	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	14	14	100
<b>1.7</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Penataan Organisasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	1	1	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE INSEMINASI BUATAN (%)</b>	<b>33,47</b>	<b>38,03</b>	<b>113,62</b>
		<b>PERSENTASE PRODUKSI HPT (%)</b>	<b>41,67</b>	<b>35,42</b>	<b>85,0</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian (ton)	15 ton	15 ton	100
<b>2.2</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten /Kota (%)</b>	<b>100</b>	<b>131,89</b>	<b>131,89</b>
2.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah dosis inseminasi buatan	2.850 dosis	3.794 dosis	133,12
		Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB	1250 ekor	1611 ekor	128,88
		Jumlah akseptor IB (ekor)	2250 ekor	3008 ekor	133,68
<b>2.3</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten /Kota (%)</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
2.3.1	Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan	Jumlah produksi hijauan pakan ternak (ton)	167	183,60	109,94
<b>2.4</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Persentase tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.4.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah pengadaan bibit ternak	430	430	100
<b>3</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)</b>	<b>16,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Persentase Ketersediaan TAM</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Jalan Produksi</b>	<b>16,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah bibit unggul yang disalurkan (batang)	7.500	7.500	100
<b>3.2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	luas pengembangan TAM (Ha)	25	25	100
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,15	0,021	714
		Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	40,65	37,39	91,88
4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	41,18	41,18
4.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelayanan kesehatan ternak /ekor	32.300	13.300	41,18
4.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	100	46	46
4.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan yang diperiksa (sampel)	100	46	46
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENURUNAN SERANGAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN (%)	0,16	0,0041	3,9
		PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT KEBAKARAN PERKEBUNAN (%)	2	0,0025	7,72
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)	100	33,89	33,89
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas serangan hama tanaman perkebunan yang dikendalikan. (Ha)	180,94	4,6	2,54
5.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	2.262	29,29	1,29
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	0,29	0,39	134,00
6.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	100	100	100
6.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah lembaga petani perkebunan yang dibina/kelompok	5	5	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>121,84</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular hewan dan ternak. Pencegahan ini melalui Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Target pelayanan kesehatan hewan tahun 2021 sebanyak 32.400 Ekor dan terealisasi sebanyak 13.351 Ekor atau sebesar 41,21%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.132.  
Pelayanan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1	Vaksinasi Rabies (Dosis)	2.500	701
2	Vaksinasi SE (Dosis)	2.500	0
3	Vaksinasi ND (Dosis)	19.800	5.600
4	Vaksinasi Jembrana (Dosis)	1.500	186
5	Desinfeksi (Liter)	250	12
6	Eliminasi	0	0
7	Pengobatan Ternak (Ekor)	5.650	6.750
8	Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (Ekor)	100	51
9	Pengobatan Gangguan Reproduksi (Ekor)	100	51
<b>Jumlah</b>		<b>32.300</b>	<b>13.300</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Perkembangan Ternak Sapi yang dikelola UPTD-BPPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021 berjumlah 70 ekor yang terdiri dari 48 ternak dewasa dan 22 Ternak Anak, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.133.  
Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPPT  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Uraian	Ternak			Keterangan
		Dewasa	Anak	Jumlah	
1	UPTD BPT Mendahara Ulu	21	19	40	
2	KT. Agro Mandiri	2	3	5	
3	KT. Makmur Jaya	1	0	1	
4	Desa Merbau	10	0	10	
5	KT. Jati Mulya I	10	0	10	
6	KT. Suka Damai	0	0	0	Lunas
7	Parit Culum I	4	0	4	
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak (BPT) Dinas Perkebunan dan Peternakan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2009 yang terletak di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas areal yang telah dikelola sampai saat ini ± 4,7 Ha dan tahun 2017 melakukan pengembangan dengan luas Lahan 12 Ha di lokasi Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat.

Pengembangan inseminasi buatan (IB), Target Tahun 2021 sebanyak 3.005 Akseptor dan terealisasi sebanyak 3.008 Akseptor atau sebesar 100,1%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.134.  
Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Uraian	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Inseminasi Buatan (Dosis)	2.800	3.258	2.850	3.862	2.850	3.794
2	Akseptor (Ekor)	2.150	2.622	2.200	3.005	2.250	3.008
3	Kelahiran / Anak (Ekor)	1.150	1.244	1.200	1.819	1.250	1.611

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Jumlah peningkatan populasi ternak dan Produksi Daging tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.135.  
Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Ternak	2019		2020		2021	
		Target (ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (ekor)	Realisasi (Ekor)
1	Sapi	22.389	21.010	23.746	21.204	21.531	21.474
2	Kambing	46.055	43.941	47.974	44.742	45.431	44.951
3	Ayam Buras	4.090.154	3.909.743	4.260.577	4.021.985	4.083.924	3.986.492
4	Ayam Ras/Broiler	71.309	47.895	74.280	58.590	59.492	203.205
5.	Itik	38.295	45.959	39.891	48.772	49.523	54.855

\*Angka Sementara. Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Tabel 3.136.  
Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Produksi	2019		2020		2021*	
		Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)
1	Ruminansia	251.105	248.873	261.568	229.323	287.687	281.065
2	Unggas	998.901	950.154	1.561.132	961.702,58	-	986.684

\*Angka Sementara, Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021

Tabel 3.137.  
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat  
Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2021 (Ha)
1	Karet	7.756
2	Kelapa Sawit	33.872
3	Kelapa Dalam	58.912
4	Lada	37
5	Kakao	441
6	Pinang	9.218
7	Kopi	3.333

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Tabel 3.138.  
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2021 (Ton)
1	Karet	4.503
2	Kelapa Sawit	76.375
3	Kelapa Dalam	57.292
4	Lada	9
5	Kakao	239
6	Pinang	16.136
7	Kopi	1.237

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada musim kemarau masih sering terjadi kebakaran lahan dan kebun yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dan pemerintah terganggu serta mengakibatkan kerugian fisik secara signifikan. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran lahan dan kebun rakyat sangat dibutuhkan melalui pemadaman titik api. Luas kebakaran lahan dan kebun pada tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 29,29 Ha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.139.  
Kejadian Kebakaran lahan dan kebun  
tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	2020 (Ha)	2021 (Ha)
1	Muara Sabak Timur	0,00	1,00
2	Muara Sabak Barat	0,45	1,00
3	Kuala Jambi	0,00	0,00
4	Dendang	0,01	1,00
5	Berbak	0,00	0,00
6	Geragai	0,62	0,00
7	Mendahara	0,00	1,00
8	Mendahara Ulu	7,80	2,00
9	Nipah Panjang	0,00	4,00
10	Rantau Rasau	0,00	0,00
11	Sadu	92,59	19,29
<b>Jumlah</b>		<b>101,47</b>	<b>29,29</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

### 3.24.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.140.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Bantuan Benih/Bibit Unggul untuk Kelompok Tani	Penambahan Bantuan Benih/Bibit Unggul untuk Kelompok Tani
2	Kurangnya Tenaga Ahli Penilaian Usaha Perkebunan, Pengawas Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan dan Petugas Informasi Harga Komoditi Perkebunan di Tingkat Kecamatan	Penambahan Personil Petugas PUP, Pengawas Peredaran Benih/Bibit dan Informasi Harga Komoditi Perkebunan
3.	Masih adanya terjadi Kebakaran Kebun dan Serangan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat yang mengakibatkan Kerugian Fisik Tanaman	Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan serta Sosialisasi tentang Kebakaran Lahan Kebun, dan Penanganan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat
4.	Di Beberapa Wilayah, Tanaman Kelapa Dalam sangat terganggu pertumbuhannya dan juga produksi buah kelapanya	Sangat diperlukan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)
5.	Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging belum optimal	Penyebaran Ternak Kepada Kelompok Tani melalui APBD II, APBD I dan APBN
6.	Masih Terbatasnya Ketersediaan Bahan dan Peralatan Inseminasi Buatan (IB) selama satu tahun berjalan	Dukungan Anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyediaan Bahan Peralatan Inseminasi Buatan (IB)
7.	Masih Terbatasnya Jumlah Inseminator yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Mengusulkan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Inseminator ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia
8.	Masih Terbatasnya Penyediaan Lokasi Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Pendampingan dan Fasilitasi Kelompok Tani dalam Pengembangan Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)
9.	Belum Optimalnya Fungsi Sarana dan Prasarana Pemasaran Ternak dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Sosialisasi dan Peningkatan Fungsi Pemasaran Ternak dan Produk Hasil Peternakan
10.	Kurangnya Perlengkapan Meubelair serta alat kerja untuk administrasi Puskesmas (Laptop, Printer, dll)	Adanya Penambahan Perlengkapan Meubelair untuk Kelengkapan Administrasi di Kantor Puskesmas
11.	Masih Kurangnya obat-obatan hewan dan Vaksin Hewan	Adanya Penambahan Anggaran untuk Pembelian Obat-obatan Hewan dan Vaksin Hewan
12.	Belum Adanya Alat Tes Uji Cepat Lapangan untuk Pemeriksaan Sampel (Tes Kit Sampel)	Perlu diadakannya Alat Test Uji Cepat Lapangan untuk Pemeriksaan Sampel (Test Kit Sampel)
13.	Tidak Adanya Pelatihan/Bimtek untuk Penjagal Ternak (Juru Sembelih Halal)	Perlu diadakannya Kegiatan Pelatihan/Bimtek Juru Sembelih Halal (Juleha)
14.	Belum Adanya Produk UMKM Kab.Tanjung Jabung Timur yang berasal dari Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) bersertifikat Halal	Diadakannya Sosialisasi dan Pengajuan Sertifikat Halal ke Kemenag dan Anggaran Penunjang untuk Kegiatan dimaksud.
15.	Belum Adanya Pelatihan/Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet di Lapangan	Perlu diadakan Pelatihan/Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.24.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.141.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Agar Selektif dalam memberikan bantuan kepada Masyarakat serta perlunya Regulasi yang Baku yang dapat dipedomani sebagai Kelengkapan Persyaratan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah	Selektif dalam memberikan Bantuan kepada Masyarakat serta menyiapkan Regulasi yang Baku yang dapat dipedomani sebagai Kelengkapan Persyaratan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah	Melaksanakan CPCL (Cek Peternak/Pekebun dan Cek Lokasi, Ada Proposal yang wajib disampaikan, wajib ada NPHD dan Fakta Integritas
2	Struktur Pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Penyampaian Struktur Pelaporan LKPJ dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Membuat Pelaporan LKPJ sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
3	Terhadap Program dan Kegiatan Pada TA. 2020 yang ditunda Pelaksanaannya karena Refocusing Anggaran yang telah masuk dalam Perencanaan dan belum ada Anggaran agar Pada Tahun Anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Terhadap Program dan Kegiatan Pada TA. 2020 yang ditunda Pelaksanaannya Karen Refocusing Anggaran sudah dimasukkan kembali Pada TA. 2021	Sudah Dilaksanakan
4	Melakukan Komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	Dinas Perkebunan dan Peternakan akan senantiasa Melakukan Komunikasi, Koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD	Agar Program dan Kegiatan lebih terencana, terarah, terukur, terpadu dan Berkesinambungan

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan/perumusan dan menginformasikan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

#### 3.25.1. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perindustrian* dan bidang urusan *Perdagangan*. Dinas Perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perindustrian* dan bidang urusan *Perdagangan*. Pada Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 7 Program , 25 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.142.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Tahun Anggaran 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Relisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5(3-4)	6(4/3*100)
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>326.420.100,00</b>	<b>314.962.202,00</b>	<b>11.457.898,00</b>	<b>96,49</b>
1.1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>288.920.100,00</b>	<b>279.772.202</b>	<b>9.147.898</b>	<b>96,83</b>
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	131.600.000,00	130.800.000	800.000	99,39
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	157.320.100,00	148.972.202	8.347.898	94,69
1.2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>35.190.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>93,84</b>
1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.500.000,00	35.190.000	2.310.000	93,84
2	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>105.274.100,00</b>	<b>91.059.300</b>	<b>14.214.800</b>	<b>86,50</b>
2.1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota</b>	<b>105.274.100,00</b>	<b>91.059.300</b>	<b>14.214.800</b>	<b>86,50</b>

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Relisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5(3-4)	6(4/3*100)
2.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60.521.000,00	50.992.000	9.529.000	84,26
2.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	44.753.100,00	40.067.300	4.685.800	89,53
<b>3</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>114.385.000,00</b>	<b>98.263.327</b>	<b>16.121.673</b>	<b>85,91</b>
<b>3.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>114.385.000,00</b>	<b>98.263.327</b>	<b>16.121.673</b>	<b>85,91</b>
3.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	114.385.000,00	98.263.327	16.121.673	85,91
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>244.431.812,00</b>	<b>194.392.111</b>	<b>50.039.701</b>	<b>79,53</b>
<b>4.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>244.431.812,00</b>	<b>194.392.111</b>	<b>50.039.701</b>	<b>79,53</b>
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	105.548.500,00	66.255.000	39.293.500	62,77
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	138.883.312,00	128.137.111	10.746.201	92,26
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.650.540.592,57</b>	<b>3.535.835.502,00</b>	<b>114.705.090,57</b>	<b>96,86</b>
<b>5.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.670.000,00</b>	<b>28.485.000</b>	<b>4.185.000</b>	<b>87,19</b>
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	100,00
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.670.000,00	24.485.000	4.185.000	85,40
<b>5.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.181.763.378,57</b>	<b>2.612.985.782</b>	<b>4.000.001</b>	<b>82,12</b>
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>2.640.903.378,57</b>	<b>2.586.085.782</b>	<b>54.817.597</b>	97,92
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540.860.000,00	530.509.500	10.350.500	98,09
<b>5.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>31.450.000,00</b>	<b>26.900.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>98,00</b>
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.450.000,00	26.900.000	550.000	98,00
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000,00	-	4.000.000	-
<b>5.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>154.716.908,00</b>	<b>129.968.382</b>	<b>24.748.526</b>	<b>84,00</b>
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.031.800,00	6.013.800	18.000	99,70
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.266.128,00	33.182.583	83.545	99,75
5.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.389.149,00	17.293.999	95.150	99,45
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	4.750.000	4.000.006	95,00
5.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.700.000,00	2.255.000	445.000	83,52
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.329.831,00	66.473.000	23.856.831	73,59
<b>5.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>49.840.306,00</b>	<b>49.803.000</b>	<b>37.306</b>	<b>99,93</b>
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.840.306,00	14.840.000	306	100,00
5.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	35.000.000,00	34.963.000	37.000	99,89
<b>5.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>27.107.638</b>	<b>8.892.362</b>	<b>75,30</b>
5.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	27.107.638	8.892.362	75,30

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Relisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5(3-4)	6(4/3*100)
<b>5.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.100.000,00</b>	<b>156.976.200</b>	<b>7.123.800</b>	<b>95,66</b>
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.140.000	88.251.200	6.888.800	92,76
5.7.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	15.710.000	15.615.000	95.000	99,40
5.7.3	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	53.250.000	53.110.000	140.000	99,74
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.753.184.099,00</b>	<b>1.691.281.850</b>	<b>61.902.249</b>	<b>96,47</b>
<b>6.1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.753.184.099,00</b>	<b>1.691.281.850</b>	<b>61.902.249</b>	<b>96,47</b>
6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	55.999.466,00	54.679.400	1.320.066	97,64
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.312.514.000,00	1.252.105.200	60.408.800	95,40
6.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	384.670.633,00	384.497.250	173.383	99,95
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>60.159.800,00</b>	<b>55.113.000</b>	<b>5.046.800</b>	<b>91,61</b>
<b>7.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>60.159.800,00</b>	<b>55.113.000</b>	<b>5.046.800</b>	<b>91,61</b>
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	60.159.800,00	55.113.000	5.046.800	91,61
	<b>Jumlah</b>	<b>6.254.780.503,57</b>	<b>5.980.907.292</b>	<b>273.873.211,57</b>	<b>95,62</b>

#### A. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Indikator Program Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

##### 1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kegiatan adalah jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### 1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pemantauan Sarana Distribusi Perdagangan (Kali)

##### 1.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Sub Kegiatan adalah jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar

##### 2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Indikator Kegiatan adalah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pemantauan Sarana Distribusi Perdagangan (Kali)

B. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Program adalah persentase operasi pasar melalui Kegiatan yang dilakukan terdiri dari

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kotadan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan adalah Terciptanya stabilitas harga jumlah monitoring kebutuhan pokok masyarakat, dengan Sub Kegiatan

1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah jumlah monitoring kebutuhan pokok masyarakat

1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga

C. Program standardisasi dan perlindungan konsumen

Indikator Program adalah persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Kegiatan adalah Jumlah wajib tera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), dengan Sub Kegiatan :

1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah wajib tera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

D. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Indikator Program adalah Persentase pelaksanaan promosi produk dalam negeri. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Indikator Kegiatan adalah Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk

Dengan Sub Kegiatan :

1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

1.2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk

E. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program adalah Indeks Pelayanan Instansi. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan (Dokumen)

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah, dengan Sub Kegiatan :

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)

4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran tagihan surat kabar (Tahun)

4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan adalah Penyediaan makan minum tamu (Tahun)

4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Tahun)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah/Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :

5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)

5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Pembiayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)

7.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)

7.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)

F. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator Kegiatan Program adalah Persentase realisasi capaian target kinerja sektor industri. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan adalah Terlaksananya temu usaha, Jumlah kelompok yang mengikuti Bimtek, dengan Sub Kegiatan

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Indikator Sub Kegiatan Jumlah IKM yang mengikuti Kegiatan Pendampingan

1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Sub Kegiatan Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan Jumlah IKM yang mengikuti Kegiatan Pendampingan.

G. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan Program adalah Persentase Peningkatan IKM Formal. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan

Indikator Kegiatan adalah : Jumlah Izin Usaha Industri yang diawasi

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Izin Usaha Industri yang diawasi

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.143.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Relisasi	%
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100$
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PASAR SEHAT</b>	0	50	0
1.1	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	100	100	100
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	5	5	100
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	9	9	100
1.2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	100	100	100
1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana prasarana yang terpelihara, operasional pasar	9	9	100
2	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN OPERASI PASAR</b>	100	100	100
2.1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota</b>	100	90	90
2.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring kebutuhan pokok masyarakat	12	12	100
2.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga Program	10	8	80
3	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG</b>	100	114	13,99
3.1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaa Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	100	13,98	13,98
3.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah wajib tera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	815	114	13,98
4	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI</b>	100	16,67	16,67
4.1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	100	33,33	33,33
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi, Pameran	3	1	33,33
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat pemasaran produk IKM	3	1	33,33

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Relisasi	%
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100$
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>97,44</b>
5.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Realisasi (dokumen)	5	5	100
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (dokumen)	4	4	100
5.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN(Tahunan)	1	1	100
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (bulanan)	12	12	100
5.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	55	55	100
5.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	10	10	100
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
5.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (jenis)	7	7	100
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar(bulan)	12	12	100
5.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	12	100
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100
5.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	3	3	100
5.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	1	1	100
5.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	12	12	100
5.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Roda 4 = 4 Roda 2=13	Roda 4 = 4 Roda 2=9	76,47
5.7.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	21	21	100
5.7.3	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	1	100
6	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN SENTRA IKM</b>	<b>44,44</b>	<b>33,33</b>	<b>75</b>
6.1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	16	16	100
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti mendapat bantuan peralatan	16	16	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Relisasi	%
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100$
6.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan	56	56	100
7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PRESENTASE PENINGKATAN IKM FORMAL</b>	<b>20,62</b>	<b>18,6</b>	<b>90,20</b>
7.1	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>81,82</b>	<b>81,82</b>
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Formal	668	750	81,82
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>70,47</b>

Sumber : LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.25.2. Permasalahan dan Solusinya

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.144.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan Pelaku usaha;	1. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
2	Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan pelaku usaha;	2. Peningkatan koordinasi antar dinas instansi yang baik dalam rangka pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
3	Peningkatan kualitas SDM melalui diklat teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;	3. Terwujudnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4	Pengurangan Anggaran akibat adanya Covid 19 yang dialokasikan ke anggaran kesehatan untuk mendukung program dari pemerintah pusat	4. Kegiatannya yang bersifat fisik dikurangkan dengan memperbanyak kegiatan yang menyentuh peningkatan ekonomi kerakyatan

Sumber : LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.25.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Berikut ini merupakan catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, yaitu:

Tabel 3.145.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Menggali produk lokal selain batik dan kopi agar lebih bervariasi dan berkualitas dalam peningkatan PAD.	Produk lain selain batik dan kopi adalah : 1. Kerupuk udang 2. Kletek Udang 3. Kerupuk Kayu Api 4. Keripik Pisang	Tujuannya : Untuk Meningkatkan Produk Unggulan Masalah yang diselesaikan : Adanya bantuan pelatihan, peralatan serta dengan bantuan pengurusan P-IRT dan sertifikat halal untuk bersaing dengan produk lainnya
2	Memberikan SK kepada pengelola pasar agar lebih bertanggungjawab dalam pekerjaannya.	SK Untuk Ketua pasar telah diberikan	- Pengurus Pasar Dapat Bertanggung Jawab terhadap tugas yang diberikan.
3	Mengevaluasi pengelolaan pasar sehingga pengurus pasar bertanggungjawab untuk peningkatan PAD.	Evaluasi pengelolaan pasar telah dilaksanakan, dengan adanya peningkatan realisasi PAD Pasar	- Telah dilaksanakan rapat bulanan tahunan dengan pengurus pasar agar kerjanya lebih baik lagi. - Pengurus Pasar dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. - Terciptanya pasar rakyat yang bersih dan tertib pengelolaannya
4	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sudah dilaksanakan perbaikan dengan koordinasi dengan mitra kerja Bidang ekonomi BAPPEDA	Telah melaksanakan komunikasi dengan tim mitra kerja BAPPEDA bagaimana Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif
5	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Untuk Anggara]n Tahun 2020 kegiatan yang di Refocusing anggaran telah dilaksanakan kembali.	Kegiatan yang direfocusing telah dilaksanakan kembali ditahun 2021

6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Telah dilaksanakan dengan instansi terkait, dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan	Kerjasama masalah perizinan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perizinan
---	--	--	---

Sumber : LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perencanaan pembangunan Daerah;
2. koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran pemerintah Daerah;
3. penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. penyusunan program dan nota keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi rencana dan program serta dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.26.1. Capaian Pelaksanaan Program

BAPPEDA menyelenggarakan urusan Penunjang pemerintahan Bidang urusan *Perencanaan*. Pada Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.146.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,458,878,837.00</b>	<b>4,090,665,478.00</b>	<b>368,213,359.00</b>	<b>91.74</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>83,232,400.00</b>	<b>33,467,700.00</b>	<b>49,764,700.00</b>	<b>40,21</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,040,300.00	9,034,300.00	18,006,000.00	33,41
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,366,900.00	14,503,300.00	7,863,600.00	64.84
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,825,200.00	9,930,100.00	23,895,100.00	29,36
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,505,344,612.00</b>	<b>3,287,268,650.00</b>	<b>218,075,962.00</b>	<b>93.78</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,873,956,112.00	2,749,800,150.00	124,155,962.00	95.68
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	631,388,500.00	537,468,500.00	93,920,000.00	85,12
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>91,46</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,600,000.00	22,500,000.00	2,100,000.00	91,46
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231,771,560.00</b>	<b>200,835,392.00</b>	<b>30,936,168.00</b>	<b>86.65</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,199,400.00	29,105,400.00	94,000.00	99.68
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,548,522.00	68,038,522.00	7,510,000.00	90,06
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,250,038.00	28,285,738.00	2,964,300.00	90.51
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	15,606,000.00	15,489,000.00	117,000.00	99.25
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,367,600.00	55,116,732.00	20,250,868.00	73.13
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62,096,065.00</b>	<b>62,095,000.00</b>	<b>1,065.00</b>	<b>100.00</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	62,096,065.00	62,095,000.00	1,065.00	100.00
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>123,600,000.00</b>	<b>99,873,236.00</b>	<b>23,726,764.00</b>	<b>80.80</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,600,000.00	99,873,236.00	23,726,764.00	80.80
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>428,234,200.00</b>	<b>384,625,500.00</b>	<b>43,608,700.00</b>	<b>89.82</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161,700,000.00	143,233,500.00	18,466,500.00	88.58
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,620,000.00	55,154,000.00	9,466,000.00	85.35
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201,914,200.00	186,238,000.00	15,676,200.00	92.24
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>877,901,230.00</b>	<b>637,737,130.00</b>	<b>240,164,100.00</b>	<b>72.64</b>
2.1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>601,835,848.00</b>	<b>418,289,048.00</b>	<b>183,546,800.00</b>	<b>69.50</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	39,387,900.00	25,692,900.00	13,695,000.00	65.23
2.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	8,025,000.00	4,650,000.00	3,375,000.00	57.94
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	149,842,740.00	78,150,140.00	71,692,600.00	52.15
2.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	8,807,628.00	7,307,628.00	1,500,000.00	82.97
2.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	330,255,946.00	268,401,746.00	61,854,200.00	81.27
<b>2.2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>126,701,300.00</b>	<b>113,470,300.00</b>	<b>13,231,000.00</b>	<b>89.56</b>
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	53,003,500.00	52,783,500.00	220,000.00	99.58
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	22,737,800.00	9,926,800.00	12,811,000.00	43.66
2.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50,960,000.00	50,760,000.00	200,000.00	99.61
<b>2.3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>149,364,082.00</b>	<b>105,977,782.00</b>	<b>43,386,300.00</b>	<b>70.95</b>
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	72,984,200.00	43,770,400.00	29,213,800.00	59.97
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	76,379,882.00	62,207,382.00	14,172,500.00	81.44
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,373,631,680.00</b>	<b>816,653,848.00</b>	<b>556,977,832.00</b>	<b>59.45</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>401,197,989.00</b>	<b>263,387,783.00</b>	<b>137,810,206.00</b>	<b>65.65</b>
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	206.272.723.00	179.045.327.00	27,227,396.00	86.80
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	00.00
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29,613,000.00	4,665,000.00	24,948,000.00	15.75
3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120,224,266.00	65,467,456.00	54,756,810.00	54.45
3.1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	7,950,000.00	4,575,000.00	3,375,000.00	57.55
3.1.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34,138,000.00	9,635,000.00	24,503,000.00	28.22
<b>3.2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).</b>	<b>461,699,774.00</b>	<b>345,050,722.00</b>	<b>116,649,052.00</b>	<b>74.73</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139,239,283.00	115,485,581.00	23,753,702.00	82.94
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	71,687,952.00	64,642,652.00	7,045,300.00	90.17
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	37,026,500.00	20,573,900.00	16,452,600.00	55.57
3.2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 9RPJPD, RPJMD dan RKPD).	102,554,387.00	72,939,537.00	29,614,850.00	71.12
3.2.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53,901,352.00	52,141,352.00	1,760,000.00	96.73
3.2.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57,290,300.00	19,267,700.00	38,022,600.00	33.63
<b>3.3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>510,733,917.00</b>	<b>208,215,343.00</b>	<b>302,518,574.00</b>	<b>40.77</b>
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144,606,770.00	83,380,052.00	61,226,718.00	57.66
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21,299,778.00	10,544,578.00	10,755,200.00	49.51
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	117,624,832.00	26,614,832.00	91,010,000.00	22.63
3.3.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104,017,672.00	57,019,316.00	46,998,356.00	54.82
3.3.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	11,299,924.00	6,799,924.00	4,500,000.00	60.18
3.3.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Wilayah.	111,884,941.00	23,856,641.00	88,028,300.00	21.32
<b>JUMLAH</b>		<b>6,710,411,747.00</b>	<b>5,545,056,456.00</b>	<b>1,165,355,291.00</b>	<b>82.63</b>

Sumber : LKPJ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program adalah Indeks Pelayanan Instansi. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

##### 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

##### 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan (Dokumen)

- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)
- 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran Monitoring dalam daerah
2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)
  - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan adalah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)
  - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)
  - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah jenis barang cetak (Jenis)
  - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)
  - 4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan adalah Penyediaan makan minum tamu (Bulan)
  - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator Kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah/Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit/Buah)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Pembiayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)

7.2 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin

7.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Program adalah 1) Persentase Capaian Target Tahunan Dalam RKPD Dan 2) Persentase Keselarasan Pembangunan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, dengan Sub Kegiatan :

1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Usulan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik TA.2022

1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Forum Konsultasi Publik di dalam satu tahun

1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD dalam 1 tahun

1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten sebagai bagian dari penyusunan RKPD.

1.5 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari penyusunan RKPD

1.6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKPD

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Data dan Informasi Pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan :

2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah data dan informasi pembangunan daerah

2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan

2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Data profil pembangunan daerah

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi RKPD dan Dana Alokasi Khusus fisik

3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator Sub Kegiatan adalah Dokumen laporan LKPJ Kabupaten

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Perencanaan Dan Penganggaran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator Sub Kegiatan adalah Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

- 1.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang perencanaan pembangunan manusia

- 1.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia

- 1.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia

- 2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Indikator Kegiatan adalah Persentase Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA, dengan Sub Kegiatan :

- 2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen RIPIK

- 2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Indikator Sub Kegiatan adalah 1) Jumlah Dokumen NTUP dan 2) Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi

- 2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang ekonomi

- 2.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA

- 2.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Indikator Sub Kegiatan adalah 1) Jumlah Dokumen NTN, 2) Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang SDA

- 2.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang SDA

- 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Indikator Kegiatan adalah Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan Sub Kegiatan :

3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi

3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Asistensi Bidang Infrastruktur

3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur

3.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator Sub Kegiatan adalah 1) Jumlah Dokumen Strategi sanitasi kabupaten tahun 2023 - 2027 dan 2) Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang kewilayahan

3.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Indikator Sub Kegiatan adalah Dokumen Asistensi Bidang Kewilayahan

3.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Indikator Sub Kegiatan adalah Dokumen Monev dan pelaporan Bidang kewilayahan

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.147.**  
Pencapaian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$\frac{6-5/4 \times 10}{0}$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>79,59</b>	<b>102,04</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43 Stel	43 Stel	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10 Jenis	10 Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	68 Jenis	68 Jenis	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	7 Jenis	7 Jenis	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	14 Unit	100
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 Unit	16 Unit	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	6 Unit	6 Unit	100
1.7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PRESENTASE CAPAIAN TARGET TAHUNAN DALAM RKPD</b>	<b>85</b>	<b>96,97</b>	<b>114,08</b>
		<b>PRESENTASE KESELARASAN PEMBANGUNAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Usulan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik TA.2022	12 Bulan	12 Bulan	100
2.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Forum Konsultasi Publik di dalam satu tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD dalam 1 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari penyusunan RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$
2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Data dan Informasi Pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data profil pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi RKPD dan Dana Alokasi Khusus fisik	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen laporan LKPJ Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PRESENTASE KESESUAIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>117,65</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	21 Berita Acara	21 Berita Acara	100
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang perencanaan pembangunan manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Berita Acara Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	7 Berita Acara	7 Berita Acara	100
3.1.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen RPIK	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Jumlah Dokumen NTUP - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$
3.2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang SDA	1 Tahun	1 Tahun	100
3.2.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	- Jumlah Dokumen NTN - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3.2.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monitoring pembangunan daerah bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>3.3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.3.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Strategi sanitasi kabupaten tahun 2023 - 2027 - Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan bidang wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3.3.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Dokumen Asistensi Bidang Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.3.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Dokumen Monev dan laporan Bidang wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>108,44</b>

Sumber : LKPJ Bappeda, 2020

### 3.26.2. Permasalahan dan Solusinya

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.148.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi  
Permasalahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum Optimalnya Mekanisme dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan	Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
2	Belum Optimalnya Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah	Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia
3	Belum Optimalnya kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas	Melaksanakan Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas
4	Belum optimalnya koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

*Sumber : LKPJ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021*

### 3.26.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Darah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan SK Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.149.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Perda tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	Perda Nomor 2 Tahun 2021	Pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026
2	Perbup tentang RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022	Perbup No 16 Tahun 2021	Penyelesaian Tahapan dalam Penyusunan APBD TA 2022
3	Perbup Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	Perbup No 63 Tahun 2021	Pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Sumber : LKPJ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.26.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020

Berikut ini merupakan catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, yaitu:

Tabel 3.150.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Mengkoordinir setiap OPD terkait standar penyampaian dokumen pelaporan dalam setiap pembahasan dengan DPRD agar terjadi kesesuaian dan keselarasan data pelaporan antar OPD.	Telah melaksanakan Koordinasi dengan setiap OPD agar dalam penyampaian dokumen pelaporan, sistematika atau format laporan sesuai dengan peraturan yang ada	Dokumen Laporan telah sesuai dan mengikuti format dan sistematika yang telah ditentukan
2	Perencanaan Pembangunan kedepannya lebih dititikberatkan kepada pencapaian output sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	Dalam penentuan kegiatan Perangkat Daerah wajib menyampaikan output yang mendukung dalam pencapaian outcome program.	Diharapkan outcome program dapat tercapai sehingga pencapaian target visi misi daerah dapat tercapai
3	Desain pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencantumkan strategi dan arah kebijakan yang mempertimbangkan aspek khusus keunggulan wilayah	Hal ini telah dimasukkan dalam misi ke I RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 yaitu menuju sektor Masyarakat sejahtera yang	Diharapkan 60% penduduk yang bekerja di sektor ini dapat lebih sejahtera.

	atau aspek spasial disektor perikanan, pertanian dan perkebunan.	bertumpu pada sektor Pertanian dan Perikanan	
4	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mempedomani pada Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan LKPJ telah mempedomani PP No 13 Tahun 2019 dan Permendagri No 18 Tahun 2020
5	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Untuk program dan kegiatan pada tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran dan telah dilaksanakan perencanaannya, Dinas PUPR telah mengusulkan kembali dalam Rencana Kerja Anggaran tahun berikutnya	Mengusulkan Kembali program dan kegiatan pada tahun berikutnya
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	Dalam penyusunan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mempedomani RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Renstra dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani usulan-usulan prioritas yang disampaikan dari musrenbang kecamatan, pikir dewan dan usulan-usulan top down yang mendukung visi misi Kepala Daerah.	Sudah melaksanakan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT

Sumber : LKPJ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

### 3.27. INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

### 3.27.1. Capaian Pelaksanaan Program

Inspektorat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang urusan pengawasan Pada Tahun 2021. Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.151.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Daerah  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.985.620.375,00</b>	<b>5.891.586.286,00</b>	<b>94.034.089,00</b>	<b>98,47</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.147.635,00</b>	<b>62.162.135,00</b>	<b>10.985.500,00</b>	<b>84,98</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.997.635,00	44.317.135,00	5.680.500,00	88,63
1.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.150.000,00	7.845.000,00	5.305.000,00	59,65
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.866.995.760,00</b>	<b>3.839.158.114,00</b>	<b>27.837.646,00</b>	<b>99,28</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3.540.575.960,00	3.537.038.314,00	3.537.646,00	99,90
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	321.420.000,00	297.120.000,00	24.300.000,00	92,43
1.2.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	4.999.800,00	4.999.800,00	-	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.964.160,00</b>	<b>14.964.160,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas	14.964.160,00	14.964.160,00	-	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>343.639.483,00</b>	<b>341.604.761,00</b>	<b>2.034.722,00</b>	<b>99,40</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	15.895.469,00	15.893.200,00	2.269,00	99,98
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	178.386.178,00	178.386.178,00	-	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	94.862.836,00	94.862.836,00	-	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.095.000,00	16.095.000,00	-	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	33.600.000,00	31.567.547,00	2.032.453,00	93,95
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.122.465.537,00</b>	<b>1.109.598.437,00</b>	<b>12.867.100,00</b>	<b>98,85</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	798.860.000,00	786.870.000,00	11.990.000,00	98,49
1.5.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	221.905.537,00	221.555.537,00	350.000,00	99,84
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	101.700.000,00	101.172.900,00	527.100,00	99,48
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.307.800,00</b>	<b>44.545.439,00</b>	<b>32.762.361,00</b>	<b>57,62</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	72.187.800,00	39.425.439,00	32.762.361,00	54,61
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>487.100.000,00</b>	<b>479.553.240,00</b>	<b>7.546.760,00</b>	<b>98,45</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	112.600.000,00	105.433.140,00	7.166.880,00	93,63
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	8.380.000,00	8.380.000,00	-	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	366.120.000,00	365.740.100,00	379.900,00	99,89
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.623.437.822,00</b>	<b>2.585.451.202,00</b>	<b>37.986.620,00</b>	<b>98,55</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>2.170.932.702,00</b>	<b>2.169.972.702,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>99,95</b>
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	631.000.000,00	630.250.000,00	750.000,00	99,88
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.200.000,00	75.200.000,00	-	100
2.1.3	Review Laporan Kinerja	363.750.000,00	363.750.000,00	-	100
2.1.4	Review Laporan Keuangan	175.250.000,00	175.200.000,00	50.000,00	99,97
2.1.5	Pengawasan Desa	381.280.000,00	381.280.000,00	-	100
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	173.852.702,00	173.692.702,00	160.000,00	99,90
2.1.7	Monitoring Dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	370.600.000,00	370.600.000,00	-	100
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>452.505.120,00</b>	<b>415.478.500,00</b>	<b>37.026.620,00</b>	<b>91,81</b>
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	45.005.120,00	25.228.500,00	19.776.620,00	56,05
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	407.500.000,00	390.250.000,00	17.250.000,00	95,76
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>189.717.995,00</b>	<b>172.873.619,00</b>	<b>16.844.376,00</b>	<b>91,12</b>
<b>3.1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>94.653.786,00</b>	<b>94.653.786,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	57.102.260,00	57.102.260,00	-	100
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan	37.551.526,00	37.551.526,00	-	100
<b>3.2</b>	<b>Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>95.064.209,00</b>	<b>78.219.833,00</b>	<b>16.844.376,00</b>	<b>82,28</b>
3.2.1	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.700.950,00	3.700.950,00	-	100
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76.794.128,00	63.199.352,00	13.594.776,00	82,29
3.2.3	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi	14.569.131,00	11.319.531,00	3.249.600,00	77,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.798.776.192,00</b>	<b>8.649.911.107,00</b>	<b>148.865.085,00</b>	<b>98,30</b>

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Indeks Pelayanan Instansi adalah. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan

7.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

7.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Koordinasi Dalam Daerah (Jumlah Monev yang Dilaksanakan)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
  - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Instalasi Listrik/Penerangan
  - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor
  - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak
  - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar
  - 4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu
  - 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
  - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
  - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin
  - 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penyediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Surat Menyurat
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara
  - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  - 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang terpelihara

#### B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Indikator Program (Outcome) Persentase Nilai Temuan Keuangan Yang Ditindaklanjuti/Dikembalikan Ke Kas Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - 1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 1.3 Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Kinerja
  - 1.4 Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Keuangan
  - 1.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa
  - 1.6 Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
  - 1.7 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Tindaklanjut Hasil Pengawasan
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan atas Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2.4 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

#### C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indikator Program (Outcome) Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model), Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

1.2 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Kegiatan/Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pendampingan dan Asistensi

2.1 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan/Dokumen Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

2.2 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Reformasi Birokrasi

2.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.152.  
Pencapaian Program Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEK PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>101,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dok	4 dok	80
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	3 dok	3 dok	100
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	48 Laporan	48 Laporan	100
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 Stel	42 Stel	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	11 Jenis	100
1.4.2	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	4 Jenis	4 Jenis	100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	14 Jenis	14 Jenis	100
1.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Bangunan	1 Bangunan	100
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.62	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit	100
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 Tahun	1 Tahun	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang gedung Kantor yang direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>PERSENTASE NILAI TEMUAN KEUANGAN YANG DITINDAKLANJUT/DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPD PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR</b>	<b>40 %</b>	<b>68,87 %</b>	<b>172,18</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemerintah Daerah	49 LHP	49 LHP	100
2.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Keuangan Pemerintah Daerah	10 LHM	10 LHM	100
2.1.3	Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Kinerja	23 LHR	23 LHR	100
2.1.4	Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review atas Review Laporan Keuangan	15 LHR	LHR	100
2.1.5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	20 LHP	20 LHP	100
2.1.6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan atas Kerjasama Pengawasan Internal	12 Laporan	12 Laporan	100
2.1.7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring/Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pengawasan	16 LHP	16 LHP	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
2.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16 LHP	16 LHP	100
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>MENINGKATKAN LEVEL IACM (INTERNAL AUDITOR CAPABILITY MODEL)</b>	<b>LEVEL 2</b>	<b>LEVEL 2</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Laporan	3 Laporan	100
3.1.2	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan/Dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3 Laporan	3 Laporan	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.2.1	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
3.2.2	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 LHE	1 LHE	100
3.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>124,49</b>

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Capaian kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 tergambar dari hasil pemeriksaan internal dan review Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.153.  
Jumlah Pemeriksaan Internal dan Review Tahun 2021

No	Kegiatan	Target/Capaian		Ket.
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149 LHP/LHM/LHR/LHE</b>
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133 LHP/LHE</b>
I.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	49	49	49 LHP/LHE
1	Reguler	25	25	25 LHP
2	Audit DAK	4	4	4 LHP
3	Evaluasi SPIP	5	5	5 LHE
4	Evaluasi SAKIP	6	6	6 LHE
5	Pemeriksaan Dana BOS	4	4	4 LHP
6	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan jasa Daerah	1	1	1 LHE
7	Pemeriksaan Pengelolaan BUMDES	1	1	1 LHP
8	Evaluasi Hasil Identifikasi Resiko	2	2	2 LHE
9	Pemeriksaan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 RSUD-NH	1	1	1 LHP
I.2	<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>10 LHM</b>
1	Monitoring Penutupan Kas	43	43	10 LHM
I.3	<b>Review Laporan Kinerja</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23 LHR/LHE</b>
1	Review LPPD	1	1	1 LHR
2	Review DAK	8	8	8 LHR
3	Review RPJM	1	1	1 LHR
4	Review SSH, ASB dan Harga Satuan Pokok	1	1	1 LHR
5	Review Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1	1	1 LHR
6	Review Kinerja UPBJ	1	1	1 LHR
7	Review Kepatuhan atas Pengelolaan BMD	1	1	1 LHR
8	Review atas Rotas, Promosi dan Mutasi ASN	1	1	1 LHR
9	Review atas Pelaksanaan Penilaian Baseline SPIP Terintegrasi	2	2	2 LHR
10	Review atas Penilaian Resiko	5	5	5 LHR
11	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ	1	1	1 LHR
I.4	<b>Review Laporan Keuangan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1	Review Laporan LKPD	5	5	5

No	Kegiatan	Target/Capaian		Ket.
2	Review Laporan Kabupaten	2	2	2
3	Review RKA OPD	6	6	6
4	Review RKPD	2	2	2
<b>1.5</b>	<b>Pengawasan Desa</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
1	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa	10	10	10
2	Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	10	10	10
<b>1.6</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
1	Monitoring Tindak Lanjut	16	16	16
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
II.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16	16	16
1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16	16	16
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
I.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4	4	4
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	4	4	4
	<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b> LHP/LHM/LHR/LHE

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.154.  
Total Temuan hasil audit pemeriksaan Tahun 2013 – 2020

Tahun	Total Temuan	Cicilan			Sisa Temuan	% Kinerja ITKAB
		Melalui TLITKAB	Melalui MP TP-TGR	Jumlah		
2013	1,227,141,167.68	779,132,656.31	423,008,511.37	1,202,141,167.68	25,000,000.00	97.96
2014	1,275,520,854.23	1,006,452,701.16	247,828,031.45	1,254,280,732.61	21,240,121.62	98.33
2015	10,378,040,087.83	6,536,745,332.49	2,678,177,059.68	9,214,922,392.17	1,163,117,695.66	88.79
2016	2,704,921,195.72	2,341,260,826.16	283,712,107.88	2,624,972,934.04	79,948,261.68	97.04
2017	1,070,858,042.54	1,070,858,042.54	-	1,070,858,042.54	-	100.00
2018	6,827,172,500.59	5,841,907,457.59	-	5,841,907,457.59	985,265,043,00	85,57
2019	1,937,305,909.31	525,495,010,51	-	525,495,010,51	1,411,810,898.80	27,13
<b>2020</b>	<b>1.673.035.497,26</b>	1.152.235.103,57	-	1.152.235.103,57	520.800.393,69	68,87
<b>TOTAL</b>	<b>27.093.995.255,16</b>	19.241.537.130,33	3,632,725,710.38	22.874.262.840,71	4.219.732.413,69	
<b>%TINDAK LANJUT</b>		<b>71.01</b>	<b>13,40</b>	<b>84.41</b>	<b>15.59</b>	

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Dari total temuan Tahun 2013 s/d 2020 sebesar Rp. 27.093.995.255,16,- ( dua puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima koma Enam belas rupiah ), persentase penyelesaian melalui TLITKAB Tanjung Jabung Timur sebesar 71,01 % atau Rp. 19.241.537.130,33 (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah), dan

penyelesaian melalui MP TP-TGR sebesar 13,40 % atau Rp. 3,632,725,710.38,- ( *tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga puluh delapan rupiah*).

Total pengembalian uang atas temuan setoran ke kas negara sebesar 84,41 % atau Rp. 22.874.262.840,71,- ( *dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh koma tujuh puluh satu rupiah*).

### 3.27.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.155.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Di Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor	Menambah SDM dan mengirim pelatihan-pelatihan dan sertifikasi terhadap auditor yang ada pada Inspektorat Daerah
2	Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh	Koordinasi yang lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar APIPDA

Sumber : LKPJ Inspektorat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.27.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.156.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Memaksimalkan tindak lanjut temuan atas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang lambat dalam mengembalikan temuan atas pemeriksaan	Upaya pemenuhan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah dilakukan melalui monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan secara berkala dan upaya percepatan lainnya adalah dengan melalui mediasi MP TPTGR (majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi).	Tujuan dari kegiatan Monitoring Tindaklanjut dan MP TPTGR adalah untuk upaya percepatan pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah
2	Berperan aktif dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan BPK serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan setiap perangkat daerah agar semakin terarah, terukur dan tepat sasaran serta tidak menyalahi aturan	Inspektorat Daerah selalu berperan aktif baik dalam hal pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut, yakni dengan memberikan pelayanan konsultasi dan trus melakukan monitoring tindaklanjut baik secara langsung ke OPD-OPD yang masih ada temuan dan juga menyurati Kepala OPD dengan melalui Surat Bupati/Wakil Bupati.	Dengan dilakukannya monitoring tindaklanjut dan pendampingan di harapkan kedepannya temuan hasil pemeriksaan dapat berkurang dan tata kelola pemerintahan dan penatausahaan administrasi dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan perbaikan atas pelaporan yang LKPJ Inspektorat Daerah	Telah dilakukan perbaikan atas pelaporan yang LKPJ Inspektorat Daerah
4	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Tahunan mengacu pada kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh kemendagri setiap tahunnya sebagai Program Kerja Pelaksanaan Tahunan yang menjadi arah atau pemetaan kami dalam pemeriksaan.	perlu Penguatan pada Inspektorat Daerah guna meningkatkan level kapabilitas APIP yakni dengan cara peningkatan SDM melalui diklat dan bimtek termasuk sarana prasarana guna menunjang hasil pemeriksaan
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan kesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Merakyat	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan sinergitas dengan OPD dan juga melakukan rapat-rapat sebagai sarana evaluasi guna melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan	Dengan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah itu sendiri dapat tercapai.

Sumber : LKPJ Inspektorat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 202

### **3.28. BADAN KEUANGAN DAERAH**

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik Daerah;
2. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
3. dan Belanja Daerah;
4. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan pemerintah Daerah;
5. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penerimaan daerah serta pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
6. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah yang terinventarisasi dan sesuai standardisasi;
7. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penyiapan penetapan dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang diberikan oleh Bupati.

#### **3.28.1. Capaian Pelaksanaan Program**

Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.157.  
 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan Daerah  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	Target	Realisasi	+/-	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.691.926.330,44</b>	<b>11.538.787.819,00</b>	<b>3.153.138.511,44</b>	<b>89,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.172.800,00</b>	<b>27.725.000,00</b>	<b>17.447.800,00</b>	<b>61,38</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.593.200,00	5.000.000,00	593.200,00	89,39
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.593.200,00	-	5.593.200,00	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.593.200,00	4.500.000,00	1.093.200,00	80,45
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.593.200,00	-	5.593.200,00	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.300.000,00	13.725.000,00	4.575.000,00	75
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.688.905.865,44</b>	<b>7.300.355.723,00</b>	<b>2.388.550.142,44</b>	<b>75,35</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.798.365.865,44	6.409.815.723,00	2.388.550.142,44	72,85
1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.894.343.368,00	1.813.633.276,00	80.710.092,00	95,74
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	890.540.000,00	890.540.000,00	-	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>97.800.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>58,28</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.300.000,00	57.000.000,00	300.000,00	99,48
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.500.000,00	-	40.500.000,00	-
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>480.542.810,00</b>	<b>434.780.150,00</b>	<b>45.762.660,00</b>	<b>90,48</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.251.000,00	25.357.200,00	5.893.800,00	81,14
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.009.810,00	276.042.550,00	7.967.260,00	97,19
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.440.000,00	43.610.400,00	4.829.600,00	90,03
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	4.700.000,00	700.000,00	87,04
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.500.000,00	24.650.000,00	6.850.000,00	78,25
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.942.000,00	60.420.000,00	19.522.000,00	75,58
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>346.200.000,00</b>	<b>346.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000,00	260.000.000,00	-	100
1.5.2	Pengadaan Mebel	86.200.000,00	86.200.000,00	-	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.546.854.855,00</b>	<b>2.914.354.964,00</b>	<b>632.499.891,00</b>	<b>82,17</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170.654.855,00	156.755.000,00	13.899.855,00	91,85
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.376.200.000,00	2.757.599.964,00	618.600.036,00	81,68
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>486.450.000,00</b>	<b>458.371.982,00</b>	<b>28.078.018,00</b>	<b>94,23</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.750.000,00	129.567.600,00	7.182.400,00	94,75
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.500.000,00	69.552.382,00	9.947.618,00	87,49
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	65
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.600.000,00	50.200.000,00	3.400.000,00	93,66

NO	Uraian	Target	Realisasi	+/-	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	206.600.000,00	202.552.000,00	4.048.000,00	98,04
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>164.119.638.628,38</b>	<b>148.209.447.225,00</b>	<b>15.910.191.403,38</b>	<b>90,31</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.504.923.000,00</b>	<b>1.074.198.550,00</b>	<b>430.724.450,00</b>	<b>71,38</b>
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	69.170.000,00	53.260.000,00	15.910.000,00	77
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.905.000,00	-	64.905.000,00	-
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	32.400.000,00	27.600.000,00	4.800.000,00	85,19
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	39.600.000,00	-	39.600.000,00	-
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	89.400.000,00	87.895.750,00	1.504.250,00	98,32
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	39.630.000,00	5.156.000,00	34.474.000,00	13,01
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	701.656.000,00	677.027.000,00	24.629.000,00	96,49
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	208.672.000,00	37.515.000,00	171.157.000,00	17,98
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	235.510.000,00	185.744.800,00	49.765.200,00	78,87
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	23.980.000,00	-	23.980.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>226.395.000,00</b>	<b>206.854.000,00</b>	<b>19.541.000,00</b>	<b>91,37</b>
2.2.1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	65.221.000,00	54.816.000,00	10.405.000,00	84,05
2.2.2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	161.174.000,00	152.038.000,00	9.136.000,00	94,33
<b>2.3</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>608.265.700,00</b>	<b>437.175.100,00</b>	<b>171.090.600,00</b>	<b>71,87</b>
2.3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	106.777.000,00	79.649.000,00	27.128.000,00	74,59
2.3.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18.680.600,00	16.870.000,00	1.810.600,00	90,31
2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	185.663.000,00	176.741.100,00	8.921.900,00	95,19
2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	98.770.100,00	-	98.770.100,00	-
2.3.5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	198.375.000,00	163.915.000,00	34.460.000,00	100
<b>2.4</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>161.780.054.928,38</b>	<b>146.491.219.575,00</b>	<b>15.288.835.353,38</b>	<b>90,55</b>
02.04.01	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	144.898.685.184,00	144.205.572.596,00	693.112.588,00	99,52
02.04.03	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.743.138.683,38	280.866.511,00	14.462.272.172,38	1,91
02.04.04	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.138.231.061,00	2.004.780.468,00	133.450.593,00	93,76
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>892.000.000,00</b>	<b>847.625.840,00</b>	<b>44.374.160,00</b>	<b>95,03</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>892.000.000,00</b>	<b>847.625.840,00</b>	<b>44.374.160,00</b>	<b>95,03</b>
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	77.440.000,00	74.250.000,00	3.190.000,00	95,88
3.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	149.100.000,00	900.000,00	99,4

NO	Uraian	Target	Realisasi	+/-	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
3.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.970.000,00	12.800.000,00	7.170.000,00	64,1
3.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	437.340.000,00	415.085.840,00	22.254.160,00	94,91
3.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	35.030.000,00	24.670.000,00	10.360.000,00	70,43
3.1.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	69.030.000,00	68.530.000,00	500.000,00	99,28
3.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	103.190.000,00	103.190.000,00	-	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>755.511.155,00</b>	<b>626.836.165,00</b>	<b>128.674.990,00</b>	<b>82,97</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>755.511.155,00</b>	<b>626.836.165,00</b>	<b>128.674.990,00</b>	<b>82,97</b>
4.1.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	77.200.000,00	48.228.000,00	28.972.000,00	62,47
4.1.2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	208.000.000,00	164.055.960,00	43.944.040,00	78,87
4.1.3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	470.311.155,00	414.552.205,00	55.758.950,00	84,14
<b>JUMLAH</b>		<b>180.959.076.113,82</b>	<b>161.722.340.049,00</b>	<b>19.236.736.064,82</b>	<b>89,37</b>

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi, Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan (Rancangan Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Renstra)
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinator dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen RKA
  - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA
  - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen DPA
  - 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA
  - 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan Tahunan)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Keuangan

- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
- 2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Sub kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan Formal
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
  - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
  - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor
  - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis Barang Cetak
  - 4.4 Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Tagihan Surat Kabar
  - 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan Makan Minum Tamu
  - 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah serta Biaya Makan Minum Rapat SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-4
  - 5.2 Sub Kegiatan Penggandaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Mebel

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Jasa Sumber Daya Air dan Listrik

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara

3.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perbaikan Mebel

7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor

3.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara

**B. PROGRAM PEGELELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Opini BPK, Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyusunan Anggaran Daerah

1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi
- 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi
- 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen DPA yang diverifikasi
- 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perubahan Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi
- 1.7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
- 1.8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perda tentang Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.9 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Terlaksananya Bimtek Regulasi tentang Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.10 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  
Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  
Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- 1.1 Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Penerbitan Dokumen SPD dan Anggaran Kas, SP2D
- 1.2 Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah SDM dalam mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengelola Keuangan
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pelaksanaan Laporan keuangan Daerah
- 3.1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO an Beban

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD

- 3.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Laporan Semester

- 3.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- 3.4 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi

- 3.5 Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah/Sisdur

- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah

- 4.1 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah 1) Jumlah Desa Penerima Dana Iuran BPJS Aparat Desa, 2) Jumlah Desa Penerima Dana ADD, 3) Jumlah Desa Penerima DD, 4) Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan Propinsi.

- 4.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Waktu Pengelolaan Dana BTT

- 4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Desa Penerima Dana PDRD

## C. PROGRAM PEGELELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Persentase Aset Daerah yang Dilaksanakan dan Didayagunakan, Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa

- 1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

1.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Pensertifikatan Laporan Barang Milik Daerah

1.4 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Persertifikatan Tanah Milik Daerah

1.5 Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah

1.6 Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

1.7 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen atas Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

**D. PROGRAM PEGELELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Indikator Program (Outcome) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Persentase Peningkatan PAD, Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Penerimaan Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kerjasama Publikasi atau Himbauan dengan Media Cetak yang berdampak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak

1.2 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Data Pajak Daerah, Penambahan Transparansi Data Penerimaan Pajak Daerah

1.3 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah adanya

- Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan penilaian PBB
- Jumlah Peta ZNT untuk NJOP

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.158.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Pelayanan Instansi</b>	<b>78,00</b>	<b>85,00</b>	<b>108,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>62,50</b>	<b>62,5</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rancangan Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Renstra)	6 Dok	6 Dok	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	1 Dok	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	0 Dok	0
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dok	1 Dok	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dok	0 Dok	0
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi (LKPJ, LKjIP, LPPD, LAPORAN TAHUNAN)	4 Dok	3 Dok	75
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Disiplin Aparatur</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 stel	84 stel	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	48 orang	0 orang	0
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	28 Jenis	28 Jenis	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	9 Jenis	9 Jenis	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12 bulan	12 bulan	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Luar Daerah serta Makan Minum Rapat SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-4	1 Unit	1 Unit	100
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	32 Unit	32 Unit	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	300 Lbr	300 Lbr	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	8 Unit	8 Unit	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	100
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebel	10 Unit	10 Unit	100
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	20 Unit	20 Unit	100
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Gedung	2 Gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Anggaran Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	0,00	0
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	43 Dok	43 Dok	100
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang diverifikasi	43 Dok	0,00	0
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	43 Dok	43 Dok	100
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	43 Dok	0,00	0
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	100
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	0,00	0
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Bimtek Regulasi tentang Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kali	1 kali	100
2.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	0,00	0
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2.2.1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Dokumen SPD dan Anggaran Kas, SP2D	3 Dok	3 Dok	100
2.2.2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Aplikasi Penatausahaan SIPKD SDM	1 Tahun	1 Tahun	100
<b>2.3</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60</b>
2.3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	43 Dok	43 Dok	100
2.3.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	2 Dok	2 Dok	100
2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dok	0,00	0
2.3.5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah / Sisdur	1 Dok	0,00	0
<b>2.4</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>98,40</b>	<b>98,4</b>
02.04.01	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Dana Iuran BPJS Aparat Desa	73 Desa	73 Desa	100
		Jumlah Desa Penerima ADD	73 Desa	70 Desa	95,89
		Jumlah Desa Penerima DD	73 Desa	73 Desa	100
		Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	73 Desa	71 Desa	97,26
02.04.03	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Waktu pengelolaan Dana BTT	1 Tahun	1 Tahun	100
02.04.04	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana PDRD	73 Desa	71 Desa	97,26
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Aset Daerah yang Diamankan dan Didayagunakan</b>	<b>100,00</b>	<b>93,03</b>	<b>93,03</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	1 Dok	1 Dok	100
3.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100
3.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100
3.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Daerah	50 Dok	50 Dok	100
3.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100
3.1.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dok	5 Dok	100
3.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen atas Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43 Dok	43 Dok	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PAD</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>200</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Penerimaan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106</b>
4.1.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi atau Himbuan dengan Media Cetak yang terdampak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak	1 Tahun	1 Tahun	100
4.1.2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	13.553 Objek	18842 Objek	139,02
4.1.3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan penilaian PBB	4 Desa/Kel	4 Desa/Kel	100
		Jumlah Peta ZNT untuk NJOP	4 Peta	4 Peta	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>125,5%</b>

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.28.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.159. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih terbatasnya Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan maupun Pendapatan lain-lain yang sah	1. Penambahan kuantitas personil di lapangan 2. Peningkatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
2	Dalam upaya meningkatkan pencapaian Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dirasa masih rendahnya tingkat keberhasilan koordinasi dengan SKPD lain	Melakukan Rapat Koordinasi Rutin yang harus dihadiri oleh Pejabat yang berwenang dalam pengambil kebijakan
3	Masih terbatasnya Kompetensi Pegawai dalam Pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pengelolaan Keuangan, Penganggaran dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Rendahnya pencapaian Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkendala dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Kepemilikan tidak ditemukan.</li><li>- Batas-batas tanah belum akurat</li></ul>	Melakukan penelusuran dokumen kepemilikan tanah pemkab dan berkoordinasi secara intens ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengatasi kendala tersebut

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.28.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Keuangan Daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 1 (satu) Peraturan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.160.  
Kebijakan Strategis Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021	Pelimpahan kewenangan pemungutan yang diberikan ke OPD terkait pengelolaan pendapatan asli daerah
3.	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4.	Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5.	Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2021	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
6.	Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 71 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7.	Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 71 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021	Pengeluaran Belanja yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.28.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.161.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Mengambil langkah strategis dalam penyusunan perencanaan anggaran terkait dengan kegiatan penyediaan sumber daya air dan listrik terutama terkait pembiayaan lampu penerangan jalan umum	Telah berkoordinasi dengan pihak PT. PLN terkait dengan pemasangan meteran yang sebagian masih menggunakan perhitungan flat/tetap yaitu apabila LPJU tersebut padam,	Menekan beban biaya belanja khususnya tagihan LPJU

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	yang sampai saat ini masih menimbulkan beban anggaran yang cukup besar sehingga target capaiannya dapat lebih terukur.	maka beban pemakaian tetap diperhitungkan juga, hal ini yang menjadi beban anggaran kita.	
2	Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah terutama terhadap kegiatan pembangunan pemerintah daerah untuk menggunakan bahan galian dari perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan alat berat yang berada dikecamatan	Telah berkoordinasi dengan ULP terkait dengan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD maupun DAK untuk dapat merekomendasikan pihak rekanan untuk membeli/menggunakan gal.C yang bersumber dari penambang yang memiliki izin. Serta dapat menggunakan/menyewa alat berat yang ada di kecamatan sebagai penunjang kegiatan apabila alat berat dikecamatan tersebut sedang tidak digunakan.	Menekan adanya kegiatan Illegal Tambang Gal.C serta dapat meningkatkan PAD dari Pajak Gal.C dan sewa alat berat.
3	Menertibkan usaha galian C yang tidak memiliki izin serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memiliki izin	Himbauan dalam bentuk Sosialisasi di Media Cetak dan Baliho serta Langsung ke tempat Usaha Illegal untuk memfasilitasi Perizinannya	Legalitas Penambang yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Struktur pelaporan LKPJ akan dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaporan LKPJ 2021 akan lebih terperinci.
5	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena	Telah dilaksanakan pembahasan bersama antara TAPD dan OPD Teknis terkait	Terlaksananya pelaksanaan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan	kegiatan yang tertunda pelaksanaan dan telah dianggarkan Kembali pada APBD TA 2022	Program dan Kegiatan Prioritas
6	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Terus melakukan koordinasi antar OPD maupun mitra kerja di DPRD terkait perencanaan program dan kegiatan diharapkan sasaran yang tepat waktu dan memberikan azas manfaat	Pelaksanaan program kegiatan yang tepat guna berhasil guna

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
2. Merencanakan program kerja Tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;
4. Merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan Informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, Pengembangan SDM, Pembinaan Disiplin, Pemberian Kesejahteraan serta Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengendalikan dan membina PNS di Lingkungan BKPSDMD;
7. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien Mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
8. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan BKPSDMD;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

### 3.29.1. Capaian Pelaksanaan Program

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dengan bidang urusan Kepegawaian Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah melaksanakan 2 (Dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.162.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.725.365.716</b>	<b>6.546.784.120</b>	<b>178.581.596</b>	<b>97,34</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.406.000</b>	<b>25.982.989</b>	<b>16.423.011</b>	<b>61,27</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.232.000	15.109.789	9.122.211	62,35
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6=4/3*100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	2.000.000	0
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	-	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.174.000	7.323.200	3.850.800	65,99
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.866.334.476</b>	<b>5.744.716.978</b>	<b>121.617.498</b>	<b>97,93</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.018.832.675	4.905.883.978	112.948.697	97,75
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	846.662.673	838.423.000	8.239.673	99,03
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	839.128	410.000	429.128	48,86
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>244.541.390</b>	<b>214.586.971</b>	<b>29.954.419</b>	<b>87,75</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.410.000	7.336.600	73.400	99,01
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.597.590	87.507.395	90.195	99,90
1.3.3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.519.800	40.484.950	34.850	99,91
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	5.400.000	4.200.000	56,25
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.850.000	16.650.00	16.849.999	98,81
1.3.6	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi	82.564.000	57.208.026	25.355.974	69,29
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>125.783.850</b>	<b>125.596.250</b>	<b>187.600</b>	<b>99,85</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.483.850	67.417.250	66.600	99,90
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.300.000	58.179.000	121.000	99,74
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.600.000</b>	<b>61.614.232</b>	<b>4.985.768</b>	<b>92,51</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	61.614.232	4.985.768	92,51
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>379.700.000</b>	<b>374.286.700</b>	<b>5.413.300</b>	<b>98,57</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.700.000	41.416.500	283.500	99,32
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.700.000	132.364.200	335.800	93,44
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	22.846.000	554.000	97,63
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.900.000	177.661.000	4.239.000	97,67
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>3.430.054.323</b>	<b>1.759.852.157</b>	<b>1.670.202.166</b>	<b>51,31</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>936.413.415</b>	<b>217.658.405</b>	<b>718.755.010</b>	<b>23,24</b>
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12.316.000	2.160.000	10.156.000	23,24

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	701.682.983	30.936.887	670.746.096	4,41
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	134.814.432	112.490.891	22.323.541	83,44
2.1.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	33.232.000	22.281.227	10.950.773	67,05
2.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	54.368.000	49.789.400	4.578.600	91,58
<b>2.2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>472.349.152</b>	<b>358.719.266</b>	<b>113.629.886</b>	<b>75,94</b>
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	12.072.800	3.940.000	8.132.800	32,64
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	68.622.800	47.264.135	21.358.665	68,88
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	391.653.552	307.515.131	84.138.421	78,52
<b>2.3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.870.713.756</b>	<b>1.098.668.504</b>	<b>772.045.252</b>	<b>58,73</b>
2.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	58.533.482	41.032.196	17.501.286	70,10
2.3.2	Koordinasi Dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.780.255.572	1.043.340.220	736.915.352	58,61
2.3.3	Fasilitasi Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional	31.924.702	14.296.088	17.628.614	44,78
<b>2.4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>150.578.000</b>	<b>84.805.982</b>	<b>65.772.018</b>	<b>56,32</b>
2.4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	51.261.000	31.642.217	19.618.783	61,73
2.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	31.920.000	21.568.880	10.351.120	67,57
2.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	51.971.000	22.170.085	29.800.915	42,66
2.4.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.426.000	9.424.800	6.001.200	61,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.155.420.039</b>	<b>8.306.636.277</b>	<b>1.848.783.762</b>	<b>81,80</b>

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah,

##### 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan

##### 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen RKA

##### 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA

##### 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen DPA

##### 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA
- 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 3.1 Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan
- 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor
- 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak
- 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar
- 3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Indikator Sub Kegiatan adalah Penyediaan makan minum tamu (Bulan)
- 3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah pengadaan peralatan dan mesin
- 4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Gedung atau Bangunan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
- Indikator Sub Kegiatan adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara
  - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
  - 6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin
  - 6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara

#### **B. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**

Indikator Program Kepegawaian adalah 1) Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN dan 2) Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Formasi Kebutuhan ASN
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Formasi ASN yang diajukan
  - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pemrosesan Pemberhentian ASN
  - 1.4 Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Kenaikan Gaji Berkala, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Dok)
  - 1.5 Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (dok)
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Mutasi dan Promosi ASN
  - 2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Mutasi ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kenaikan Pangkat ASN

2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Promosi ASN

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pengembangan Kompetensi

3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal

3.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial

3.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional Indikator

Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan

4.2 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang terevaluasi

4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran terselesaikan

4.4 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pemrosesan Surat Cuti dan Surat Cerai

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.163.  
Target, Realisasi dan Capaian Program  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78	80,21	102,83
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	3	100,0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	100,0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	1	100,0
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	1	100,0
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	1	100,0
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	4	4	100,0
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100,0
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	100,0
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	7	100,0
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100,0
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	8	8	100,0
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (bulan)	12	12	100,0
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12	12	100,0
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (bulan)	12	12	100,0
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin (Unit)	12	12	100,0
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung atau Bangunan (Gedung)	1	1	100
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	100,0
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Jabatan yang terpelihara (Unit)	1	1	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	13	13	100,0
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin (Tahun)	1	1	100,0
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	2	2	100,0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2	Program Kepegawaian Daerah Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN	54,431	71	130,5
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	70	81,54	116,49
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	92,54	92,54
2.1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Kebutuhan ASN (Orang)	200	-	-
2.1.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN yang diajukan (orang)	200	-	-
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pemrosesan Pemberhentian ASN (berkas)	134	284	211,9
2.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen Kenaikan Gaji Berkala, Cuti PNS, Karpeg, Karis, Karsu dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Dok)	1.600	2.413	150,8
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (dok)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	125,77	125,77
2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN (orang)	100	45	45,0
2.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN (orang)	350	912	260,6
2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi ASN (Orang)	608	436	71,7
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi	100	83,07	83,07
2.3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal (Orang)	76	57	75,0
2.3.2	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajerial (Orang)	262	262	100
2.3.3	Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (orang)	155	115	74,2
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	209,00	209
2.4.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan (Orang)	100	196	196,0
2.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi (orang)	37	74	200,0
2.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus ASN yang melakukan Pelanggaran terselesaikan (kasus)	5	5	100,0
2.4.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemrosesan Surat Cuti dan Surat Cerai (Kasus)	5	17	340,0
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>116,61</b>

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.29.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.164.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penundaan Pelaksanaan Pengadaan PNS dan PPPK	Melakukan Koordinasi, untuk pengusulan kembali pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK
2	Pelaksanaan Diklat LATSAR CPNS mengalami perubahan metode pembelajaran	Pelaksanaan Pembelajaran Diklat dilakukan Melalui Zoom Meeting, serta Mencegah terjadinya Penularan Covid.
3	Rendahnya penyerapan Anggaran Perjalanan Dinas	Mereview kembali penganggaran Belanja Perjalanan Dinas yang disesuaikan dengan penerapan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.29.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.165.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Berkoordinasi dengan BKN Regional VII atau BKP Pusat terkait rekrutmen PPPK terutama tenaga Pengajar dan Medis	Telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, BKN Pusat dan kementerian PANRB di Jakarta terkait rekrutmen PPPK.	Untuk Tahun Anggaran 2021, Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunda utk penerimaan PPPK dengan alasan pertimbangan gaji PPPK yg dibebankan ke APBD Pemerintah Daerah Masing-masing sehingga Pemkab Tanjab Timur dan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Kab/kota se-Provinsi Jambi sepakat untuk menunda penerimaan tersebut, sampai menunggu petunjuk selanjutnya dari MENPAN RB.
2	Melaksanakan lelang jabatan eselon II yang masih kosong (Dinas Perhubungan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Melaksanakan evaluasi/Job Fit/ Uji kesesuaian terhadap Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi	Telah dilaksanakan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tanggal 22 s.d 24 November 2021. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah di isi melalui job fit. Sedangkan Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi pada Badan Kesbangpol akan dilaksanakan seleksi terbuka pada tahun 2022.
3	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mereview Struktur laporan LKPJ tahun 2020 dan menyusun LKPJ tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menyusun LKPJ tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai sistematika yang ditetapkan.
4	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya	Mengalokasikan kembali Program dan Kegiatan pada TA 2021 untuk pelaksanaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kegiatan pada TA 2021 yaitu : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.		
5	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Melakukan Koordinasi antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD Guna mensinkronisasikan data pengembangan Kompetensi ASN yang bertujuan meningkatkan Indeks Profesional ASN (IPASN) sesuai Visi Misi Kepala Daerah dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT.	Terjadi Peningkatan Indeks Kompetensi ASN dari 2,336% di tahun 2020 menjadi 4,280% pada tahun 2021.

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.30. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
2. penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
5. pemberian bimbingan teknis urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan di seluruh SKPD;

6. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diberikan oleh Bupati.

### 3.30.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dengan bidang urusan Pemerintah Pada Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 2 (Dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 166.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3* 100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.377.575.366,07</b>	<b>3.315.480.494,00</b>	<b>62.114.872,07,-</b>	<b>98,16</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.771.716,-</b>	<b>9.652.000,-</b>	<b>11.119.716,-</b>	<b>63,66</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,-	4.500.000,-	3.000.000,-	60,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.048.910,-	4.045.000,-	3.910,-	99,90
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.048.910,-	-	-	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.048.910,-	4.045.000,-	3.910,-	99,90
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	4.048.910,-	-	-	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.076.076,-	7.062.000,-	14.076,-	99,80
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.042.368.732,07,-</b>	<b>3.020.747.084,-</b>	<b>21.621.648,07</b>	<b>99,29</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.185.822,07	2.717.213.084,-	14.972.738,07	99,45
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.234.000,-	295.634.000,-	6.600.000,-	97,82
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.048.910,-	4.000.000,-	48.910,-	98,78
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.900.000,-	3.900.000,-	-	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>161.854.918,-</b>	<b>145.907.650,-</b>	<b>16.247.268,-</b>	<b>89,96</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	3.223.200,-	3.222.000,-	1.200.000,-	99,96
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.743.233,-	42.343.000,-	400.233,-	99,06
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.867.485,-	21.822.700	44.785,-	99,80
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,-	3.000.000,-	-	100
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan tamu	20.792.000,-	20.792.000,-	-	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.229.000,-	70.229.000,-	-	100
<b>1.4.</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.800.000,-</b>	<b>15.062.660,-</b>	<b>10.737.340,-</b>	<b>58,39</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000,-	15.062.660,-	10.737.340,-	58,39
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>116.780.000,-</b>	<b>114.391.100,-</b>	<b>2.369.900,-</b>	<b>97,50</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	96.480.000,-	94.166.100,-	2.313.000,-	97,60
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,-	20.225.000,-	75.000,-	99,63
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>383.195.808,-</b>	<b>298.234.600,-</b>	<b>84.961.208,-</b>	<b>77,83</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>16.850.000,-</b>	<b>15.680.000,-</b>	<b>1.170.000,-</b>	<b>93,06</b>
2.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.940.000,-	6.120.000,-	820.000,-	88,18
2.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	9.910.000,-	9.560.000,-	350.000,-	96,47
<b>2.2.</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>	<b>51.864.000,-</b>	<b>49.554.000,-</b>	<b>2.310.000,-</b>	<b>95,55</b>
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	51.864.000,-	49.554.000,-	2.310.000,-	95,55
<b>2.3.</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>136.339.736,-</b>	<b>124.884.600,-</b>	<b>11.455.136,-</b>	<b>91,60</b>
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	136.339.736,-	124.884.600,-	11.455.136,-	91,60
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi</b>	<b>178.142.072,-</b>	<b>108.116.000,-</b>	<b>70.026.072,-</b>	<b>60,69</b>
2.4.1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	51.399.800,-	43.910.000,-	7.489.800,-	85,43
2.4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	88.511.272,-	25.975.000	62.536.272,-	29,35
2.4.3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	38.231.000,-	38.231.000,-	-	100
<b>Jumlah</b>					<b>96,09</b>

Sumber : LKPJ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
  - 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
  - 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)
  - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Output) adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Indikator Sub Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah
- 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
  - 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)

3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak (Jenis)

3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)

3.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu (bulan)

3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator

Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara

5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

B. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator Program (Outcome) Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

3.2.1.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Indikator Kegiatan (Output) Adalah Persentase Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1.1 Sub Kegiatan fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Indikator Kegiatan (Output) adalah Persentase Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan

2.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

5 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Litbang Bidang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

3.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan

6 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4.1 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

4.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan

4.3 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.167.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	$\frac{5}{4} \times 100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>65</b>	<b>80,31</b>	<b>123,55</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1	100
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	$\frac{6=5}{4} \times 100$
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1	100
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	-	0
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi	3	3	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	1	100
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	100
1.2.3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100
1.2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	1	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	3	3	100
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
1.3.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	6	6	100
1.3.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	12	100
1.3.5.	Fasilitasi Kunjungan tamu	Penyediaan makan minum tamu (bulan)	12	12	100
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	12	12	100
<b>1.4.</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	100
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6	6	100
1.5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	12	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	$\frac{6=5/4*100}{100}$
2.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100
2.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	1	100
<b>2.2.</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	100
<b>2.3.</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Litbang Bidang Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	1	100
<b>2.4</b>	<b>Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.4.1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100
2.4.2.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	1	1	100
2.4.3.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>111,78</b>

Sumber : LKPJ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.30.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 masalah dalam pencapaian pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan. dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.168.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih terbatasnya Sumber Dana atau Biaya dalam Pelaksanaan Pencapaian Program Kegiatan yang akan dilaksanakan atau dikerjakan	Mengusulkan Program Kegiatan dengan dana yang memenuhi Syarat Pelaksanaan dan menjadi Prioritas Penganggaran Pemerintah Daerah

Sumber : LKPJ Balitbangda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.30.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021.

Tabel 3.169.  
Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Setiap hasil Penelitian yang selesai dilaksanakan dapat disosialisasikan sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah.	Setiap hasil Penelitian yang selesai dilaksanakan telah disosialisasikan	dapat diadag dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah.
2.	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Struktur pelaporan LKPJ telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019	Supaya dapat dipedomani
3.	Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaan karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program /kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Telah dianggarkan kembali untuk kegiatan yang tertunda di tahun 2020 karena refocusing agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana.	Supaya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana sepenuhnya

4.	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT	Badan penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi pada OPD yang Berkaitan terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan supaya terlaksana dengan baik	Supaya program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAHYAT
----	---	--	--

Sumber : LKPJ Balitbangda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.31. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.31.1. Capaian Pelaksanaan Program

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi staf Pendukung Kepala Daerah. Pada Tahun 2021, Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Daerah tertera dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.170.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5(=3-4)	6(=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27.735.305.795</b>	<b>26.230.568.950</b>	<b>1.504.736.845</b>	<b>94,57</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>233.309.000</b>	<b>132.411.400</b>	<b>100.897.600</b>	<b>56,75</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.750.000	3.750.000	-	100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	8.000.000	7.998.500	1.500	99,98
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	13.100.000	13.100.000	-	100
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	13.200.000	13.198.500	1.500	99,99
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	13.800.000	13.800.000	-	100
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.459.000	80.564.400	100.894.600	44,40
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.146.546.741</b>	<b>11.995.930.280</b>	<b>150.616.461</b>	<b>98,75</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	11.205.515.872	11.090.305.690	115.210.182	98,97
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	915.530.869	886.124.590	29.406.270	96,79
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.000.000	9.000.000	-	100
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.500.000	1.500.000	3.000.000	33,33
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	12.000.000	9.000.000	3.000.000	75
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	16.500.000	16.500.000	-	100
1.3.2	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Skpd	16.500.000	16.500.000	-	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>136.750.000</b>	<b>136.420.000</b>	<b>330.000</b>	<b>99,76</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	128.750.000	128.420.000	330.000	99,74
1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pengawal Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	-	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.505.497.951</b>	<b>1.199.675.161</b>	<b>305.822.790</b>	<b>79,69</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	53.356.160	42.726.000	10.630.150	80,08
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	116.693.091	115.752.394	940.697	99,19
1.5.3	Sub Kegiatan Logistik Kantor	10.003.800	5.244.000	4.759.800	52,42
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	155.866.900	155.662.000	204.900	99,87
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	576.648.000	526.250.000	50.398.000	91,26
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	592.930.000	354.040.767	238.889.233	59,71
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.921.897.600</b>	<b>2.919.398.000</b>	<b>2.499.600</b>	<b>99,91</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.848.700.000	2.848.680.000	20.000	100
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	73.197.600	70.718.000	2.479.600	96,61
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.609.841.000</b>	<b>3.031.189.443</b>	<b>578.651.557</b>	<b>83,97</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.155.480.000	752.865.943	402.614.057	65,16
1.7.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	647.611.000	539.073.500	108.537.500	83,24
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.806.750.000	1.739.250.000	67.500.000	96,26

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5(=3-4)	6(=4/3*100)
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.173.315.000</b>	<b>2.982.184.597</b>	<b>191.130.403</b>	<b>93,98</b>
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas	783.540.000	722.656.461	60.883.539	92,23
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas	676.320.000	648.770.336	27.549.564	95,93
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Meubel	448.350.000	446.480.500	1.869.500	99,58
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	398.000.000	322.340.800	75.659.200	80,99
1.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	117.000.000	109.148.000	7.852.000	93,29
1.8.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	306.000.000	294.091.600	11.908.400	96,11
1.8.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	361.500.000	359.360.900	2.139.100	99,41
1.8.8	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	82.605.000	79.336.000	3.269.000	96,04
<b>1.9</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>539.120.863</b>	<b>537.107.090</b>	<b>2.013.773</b>	<b>99,63</b>
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	177.120.863	176.137.090	983.773	99,44
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	62.000.000	60.970.000	1.030.000	98,34
1.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	-	100
<b>1.10</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.427.053.345</b>	<b>1.321.555.200</b>	<b>105.498.145</b>	<b>92,61</b>
1.10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	633.332.622	576.613.500	56.719.122	91,04
1.10.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	390.134.994	361.929.200	28.205.794	92,77
1.10.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	403.585.729	383.012.509	20.573.229	94,90
<b>1.11</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>313.397.938</b>	<b>290.512.986</b>	<b>22.884.952</b>	<b>92,70</b>
1.11.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	128.453.928	116.266.800	12.187.128	90,51
1.11.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	88.983.067	87.384.400	1.598.667	98,20
1.11.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	95.960.943	86.861.786	9.099.157	90,52
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.695.576.357</b>	<b>1.651.184.793</b>	<b>44.391.564</b>	<b>97,38</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	73.586.000	46.291.648	27.294.352	62,91
2.3.2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.376.060.000	1.364.698.248	11.361.752	99,17
2.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	245.930.357	240.194.897	5.735.460	97,67
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>4.216.547.984</b>	<b>3.818.855.302</b>	<b>397.692.682</b>	<b>90,57</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>902.569.311</b>	<b>598.539.850</b>	<b>304.029.461</b>	<b>66,32</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	255.204.235	183.991.861	71.212.374	72,10
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	306.866.714	216.169.022	90.697.692	70,44
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	340.498.362	198.378.967	142.119.395	58,26
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2.918.513.002</b>	<b>2.855.491.052</b>	<b>63.021.950</b>	<b>97,84</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	2.574.147.002	2.527.750.052	46.396.950	98,20
2.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	52.418.000	40.793.000	11.625.000	77,82
2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Masyarakat	291.948.000	284.948.000	5.000.000	98,29
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Hukum</b>	<b>395.465.671</b>	<b>364.824.400</b>	<b>30.641.271</b>	<b>92,25</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5(=3-4)	6(=4/3*100)
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	65.266.878	54.878.100	10.388.778	84,08
2.3.2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	227.593.078	216.008.900	11.584.178	94,91
2.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	102.605.715	93.937.400	8.668.315	91,55
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.390.111.412</b>	<b>988.899.430</b>	<b>401.211.982</b>	<b>71,14</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>362.769.806</b>	<b>223.865.550</b>	<b>138.904.256</b>	<b>61,71</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	160.430.826	68.684.800	91.746.026	42,81
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	125.812.610	102.554.150	23.258.460	81,51
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	76.526.370	52.626.600	23.899.770	68,77
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>395.261.464</b>	<b>348.162.540</b>	<b>47.098.924</b>	<b>88,08</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	87.223.774	65.423.440	21.800.334	75,01
3.2.2	Sub Kegiatan Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	40.288.960	29.848.300	10.440.660	74,09
3.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	267.748.730	252.890.800	14.857.930	14.857.930
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>	<b>441.598.602</b>	<b>283.314.390</b>	<b>158.284.212</b>	<b>64,16</b>
3.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	286.960.170	180.026.639	106.933.531	62,74
3.3.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	154.638.432	103.287.751	51.350.681	66,79
<b>3.4</b>	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>190.481.540</b>	<b>133.556.950</b>	<b>56.924.590</b>	<b>70,12</b>
3.4.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	59.880.372	37.425.500	22.454.872	62,50
3.4.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	76.206.836	57.654.850	18.551.986	75,66
3.4.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	54.394.332	38.476.600	15.917.732	70,74
<b>JUMLAH</b>		<b>33.341.965.191,00</b>	<b>31.038.323.682,00</b>	<b>2.303.641.509,00</b>	<b>93,09</b>

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (outcome) Indeks Pelayanan Instansi adalah Indikator Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kegiatan (output) adalah Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah.

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen laporan kerja.

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perubahan laporan kerja.

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan DPA-SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen yang di susun.

1.5 Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perubahan yang tersusun.

- 1.6 Sub Kegiatan Evaluasi kerja perangkat daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah monev yang di laksanakan.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase penyelesaian administrasi keuangan daerah.
- 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.
- 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- 2.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah bahan dokumen yang dipersiapkan untuk tanggapan pemeriksaan.
- 2.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD yang tersusun.
9. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
- 3.1 Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun.
- 3.2 Sub Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD tersusun.
10. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah pakaian dinas serta atribut dan kelengkapannya.
- 4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah.
- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan.
- 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah peralatan gedung kantor.

- 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran bahan logistik kantor.
- 5.4 Sub Kegiatan Penyediaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah jenis barang cetakan.
- 5.5 Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran makan minum kunjungan tamu.
- 5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pengadaan barang milik daerah.
  - 6.1 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan.
  - 6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah mebel.
  - 6.3 Sub Kegiatan Pengadaan peralatan mesin dan lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah peralatan mesin dan lainnya.
  - 6.4 Sub Kegiatan Pengadaan aset tetap lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah aset tetap lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - 7.1 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah.
  - 7.2 Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah.
  - 7.3 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran jasa pelayanan umum kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara.
  - 8.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara.
  - 8.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan operasional/lapangan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara.
  - 8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah mebel yang terpelihara.
  - 8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara.

- 8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tetap lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara.
- 8.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah ruang gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara.
- 8.7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara.
- 8.8 Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara.
9. Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - 9.1 Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan
  - 9.2 Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah pembayaran pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - 9.3 Sub Kegiatan Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah.
  - 10.1 Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terpenuhi.
  - 10.2 Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terpenuhi.
  - 10.3 Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terpenuhi.
11. Kegiatan Penataan Organisasi, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase penataan organisasi.
  - 11.1 Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan analisis jabatan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan analisis jabatan.
  - 11.2 Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah OPD yang di fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana

- 11.3 Sub Kegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.
- 12.1 Sub Kegiatan Fasilitasi keprotokolan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi.
- 12.2 Sub Kegiatan Fasilitasi komunikasi pimpinan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kegiatan komunikasi pimpinan yang difasilitasi.
- 12.3 Sub Kegiatan Pendokumentasian tugas pimpinan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.

#### B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator Program (outcome) Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti, untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase administrasi tata pemerintahan.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penataan administrasi pemerintahan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan.
  - 1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan.
  - 1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.
  - 2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, indikator Sub Kegiatan (output) adalah
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.
  - 2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum.
  - 3.1 Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen penyusunan produk hukum daerah yang di fasilitasi.
  - 3.2 Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan hukum, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah perkara bantuan hukum yang di fasilitasi.
  - 3.3 Sub Kegiatan Pendokumentasian produk hukum, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumentasi produk hukum.

### C. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Indikator program (outcome) Persentase Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti. Untuk mencapai indikator program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian.
  - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.
  - 1.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian perekonomian, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pengendalian dan pendistribusian perekonomian.
  - 1.3 Sub Kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan.
  - 2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program pembangunan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen program pembangunan yang tersusun dan difasilitasi.
  - 2.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan.
  - 2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
  - 3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, indikator Sub Kegiatan (output) adalah
  - 3.3 Sub Kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, indikator Sub Kegiatan (output) adalah
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, indikator Kegiatan (output) adalah Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam.
  - 4.1 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, pertanian dan perikanan, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, pertanian dan perikanan.

4.2 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.

4.3 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air, indikator Sub Kegiatan (output) adalah Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.

Adapun target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.171.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>88,3</b>	<b>87,75</b>	<b>99,38</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>84,84</b>	<b>84,84</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	4	4	100
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	11	11	100
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cetak RKA Perubahan Tahun 2021	11	11	100
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cetak DPA Tahun 2021	11	11	100
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cetak DPPA Tahun 2021	11	1	9,09
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (bulan)	12	12	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan CALK (Dokumen)	1	1	100
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (dokumen)	2	2	100
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan dan semester	18	18	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1 dok	1 dok	100
1.3.2	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (dok)	1 dok	1 dok	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel)	283 stel	263 stel	92,93
1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	1 orang	1 orang	100
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	7	7	100
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung/kantor pengadaan alat tulis kantor (1 Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.5.3	Sub Kegiatan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibutuhkan (Jenis)	15 Jenis	15 Jenis	100
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak/penggandaan (Jenis)	8 Jenis	8 Jenis	100
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu (bulan)	12	12	100
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran konsultasi dan koordinasi luar daerah (bulan)	12	12	100
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan dinas pejabat	5	5	100
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	37	37	100
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	100
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran gaji PHTT (bulan)	11 bulan	11 bulan	100
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas	Pembayaran biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/jabatan (unit)	71	71	100
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas	Pembayaran biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	16	16	100
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Waktu Pemeliharaan meubelair (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan mesin lainnya (Unit)	239	239	100
1.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara (Unit)	7	7	100
1.8.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6	6	100
1.8.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1	1	100
<b>1.9</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	100
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian kerja lapangan (stel)	28	28	100
1.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran penunjang operasional kunjungan kerja (bulan)	12 bulan	12 Bulan	100
<b>1.10</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah (Tahun)	1	1	100
1.10.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah (Tahun)	1	1	100
1.10.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah (Tahun)	1	1	100
<b>1.11</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Penataan Organisasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.11.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbup kelas jabatan (Dok) Jumlah perbup SOTK (Dok)	1 6	1 6	100
1.11.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang memiliki standar pelayanan Jumlah OPD yang menerapkan budaya kerja	43 10	43 10	100 100
1.11.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen road Map RB	1	1	100
1.11.4	Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah OPD yang memiliki dokumen IKM	43	43	100
1.11.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJIP Kabupaten	1	1	100
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah waktu Pendampingan kegiatan kepala daerah atau wakil kepala daerah (bulan)	12	12	100
2.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kerjasama kemitraan pemkab dengan media cetak dan elektronik	36	36	100

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
2.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Jenis kegiatan dokumentasi pemkab, kegiatan media center (Jenis)	4	4	100
<b>2</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan batas kecamatan dan buku administrasi kecamatan	2	2	100
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen penetapan batas kelurahan	2	2	100
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	1	1	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah waktu fasilitasi kegiatan MTQ Provinsi, MTQ Kabupaten, Fasi Provinsi, Fasi Kabupaten, Jumlah Hafidz-hafidzoh (tahun)	1	1	100
2.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen	4	4	100
2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Masyarakat	Jumlah veteran dan BKMT	1 bkmt 8 orang	1 BKMT 8 orang	100
<b>2.3</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Fasilitasi dan koordinasi Hukum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen produk hukum yang dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	4	100
2.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara tata usaha Negara, perdana tingkat pengadilan sampai ke mahkamah agung	2	2	100
2.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang telah di sahkan	5	5	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DIBIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan BUMD dan BLUD	2	2	100
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen TPID, TPAKD dan laporan distribusi pupuk bersubsidi	3	3	100
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen laporan beras ASN, KUPEM, Koperasi, UMKM dan laporan produk unggulan daerah	3	3	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan penyusun program dan rapat hasil fasilitasi kegiatan program pembangunan	2	2	100

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
3.2.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kegiatan program pembangunan	1	1	100
3.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan yang disusun dalam kegiatan program pembangunan daerah	2	2	100
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa	100	100	100
3.3.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik	100	100	100
3.3.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pembinaan SDM pengadaan barang jasa	4	4	100
<b>3.4</b>	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.4.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen laporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	12	12	100
3.4.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen laporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	12	12	100
3.4.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen laporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energy dan sumber daya alam	12	12	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,79</b>

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah, berbagai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Tabel berikut akan menggambarkan produk hukum yang dihasilkan Tahun 2021.

Tabel 3.172.  
Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan Tahun 2021

No	URAIAN	2021
1	Peraturan Daerah	4
2	Peraturan Bupati	66
3	Keputusan Bupati	458
4	Prolegda	8

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2021

Tabel 3.173.  
Uraian Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2021

No	Peraturan Daerah	Nomor Perda	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020	1 Tahun 2021	20 Agustus 2021	20 Agustus 2021	2021
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	2 Tahun 2021	26 Oktober 2021	26 Oktober 2021	2021
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Tahun 2021	2 Desember 2021	2 Desember 2021	2021
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	4 Tahun 2021	4 Desember 2021	4 Desember 2021	2021

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2021

Tabel 3.174.  
Uraian Peraturan Bupati yang dihasilkan Tahun 2021.

No	Peraturan Bupati	Nomor Peraturan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
1	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
2	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4 Tahun 2021	19 Maret 2021	19 Maret 2021	2021
3	Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5 Tahun 2021	19 Maret 2021	19 Maret 2021	2021
4	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	6 Tahun 2021	30 Maret 2021	30 Maret 2021	2021
5	Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
6	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	8 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
7	Pedoman Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang	10 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021

No	Peraturan Bupati	Nomor Peraturan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah				
9	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah	11 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
10	Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	12 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
11	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	13 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
12	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2035	18 Tahun 2021	28 Juli 2021	28 Juli 2021	2021
13	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	19 Tahun 2021	28 Juli 2021	28 Juli 2021	2021
14	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020	20 Tahun 2021	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	2021
15	Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi	21 Tahun 2021	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	2021
16	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	22 Tahun 2021	9 September 2021	9 September 2021	2021
17	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	23 Tahun 2021	23 September 2021	23 September 2021	2021
18	Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah	24 Tahun 2021	1 Oktober 2021	1 Oktober 2021	2021
19	Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	25 Tahun 2021	1 Oktober 2021	1 Oktober 2021	2021

No	Peraturan Bupati	Nomor Peraturan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
20	Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar	26 Tahun 2021	21 Oktober 2021	21 Oktober 2021	2021
21	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	62 Tahun 2021	10 November 2021	10 November 2021	2021
22	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	63 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
23	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	65 Tahun 2021	23 Desember 2021	23 Desember 2021	2021
24	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	66 Tahun 2021	23 Desember 2021	23 Desember 2021	2021
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,79</b>

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2021

Tabel 3.175.  
Uraian Keputusan Bupati yang dihasilkan Tahun 2021.

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
1	Pelimpahan Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	1 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
2	Pelimpahan Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	2 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
3	Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Anggaran 2021	3 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
4	Penunjukan Bank Jambi Cabang Muara Sabak Dan Bank BNI Cabang Pembantu Muara Sabak Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	4 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
5	Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	5 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
6	Penetapan Nomor Rekening Operasional Perangkat Daerah Pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	7 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
7	Penetapan Nomor Rekening Operasional Desa Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak Tahun Anggaran 2021	9 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
8	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	10 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
9	Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	11 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
10	Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	12 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
11	Penunjukan Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	13 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
12	Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	14 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
13	Penetapan Nomor Rekening Operasional Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak Tahun Anggaran 2021	15 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
14	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	18 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
15	Penetapan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	19 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
16	Pengangkatan dan Penyusunan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
17	Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	21 Tahun 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021	2021
18	Penetapan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020	22 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
19	Penetapan Tim Pembina dan Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	23 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
20	Penetapan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	24 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
21	Penetapan Tim Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanjung Jabung Timur	25 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
22	Penunjukan Tim Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	26 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
23	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
24	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.	28 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
25	Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andri Saputra	29 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
26	Penetapan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	30 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
27	Penetapan Kelompok Penerima Hibah Berupa Bibit/Benih Sayur dan Sarana Prasarana Produksi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	31 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
28	Penetapan Kelompok Penerima Hibah Berupa Bibit/Benih Sayur dan Prasarana Produksi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	32 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
29	Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus Pembangunan Fisik Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, Rumah Rice Milling Unit Dan Mesin Rice Milling Unit Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	33 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
30	Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	34 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
31	Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	35 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
32	Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	36 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
33	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	37 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
34	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	39 Tahun 2021	5 Januari 2021	5 Januari 2021	2021
35	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	40 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
36	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun	41 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
37	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	42 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
38	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	43 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
39	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	44 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
40	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	45 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
41	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	46 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
42	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	47 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
43	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	48 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
44	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	49 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
45	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	50 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
46	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	51 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
47	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	52 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
48	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian	53 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2011	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun				
49	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	54 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
50	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	55 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
51	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	56 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
52	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	57 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
53	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	58 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
54	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	59 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
55	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	60 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
56	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	61 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
57	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	62 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
58	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	63 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
59	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	64 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun				
60	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	65 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
61	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	66 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
62	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	67 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
63	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	68 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
64	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	69 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
65	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	70 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
66	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	71 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
67	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	72 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
68	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	73 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
69	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	74 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
70	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	75 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun				
71	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	76 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
72	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	77 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
73	Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Dari Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	79 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
74	Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	80 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
75	Penetapan Penerima Penghargaan Berupa Piagam dan Uang Kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan Dan Desa Atas Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Persen Atau Lebih Pada Tahun 2021	81 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
76	Penetapan Nama Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	82 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
77	Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Kapasitas Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	83 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2011
78	Penetapan Standarisasi Biaya Belanja Desa Tahun 2021	84 Tahun 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021	2021
79	Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Dan Aparatur Desa	87 Tahun 2021	15 Januari 2021	15 Januari 2021	2021
80	Penetapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	88 Tahun 2021	15 Januari 2021	15 Januari 2021	2021
81	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengendalian, Pemberhentian	90 Tahun 2021	18 Januari 2021	18 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	dan Pemberian Pensiun Janda/Duda				
82	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	91 Tahun 2021	18 Januari 2021	18 Januari 2021	2021
83	Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	92 Tahun 2021	18 Januari 2021	18 Januari 2021	2021
84	Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	93 Tahun 2021	18 Januari 2021	18 Januari 2021	2021
85	Penetapan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	94 Tahun 2021	22 Januari 2021	22 Januari 2021	2021
86	Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	95 Tahun 2021	25 Januari 2021	25 Januari 2021	2021
87	Pemberian Izin Perceraian	96 Tahun 2021	25 Januari 2021	25 Januari 2021	2021
88	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	97 Tahun 2021	26 Januari 2021	26 Januari 2021	2021
89	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Bambang Budiman Dan Andri Desta Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	98 Tahun 2021	26 Januari 2021	26 Januari 2021	2021
90	Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur	99 Tahun 2021	26 Januari 2021	26 Januari 2021	2021
91	Penetapan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	103 Tahun 2021	27 Januari 2021	27 Januari 2021	2021
92	Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.	104 Tahun 2021	27 Januari 2021	27 Januari 2021	2021
93	Penunjukan Petugas Administrator Database Kabupaten Pada Dinas	105 Tahun 2021	27 Januari 2021	27 Januari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021				
94	Penetapan Nama Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	106 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
95	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.	107 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
96	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.	108 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
97	Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	109 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
98	Tim Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	110 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
99	Pembentukan Tim Terpadu Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.	116 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
100	Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	117 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
101	Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	118 Tahun 2021	28 Januari 2021	28 Januari 2021	2021
102	Penetapan Nama Kelompok Penerima Hibah Berupa Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dalam Kecamatan Mendahara, Kec. Kuala Jambi, Kec. Kuala Jambi, Kec. Muara Sabak Timur, Kec. Nipah Panjang, Kec. Berbak dan Kec. Sadu Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	122 Tahun 2021	1 Februari 2021	1 Februari 2021	2021
103	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung	124 Tahun 2021	1 Februari 2021	1 Februari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Jabung Timur Tahun Anggaran 2021				
104	Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab Corona Virus Disease 2019 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	125 Tahun 2021	1 Februari 2021	1 Februari 2021	2021
105	Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Proses Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha di Bidang Pertanian	126 Tahun 2021	1 Februari 2021	1 Februari 2021	2021
106	Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Proses Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Di Bidang Pertanian	127 Tahun 2021	4 Februari 2021	4 Februari 2021	2021
107	Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	128 Tahun 2021	4 Februari 2021	4 Februari 2021	2021
108	Penetapan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	129 Tahun 2021	4 Februari 2021	4 Februari 2021	2021
109	Penetapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	130 Tahun 2021	5 Februari 2021	5 Februari 2021	2021
110	Penetapan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	131 Tahun 2021	5 Februari 2021	5 Februari 2021	2021
111	Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	132 Tahun 2021	5 Februari 2021	5 Februari 2021	2021
112	Penetapan Tim Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	133 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
113	Penetapan Tim Koordinasi dan Pengawas Program Bantuan Social Pangan Tahun 2021	134 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
114	Penetapan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	135 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
115	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2027	136 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
116	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Simbur Naik Kec.	137 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2019-2025				
117	Penetapan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	138 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
118	Pembentukan District Project Manajemen	139 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
119	Penetapan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	141 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
120	Penetapan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	142 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
121	Penetapan Dokumen dan Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa	144 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
122	Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021	145 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
123	Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	146 Tahun 2021	8 Februari 2021	8 Februari 2021	2021
124	Hibah Bangunan Kantor Polisi Sektor Muara Sabak Timur Kepada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur	147 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
125	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	148 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
126	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	149 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
127	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	150 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
128	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah	151 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
129	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	152 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
130	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	153 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
131	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	154 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
132	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	155 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
133	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	156 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
134	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	157 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
135	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	158 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
136	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	159 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
137	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah	160 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
138	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	161 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
139	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	162 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
140	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	163 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
141	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	164 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
142	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	165 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
143	Penetapan Tim Koordinasi Dan Petugas Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur	166 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
144	Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	168 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
145	Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Bidang Keagamaan Dan Pendidikan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	169 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
146	Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2024	170 Tahun 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021	2021
147	Penetapan Penerima Hibah Kepada Kelompok Tani Dalam	171 Tahun 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021				
148	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2021 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Di Gunakan Pada Tahun Anggaran 2021	172 Tahun 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021	2021
149	Susunan Anggota Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	176 Tahun 2021	25 Februari 2021	25 Februari 2021	2021
150	Penetapan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang Berasal Dari Bukan Perusahaan Listrik Negara Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	178 Tahun 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021	2021
151	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	182 Tahun 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021	2021
152	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	183 Tahun 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021	2021
153	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	184 Tahun 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021	2021
154	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	187 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
155	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	188 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
156	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	189 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
157	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	190 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
158	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	191 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
159	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	192 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
160	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	193 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
161	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	194 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
162	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	195 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
163	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	196 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
164	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	197 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
165	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	198 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
166	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	199 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
167	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	200 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
168	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	201 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
169	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	202 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
170	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	203 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
171	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	204 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
172	Penetapan Kegiatan dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minuman dan Sanitasi Tahun Anggaran 2021	205 Tahun 2021	3 Maret 2021	3 Maret 2021	2021
173	Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	207 Tahun 2021	4 Maret 2021	4 Maret 2021	2021
174	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan	210 Tahun 2021	5 Maret 2021	5 Maret 2021	2021
175	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Ferri Saputra, S.Ip	213 Tahun 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	2021
176	Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform	215 Tahun 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
177	Penunjukan Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	216 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
178	Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintahan Atas Nama A.Muzani,S.Ag	217 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
179	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	218 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
180	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Berbak, Dendang, Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2027	219 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
181	Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	220 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
182	Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	221 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
183	Penetapan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	222 Tahun 2021	16 Maret 2021	16 Maret 2021	2021
184	Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	223 Tahun 2021	19 Maret 2021	19 Maret 2021	2021
185	Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	224 Tahun 2021	19 Maret 2021	19 Maret 2021	2021
186	Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	225 Tahun 2021	22 Maret 2021	22 Maret 2021	2021
187	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negerisipil Atas Nama Andriansyah Nasution, S.Kom., M.Sc	226 Tahun 2021	22 Maret 2021	22 Maret 2021	2021
188	Penetapan Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan	227 Tahun 2021	22 Maret 2021	22 Maret 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
189	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	229 Tahun 2021	25 Maret 2021	25 Maret 2021	2021
190	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Impassing di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	230 Tahun 2021	25 Maret 2021	25 Maret 2021	2021
191	Pembentukan Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	231 Tahun 2021	25 Maret 2021	25 Maret 2021	2021
192	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	232 Tahun 2021	30 Maret 2021	30 Maret 2021	2021
193	Penyesuaian Tunjangan dan Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	233 Tahun 2021	30 Maret 2021	30 Maret 2021	2021
194	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	234 Tahun 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021	2021
195	Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	235 Tahun 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021	2021
196	Penunjukan Pengelola Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur	236 Tahun 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021	2021
197	Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (Pasti) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	237 Tahun 2021	31 Maret 2021	31 Maret 2021	2021
198	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 11 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	240 Tahun 2021	1 April 2021	1 April 2021	2021
199	Penetapan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Nama Pauziah D, Am, Keb	241 Tahun 2021	1 April 2021	1 April 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
200	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Timur	242 Tahun 2021	1 April 2021	1 April 2021	2021
201	Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	244 Tahun 2021	1 April 2021	1 April 2021	2021
202	Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kemasan IKM Makanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	246 Tahun 2021	7 April 2021	7 April 2021	2021
203	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 343 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	247 Tahun 2021	7 April 2021	7 April 2021	2021
204	Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur	248 Tahun 2021	7 April 2021	7 April 2021	2021
205	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang di peruntukan Fasilitas Umum Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	250 Tahun 2021	7 April 2021	7 April 2021	2021
206	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jabung Timur	251 Tahun 2021	9 April 2021	9 April 2021	2021
207	Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	252 Tahun 2021	9 April 2021	9 April 2021	2021
208	Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	253 Tahun 2021	9 April 2021	9 April 2021	2021
209	Penetapan Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan III Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	254 Tahun 2021	9 April 2021	9 April 2021	2021
210	Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	255 Tahun 2021	9 April 2021	9 April 2021	2021
211	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Desti Yuli Anggaini, SE	263 Tahun 2021	19 April 2021	19 April 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
212	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Desi Ratna Sari, Am.Keb	264 Tahun 2021	19 April 2021	19 April 2021	2021
213	Penelitian Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	266 Tahun 2021	27 April 2021	27 April 2021	2021
214	Tim Teknis Penyusunan dan Tim Pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	267 Tahun 2021	27 April 2021	27 April 2021	2021
215	Penetapan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	271 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
216	Penetapan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	272 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
217	Tim Verifikasi Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur	273 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
218	Penetapan Penerima dan Besaran Insentif dari Pemungutan Retribusi Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Berat Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur	274 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
219	Penetapan Kriteria Kerusakan Rumah Akibat Bencana dan Besaran Pemerintahan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	275	28 April 2021	28 April 2021	2021
220	Tim Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	276 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
221	Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Negara Yang Di Selenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	277 Tahun 2021	28 April 2021	28 April 2021	2021
222	Calon Penerima Manfaat Bantuan Rumah Khusus Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara	280 Tahun 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Sabak Barat Timur Dan Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021				
223	Penetapan Kelompok Tani Sawit Desa Pangkal Duri Peserta Plasma Dengan Pt. Bumi Borneo Sentosa Di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	281 Tahun 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021	2021
224	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	282 Tahun 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021	2021
225	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 13 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Pengurus Barang Pengguna San Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	283 Tahun 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021	2021
226	Pemberian Kenaikan Perangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	298 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
227	Pemberian Kenaikan Perangkat Pengabdian, Pemerintahan Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	301 Tahun 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	2021
228	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 338 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Dengan Pt. Pelita Agro Lestari Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	305 Tahun 2021	7 Mei 2021	7 Mei 2021	2021
229	Penetapan Petani Peserta Kemitraan (Plasma) Dengan Pt. Innokebun Lestari Di Desa Sungai Benuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	306 Tahun 2021	7 Mei 2021	7 Mei 2021	2021
230	Penetapan Desa Dan Kelurahan Lokus Stunting Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	307 Tahun 2021	7 Mei 2021	7 Mei 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
231	Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Tanjung Jabung Timur	308 Tahun 2021	7 Mei 2021	7 Mei 2021	2021
232	Pengangkatan Sekretariat Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020	311 Tahun 2021	10 Mei 2021	10 Mei 2021	2021
233	Penetapan Penerima Hibah Berupa Bantuan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Lantai Jemur Kepada Kelompok Masyarakat Pengolah Dan Pemasaran Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	323 Tahun 2021	19 Mei 2021	19 Mei 2021	2021
234	Penetapan Mentor Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	350 Tahun 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021	2021
235	Penetapan Mentor Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ii Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	351 Tahun 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021	2021
236	Tim Evaluasi Sistem, Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan, Perkebunan Milik Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	352 Tahun 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021	2021
237	Penetapan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021	353 Tahun 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021	2021
238	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Titik Wulandari, Ss	355 Tahun 2021	28 Mei 2021	28 Mei 2021	2021
239	Tim Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	356 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
240	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	357 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
241	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	358 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
242	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	359 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
243	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	360 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
244	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	361 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
245	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	362 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
246	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	363 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
247	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	364 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
248	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	365 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
249	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	366 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
250	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	367 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
251	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	368 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
252	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	369 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
253	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	370 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
254	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	371 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021
255	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun	372 Tahun 2021	31 Mei 2021	31 Mei 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun				
256	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 10 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	373 Tahun 2021	2 Juni 2021	2 Juni 2021	2021
257	Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 11 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	374 Tahun 2021	2 Juni 2021	2 Juni 2021	2021
258	Penetapan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Permukiman Penduduk Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	375 Tahun 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	2021
259	Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	377 Tahun 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021	2021
260	Susunan Pengurus Dan Tata Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesehatan Keluarga (PKK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2024	378 Tahun 2021	10 Juni 2021	10 Juni 2021	2021
261	Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	382 Tahun 2021	11 Juni 2021	11 Juni 2021	2021
262	Penetapan Lokus Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022	383 Tahun 2021	11 Juni 2021	11 Juni 2021	2021
263	Penetapan Sesuai Nama Dan Alamat Masyarakat Prasejahtera Usulan Calon Penerima Bantuan Penyediaan Hunian Baru Layak Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	384 Tahun 2021	11 Juni 2021	11 Juni 2021	2021
264	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Korban Bencana Abrasi (Tanah Longsor) Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara, Korban Bencana Kebakaran Desa Pangkal Duri Ilir, Kelurahan Muara Sabak Ulu	385 Tahun 2021	15 Juni 2021	15 Juni 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kecamatan Muara Sabak Timur, Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
265	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UMU KHASANAH, S.Pd, AUD	386 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
266	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ARIF SUPENDI, S.Kep	387 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
267	Penetapan Penerima Hibah Berupa Sarana Dan Prasarana Perikanan Budaya Kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Kolam, Tambak Dan Keramba Ikan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	388 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
268	Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022	389 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
269	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Priode 2019-225	390 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
270	Penetapan Kelompk Tani Sinar Jaya Sawit Desa Sinar Kalimantan, Desa Pangkal Duri Dan Desa Pangkal Duri Ilir Peserta Plasma Kelapa Sawit Dengan Pt. Bumi Borneo Sentosa Di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	391 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
271	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 139 Tahun 2021 Tentang Pembentukan District Project Managemen Unit Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbaris Masyarakat Iii Kabupaten Tanjunng Jabung Timur	394 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
272	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar	396 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
273	Pengukuhan Ibu Hj. Wirdayanti Romi Sebagai Bunda Pendidikan Ananak Usia Dini Kabupaten Tanjung Jabung Timur	397 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
274	Tim Evaluasi Sistem Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Milik Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	398 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
275	Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Dan Pemindah Tangan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	399 Tahun 2021	16 Juni 2021	16 Juni 2021	2021
276	Tim Pelaksana Gabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	403 Tahun 2021	30 Juni 2021	30 Juni 2021	2021
277	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 79 Tahun 2021 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Dari Pemungutan Pajak	404 Tahun 2021	30 Juni 2021	30 Juni 2021	2021
278	Penetapan Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	408 Tahun 2021	1 Juli 2021	1 Juli 2021	2021
279	Penetapan Panitia Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	409 Tahun 2021	1 Juli 2021	1 Juli 2021	2021
280	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi	410 Tahun 2021	1 Juli 2021	1 Juli 2021	2021
281	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	411 Tahun 2021	1 Juli 2021	1 Juli 2021	2021
282	Pencabutan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Kepada Pt. Abadilla Kesuma	417 Tahun 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021	2021
283	Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Program Beasiswa Badan Pembangunan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Atas Nama Drs, Rosmiati	418 Tahun 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021	2021
284	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	419 Tahun 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021	2021
285	Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	420 Tahun 2021	15 Juli 2021	15 Juli 2021	2021
286	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun	424 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Pegawai Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun				
287	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	425 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
288	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	426 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
289	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	427 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
290	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	428 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
291	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	429 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
292	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	430 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
293	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	431 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
294	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	432 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
295	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	433 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
296	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	434 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
297	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	435 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
298	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	436 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
299	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	437 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
300	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	438 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
301	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	439 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
302	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	440 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
303	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	441 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
304	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	442 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
305	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	443 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
306	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	444 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
307	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	445 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
308	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	446 Tahun 2021	19 Juli 2021	19 Juli 2021	2021
309	Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-226	450 Tahun 2021	20 Juli 2021	20 Juli 2021	2021
310	Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Peralatan Kerupuk Kayu Api, Kerupuk Udang Dan Keletek Udang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Anggaran 2021	458 Tahun 2021	26 Juli 2021	26 Juli 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
311	Kelompok Kerja Teknis Penyusunan Rencana Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	460 Tahun 2021	26 Juli 2021	26 Juli 2021	2021
312	Penetapan Pusat kesehatan Masyarakat Rawat Inap Yang Ditingkatkan Fungsi Pelayanan Sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	462 Tahun 2021	30 Juli 2021	30 Juli 2021	2021
313	Panitia Penyusunan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	463 Tahun 2021	30 Juli 2021	30 Juli 2021	2021
314	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	464 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
315	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	465 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
316	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	466 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
317	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	467 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
318	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	468 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
319	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	469 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
320	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	470 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
321	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	471 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
322	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	472 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
323	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	473 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
324	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	474 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
325	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	475 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
326	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	476 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
327	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	477 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
328	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	478 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
329	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	479 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
330	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	480 Tahun 2021	2 Agustus 2021	2 Agustus 2021	2021
331	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	483 Tahun 2021	3 Agustus 2021	3 Agustus 2021	2021
332	Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2035	493 Tahun 2021	9 Agustus 2021	9 Agustus 2021	2021
333	Penetapan Nama-Nama Kelompok Dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021	494 Tahun 2021	9 Agustus 2021	9 Agustus 2021	2021
334	Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Corona Virus Disease 2019 Pemerintahan Provinsi Jambi Untuk Kabupaten Tanjung	496 Tahun 2021	12 Agustus 2021	12 Agustus 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Jabung Timur Tahun Anggaran 2021				
335	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	497 Tahun 2021	12 Agustus 2021	12 Agustus 2021	2021
336	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 273 Tahun 2021 Tentang Tim Verifikasi Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur	500 Tahun 2021	13 Agustus 2021	13 Agustus 2021	2021
337	Pembentukan Satuan Tugas Pungsi Bersih Narkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur	503 Tahun 2021	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021	2021
338	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	504 Tahun 2021	16 Agustus 2021	16 Agustus 2021	2021
339	Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun Anggaran 2022	506 Tahun 2021	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021	2021
340	Penetapan Penerima Hibah Berupa Bantuan Pengembangan Tata Air Mikro dan Bibit Coklat Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	508 Tahun 2021	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021	2021
341	Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Surya Unggas Mandiri Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	511 Tahun 2021	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	2021
342	Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sumber Unggas Jaya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	512 Tahun 2021	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	2021
343	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ulena Mahan	518 Tahun 2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	2021
344	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adiansyah	519 Tahun 2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	2021
345	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Nurmayani, Spd. Sd	520 Tahun 2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	2021
346	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	521 Tahun 2021	1 September 2021	1 September 2021	2021
347	Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan	523 Tahun 2021	1 September 2021	1 September 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
348	Penetapan Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Sebagai Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	524 Tahun 2021	2 September 2021	2 September 2021	2021
349	Penetapan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	526 Tahun 2021	2 September 2021	2 September 2021	2021
350	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	527 Tahun 2021	2 September 2021	2 September 2021	2021
351	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	528 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
352	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	529 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
353	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	530 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
354	Satuan Tugas Pengendalian Ketersediaan Oksigen Guna Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	531 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
355	Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa Kursi Roda Dan Tongkat Bagi Penyandang Disabilitas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	532 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
356	Gugus Tugas Pengembangan Anak-Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Masa Bhakti 2021-2024	535 Tahun 2021	6 September 2021	6 September 2021	2021
357	Pengangkatan Kembali, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Telah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar Atas Nama Arifin, Skm	538 Tahun 2021	9 September 2021	9 September 2021	2021
358	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	539 Tahun 2021	9 September 2021	9 September 2021	2021
359	Penetapan Juara Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten	540 Tahun 2021	9 September 2021	9 September 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Tanjung Jabung Timur Tahun 2021				
360	Penetapan Juara Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	541 Tahun 2021	9 September 2021	9 September 2021	2021
361	Penetapan Penerima Hibah Berupa Bantuan Itik Dan Jaringan Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021	542 Tahun 2021	13 September 2021	13 September 2021	2021
362	Penetapan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021	546 Tahun 2021	16 September 2021	16 September 2021	2021
363	Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	547 Tahun 2021	16 September 2021	16 September 2021	2021
364	Penghapusan Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Aset lainnya dalam Daftar Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	548 Tahun 2021	17 September 2021	17 September 2021	2021
365	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	549 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021
366	Pemberhentian tidak dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan	550 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021
367	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	551 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021
368	Penetapan Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Sebagai Kelurahan Bersih Narkoba	552 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021
369	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	553 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021
370	Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Program Beasiswa Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	554 Tahun 2021	20 September 2021	20 September 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Teknologi Universitas Sriwijaya Atas Nama Ika Astuti, SKM				
371	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	556 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
372	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	557 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
373	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	558 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
374	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	559 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
375	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	560 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
376	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	561 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
377	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	562 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
378	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	563 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
379	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	564 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
380	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	565 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
381	Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data Pelaku Usah Mikro Penerima Bantuan Stimulus Terdampak Corona Virus Disease 19 (Covid-2019) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	566 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021
382	Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Kepada Pelaku Usaha Mikro Penerima Bantuan Stimulus	567 Tahun 2021	24 September 2021	24 September 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Terdampak Corona Virus Disease 19 ( Covid-2019 ) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
383	Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Atas Nama DONY WINDRA Dkk, Tahun 2021	570 Tahun 2021	29 September 2021	29 September 2021	2021
384	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	571 Tahun 2021	29 September 2021	29 September 2021	2021
385	Penunjukan User Verifikator dan User Approval Pemerintahan Data Mandiri ASN Secara Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021	574 Tahun 2021	30 September 2021	30 September 2021	2021
386	Kelompok Kerja Penyuluh Bantuan Stimulus Kepada Pelaku Usaha Mikro Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	575 Tahun 2021	30 September 2021	30 September 2021	2021
387	Penetapan Kelompok Tani Rezeki Bersama Yang Berdomisili Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kelurahan Rano	577 Tahun 2021	1 Oktober 2021	1 Oktober 2021	2021
388	Standar Operasional Prosedur Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	579 Tahun 2021	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021	2021
389	Mutasi Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	580 Tahun 2021	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021	2021
390	Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	582 Tahun 2021	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021	2021
391	Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	583 Tahun 2021	4 Oktober 2021	4 Oktober 2021	2021
392	Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi Dan Uji Kesesuaian (Job Fir) Jabatan Pimpinan Tinggi Prama Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021	587 Tahun 2021	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021	2021
393	Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ri	589 Tahun 2021	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021	2021
394	Pemberian Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	590 Tahun 2021	13 Oktober 2021	13 Oktober 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Atas Nama Ja'far, Skm Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
395	Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri	591 Tahun 2021	13 Oktober 2021	13 Oktober 2021	2021
396	Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	592 Tahun 2021	13 Oktober 2021	13 Oktober 2021	2021
397	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2024	594 Tahun 2021	18 Oktober 2021	18 Oktober 2021	2021
398	Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	595 Tahun 2021	25 Oktober 2021	25 Oktober 2021	2021
399	Penetapan Panitia Peresmian Zbaq Nasional Sirkuit	597 Tahun 2021	25 OKTOBER 2021	25 OKTOBER 2021	2021
400	Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur	598 Tahun 2021	28 Oktobe r2021	28 Oktobe r2021	2021
401	Penetapan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Thun 2022	599 Tahun 2021	28 Oktober 2021	28 Oktober 2021	2021
402	Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Bakti 2021-2026	600 Tahun 2021	28 Oktober 2021	28 Oktober 2021	2021
403	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun A.N. HAMIDIN	607 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
404	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	608 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
405	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	609 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
406	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	610 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
407	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	611 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
408	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	612 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
409	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	613 Tahun 2021	3 Novemebr 2021	3 Novemebr 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
410	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	614 Tahun 2021	3 Novemeber 2021	3 Novemeber 2021	2021
411	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	615 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
412	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	616 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
413	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	617 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
414	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	618 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
415	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	619 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
416	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	620 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
417	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	621 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
418	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	622 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
419	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	623 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
420	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	624 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
421	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	625 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
422	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	626 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
423	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	627 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
424	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Pensiun	628 Tahun 2021	3 November 2021	3 November 2021	2021
425	Tenaga Ahli Narasumber Pelaksanaan Assesment Pada	629 Tahun 2021	11 November 2021	11 November 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kegiatan Evaluasi Kinerja, Uji Kompetensi Dan Uji Kesesuaian (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021				
426	Panitia Peringatan Hari Pahlawan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	625 Tahun 2021	8 November 2021	8 November 2021	2021
427	Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur	630 Tahun 2021	12 November 2021	12 November 2021	2021
428	Penetapan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2021-2022	631 Tahun 2021	15 November 2021	15 November 2021	2021
429	Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintahan Bupati Tanjung Jabung Timur	632 Tahun 2021	15 November 2021	15 November 2021	2021
430	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Pengambilan Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Kegiatan Relokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Desa Rasau Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020	643 Tahun 2021	17 November 2021	17 November 2021	2021
431	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Kesalahan Transfer Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu Pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	644 Tahun 2021	17 November 2021	17 November 2021	2021
432	Penetapan Penerima Bantuan Stimulus Kepada Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	646 Tahun 2021	17 November 2021	17 November 2021	2021
433	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemerintahan Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun	647 Tahun 2021	18 November 2021	18 November 2021	2021
434	Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur	650 Tahun 2021	19 November 2021	19 November 2021	2021
435	Standar Operasional Prosedur Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	651 Tahun 2021	19 November 2021	19 November 2021	2021
436	Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah Di	652 Tahun 2021	19 November 2021	19 November 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021				
437	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Timur	657 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
438	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda	658 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
439	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	659 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
440	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	660 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
441	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	661 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
442	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	662 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
443	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	663 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
444	Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda / Duda	664 Tahun 2021	23 November 2021	23 November 2021	2021
445	Penyesuaian Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Timur	665 Tahun 2021	24 November 2021	24 November 2021	2021
446	Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026	667 Tahun 2021	25 November 2021	25 November 2021	2021
447	Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Early Warning System Alat Pemantauan Kualitas Air Secara Dramatis Kontinyu Dan Online Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	668 Tahun 2021	25 November 2021	25 November 2021	2021
448	Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasbullah	670 Tahun 2021	26 November 2021	26 November 2021	2021
449	Penarikan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Rosyadi Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Banwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	674 Tahun 2021	30 November 2021	30 November 2021	2021
450	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Menjadi Pegawai Negeri Sipil	675 Tahun 2021	1 Desember 2021	1 Desember 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
451	Hibah Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Komando Distrik Militer 0419/Tanjung Jabung.	700 Tahun 2021	6 Desember 2021	6 Desember 2021	2021
452	Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023	701 Tahun 2021	6 Desember 2021	6 Desember 2021	2021
453	Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (Rdt-Ag) Dan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (Rt-Pcr) Pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	702 Tahun 2021	6 Desember 2021	6 Desember 2021	2021
454	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	703 Tahun 2021	7 Desember 2021	7 Desember 2021	2021
455	Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Alokasi Khusus Pembangunan Fisik Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, Rumah Rice Milling Unit Dan Bed Dryer, Bed Dryer Dan Rice Milling Unit Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	706 Tahun 2021	13 November 2021	13 November 2021	2021
456	Penetapan Bangunan Candi Desa Simpang, Struktur Makam Orang Kayo Hitam, Struktur Desa Simpang, Struktur Perahu Kayu Kuno Desa Lambur 1, Struktur Makam Orang Kayo Pingai Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur	710 Tahun 2021	15 Desember 2021	15 Desember 2021	2021
457	Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur	723 Tahun 2021	23 Desember 2021	23 Desember 2021	2021
458	Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	724 Tahun 2021	23 Desember 2021	23 Desember 2021	2021
459	Penetapan Analisa Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Penyusunan Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	727 Tahun 2021	27 Desember 2021	27 Desember 2021	2021
460	Penghapusan Pencatatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	728 Tahun 2021	27 Desember 2021	27 Desember 2021	2021

No	Keputusan Bupati	Nomor Keputusan Bupati	Tanggal Di Tetapkan	Tanggal Diundangkan	Tahun
461	Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Program Beasiswa Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Universitas Hasanuddin	730 Tahun 2021	29 Desember 2021	29 Desember 2021	2021
462	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	736 Tahun 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	2021
463	Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023	737 Tahun 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	2021
464	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	738 Tahun 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2021	2021

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2021

Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan dari Tahun 2016 - 2021 terdapat 23 kasus yang ada 10 kasus telah selesai dan sisanya masih proses penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kasus Sengketa Lahan Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.176.  
Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Tahun	Nama Kasus Sengketa	Uraian	Persentase	Keterangan
1	2016	M Saleh warga Desa Lagan Tengah dengan PT. Indonusa Agromulya Kecamatan Geragai	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan melaksanakan negosiasi harga antara pihak Perusahaan dan pihak M. Saleh terkait tali asih	100	Proses Hukum
2	2016	Warga Kelurahan Teluk Dawan dengan PT. Kaswari Unggul Kec. Ma. Sabak Barat		100	Selesai Proses
3	2016	Sdr. Buchari dengan PT. MPK (Parit 2 Sungai Dendang)		100	Selesai Proses
4	2016	Masyarakat Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang dengan Masyarakat Desa Rantau Rasau Kec. Berbak		100	Selesai Proses
5	2017	M. Nasir dkk warga Desa Lagan Ulu dengan PT. Indonusa Agromulya Kecamatan Geragai		100	Selesai Proses
6	2017	Masyarakat Desa Pangkal Duri dengan PT. Bumi Borneo Sentosa Kec. Mendahara		100	Selesai Proses
7	2017	H Latuo Bin Marek Desa Sido Mukti dengan PT. Kaswari Unggul Kec. Dendang		100	Selesai Proses
8	2018	H. Junawan dengan Latahere abi Parit 2 Sungai Remau Kanan	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengketa lahan	50	Dalam Proses

No	Tahun	Nama Kasus Sengketa	Uraian	Persentase	Keterangan
9	2018	H. Junawan dengan H Dahe Berdin Parit lapis Sungai Jawi	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengketa lahan	50	Dalam Proses
10	2018	H. Junawan dengan Bera Jumasse Parit 2 Jepu Sungai Sayang	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengketa lahan	50	Dalam Proses
11	2018	Mustari dengan Panaungi dkk Parit 1 Sungai Remau Bako Tuo		100	Proses Hukum
12	2018	H. Puasa dengan Nuredi dkk Kec. Rantau Rasau		100	Proses Camat
13	2019	Masyarakat Kel. Pandan Jaya dan Desa Lagan Ulu dengan PT. Indonusa Agro Mulya		100	Selesai Proses
14	2019	Mujiono dengan PT. PetroChina Intr Jabung Ltd	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan telah memfasilitasi.	50	Dalam Proses
15	2019	Nurlena dengan Pemerintah Daerah	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan telah memfasilitasi.	50	Dalam Proses
16	2019	Raja Muhammad Putih dengan Pemerintah Daerah	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan telah memfasilitasi.	50	Dalam Proses
17	2019	Ishak dengan Pemerintah Daerah	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan telah memfasilitasi.	50	Dalam Proses
18	2019	Serikat Petani Indonesia (SPI) dengan PT. Kaswari Unggul	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan telah memfasilitasi.	50	Dalam Proses
19	2021	Kelompok Tani Perintis Lestari dengan PT. Kaswari Unggul		0	Belum Proses
20	2021	Kelompok Tani Lesung Indah dengan PT. Kaswari Unggul		0	Belum Proses
21	2021	Kelompok Masyarakat Muara Sabak Ilir dengan PT. MPK		0	Belum Proses
22	2021	Serikat Petani Indonesia dengan PT. MAJI (Reclaiming Lahan)		0	Belum Proses
23	2021	Masyarakat dengan Pemerintah terkait Lokasi SDN 115/x Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai		0	Belum Proses

Sumber : LKPJ Setda 2021

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengalami kendala karena terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga proses fasilitasi dan ruang gerak harus dibatasi.

Semua Pelaksanaan lelang Tahun 2021 melalui LPSE, total paket yang dilelang sebanyak 167 paket dan efisiensi anggaran dari lelang yang dilaksanakan sebesar Rp. 10.727.975.581,16- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.177.  
Rekap Lelang Tahun 2021

No	PAKET PENYEDIA	JUMLAH PAKET			JUMLAH
		APBN	APBD	APBD-P	
1	Pekerjaan Konstruksi	-	115	1	116
2	Pengadaan Barang	-	16	2	18
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	-	33	-	33
<b>Jumlah Paket Lelang</b>		-	<b>164</b>	<b>3</b>	<b>167</b>

Sumber : LKPJ Setda 2021

Tabel 3.178.  
Efisiensi Anggaran Lelang Tahun 2021

No	PAKET PENYEDIA	JUMLAH ANGGARAN LELANG (Rp)			JUMLAH
		APBN	APBD	APBD-P	
1	Pagu Lelang	-	178.499.569.958,00	2.234.181.000,00	180.733.750.958,00
2	Nilai Kontrak	-	167.940.507.376,84	2.065.268.000,00	170.005.775.376,84
3	Efisiensi Anggaran	-	10.559.062.581,16	168.913.000,00	10.727.975.581,16

Sumber : LKPJ Setda 2021

Sampai dengan Tahun 2021 Sekretariat Daerah telah melaksanakan penataan Tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

- A. Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perkiraan batas 77 Km, hasil penataan batas sebagai berikut:
  - 65 Km telah dilaksanakan sementara 12 Km (sub segmen Pangkal Duri) Daerah Aliran Sungai Pangkal Duri kedua Kabupaten sepakat menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri dalam hal pengambilan Keputusan.
- B. Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi dengan perkiraan batas 160 Km, hasil penataan batas sebagai berikut :
  - Telah selesai dilaksanakan, Kedua Kabupaten telah menandatangani kesepakatan dan menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- C. Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan perkiraan batas 20 Km, hasil penataan batas telah selesai dilaksanakan dengan dikeluarkannya Permendagri No 130 Tahun 2017.

- D. Segmen batas Kecamatan Kuala Jambi dengan perkiraan batas 54,82 Km, hasil penataan batas Telah selesai dilaksanakan.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 terealisasi 73,57%. Jumlah Pegawai Negeri Wajib Laporan tahun 2020 sebanyak 821 wajib lapor dan yang telah melaporkan sebanyak 604 wajib lapor, Data tersebut per tanggal 9 Februari 2022 (Proses finalisasi pelaporan Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2022).

### 3.31.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

Tabel 3.179.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas	Perlu adanya Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bimbingan teknis diberbagai bidang sehingga Sumber Daya Manusia dapat berkualitas
2	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki sertifikat barang/jasa	Perlu adanya pendidikan dan pelatihan terkait barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
3	Kurangnya koordinasi antara bagian terkait perencanaan anggaran	Perlu adanya koordinasi internal Sekretariat Daerah untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga tercapainya dampak dari program kegiatan Sekretariat Daerah yang lebih maksimal.
4	Penetapan indikator-indikator kinerja belum seluruhnya terukur	Sinkronisasi kegiatan lebih diutamakan sehingga target kinerja tiap tahun statis dan dapat menunjukkan hasil kinerja sebenarnya.

Sumber : LKPJ Setda 2021

### 3.31.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Selama kurun waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretariat Daerah telah mengeluarkan beberapa Kebijakan Strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 19 (sembilan belas) Keputusan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.180.  
Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2021

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah	SK Nomor 11 Tahun 2021	Memberikan sebagian wewenang Bupati kepada Camat
2	Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 19 Tahun 2021	Terciptanya Peraturan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	SK Nomor 21 Tahun 2021	Monitoring Penggunaan Anggaran
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 22 Tahun 2021	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
5	Pembina dan Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 23 Tahun 2021	Menghasilkan Camat Teladan/Berprestasi
6	Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 24 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Koordinasi terkait Kerjasama antar Daerah
7	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 25 Tahun 2021	Terciptanya Standard Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintahan
8	Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 30 Tahun 2021	Terbentuknya Tim dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Paten
9	Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal	SK Nomor 87 tahun 2021	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi produk local
10	Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 88 Tahun 2021	Terbentuknya Tim dalam Rangka Pengendalian Inflasi
11	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 93 Tahun 2021	Terciptanya Penyelenggara Pemerintahan yang bersih
12	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 99 Tahun 2021	Terbentuknya Komisi Pengawasan Pupuk
13	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg bersubsidi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 103 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengawasan LPG 3 Kg
14	Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 109 Tahun 2021	Pengelolaan Jaringan yang Berkaitan dengan Hukum
15	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 110 Tahun 2021	Penyebaran informasi-informasi yang berkaitan dengan Hukum
16	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 141 Tahun 2021	Terbentuknya Tim dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lahan

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
17	Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 142 Tahun 2021	Terbentuknya Tim dalam rangka Penegasan Batas Daerah
18	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 146 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Penyusunan Peraturan
19	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SK Nomor 176 Tahun 2021	Terbentuknya Tim dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sumber : LKPJ Setda 2021

### 3.31.4. Tindaklanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020.

Catatan dan rekomendasi pansus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.181.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Bagian Pemerintahan berperan dalam mediasi penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan.	Bagian Pemerintahan dalam Penyelesaian Sengketa Lahan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana Kepala Bagian Pemerintahan berkedudukan sebagai Sekretaris Tim. Selama tahun 2021 permasalahan sengketa lahan yang telah difasilitasi yaitu sebagai berikut : a. Serikat Petani Indonesia dengan PT. Kaswari Unggul (HGU PT. Kaswari Unggul). b. Kelompok Tani Perintis Lestari dengan PT. Kaswari Unggul (tuntutan lahan plasma). c. Mediasi Penyelesaian Sengketa Warga Desa Merbau dengan PT. Mendahara Agrojaya Industri. d. Rapat Koordinasi terkait konsiliasi Kasus Lahan Transmigrasi antara warga	Dengan terbentuknya Tim maka Pemerintah Daerah berupaya menyelesaikan sengketa lahan yang timbul.

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai dengan PT. Indonusa Agromulya.	
2	Bagian Pemerintahan membentuk Tim Khusus Penyelesaian Permasalahan Sengketa Lahan masyarakat dengan PT. Kaswari Unggul agar tidak terjadi gejala yang berkepanjangan.	Tim Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Lahan masyarakat dengan PT. Kaswari Unggul yaitu telah di fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dengan keanggotaan dan fungsi tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 141 Tahun 2021.	Terselesainya sengketa lahan yang selama ini terjadi agar masalah tidak berkepanjangan.
3	Bagian Hukum mengupayakan terbentuknya Perda/Perbup dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan batas dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.	Bahwa Bagian Hukum Telah Mengupayakan Pada Tahun 2021 Telah Mengusulkan Propemperda Yaitu Peraturan Daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun setelah diusulkan ke Biro Hukum Provinsi Jambi bahwa Propemperda tersebut ditolak karena merupakan kewenangan absolut atau kewenangan pusat	Terwujudnya regulasi produk hukum daerah yang mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Bagian Hukum agar mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat.	Bahwa sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 berupa: a. mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, lokasi kegiatan sosialisasi di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. b. mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2018 tentang Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak, lokasi kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Camat Muara Sabak Barat.	Agar masyarakat khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengetahui adanya regulasi produk hukum daerah yang mengatur terhadap Kabupaten layak anak dan perlindungan kekerasan perempuan dan anak.
5	Bagian Hukum menginventarisir dan merevisi Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya melakukan inventarisir Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, menuntut	Teridentifikasi produk hukum daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya, sehingga produk hukum daerah yang berlaku menyesuaikan dengan

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan identifikasi awal perda berdampak undang-undang cipta kerja. Terhadap Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah melakukan identifikasi awal, terkait perubahan atau revisi perda dikembalikan ke Perangkat Dinas Teknis.</p>	<p>regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>
6	<p>Bagian Administrasi Pembangunan mengkoordinir setiap Bagian terkait penyampaian dokumen pelaporan pembahasan bersama DPRD sehingga terjadi kesesuaian dan keselarasan data pelaporan antar bagian.</p>	<p>Bahwa penyampaian dokumen pelaporan pembahasan bersama DPRD selama ini telah di koordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan.</p>	<p>Dengan dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan sehingga tercipta keselarasan dan kesesuaian.</p>
7	<p>Bagian Perekonomian dan SDA bersama Tim pengawas pupuk subsidi agar melakukan tindakan tegas terkait penyimpangan pupuk bersubsidi di distributor, penyalur dan pengecer atau kelompok tani fiktif.</p>	<p>Dalam rangka Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam penyediaan pupuk bersubsidi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menyusun Alokasi Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kecamatan dan melakukan beberapa kali perubahan alokasi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 15 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.</li> <li>b. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 71 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang relokasi ke pertama kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.</li> <li>c. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan</li> </ol>	<p>Terciptanya penyaluran pupuk yang tepat sasaran.</p>

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 130 Tahun 2021 tentang relokasi ke kedua kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.</p> <p>d. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 177 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang relokasi ke tiga kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 180 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang relokasi ke empat kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2021 sebagai berikut :</p> <p>a. Pupuk Urea realisasi penyaluran sebesar 1.622,00 ton atau 95,00 % dari alokasi 1.704,24 ton.</p> <p>b. Pupuk SP36 realisasi penyaluran sebesar 1.073,00 ton atau 88,00 % dari alokasi 1.217,00 ton.</p> <p>c. Pupuk ZA realisasi penyaluran sebesar 626,20 ton atau 93,00 % dari alokasi 670,24 ton.</p> <p>d. Pupuk NPK Phonska realisasi penyaluran sebesar 6.873,65 atau 98,00 % dari alokasi 7.048,65 ton.</p> <p>e. Pupuk Organik realisasi penyaluran sebesar 250,40 atau sebesar 84,00 % dari alokasi 299,70 ton.</p> <p>Apabila terjadi tindakan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor atau penyalur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan</p>	

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Nomor Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung upaya tindakan atau sanksi tegas bagi distributor/pengecer dan ataupun pihak pihak lain serta mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.</p>	
8	<p>Struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Bahwa struktur pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.</p>	<p>Terciptanya sistem pelaporan yang komprehensif.</p>
9	<p>Terhadap program dan kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru tidak relevan.</p>	<p>Terhadap program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran akan mengalokasikan kembali anggaran melalui mekanisme yang berlaku.</p>	<p>Terlaksananya program kegiatan yang selama ini diharapkan terlaksana.</p>
10	<p>Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur,</p>	<p>Komunikatif lebih intensif terhadap OPD dan Mitra Kerja terkait program dan kegiatan serta sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu, terencana,</p>	<p>Tercapainya kegiatan dan program antara OPD dan Mitra Kerja sehingga terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat</p>

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	terarah dan terukur dalam menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT	yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT).

Sumber : LKPJ Setda 2021

### 3.32. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang penganggaran dan pengawasan;
4. fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang legislasi;
5. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 3.32.1. Capaian Pelaksanaan Program

Sekretariat DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang urusan pemerintahan Pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.182.

## Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>30.395.975.560</b>	<b>28.498.149.226</b>	<b>1.897.826.334</b>	<b>93,76</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>98.109.682</b>	<b>96.630.750</b>	<b>1.478.932</b>	<b>98,49</b>
1.1.1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.217.122	48.900.850	1.316.272	97,38
1.1.2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	47.892.560	47.729.900	162.660	99,66
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.498.831.491</b>	<b>3.394.304.352</b>	<b>104.527.139</b>	<b>97,01</b>
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.017.378.550	2.922.415.252	94.963.298	96,85
1.2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	52.353.000	46.219.300	6.133.700	88,28
1.2.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	410.978.573	408.163.200	2.815.373	99,31
1.2.4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	6.798.000	6.752.600	45.400	99,33
1.2.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11.323.368	10.754.000	569.368	94,97
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>195.099.000</b>	<b>192.771.743</b>	<b>2.327.257</b>	<b>98,81</b>
1.3.1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	195.099.000	192.771.743	2.327.257	98,81
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>360.143.000</b>	<b>328.788.600</b>	<b>31.354.400</b>	<b>91,29</b>
1.4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	127.083.000	123.062.000	4.021.000	96,84
1.4.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	233.060.000	205.726.600	27.333.400	88,27
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.161.492.353</b>	<b>3.096.029.120</b>	<b>1.065.463.233</b>	<b>74,40</b>
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	192.602.420	192.602.420	0	100,00
1.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	661.484.883	586.760.485	74.724.398	88,70
1.5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	456.733.500	435.015.740	21.717.760	95,24
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	372.171.550	370.023.700	2.147.850	99,42
1.5.5	Penyediaan bahan bacaan dan undangan	757.300.000	736.293.500	21.006.500	97,23
1.5.6	Fasilitasi kunjungan tamu	1.659.474.000	714.238.275	945.235.725	43,04
1.5.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61.726.000	61.095.000	631.000	98,98
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>531.335.582</b>	<b>522.628.000</b>	<b>8.707.582</b>	<b>98,36</b>
1.6.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	101.146.000	99.250.000	1.896.000	98,13
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	430.189.582	423.378.000	6.811.582	98,42
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.081.190.000</b>	<b>1.791.023.150</b>	<b>290.166.850</b>	<b>86,06</b>
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	26.700.000	25.108.000	1.592.000	94,04

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	494.400.000	329.315.150	165.084.850	66,61
1.7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.560.090.000	1.436.600.000	123.490.000	92,08
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.216.576.078</b>	<b>2.194.789.186</b>	<b>21.786.892</b>	<b>99,02</b>
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	629.980.000	618.710.920	11.269.080	98,21
1.8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	188.748.078	188.702.566	45.512	99,98
1.8.3	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	1.309.448.000	1.302.010.200	7.437.800	99,43
1.8.4	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	88.400.000	85.365.500	3.034.500	96,57
<b>1.9</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>14.470.126.374</b>	<b>14.233.208.827</b>	<b>236.917.547</b>	<b>98,36</b>
1.9.1	Penyelenggaraan administrasi keuangan	14.246.646.374	14.019.783.827	226.862.547	98,41
1.9.2	Penyediaan pakaian dinas atribut DPRD	222.150.000	212.175.000	9.975.000	95,51
1.9.3	Pelaksanaan medical check up DPRD	1.330.000	1.250.000	80.000	93,98
<b>1.10</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>2.783.072.000</b>	<b>2.647.975.498</b>	<b>135.096.502</b>	<b>95,15</b>
1.10.1	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	1.998.000	1.997.950	50	100,00
1.10.2	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	2.181.074.000	2.045.977.548	135.096.452	93,81
1.10.3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	600.000.000	600.000.000	0	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>7.210.142.458</b>	<b>4.348.877.396</b>	<b>2.861.265.062</b>	<b>60,32</b>
<b>2.1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1.292.133.013</b>	<b>690.356.714</b>	<b>601.776.299</b>	<b>53,43</b>
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	400.607.889	283.250.350	117.357.539	70,71
2.1.2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	725.679.992	365.214.600	360.465.392	50,33
2.1.3	Penyelenggaraan kajian perundang undangan	88.569.810	36.183.464	52.386.346	40,85
2.1.4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	77.275.322	5.708.300	71.567.022	7,39
<b>2.2</b>	<b>Pembahasan kebijakan anggaran</b>	<b>410.717.797</b>	<b>232.204.500</b>	<b>178.513.297</b>	<b>56,54</b>
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	49.004.970	29.052.800	19.952.170	59,29
2.2.2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	49.005.000	0	49.005.000	0,00
2.2.3	Pembahasan APBD	81.881.140	81.231.400	649.740	99,21
2.2.4	Pembahasan APBD perubahan	81.881.128	0	81.881.128	0,00
2.2.5	Pembahasan pertanggung jawaban	148.945.559	121.920.300	27.025.259	81,86
<b>2.3</b>	<b>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>780.225.000</b>	<b>212.420.000</b>	<b>567.805.000</b>	<b>27,23</b>
2.3.1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintah dan hukum	206.490.000	42.935.000	163.555.000	20,79

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.3.2	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintah bidang infrastruktur	126.510.000	57.835.000	68.675.000	45,72
2.3.3	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	229.500.000	76.650.000	152.850.000	33,40
2.3.4	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	125.925.000	32.270.000	93.655.000	25,63
2.3.5	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan lap. Keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan	91.800.000	2.730.000	89.070.000	2,97
<b>2.4</b>	<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>	<b>2.102.965.571</b>	<b>1.309.445.882</b>	<b>793.519.689</b>	<b>62,27</b>
2.4.1	Bimbingan teknis DPRD	1.133.570.000	461.308.900	672.261.100	40,70
2.4.2	Publikasi dan dokumentasi dewan	735.086.207	686.851.982	48.234.225	93,44
2.4.3	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	50.000.000	0	50.000.000	0,00
2.4.4	Penyediaan tenaga ahli fraksi	150.000.000	150.000.000	0	100,00
2.4.5	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	22.795.000	0	22.795.000	0,00
2.4.6	Penyusunan program kerja DPRD	11.514.364	11.285.000	229.364	98,01
<b>2.5</b>	<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>	<b>1.002.261.725</b>	<b>588.868.400</b>	<b>413.393.325</b>	<b>58,75</b>
2.5.1	Kunjungan kerja dalam daerah	107.035.000	12.705.000	94.330.000	11,87
2.5.2	Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD	18.880.380	18.450.000	430.380	97,72
2.5.3	Pelaksanaan reses	876.346.345	557.713.400	318.632.945	63,64
<b>2.6</b>	<b>Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>	<b>7.885.077</b>	<b>4.761.700</b>	<b>3.123.377</b>	<b>60,39</b>
2.6.1	Penyusunan kode etik DPRD	5.005.077	4.761.700	243.377	95,14
2.6.2	Pengawasan kode etik DPRD	2.880.000	0	2.880.000	0,00
<b>2.7</b>	<b>Pembahasan kerjasama</b>	<b>20.374.000</b>	<b>0</b>	<b>20.374.000</b>	<b>0,00</b>
2.7.1	Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	20.374.000	0	20.374.000	0,00
<b>2.8</b>	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>1.593.580.275</b>	<b>1.310.820.200</b>	<b>282.760.075</b>	<b>82,26</b>
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	1.586.070.000	1.303.799.200	282.270.800	82,20
2.8.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	7.510.275	7.021.000	489.275	93,49
	<b>Jumlah</b>	<b>37.606.118.018</b>	<b>32.847.026.622</b>	<b>4.759.091.396</b>	<b>87,34</b>

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD 2021

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Instansi untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.1 Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,

Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah dokumen laporan realisasi (dokumen)

- 1.2 Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah dokumen perencanaan (dokumen)
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,  
Indikator kegiatan (Output) adalah persentase penyelesaian administrasi keuangan daerah
- b. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- c. Sub Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa administrasi tugas ASN
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah pembayaran jasa administrasi keuangan
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah dokumen laporan akuntansi
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah dokumen laporan keuangan
- 3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, Indikator Kegiatan (Output) adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah
- 3.1 Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD,  
Indikator Kegiatan (Output) adalah jasa pengamanan barang milik daerah
- 4) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah,  
Indikator Kegiatan (Output) adalah persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah
- 4.1 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya,  
Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 4.3 Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi,  
Indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal
- 5) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase penyelesaian administrasi umum
- 5.1 Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jenis komponen instalasi listrik/penerangan
- 5.2 Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor
- 5.3 Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pengadaan peralatan rumah tangga
- 5.4 Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah jenis barang cetakan

- 5.5 Sub kegiatan bahan bacaan dan perundang-undangan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran tagihan surat kabar
- 5.6 Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu,  
indikator sub kegiatan (output) adalah penyediaan makan minum tamu
- 5.7 Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran koordinasi
- 6) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kegiatan (output) adalah persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - 6.1 Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pengadaan kendaraan dinas
  - 6.1. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya,
  - 6.2. indikator sub kegiatan(output) adalah jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kegiatan (output) adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - 7.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah materai
  - 7.2 Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 7.3 Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran gaji PHTT
- 8) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, indikator kegiatan (output) adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah
  - 8.1 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
  - 8.2 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin
  - 8.3 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara
  - 8.4 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara
- 9) Kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, indikator kegiatan (output) adalah persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
  - 9.1 Sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,

- indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran gaji DPRD
- 9.2 Sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD
- 9.3 Sub kegiatan pelaksanaan medical Check Up DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah medical Check Up DPRD
- 10) Kegiatan layanan administrasi DPRD,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase layanan administrasi DPRD
- 10.1 Sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah administrasi keanggotaan DPRD
- 10.2 Sub kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
- 10.3 Sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD

## B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Indikator Program (Outcome) program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pembentukan peraturan daerah,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase penyelesaian peraturan daerah dan peraturan DPRD
- 1.1 Sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah usulan rancangan peraturan daerah
- 1.2 Sub kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan (Ranperda)
- 1.3 Sub kegiatan penyelenggaraan perundang-undangan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Rancangan)
- 1.4 Sub kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah naskah akademik
- 2) Kegiatan pembahasan kebijakan anggaran,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase pembahasan kebijakan anggaran
- 2.1 Sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pembahasan KUA dan PPAS
- 2.2 Sub kegiatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS,

- indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pembahasan perubahan KUA dan PPAS
- 2.3 Sub kegiatan pembahasan APBD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan APBD
- 2.4 Sub kegiatan pembahasan APBD Perubahan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pembahasan perubahan APBD
- 2.5 Sub kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pertanggungjawaban APBD
- 3) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah
- 3.1 Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
- 3.4 Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
- 3.5 Sub kegiatan pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
- 3.6 Sub kegiatan pengawasan pemerintahan bidang perekonomian,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
- 3.7 Sub kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 4) Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD, indikator kegiatan (output) adalah persentase peningkatan kapasitas DPRD
- 4.1 Sub kegiatan bimbingan teknis DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan bimbingan teknis DPRD
- 4.2 Sub kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan publikasi dan dokumentasi Dewan
- 4.3 Sub kegiatan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan penyediaan tenaga ahli fraksi
- 4.4 Sub kegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi,

- indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan penyediaan tenaga ahli fraksi
- 4.5 Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan penyelenggaraan hubungan masyarakat
- 4.6 Sub kegiatan penyusunan program kerja DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan penyusunan program kerja DPRD
- 5) Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah
- 5.1 Sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pembayaran kunker dalam daerah
- 5.2 Sub kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pokok-pokok pikiran
- 5.3 Sub kegiatan pelaksanaan reses,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah reses
- 6) Kegiatan pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD, indikator kegiatan (output) adalah persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
- 6.1 Sub kegiatan penyusunan kode etik DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan penyusunan kode etik DPRD
- 6.2 Sub kegiatan pengawasan kode etik DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD
- 7) Kegiatan pembahasan kerja sama daerah,  
indikator kegiatan (output) adalah persentase pembahasan kerjasama daerah
- 7.1 Sub kegiatan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah,  
indikator sub kegiatan (output) adalah jumlah fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah
- 8) Kegiatan fasilitasi tugas DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah persentase fasilitasi tugas DPRD
- 8.1 Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
- 8.2 Sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD,  
indikator sub kegiatan (output) adalah pelaksanaan penyusunan laporan kinerja DPRD

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.183.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Sekretariat DPRD  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
							(%)
1	2	3	4		5		6=5/4*100
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	78		78,65		100,83
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	100	%	100	%	100
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi (Dokumen)	3	dokumen	3	dokumen	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Dokumen)	9	dokumen	9	dokumen	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	100	%	100	%	100
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	Tahun	1	Tahun	100
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran jasa administrasi Tugas ASN (Bln)	12	bulan	12	bulan	100
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	bulan	12	bulan	100
1.2.4	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Laporan Akuntansi (Dokumen)	16	dokumen	16	dokumen	100
1.2.5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100	%	100	%	100
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Pengamanan Barang Milik Daerah (Jenis)	2	jenis	2	jenis	100
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	%	99,42	%	99,42
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	141	Stel	141	stel	100
1.4.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal (Orang)	31	orang	29	orang	98,84
1.5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	100	%	100	%	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Jenis)	28	jenis	28	jenis	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Thn)	1	tahun	1	tahun	100
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan peralatan Rumah Tangga(Jenis)	8	jenis	8	jenis	100
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Jenis)	9	jenis	9	jenis	100
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang – Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bln)	12	bulan	12	bulan	100
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12	bulan	12	bulan	100
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	12	bulan	12	bulan	100
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	100	%	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
							(%)
1	2	3	4		5		$\frac{6=5}{4} \times 100$
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	4	unit	4	unit	100
1.6.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	unit	8	unit	100
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	2500	lembar	2500	lembar	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln)	12	bulan	12	bulan	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji PHTT (Bln)	11	bulan	11	bulan	100
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	28	unit	28	unit	100
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin (Jenis)	5	jenis	5	jenis	100
1.8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	7	gedung	7	gedung	100
1.8.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang terpelihara (Gedung)	4	gedung	4	gedung	100
<b>1.9</b>	<b>Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji DPRD (Bulan)	14	bulan	14	bulan	100
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD (Stel)	120	stel	120	stel	100
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD(kali)	1	kali	0	kali	0
<b>1.10</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
1.10.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Administrasi Keanggotaan DPRD DPRD (Bln)	12	bulan	12	bulan	100
1.10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD	Pembayaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (kali)	40	kali	40	kali	100
1.10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (kali)	12	kali	12	kali	100
<b>2.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>87,5</b>	<b>%</b>	<b>87,5</b>
<b>2.1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
2.1.1	Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan (Ranperda)	4	ranperda	4	ranperda	100
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Rancangan)	2	rancangan	2	rancangan	100
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Dan / Atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
<b>2.2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
							(%)
1	2	3	4		5		$\frac{6=5}{4} \times 100$
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
2.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan APBD (Dokumen)	2	dokumen	2	dokumen	100
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
2.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	2	dokumen	2	dokumen	100
<b>2.3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kali)	24	kali	24	kali	100
2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Kali)	12	kali	12	kali	100
2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kali)	24	kali	24	kali	100
2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Kali)	12	kali	12	kali	100
2.3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Kali)	6	kali	6	kali	100
<b>2.4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
2.4.1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Orang)	90	orang	90	orang	100
2.4.2	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi Dan Dokumentasi Dewan (Kali)	48	kali	48	kali	100
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli (Orang)	3	orang	3	orang	100
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5	orang	5	orang	100
2.4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Kali)	6	kali	6	kali	100
2.4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja DPRD (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
<b>2.5</b>	<b>Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>141,67</b>	<b>%</b>	<b>141,67</b>
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pembayaran Kunker Dalam Daerah (kali)	24	kali	24	kali	100
2.5.2	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran (Pokir)	400	pokir	900	pokir	225
2.5.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses (kali)	3	kali	3	kali	100
<b>2.6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik DPRD (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD (Kali)	2	kali	2	kali	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
							(%)
1	2	3	4		5		$\frac{6=5}{4} \times 100$
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah	100	%	0	%	0
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah (Kali)	4	kali	0	kali	0
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	100	%	100
2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Kali)	6	kali	6	kali	100
2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (Dokumen)	1	dokumen	1	dokumen	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>							<b>94,17</b>

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD 2021

### 3.32.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.184.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Alokasi dana anggaran 2021 belum seluruhnya dapat digunakan pada kegiatan tersebut.	Perlu adanya sinkronisasi dalam penyusunan anggaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
2	Terlambatnya pencairan dana sedangkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang terbatas	Proses pencairan sebaiknya didasarkan pada anggaran kas yang telah dibuat, agar kegiatan yang telah dilaksanakan untuk proses pencairan tidak terlambat yang tentunya didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap sehingga proses pencairan tidak menumpuk diakhir tahun waktu pelaksanaan.
3	Tingkat profesionalisme sebagai aparatur pelaksana kegiatan yang masih kurang	Dengan terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD maka akan dilaksanakan Bimtek dan Pelatihan untuk meningkatkan professional kerja yang tentunya disesuaikan dengan keilmuannya, sehingga Bimtek dan pelatihannya tepat sasaran.

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Refocusing anggaran dikarenakan Covid-19 sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.	Melakukan koordinasi antar bagian terhadap kegiatan yang tidak mungkin dapat terlaksana, sehingga pada saat refocusing dapat mengalihkan kegiatan yang sekiranya tidak terlaksana. Peran pejabat pengelola keuangan yang diharapkan dalam menyampaikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkena pengurangan dampak Covid-19.

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD 2021

### 3.32.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama kurun waktu Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretariat Daerah telah mengeluarkan beberapa Kebijakan Strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa 4 (empat) Peraturan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.185.  
Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2021

No	Nomor/Tgl Perda Tahun 2021	Tentang	Sumber
1	01/ 20 Agustus 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan Daerah
2	02/ 26 Oktober 2021	RPJMD Tahun 2021-2026	BAPPEDA
3	03/2 Desember 2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	04/29 Desember 2021	APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022	Badan Keuangan Daerah

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD 2021

### 3.32.4. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

Tabel berikut menjabarkan tindak lanjut atas Catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 20 April tahun 2021

Tabel 3.186.  
Tindak Lanjut Catatan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Agar TAPD mengakomodir anggaran kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor DPRD Kab. Tangung Jabung Timur	Mengajukan usulan rehab lanjutan Gedung DPRD	Belum adanya anggaran untuk rehab tersebut ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2022
2	Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Menyesuaikan dengan PP No.13 Tahun 2019 terkait struktur pelaporan LKPJ	Mempedomani dengan PP.13 Tahun 2019 penyusunan LKPJ Sekretariat DPRD disesuaikan pada LKPJ tahun 2021 yang berkoordinasi dengan OPD terkait.
3	Terhadap program dan kegiatan TA. 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan.	Tetap berpedoman pada perencanaan dan melaksanakan perubahan pada saat perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan program/kegiatan yang baru yang dibutuhkan dan dianggap penting dan mendesak sehingga tidak timbul kegiatan yang tidak relevan	Untuk itu penundaan kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan disebabkan adanya refocusing anggaran, hal ini dapat membantu pergeseran anggaran dari anggaran yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan digeser dengan kegiatan yang sangat mendesak dengan berpedoman pada peraturan keuangan terkait pergeseran refocusing.
4	Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan	Melaksanakan pembahasan bersama antara OPD dengan	Menyusun perencanaan anggaran kegiatan Dewan dengan menyesuaikan pada

No	Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020	Tindak Lanjut yang dilaksanakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.	DPRD dalam menyusun program dan kegiatan Dewan yang didasarkan pada program dan kegiatan Dewan satu tahun diawal tahun, sehingga perencanaan anggaran kegiatan dapat menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pimpinan dan anggota DPRD	program dan kegiatan Dewan satu tahun, dengan telah disusunnya perencanaan anggaran dengan program kegiatan Dewan diharapkan terjadinya sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan secara terbuka, transparan dan terperinci.

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD 2021

### 3.33. 11 KECAMATAN

Kecamatan merupakan beberapa unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh perundang-undangan.

### 3.33.1. Capaian Pelaksanaan Program

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan sebagai berikut :

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program (Outcome) adalah Indeks Pelayanan Instansi. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen perencanaan
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah dokumen Laporan Realisasi
  - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang dilaksanakan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah.
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa administrasi keuangan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - 3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan.
  - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan (Output) adalah Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor.
  - 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah jenis barang cetak.
  - 4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran tagihan surat kabar.

- 4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sub Kegiatan (Output) adalah Penyediaan makan minum tamu.
  - 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan (Output) adalah Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD.
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Pengadaan Mebel.
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Materai.
    - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik, Indikator kegiatan (Output) adalah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara.
    - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator kegiatan (Output) adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
- B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
    - 2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan.
  3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum.
    - 3.1 Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah excavator yang dipelihara.

4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, Indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

3.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah izin yang dilayani.

#### C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Program (Outcome) adalah Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan dan Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan. Untuk mencapai Indikator Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, indikator kegiatan (Output) Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan.

2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah pembangunan yang dilaksanakan.

2.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Masyarakat yang aktif di Kelurahan.

2.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Monev yang Dilaksanakan.

#### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, indikator kegiatan (Output) adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, indikator Sub Kegiatan (Output) adalah Jumlah Kegiatan Hari Besar dan Keagamaan.

### 1. Kecamatan Muara Sabak Barat

Kecamatan Muara Sabak Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan kewilayahan dengan bidang urusan kecamatan pada Tahun 2021 Kecamatan Muara Sabak Barat melaksanakan 4 (Empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Muara Sabak Barat sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.187.  
 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Muara Sabak Barat  
 Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,691,298,980</b>	<b>5,398,253,185</b>	<b>293,045,795</b>	<b>94.85</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.170.000</b>	<b>47,099,700</b>	<b>3,070,300</b>	<b>93.88</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	4,959,900	440,100	91.85
1.1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	4.800.000	3,679,800	1,120,200	76.66
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.970.000	38.460.000	1,510,000	96.22
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.396.130.051</b>	<b>5,108,977,413</b>	<b>287,152,638</b>	<b>94.68</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5.029.040.251	4,745,487,613	283,552,638	94.36
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	367.089.800	363,489,800	3,600,000	99.02
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19,400,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.400.000	14,400,000	0	100
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	5.000.000	5,000,000	0	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.201.595</b>	<b>107,682,211</b>	<b>519,384</b>	<b>99.52</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.714.100	4,714,100	0	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	50.897.495	50,864,211	33,284	99.93
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	7.710.000	7,709,900	100	99.99
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5,000,000	0	100
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	34,755,000	245,000	99.30
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	4.880.000	4,639,000	241,000	95.06
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.570.662</b>	<b>22,320,265</b>	<b>250,397</b>	<b>98.89</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	22.570.662	22,320,265	250,397	98.98
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.050.000</b>	<b>30,959,246</b>	<b>90,754</b>	<b>99.71</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000	4,050,000	0	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	27.000.000	26,909,246	90,754	99.66
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.776.672</b>	<b>61,814,350</b>	<b>1,962,322</b>	<b>96.92</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	29.750.000	28,124,350	1,625,650	94.54
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	34.026.672	33,690,000	336,672	99.01
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>132,315,475</b>	<b>128,286,183</b>	<b>4,029,292</b>	<b>96.95</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	<b>56.118.888</b>	<b>56,087,096</b>	<b>31,792</b>	<b>99.94</b>
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	56.118.888	56,087,096	31,792	99.94
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>65.000.000</b>	<b>64,062,500</b>	<b>937,500</b>	<b>98.56</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	65.000.000	64,062,500	937,500	98.56
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>11.196.587</b>	<b>8,136,587</b>	<b>3,060,000</b>	<b>72.67</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	11.196.587	8,136,587	3,060,000	72.67
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>4,632,917,000</b>	<b>4,442,225,318</b>	<b>190,691,682</b>	<b>95.88</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>11.650.000</b>	<b>5,950,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>51.07</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	11.650.000	5,950,000	5,700,000	51.07
<b>3.2</b>	<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>4,621,267,000</b>	<b>4,436,275,318</b>	<b>184,991,682</b>	<b>96</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	1,737,287,000	1,674,345,061	62,941,939	96.38
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan	2,772,310,000	2,702,210,257	70,099,743	97.47
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	111,670,000	59,720,000	51,950,000	53.48

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	27,400,000	27,400,000	0	100
4.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	27.400.000	27,400,000	0	100
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	27.400.000	27,400,000	0	100
<b>JUMLAH</b>		<b>10.483.931.455</b>	<b>9.996.164.686</b>	<b>487,766,769</b>	<b>95,35</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.188.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Muara Sabak Barat  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dok)	4	4	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	5	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28	28	100
1.3.2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	1	100
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan (Unit/Komponen)	7	7	100
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100
1.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Buah)	3	3	100
1.4.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (Bulan)	12	12	100
1.4.5	Fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan makan minum tamu (Bulan)	12	12	100
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah (Bulan)	12	12	100
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5.1	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)	8	8	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	405	405	100
1.6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	6	6	100
1.7.2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (Tahun)	1	1	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif di Kecamatan (Orang)	25	25	100
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara (Tahun)	1	1	100
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	Jumlah Izin yang dilayani (Pelayanan)	1	1	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	1	1	100
<b>3.2</b>	<b>Pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan (Unit/Paket)	15	15	100
3.2.2	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Masyarakat yang Aktif di Kelurahan (Orang)	175	175	100
3.2.3	Evaluasi kelurahan	Jumlah Monev yang Dilaksanakan (Bulan)	12	12	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Hari Besar dan Keagamaan (Tahun)	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 2. Kecamatan Muara Sabak Timur

Kecamatan Muara Sabak Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan Tanjung Jabung Timur dengan bidang urusan Pemerintah Pada Tahun 2021 Kecamatan Muara Sabak Timur melaksanakan 4 (Empat) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Muara Sabak Timur sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.189.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Muara Sabak Timur  
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>107.620.000</b>	<b>107.550.000</b>	<b>70.000</b>	<b>99,93</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.640.000	19.640.000	0	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.230.000	4.230.000	0	100
1.1.3	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	83.750.000	83.680.000	70.000	99,92
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.692.400.639</b>	<b>3.662.644.899</b>	<b>29.755.740</b>	<b>99,19</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.364.125.639	3.334.404.899	29.720.740	99,12
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	328.275.000	328.240.000	35.000	99,99
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>26.300.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.300.000	21.300.000	0	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	0	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212.286.966</b>	<b>212.035.000</b>	<b>251.966</b>	<b>99,88</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.095.900	9.050.000	45.900	99,50
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.928.706	93.900.000	28.706	99,97
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	3.000.000	0	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	57.192.390	57.150.000	42.390	99,93
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.995.000	4.950.000	45.000	99,10
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	28.125.000	28.125.000	0	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.950.000	15,860.000	90.000	99,44
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.694.454</b>	<b>9.655.000</b>	<b>39.454</b>	<b>99,59</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	4.935.704	4.900.000	35.704	99,28
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.758.750	4.755.000	3.750	99,92

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.640.000</b>	<b>37.587.498</b>	<b>52.502</b>	<b>99,86</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	0	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	17.987.498	12.502	99,93
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.140.000	15.100.000	40.000	99,74
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.050.000</b>	<b>71.669.800</b>	<b>1.380.200</b>	<b>98,11</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500.000	25.169.000	331.000	98,70
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.550.000	46.500.800	1.049.200	97,79
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>173.573.000</b>	<b>173.573.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.075.000</b>	<b>11.075.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.075.000	11.075.000	0	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>162.498.000</b>	<b>162.498.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	162.498.000	162.498.000	0	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.301.271.000</b>	<b>1.297.316.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>99,70</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.909.000</b>	<b>30.885.000</b>	<b>24.000</b>	<b>99,92</b>
3.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.909.000	30.885.000	24.000	99,92
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.270.362.000</b>	<b>1.266.431.000</b>	<b>3.931.000</b>	<b>99,69</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	819.362.000	815.431.000	3.931.000	99,52
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	431.300.000	431.300.000	0	100
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	19.700.000	19.700.000	0	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.915.000</b>	<b>85.000</b>	<b>99,88</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.915.000</b>	<b>85.000</b>	<b>99,88</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75.000.000	74.915.000	85.000	99,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.720.260.257</b>	<b>5.684.646.197</b>	<b>35.614.060</b>	<b>99,37</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.190.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Muara Sabak Timur  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>108,97</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok	3 Dok	100
1.1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen Realisasi	3 Dok	3 Dok	100
1.1.3	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	15 Stel	15 Stel	100
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Bimtek	1 orang	1 orang	100
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Jenis	5 Jenis	100
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	5 Jenis	5 Jenis	100
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.6	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1 Tahun	1 tahun	99,44
1.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	1 Unit	1 Unit	100
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	500 Lembar	500 Lembar	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumber Daya air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.6.3	Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	100
1.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali	1 kali	100
2.2	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Terpenuhinya Proposal Yang Diajukan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Alat Berat Escavator yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan dan Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		<b>Persentase Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	50 Orang	50 Orang	100
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	2 Unit	2 Unit	100
3.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam Pembangunan di kelurahan	50 Orang	50 Orang	100
3.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi dalam/Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	100
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM</b>	<b>Persentase terlaksananya hari besar dan keagamaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari Besar dan Keagamaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101,79</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3. Kecamatan Rantau Rasau

Kecamatan Rantau Rasau menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan pada Tahun 2021 Kecamatan Rantau Rasau melaksanakan 4 (*Empat*) program, 13 (*Tiga Belas*) kegiatan dan 28 (*Dua Puluh Delapan*) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Rantau Rasau sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.191.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Rantau Rasau  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.797.214.723,00</b>	<b>2.511.413.130,00</b>	<b>285.801.593,00</b>	<b>89,78</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>51.565.000,00</b>	<b>51.565.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.565.000,00	34.565.000,00	0,00	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.472.568.105,00</b>	<b>2.195.441.630,00</b>	<b>277.126.475,00</b>	<b>88,79</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.076.105,00	1.926.949.630,00	277.126.475,00	87,43
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	268.492.000,00	268.492.000,00	-	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.884.268,00</b>	<b>115.722.000,00</b>	<b>2.162.268,00</b>	<b>98,17</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.590.000,00	9.590.000,00	-	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.204.268,00	72.063.500,00	2.140.768,00	97,12
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28.523.450,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>99,92</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	28.523.450,00	28.500.000,00	23.450,00	99,92
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.770.000,00</b>	<b>15.861.500,00</b>	<b>5.908.500,00</b>	<b>72,86</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.570.000,00	2.569.500,00	500	99,98
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	13.292.000,00	5.908.000,00	69,23
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.303.900,00</b>	<b>86.723.000,00</b>	<b>580.900,00</b>	<b>99,33</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.500.000,00	65.926.000,00	574.000,00	99,14
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.803.900,00	10.797.000,00	6.900,00	99,94
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>57.393.522,00</b>	<b>57.392.000,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>45.400.000,00</b>	<b>45.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	45.400.000,00	45.400.000,00	-	100,00
2.3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat</b>	<b>1.993.522,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>99,92</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.993.522,00	1.992.000,00	1.522,00	99,92
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>606.655.311,00</b>	<b>590.096.850,00</b>	<b>16.558.461,00</b>	<b>97,27</b>
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>15.016.606,00</b>	<b>14.991.500,00</b>	<b>25.106,00</b>	<b>99,83</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.016.606,00	14.991.500,00	25.106,00	99,83
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>591.638.705,00</b>	<b>575.105.350,00</b>	<b>16.533.355,00</b>	<b>97,21</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	221.584.099,00	205.222.350,00	16.361.749,00	92,62
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360.054.606,00	359.908.000,00	146.606,00	99,96
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
4.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.120.000,00	9.120.000,00	-	100
<b>JUMLAH</b>		<b>3.470.383.556,00</b>	<b>3.168.021.980,00</b>	<b>302.361.576,00</b>	<b>91,29</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.192.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Rantau Rasau  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>85,84</b>	<b>110,05</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8 dokumen	8 dokumen	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28 stel	28 stel	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1 orang	1 orang	100
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	10 jenis	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	10 jenis	10 jenis	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12 bulan	12 bulan	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 unit	2 unit	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	257 lembar	257 lembar	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	7 unit	99
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	1 gedung	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	100
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1 unit	1 unit	100
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1 izin	1 izin	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan dibagi target x 100	100 orang	100 orang	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1 Unit	1 Unit	100
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	50 orang	50 orang	100
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	1 tahun	1 tahun	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI-HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	5 kali	5 kali	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>102,01</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

#### 4. Kecamatan Berbak

Kecamatan Berbak menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan pada Tahun 2021 Kecamatan Berbak melaksanakan 4 (*Empat*) program, 13 (*Tiga Belas*) kegiatan dan 29 (*Dua Puluh Sembilan*) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Berbak sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.193.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Berbak  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.059.009.060,14</b>	<b>2.015.002.621,00</b>	<b>44.006.439,00</b>	<b>97,86</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>22.770.000</b>	<b>13.955.000</b>	<b>62,00</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000	-	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.475.000,00	2.475.000	-	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	16.045.000	13.955.000	53,48
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.675.269.862,14</b>	<b>1.655.693.321</b>	<b>19.576.541</b>	<b>98,83</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.949.862,14	1.381.373.321	15.576.541	98,88
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	278.320.000,00	274.320.000	4.000.000	98,56
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>20.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>95,37</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.600.000,00	15.600.000	-	100,00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000,00	5.000.000	1.000.000	83,33
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>126.847.888,00</b>	<b>121.108.500</b>	<b>5.739.388</b>	<b>95,48</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.994.200,00	7.994.200	-	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.294.296,00	73.250.000	44.296	99,94
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000,00	-	4.000.000	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.559.392,00	16.539.300	20.092	99,88
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000	-	100,00
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000	-	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	3.325.000	1.675.000	66,50
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.686.310,00</b>	<b>26.660.000</b>	<b>26.310</b>	<b>99,90</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	12.226.310,00	12.200.000	26.310	99,78
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.460.000,00	14.460.000	-	100,00
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.296.000,00</b>	<b>15.202.000</b>	<b>94.000</b>	<b>99,39</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.296.000,00	15.202.000	94.000	99,39
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>156.584.000,00</b>	<b>152.968.800</b>	<b>3.615.200</b>	<b>97,69</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.750.000,00	55.283.800	2.466.200	95,73
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.440.000,00	7.295.000	1.145.000	86,43
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.394.000,00	90.390.000	4.000	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>83.341.200,00</b>	<b>82.373.200,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>98,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>9.550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>94,09</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.150.000,00	9.550.000	600.000	94,09
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>70.498.000,00</b>	<b>70.490.000</b>	<b>8.000</b>	<b>99,99</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	70.498.000,00	70.490.000	8.000	99,99
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2.693.200,00</b>	<b>2.333.200</b>	<b>360.000</b>	<b>86,63</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.693.200,00	2.333.200	360.000	86,63
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>621.054.610,00</b>	<b>553.212.450,00</b>	<b>67.842.160,00</b>	<b>89,08</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>19.332.160,00</b>	<b>9.075.000</b>	<b>10.257.160</b>	<b>46,94</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.332.160,00	9.075.000	10.257.160	46,94
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>601.722.450,00</b>	<b>544.137.450</b>	<b>57.585.000</b>	<b>90,43</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	327.102.450,00	319.412.450	7.690.000	97,65
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	262.270.000,00	222.670.000	39.600.000	84,90
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	12.350.000,00	2.055.000	10.295.000	16,64
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>47.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>47.050.000</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>47.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>47.050.000</b>	<b>-</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.050.000,00	0	47.050.000	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.810.454.870,14</b>	<b>2.650.588.271,00</b>	<b>159.866.599,00</b>	<b>94,31</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.194.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Berbak  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>85,47</b>	<b>109,6</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5 dokumen	5 dokumen	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	21 ob	21 ob	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23 stel	23 stel	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	2 orang	2 orang	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>90</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4 buah	4 buah	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5=3-4	$\frac{6=4/3 \times 10}{0}$
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1 kali	0	0
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	12 bulan	12 bulan	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	100
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	1 tahun	1 tahun	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	1 unit	1 unit	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 kali	12 kali	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 unit	10 unit	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	1 tahun	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang mengikuti Musrenbang kecamatan	200 orang	200 orang	100
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1 unit	1 unit	100
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1 izin	1 izin	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di PKK Kecamatan dibagi target x 100	1 tahun	1 tahun	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	100
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	87 orang	87 orang	100
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	9 orang	9 orang	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI-HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Hari-haribesar dan Keagamaan di Kecamatan	100 %	0 %	0

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5=3-4	$6=4/3 \times 100$
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	1 kali	0 kali	0
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>81,92</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 5. Kecamatan Nipah Panjang

Kecamatan Nipah Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan. Pada Tahun 2021 Kecamatan Nipah Panjang melaksanakan 4 (Empat) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Nipah Panjang sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.195.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Nipah Panjang  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=3-4	$6=4/3 \times 100$
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>4.212.567.505</b>	<b>4.182.156.312</b>	<b>30.411.193</b>	<b>99,28</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.490.500</b>	<b>23.410.500</b>	<b>80.000</b>	<b>99,66</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	990.000	990.000	0	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.500	2.500.500	0	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	20.000.000	19.920.000	80.000	99,6
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.025.320.777</b>	<b>3.999.599.365</b>	<b>25.721.412</b>	<b>99,36</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.608.760.777	3.589.639.365	19.121.412	99,47
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	416.560.000	409.960.000	6.600.000	98,42
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.256.000</b>	<b>6.256.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.256.000	6.256.000	0	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	5.000.000	0
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>83.688.168</b>	<b>83.639.163</b>	<b>49.005</b>	<b>99,94</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.493.000	1.493.000	0	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.989.574	42.971.163	18.411	99,96
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	3.000.000	0	3.000.000	0
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.110.594	5.110.000	594	99,99
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.800.000	0	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	0	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.295.000	4.265.000	30.000	99,3
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.052.060</b>	<b>5.052.060</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	5.052.060	5.052.060	0	100
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.200.000</b>	<b>18.690.724</b>	<b>4.509.276</b>	<b>80,56</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	0	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	22.000.000	17.490.724	4.509.276	79,5
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.560.000</b>	<b>45.508.500</b>	<b>51.500</b>	<b>99,89</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.560.000	45.508.500	51.500	99,89
<b>2</b>	<b>ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>65.995.000</b>	<b>65.995.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.995.000</b>	<b>4.995.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	4.995.000	4.995.000	0	100
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>61.000.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	61.000.000	61.000.000	0	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>12.434.710</b>	<b>12.426.400</b>	<b>8.310</b>	<b>99,93</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>12.434.710</b>	<b>12.426.400</b>	<b>8.310</b>	<b>99,93</b>
3.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.434.710	12.426.400	8.310	99,93
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.335.632.000</b>	<b>1.299.485.324</b>	<b>36.146.676</b>	<b>97,29</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	526.472.752	495.552.834	30.919.918	94,13
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	769.209.248	769.037.490	171.758	99,98
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	39.950.000	34.895.000	5.055.000	87,35
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14.057.038</b>	<b>14.057.038</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>14.057.038</b>	<b>14.057.038</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.057.038	14.057.038	0	100
<b>Jumlah</b>		<b>5.640.686.253</b>	<b>5.574.120.074</b>	<b>66.566.179</b>	<b>98,82</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.196.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>82,45</b>	<b>105,71</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	4	4	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	8	8	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
1.3.1	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8	8	100
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	5	0	0
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	20	20	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	1	100
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	0	0
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	5	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	12	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	12	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	12	100
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6	6	100
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	120	120	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	12	12
2	<b>ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	1	100
2.2	<b>Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	1	100
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan (orang)	120	120	100
3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembangunan dikelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	6	100
3.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	6	6	100
3.1.1	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan (Unit)	2	2	100
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	3	3	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>101,14</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 6. Kecamatan Sadu

Kecamatan Sadu menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan pada Tahun 2021 Kecamatan Sadu melaksanakan 3 (*Tiga*) program, 11 (*Sebelas*) kegiatan dan 23 (*Dua Puluh Tiga*) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Sadu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.197.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kecamatan Sadu  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.006.164.790,08</b>	<b>2.875.763.271,00</b>	<b>130.401.439,00</b>	<b>97,86</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.225.000,00</b>	<b>16.054.700</b>	<b>200.300</b>	<b>98,77</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.999.700	300	99,99
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000	-	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.255.000,00	10.055.000	200.000	98,05
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.002.917.657,08</b>	<b>1.927.308.501</b>	<b>75.609.156,08</b>	<b>96,22</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.668.397.657,08	1.592.788.501	75.609.156,08	95,46
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	334.520.000,00	334.520.000	-	100,00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>27.150.000,00</b>	<b>20.750.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>76,43</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.150.000,00	20.750.000	1.400.000	93,68
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	-	5.000.000	0,00
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>68.614.544,00</b>	<b>68.599.875</b>	<b>14.679</b>	<b>99,98</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.125.000,00	2.125.000	-	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.311.466,00	37.310.500	966	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.178.088,00	10.164.375	13.713	99,88
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000	-	100,00
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.000.000,00	14.000.000	-	100,00
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	2.300.000	-	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00	19.200.000	-	100,00
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.050.000,00</b>	<b>40.650.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>92,28</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.850.000,00	39.450.000	3.400.000	92,07
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000	1.200.000	-	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>136.841.579,00</b>	<b>110.793.550,00</b>	<b>26.048.029,00</b>	<b>80,96</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.145.000,00</b>	<b>7.760.000</b>	<b>5.385.000</b>	<b>59,03</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.145.000,00	7.760.000	5.385.000	59,03
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>120.461.000,00</b>	<b>99.798.000</b>	<b>20.663.000</b>	<b>82,85</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120.461.000,00	99.798.000	20.663.000	82,85
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>3.235.579,00</b>	<b>3.235.550</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.235.579,00	3.235.550	29	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	711.336.000,00	692.606.645,00	18.729.355,00	97,36
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	19.997.000,00	19.965.000	32.000	99,84
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.997.000,00	19.965.000	32.000	99,84
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	691.339.000,00	672.641.645	18.697.355	97,29
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	249.419.000,00	238.421.645	10.997.355	95,59
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	441.920.000,00	434.220.000	7.700.000	98,25
<b>JUMLAH</b>		<b>3.006.164.790,08</b>	<b>2.875.763.271,00</b>	<b>130.401.519,08</b>	<b>95,66</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.198.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Sadu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>102,56</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4	4	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	5	5	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37	37	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	0	0
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	4	4	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	1	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	13	13	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	12	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	12	100
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	230	230	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	6	100
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	1	100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	1	100
2.2	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	1	100
2.3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	1	100
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perempuan yang aktif di Kecamatan	25	25	100
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase peningkatan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan	4	4	100
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan	53	53	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,64</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 7. Kecamatan Dendang

Kecamatan Dendang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kecamatan dengan bidang urusan Pemerintahan. Pada Tahun 2021 Kecamatan Dendang melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Dendang sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.199.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kecamatan Dendang Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>74.801.365,00</b>	<b>66.591.365,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>89,02</b>
1.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait.	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.2	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>49.770.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>99,94</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum.	49.800.000,00	49.770.000,00	30.000	99,94
1.3	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>15.001.365,00</b>	<b>6.821.365,00</b>	<b>8.180.000</b>	<b>45,47</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	15.001.365,00	6.821.365,00	8.180.000	45,47
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>622.269.691,00</b>	<b>535.453.416,00</b>	<b>86.816.275,00</b>	<b>86,05</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>27.088.691,00</b>	<b>26.404.191</b>	<b>684.500</b>	<b>97,47</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	27.088.691,00	26.404.191	684.500	97,47
2.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>595.181.000,00</b>	<b>509.049.225,00</b>	<b>86.131.775</b>	<b>85,53</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	250.178.342,00	197.207.342,00	52.971.000	78,83
2.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	312.452.658,00	307.801.883,00	4.60.775	98,51
2.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	32.550.000,00	4.040.000,00	28.510.000	12,41
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>19.997.500,00</b>	<b>19.945.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>99,74</b>
3.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>19.997.500,00</b>	<b>19.945.000,00</b>	<b>52.500</b>	<b>99,74</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional.	19.997.500,00	19.945.000,00	52.500	99,74
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>192.095.800,00</b>	<b>176.280.771,00</b>	<b>15.815.029,00</b>	<b>91,77</b>
4.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.349.000,00</b>	<b>52.409.000,00</b>	<b>7.940.000</b>	<b>86,84</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	9.999.000,00	9.999.000,00	0	100,00
4.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.350.000,00	27.410.000,00	7.940.000	77,54
4.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.887.045.614,83</b>	<b>1.724.663.251,00</b>	<b>162.382.364</b>	<b>91,39</b>
4.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.600.016.370,00	1.442.983.451,00	157.032.364	90,19
4.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Skpd	288.229.800,00	281.679.800,00	5.350.000	97,73
4.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>38.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
4.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.100.000,00	18.100.000,00	0	100,00
4.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
4.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.161.438,00</b>	<b>106.235.463,00</b>	<b>1.925.975</b>	<b>98,22</b>
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.995.000,00	16.995.000,00	0	100,00
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	48.623.438,00	48.621.066,00	2.372	100,00
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12.243.000,00	12.238.800,00	4.200	99,97
4.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
4.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000	0	100,00
4.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	10.300.000,00	8.380.597,00	1.919.403	81,37
4.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41.450.000,00</b>	<b>36.220.000,00</b>	<b>5.230.000</b>	<b>87,38</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
4.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	36.000.000,00	30.800.000,00	5.200.000	85,56
4.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.450.000,00	5.420.000,00	30.000	99,45
4.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>10.443.671,00</b>	<b>1.456.329</b>	<b>87,76</b>
4.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	0	100,00
4.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9.200.000,00	7.743.671,00	1.456.329	84,17
4.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.296.800,00</b>	<b>39.108.100,00</b>	<b>1.188.700</b>	<b>97,05</b>
4.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	30.300.000,00	29.111.300,00	1.188.700	96,08
4.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	9.996.800,00	9.996.800,00	0	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.904.371.408,83</b>	<b>2.629.169.266,00</b>	<b>275.202.143</b>	<b>90,52</b>

Sumber : LKPJ Kantor Camat Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.200.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Dinas/Badan/Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait.	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1	1	100,00
1.2	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum,</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum.	Jumlah alat Berat yang di Pelihara	1	1	100
1.3	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	Jumlah Izin yang dilayani	1	1	100
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Melakukan Kegiatan PKK Kecamatan	120	120	100
2.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Yang Dilaksanakan	5	3	60
2.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang aktif di Kelurahan	1	1	100
2.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	1	1	100
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional.	Jumlah Kegiatan Hari Besar dan Keagamaan	1	1	100
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>84,92</b>	<b>108,87</b>
4.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	100,00
4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi.	5	5	100,00
4.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100,00
4.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	90,19
4.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Skpd	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	97,73
4.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	28	28	100,00
4.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal.	4	4	100,00
4.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	15	15	100,00
4.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	1	100,00
4.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan	3	3	100,00
4.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	12	100,00
4.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12	12	100,00
4.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12	12	100,00
4.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	1	1	100
4.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Mesin	1	1	100
4.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai	270	270	100,00
4.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
4.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	7	7	100
4.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	1	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>99,18</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 8. Kecamatan Kuala Jambi

Kecamatan Kuala Jambi menyelenggarakan urusan pemerintahan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan Pada Tahun 2021 Kecamatan Kuala Jambi melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Kuala Jambi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.201.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kecamatan Kuala Jambi Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.066.511.795,00</b>	<b>1.811.860.491,00</b>	<b>254.651.304,00</b>	<b>87,68%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.405.000,00</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>93,51%</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.305.000,00	8.930.000,00	375.000,00	95,97%
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.926.522.247,00</b>	<b>1.680.883.133,00</b>	<b>245.639.114,00</b>	<b>87,25%</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.535.962.247,00	1.305.443.133,00	230.519.114,00	84,99%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keuangan Skpd	390.560.000,00	375.440.000,00	15.120.000,00	96,13%
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>64.814.548,00</b>	<b>64.803.881,00</b>	<b>10.667,00</b>	<b>99,98%</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	569.600,00	569.600,00	0,00	100,00%
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	55.341.348,00	55.330.681,00	10.667,00	99,98%
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	403.600,00	403.600,00	0,00	100,00%
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00%
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>15.448.077,00</b>	<b>5.851.923,00</b>	<b>72,53%</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	3.295.000,00	5.000,00	99,85%
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	18.000.000,00	12.153.077,00	5.846.923,00	67,52%
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.470.000,00</b>	<b>40.995.400,00</b>	<b>2.474.600,00</b>	<b>94,31%</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	33.470.000,00	30.995.400,00	2.474.600,00	92,61%
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>27.441.907,00</b>	<b>18.818.907,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>68,58%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.225.000,00</b>	<b>3.452.000,00</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>55,45%</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6.225.000,00	3.452.000,00	2.773.000,00	55,45%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2.2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	20.700.000,00	14.850.000,00	5.850.000,00	71,74%
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	20.700.000,00	14.850.000,00	5.850.000,00	71,74%
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diimpahkan Kepada Camat	516.907,00	516.907,00	0,00	100,00%
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	516.907,00	516.907,00	0,00	100,00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.357.736.914,00	1.310.224.576,00	47.512.338,00	96,50%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.463.780,00	39.417.021,00	46.759,00	99,88%
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	39.463.780,00	39.417.021,00	46.759,00	99,88%
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.318.273.134,00	1.270.807.555,00	47.465.579,00	96,40%
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	738.540.718,00	694.195.585,00	44.345.133,00	94,00%
3.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	570.832.416,00	567.806.970,00	3.025.446,00	99,47%
3.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	8.900.000,00	8.805.000,00	95.000,00	98,93%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.451.690.616,00</b>	<b>3.140.903.974,00</b>	<b>310.786.642,00</b>	<b>91,00%</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.202.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Kuala Jambi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	78	78	100
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100,00
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100%	100%	100,00
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3 Jenis	3 Jenis	100,00
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	2 Jenis	2 Jenis	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan	100,00
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100,00
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	330 Lembar	329 Lembar	99,70
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	4 Unit	4 Unit	100,00
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100,00
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100,00
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>	<b>58,00</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang Masuk	100 Izin	58 Izin	58,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang Aktif dalam Pembangunan di Kecamatan	30 Orang	30 Orang	100,00
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100,%</b>	<b>100,00</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Unit	3 Unit	100,00
3.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Perempuan yang Aktif di Kelurahan	52 Orang	52 Orang	100,00
3.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,00</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 9. Kecamatan Geragai

Kecamatan Geragai menyelenggarakan urusan pemerintahan Tanjung Jabung Timur dengan bidang urusan Pemerintah Pada Tahun 2021 Kecamatan Geragai melaksanakan 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Geragai sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.203.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kecamatan Geraga Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.723.549.412</b>	<b>2.483.502.635</b>	<b>240.046.777</b>	<b>91,19</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.905.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>9,63</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	920.000	920.000	0	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.065.000	1.065.000	0	100
1.1.3	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20.920.000	220.000	20.700.000	1,05
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.515.522.978</b>	<b>2.321.934.531</b>	<b>193.588.447</b>	<b>92,30</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.203.952.978	2.014.844.531	189.108.447	91,42
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	311.570.000	307.090.000	4.480.000	98,56
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>34.500.000</b>	<b>22.225.000</b>	<b>12.275.000</b>	<b>64,42</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.500.000	22.225.000	0	90,71
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	10.000.000	0
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>97.136.874</b>	<b>89.741.200</b>	<b>7.395.674</b>	<b>92,39</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000	2.028.000	2.000	99,90
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.104.074	75.040.500	3.063.574	96,08
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2.272.800	2.272.700	100	99,99
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	0	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.990.000	3.600.000	390.000	90,22
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.940.000	2.000.000	3.940.000	33,67
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.960.160</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.300.160</b>	<b>67,17</b>
1.5.1	Pengadaan Mebel	2.660.160	2.660.000	160	99,99
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000	0	1.300.000	0
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.583.704</b>	<b>4.416.296</b>	<b>63,20</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	7.583.704	4.416.296	63,20
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.524.400</b>	<b>37.153.200</b>	<b>371.200</b>	<b>99,01</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.085.000	28.723.800	361.200	98,76
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.059.400	3.059.400	0	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.380.000	4.370.000	10.000	99,77

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>90.722.884</b>	<b>87.107.000</b>	<b>3.615.884</b>	<b>96,01</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>88.692.374</b>	<b>85.500.000</b>	<b>3.192.374</b>	<b>96,40</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	88.692.374	85.500.000	3.192.374	96,40
2.2	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>2.030.510</b>	<b>1.607.000</b>	<b>423.510</b>	<b>79,14</b>
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.030.510	1.607.000	423.510	79,14
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>683.995.000</b>	<b>523.063.256</b>	<b>160.931.744</b>	<b>76,47</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	0	10.000.000	0
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>673.995.000</b>	<b>523.063.256</b>	<b>150.931.744</b>	<b>77,61</b>
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	380.515.000	233.155.376	147.359.624	61,27
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	293.480.000	289.907.880	3.572.120	98,78
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.498.267.296</b>	<b>3.093.672.891</b>	<b>404.594.405</b>	<b>88,43</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.204.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Geragai  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>108,97</b>
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.1.3	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	12 bulan	12 Bulan	100
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	35 Stel	35 Stel	100
1.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Bimtek	2 orang	-	0
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3 Jenis	3 Jenis	100
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	5 Jenis	5 Jenis	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	1 Tahun	1 Tahun	100
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1 Tahun	1 tahun	100
1.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	2 Unit	2 Unit	100
1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	0	0
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumber Daya air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100
1.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	100,00
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Gedung	2 Gedung	100
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.2	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100
2.3	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang Masuk	28	28	100
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
		<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	40 Orang	40 orang	100
3.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>66,6%</b>	<b>66,6%</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	3 Unit	1 Unit	33,3
3.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam Pembangunan di kelurahan	28 Orang	28 Orang	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>85,57</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 10. Kecamatan Mendahara

Kecamatan Mendahara menyelenggarakan *Pemerintahan umum* dan *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*. Pada Tahun 2021 Kecamatan Mendahara melaksanakan 4 (Empat) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub

Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Mendahara sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.205.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kecamatan Mendahara Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.608.465.690,92</b>	<b>2.548.172.295,00</b>	<b>60.338.395,92</b>	<b>97,68</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40,960,000.00</b>	<b>40,930,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>99,93</b>
1.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2,500,000.00	2,500,000.00	0,-	100
1.1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	480,000.00	480,000.00	0,-	100
1.1.3	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	37,980,000.00	37,950,000.00	30.000,00	100
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,125,915,470.92</b>	<b>2.071.082.347.00</b>	<b>54.833.123,92</b>	<b>97.42</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,725,895,470.92	1.672.322.347,00	53.573.123,92	96.90
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400,020,000.00	398,760,000.00	1,260,000	99,69
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,500,000	10,500,000	0,-	100
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74,617,720.00</b>	<b>74,130,900.00</b>	<b>486,820</b>	<b>99,35</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,133,000.00	4,125,000.00	8,000,00	99,81
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,782,620.00	37,779,000.00	3,620,00	99,99
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	7,102,100.00	7,101,900.00	200,00	100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0,-	100
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan Tamu	18,000,000.00	18,000,000.00	0,-	100
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,600,000.00	1,125,000.00	475,000	70,31
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23,212,500.00</b>	<b>23,200,000.00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>99,95</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	23,212,500.00	23,200,000.00	12.500,00	99,95
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21,980,000.00</b>	<b>21,976,323.00</b>	<b>3,677,00</b>	<b>99,98</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,980,000.00	3,980,000.00	0,-	100
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	17,996,323.00	3,677,00	99,98
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>311,280,000.00</b>	<b>306,307,725.00</b>	<b>4,972,275,00</b>	<b>98,40</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	8,600,000.00	7,200,000.00	1,400,000	83.72
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	14,760,000.00	11,647,700.00	3,112,300,00	78,91
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,920,000.00	2,920,000.00	0,-	100
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125,000,000.00	124,818,900.00	181,100,00	99,86
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160,000,000.00	159,721,125.00	278,875,00	99,83
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.519.900,00</b>	<b>21.480.000,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>98,42</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,000,000.00	5,000,000.00	0,-	100
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	<b>2.519.900,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>98,42</b>
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.519.900,00	2.480.000,00	39.900,00	98,42
<b>2.3</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14,000,000.00	14,000,000.00	0,-	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>597.181.000,00</b>	<b>571.534.000,00</b>	<b>25.647.000,00</b>	<b>95,70</b>
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,-	100
<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>582,181,000.00</b>	<b>556.534.000,00</b>	<b>25.647.000,00</b>	<b>95,59</b>
3.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105,867,000.00	99.124.000,00	6.743.000,00	93,63
3.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	474,144,000.00	455.440.000,00	18.704.000,00	96,06
3.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	2,170,000.00	1.970.000,00	200.000,00	90,78
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>0,-</b>	<b>100</b>
4.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6,990,000.00	6,990,000.00	0,-	100
<b>JUMLAH</b>		<b>3.234.156.590,92</b>	<b>3,148,728,655.00</b>	<b>86,025,295.92</b>	<b>97.23</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.206.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Mendahara  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>87,39</b>	<b>112,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Sub kegiatan penyusunan dokumen p perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1.1.2	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.1.3	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	12 bulan	12 Bulan	100
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	15 Stel	15 Stel	100
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7 Jenis	3 Jenis	100
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	3 Jenis	100
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan	3 Jenis	5 Jenis	100
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	12 Bulan	100
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100
1.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	398 Lembar	398 Lembar	100
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumber Daya air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100
1.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	100
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100
2.2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Izin yang dilayani	1 Izin	1 Izin	100
2.3	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Excavator yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	PERSENTASE PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	100%	100%	100
3.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100
3.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari besar dan keagamaan (kali)	1 kali	1 Kali	100
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100%	100%	100,00
		PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	100%	100%	100
4.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100%	100%	100,00
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perempuan yang aktif dalam pembangunan dikecamatan	50 Orang	50 orang	100
4.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	100	100%	100%
4.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	100
4.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100
4.2.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>102,41</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## 11. Kecamatan Mendahara Ulu

Kecamatan Mendahara Ulu menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan pada Tahun 2021 Kecamatan Mendahara Ulu melaksanakan 4 (*Empat*) program, 11 (*Sebelas*) kegiatan dan 25 (*Dua Puluh Lima*) Sub Kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Mendahara Ulu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.207.  
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran  
Kecamatan Mendahara Ulu Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.617.156	1.328.066.473	400.160.851	82,09
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.900.000	30.900.000	2.000.000	93,92
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	3.000.000	2.000.000	60,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	-	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.900.000	24.900.000	-	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.684.843,00	1.576.426.473,00	375.258.370,00	80,77
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.698.474.843,00	1.328.066.473,00	370.758.370,00	78,18
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	252.860.000,00	248.360.000,00	4.500.000,00	98,22
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.050.000,00	12.500.000,00	550.000,00	95,79
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.050.000,00	7.500.000,00	550.000,00	93,17

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.837.313,00</b>	<b>125.014.523,00</b>	<b>9.822.790,00</b>	<b>92,72</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.988.300,00	2.988.300,00	-	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.773.990,00	89.459.200,00	314.790,00	99,64
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.608.000,00	4.608.000,00	-	100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.102.023,00	10.102.023,00	-	100,00
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.565.000,00	12.565.000,00	-	100,00
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>17.582.009,00</b>	<b>9.417.991,00</b>	<b>65,12</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,0	14.582.009,00	9.417.991,0	60,76
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.145.000,00</b>	<b>72.033.300,00</b>	<b>3.111.700,00</b>	<b>85,86</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.575.000,00	52.463.300,00	3.111.700,00	94,40
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.570.000,00	19.570.000,00	-	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>87.064.429,00</b>	<b>83.114.429,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>95,46</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>12.518.532,00</b>	<b>8.568.532,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>68,45</b>
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK)	12.518.532,00	8.568.532,00	3.950.000,00	68,45
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>68.650.000,00</b>	<b>68.650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	68.650.000,00	68.650.000,00	-	100,00
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.895.897,00</b>	<b>5.895.897,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.895.897,00	5.895.897,00	-	100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.946.250,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>17.771.250,00</b>	<b>28,76</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>24.946.250,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>17.771.250,00</b>	<b>28,76</b>
3.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.946.250,00	7.175.000,00	17.771.250,00	28,76
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>622.181.000,00</b>	<b>589.838.222,00</b>	<b>32.342.778,00</b>	<b>94,80</b>
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>622.181.000,00</b>	<b>589.838.222,00</b>	<b>32.342.778,00</b>	<b>94,80</b>
4.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	283.980.500,00	283.115.800,00	864.700,00	99,70
4.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	328.480.500,00	300.842.422,00	27.638.078,00	99,70
4.1.3	Evaluasi Kelurahan	9.720.000,00	5.880.000	3.840.000	60,49
<b>JUMLAH</b>		<b>2.968.808.835</b>	<b>2.514.583.956</b>	<b>454.224.879</b>	<b>84,70</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Adapun Target, Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.208.  
Target, Realisasi dan Capaian Program Kecamatan Mendahara Ulu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS PELAYANAN INSTANSI</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	5	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan keuangan	3	3	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan	12	12	100
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	1	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12	12	100
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15	15	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	1	1	100
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	5	5	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	1	1	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1	0	0
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	5	5	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	12	12	100
1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	12	12	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12	12	100
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.5.1	Penyediaan Surat -menyurat	Persentasi pembelian materai	300	300	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9	9	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	1	100
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang kecamatan	1	1	100
2.2	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah excavator yang dipelihara	1	1	100
2.3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin yang dilayani	1	1	100
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA HARI-HARI BESAR DAN KEAGAMAAN</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	100	50	50

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Hari-Hari Besar Keagamaan	2	1	50
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	100%	100	100
		PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	100%	100	100
4.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase perempuan dalam pembangunan di Kecamatan	100	100	100
4.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan di Kelurahan	1	1	100
4.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan masyarakat di Kelurahan	1	1	100
4.1.3	Evaluasi Kelurahan	Pembayaran Konsultasi dan Koordinasi	1	1	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>90</b>

Sumber : LKPJ Kecamatan Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.33.2 Capaian Pekerjaan Alat Berat Kecamatan dan Realisasi PBB serta Retribusi Daerah

Berikut Data capaian pekerjaan alat berat Kecamatan serta Realisasi PBB dan Retribusi Tahun 2021.

Tabel 3.209.  
Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Kecamatan Tahun 2021

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Hasil Pekerjaan
<b>Kecamatan Muara Sabak Barat</b>			
1	Kelompok Tani Usaha Mandiri Rt 06 Kel Teluk Dawan	Pembuatan Tanggul	300 Meter
2	Kelompok Tani Usaha Mandiri Rt 06 Kel Teluk Dawan	Cuci Parit	5400 Meter
<b>Kecamatan Muara Sabak Timur</b>			
1	Desa Lambur II	Pembuatan Tanggul	3 KM
2	Muara Sabak Ilir	Pembuatan Tanggul (Swakelola)	2 KM
3	Kota Harapan	Pembuatan Tanggul	3 KM
<b>Kecamatan Rantau Rasau</b>			
1	Dusun Karya Dadi Desa Rantau Rasau II RT. 06 – RT. 11	Pembuatan Badan Jalan	3,5 m X 984 m
<b>Kecamatan Berbak</b>			
1	SDN 28/X Simpang Kecamatan Berbak	Membuat saluran sanitasi sekolah	±100 m
2	RT.8 RW.2 Dusun Marga Mukti Kelurahan Simpang	Penimbunan tanggul yang jebol	± 15 m
3	RT.10 RW.2 Dusun Tanjung Kuningan Kelurahan Simpang	Penimbunan tanggul yang jebol	± 15 m
4	SK. 01 sd 03 Desa Telago Limo	Pelebaran jalan	± 5 km
<b>Kecamatan Nipah Panjang</b>			
1	Parit 7 Kel. Nipah Panjang II RT. 01/05, 03/05, 04/05 & 01/08	Pekerjaan Tanggul	2 km
<b>Kecamatan Sadu</b>			
1	RT 11 Dusun 1 Desa Sungai Jambat	Penggalian Cuci Parit / Buang Lumpur	± 5.000 m
2	RT 12 Dusun 1 Desa Sungai Jambat	Penggalian Cuci Parit / Buang Lumpur	± 2.600 km
<b>Kecamatan Dendang</b>			
1	Tidak Ada Pekerjaan, Hanya Pemeliharaan Rutin dikarenakan. Computer Alat Berat Hilang. dan sudah dilaporkan		
<b>Kecamatan Kuala Jambi</b>			

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Hasil Pekerjaan
1	WELA KEL. KAMPUNG LAUT	AREAL PERKEBUNAN	P = 210 M dan L = 45 M
<b>Kecamatan Geragai</b>			
1	Desa Kota Baru	Normalisasi Parit	2,5KM
<b>Kecamatan Mendahara</b>			
1	Depan PT.PAL Menuju Jembatan Parit Lintang Kel.Mendahara Ilir	Tanggul jalan menuju ke Kabupaten guna menanggulangi Air Pasang Masuk	100X2 Meter
2	Parit 1 dan Sei Bom Kel.Mendahara Ilir	Perbaikan jalan menuju ke Kabupaten yang membuat mobil terpuruk	6 Titik
<b>Kecamatan Mendahara Ulu</b>			
1	Desa Sungai Toman	Penyewaan alat	± 100 m
2	Kelurahan Simpang Tuan	Penyewaan alat	± 100 m

Sumber : LKPJ 11 Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Tabel 3.210.  
Target dan Realisasi PBB dan Retribusi Daerah Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	PBB		%	Retribusi		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Muara Sabak Barat	614.720.844	289,379,129	47,07	14.708.971	12.020.000	81,72
2	Muara Sabak Timur	329.863.261	238.136.787	72,19			
3	Rantau Rasau	209.669.140	209.669.140	100	25.654.147	11.466.696	44,70
4	Berbak	87.017.351	87.359.957	100,39	11.922.622	0	0
5	Nipah Panjang	168.773.026	168.773.026	100	25.389.818	901.000	3,55
6	Sadu	123.208.509	136.746.175	110,99	19.545.212	1.450.000	7,41
7	Dandang						
8	Kuala Jambi	65.480.571,00	39.290.014,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9	Geragai	289.986.287	176.243.868	60,78	0	0	0
10	Mendahara	235.143.207,-	205.338.985,-	87,33	0	0	0
11	Mendahara Ulu	87.017.351	87.359.957	100,39	11.922.622	0	0

Sumber : LKPJ 11 Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.33.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.211.  
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>Kecamatan Muara Sabak Barat</b>		
1	Refocusing Anggaran mengakibatkan kegiatan pembangunan di Kelurahan tidak bisa dilaksanakan.	Untuk kegiatan fisik di Kelurahan telah diakomodir pada tahun berikutnya.
2	Pergeseran Anggaran sehingga capaian anggaran tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.	Memaksimalkan kegiatan lainnya untuk meningkatkan persentase capaian.
<b>Kecamatan Muara Sabak Timur</b>		

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Excavator sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, Namun Dikarenakan Refocusing Anggaran, menyebabkan Kegiatan Excavator tidak berjalan dengan Maksimal.	Alat Berat Excavator di Kembalikan Ke Dinas PUPR
2	Infrastruktur Jalan Rusak di berapa titik	Dengan Adanya Koordinasi dengan beberapa OPD Terkait, Semoga Terealisasi Perbaikan Jalan Tersebut.
<b>Kecamatan Rantau Rasau, Mendahara Ulu, Berbak</b>		
1	Ada kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali, dikarenakan agenda kegiatan tersebut berlangsung pada masa pandemi dan pada saat itu masyarakat dilarang untuk berkerumun/berkumpul dalam jumlah besar	Berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Covid-19. Dan jika wilayah tersebut sudah dinyatakan dalam zona hijau/aman, maka kegiatan dapat dilaksanakan.
<b>Kecamatan Nipah Panjang</b>		
1	Tidak tercapai target pada Pendapatan Retribusi Daerah	Melakukan Sosialisasi tentang IMB kepada masyarakat agar tidak berbenturan dengan Peraturan Daerah
<b>Kecamatan Sadu</b>		
1	Ada kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali, dikarenakan agenda kegiatan tersebut berlangsung pada masa pandemi dan pada saat itu masyarakat dilarang untuk berkerumun/berkumpul dalam jumlah besar	Berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Covid-19. Dan jika wilayah tersebut sudah dinyatakan dalam zona hijau/aman, maka kegiatan dapat dilaksanakan.
<b>Kecamatan Dendang</b>		
1	Refocusing Anggaran mengakibatkan kegiatan pembangunan di Kelurahan tidak bisa dilaksanakan.	Untuk kegiatan fisik di Kelurahan telah diakomodir pada tahun berikutnya.
2	Pergeseran Anggaran sehingga capaian anggaran tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.	Memaksimalkan kegiatan lainnya untuk meningkatkan persentase capaian.
<b>Kecamatan Kuala Jambi</b>		
1	Masih kurangnya pegawai yang tersedia di SKPD Kecamatan Kuala Jambi, sehingga untuk melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan masih belum maksimal	Mengusulkan penambahan Pegawai pada OPD Kecamatan Kuala Jambi
2	Masih kurangnya SDM pegawai yang dimiliki, sehingga untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan berjalan lamban	Pelaksanaan Bimtek/kursus/pelatihan peningkatan SDm Aparatur
3	Masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki OPD Kecamatan Kuala Jambi, sehingga dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan masih belum bisa dimaksimalkan	Penambahan Sarana dan Prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan kerja
4	Jumlah Anggaran yang tersedia untuk OPD Kecamatan masih belum memadai untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah di tentukan	Perlunya Penambahan Anggaran pada OPD Kecamatan Kuala Jambi sehingga program kerja bisa berjalan dengan maksimal.
<b>Kecamatan Geragai</b>		
1	Excavator sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, Namun Dikarenakan Refocusing Anggaran, menyebabkan	Alat Berat Excavator di Kembalikan KeDinas PUPR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan Excavator tidak berjalan dengan Maksimal.	
2	Masih kurangnya pegawai yang tersedia di SKPD Kecamatan Geragai, sehingga untuk melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan masih belum maksimal	Mengusulkan penambahan Pegawai pada OPD Kecamatan Geragai
3	Jumlah Anggaran yang tersedia untuk SKPD Kecamatan masih belum memadai untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah di tentukan	Perlunya Penambahan Anggaran pada SKPD Kecamatan Kuala Jambi sehingga program kerja bisa berjalan dengan maksimal.
4	Infrastruktur Jalan Rusak di berapa titik	Dengan Adanya Koordinasi dengan beberapa OPD Terkait, Semoga Terealisasi Perbaikan Jalan Tersebut.
<b>Kecamatan Mendahara</b>		
1	Masih Membutuhkan PNS	PNS yang ada harus merangkap tugas jabatan yang masih kosong
2	Infrastruktur Jalan Rusak di berapa titik	Excavator Kecamatan membantu titik jalan yang rusak

Sumber : LKPJ 11 Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

### 3.33.3. Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2020

#### A. Rekomendasi DPRD.

Catatan dan rekomendasi pansus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah agar menarik alat berat Excavator Kecamatan untuk dilakukan pelelangan karena alat sudah tua dan produktivitasnya rendah.
2. Sebagai pengganti excavator tersebut agar diberikan Excavator dengan ukuran sedang yang sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Agar Tunjangan Tambahan Penghasilan Camat disamakan besarnya dengan pejabat eselon III di Sekretariat Daerah
4. Struktur pelaporan LKPJ disampaikan lebih terperinci dan komprehensif dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Terhadap Program dan Kegiatan pada TA 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena Refocusing anggaran yang telah masuk dalam perencanaan dan belum ada anggaran agar pada tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan dan munculnya program/kegiatan yang baru yang tidak relevan; dan

6. Melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terealisasi tepat waktu dan memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT

B. Tindak Lanjut

1. Kecamatan Muara Sabak Barat

- 1) Menunggu BA serah terima asset dari Dinas terkait yang mengelola Alat Berat Agar Aset Alat Berat tidak menjadi Beban di Neraca
- 2) Menunggu penyerahan alat berat dimaksud dengan administrasinya Agar tercatat pada Aset
- 3) Kasubbag Kepegawaian dan Umum Kecamatan Muara Sabak Barat menunggu Peraturan Bupati untuk dikordinasikan kepada PD BKPSDMD dan BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, Agar TPP tercatat pada amprah yang dikeluarkan oleh BKD Kab. Tanjung Jabung Timur.
- 4) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sangat mendukung peraturan dimaksud agar di sesuaikan dengan laporan LRA dan Aset
- 5) Kegiatan dimaksud sudah di input pada Aplikasi SIPD Kemendagri TA 2022 untuk dilaksanakan, Agar Pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.
- 6) Menunggu arahan lebih lanjut dari Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Agar koordinasi antar PD Teknis menjadi sinkron.

2. Kecamatan Muara Sabak Timur

- 1) Kecamatan Muara Sabak Timur tidak menganggarkan kembali Belanja Pemeliharaan Excavator, agar Excavator bisa diperbaiki dan dilelang oleh pihak yang berwenang.
- 2) Sangat menyetujui Karena kondisi Alat Berat/Excavator saat ini sangat memperhatikan dimana Kondisi Excavator yang ada tidak memungkinkan untuk beroperasi Daerah Kec. Muara Sabak Timur

3. Kecamatan Rantau Rasau

- 1) Kecamatan Rantau Rasau pada dasarnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis dan Menyetujui guna segera dilaksanakan pelelangan.
- 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah- wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan.
- 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat yang besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan sehingga dapat memberikan dampak semangat kerja yang lebih baik lagi.
- 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Rantau Rasau mengalami Refocusing, ada kegiatan yang dikurangi anggarannya karena Refocusing, yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan (operasional excavator) Rp. 139.750.000,00 dan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Pembinaan Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Bandar Jaya Rp. 353.000.000,00, pada anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program yang Refocusing pada tahun 2020 tidak dapat dianggarkan Kembali karena anggaran yang difloating hampir sama dengan pagu anggaran 2020 setelah di Refocusing
  - 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT
4. Kecamatan Nipah Panjang
- 1) Setuju, mengingat kondisi alat Alat berat yang sudah lama beroperasi bahkan banyak mengalami kerusakan dibagian alat – alatnya.
  - 2) Untuk alat berat yang baru nanti, kepengurusan dibawah pengelola UPTD PU setiap Kecamatan namun tetap bisa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa untuk Operasional selanjutnya.
  - 3) Setuju, tunjangan tambahan penghasilan camat disamakan besarnya dengan pejabat eselona III di secretariat daerah, mengingat beban kerja camat sangat banyak dan perlu tambahan penghasilan
  - 4) Terhadap program dan kegiatan Tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya karena recopucing telah di masukkan ke anggaran tahun 2021 namun pada akhirnya anggaran tersebut ditunda kembali.
5. Kecamatan Berbak
- 1) Kecamatan Berbak pada dasarnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis dan Menyetujui guna segera dilaksanakan pelelangan.
  - 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah- wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan.
  - 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat yang besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan sehingga dapat memberikan dampak semangat kerja yang lebih baik lagi.
  - 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Berbak mengalami Refocusing, adakegiatan yang dikurangi anggarannya, yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan (operasional excavator) Rp. 188.450.000,00 dan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Pembinaan Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Rp. 366.404.550,00, pada anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program

yang Refocusing pada tahun 2020 tidak dapat dianggarkan Kembali karena jumlah anggaran yang difloating hamper sama dengan pagu anggaran 2020 setelah di Refocusing

- 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.

#### 6. Kecamatan Sadu

- 1) Kecamatan Sadu pada dasarnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis dan Menyetujui guna segera dilaksanakan pelelangan.
- 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah- wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan.
- 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat yang besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan sehingga dapat memberikan dampak semangat kerja yang lebih baik lagi.
- 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Sadu mengalami Refocusing, ada kegiatan yang dikurangi anggarannya karena Refocusing, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 77.290.000,00, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 19.000.000,00, Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Bimtek) Rp. 10.000.000,00, Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi (MTQ,Camat Cup, HUT RI) Rp. 82.700.000,00, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PKK) Rp. 27.813.500,00, Program pembangunan infrastruktur perdesaan (operasional excavator) Rp. 15.591.500,00 dan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Pembinaan Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Sungai Lokan Rp. 380.350.000,00, pada anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program yang Refocusing pada tahun 2020 tidak dapat dianggarkan Kembali karena anggaran yang difloating hampir sama dengan pagu anggaran 2020 setelah di Refocusing
- 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT.

#### 7. Kecamatan Dendang

- 1) Menunggu BA serah terima asset dari Dinas terkait yang mengelola Alat Berat Agar Aset Alat Berat tidak menjadi Beban di Neraca
- 2) Menunggu penyerahan alat berat dimaksud dengan administrasinya Agar tercatat pada Aset

- 3) Kasubbag Kepegawaian dan Umum Kecamatan Dendang menunggu Peraturan Bupati untuk dikoordinasikan kepada PD BKPSDMD dan BKD Kab. Tanjung Jabung Timur, Agar TPP tercatat pada amprah yang dikeluarkan oleh BKD Kab. Tanjung Jabung Timur.
- 4) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sangat mendukung peraturan dimaksud agar di sesuaikan dengan laporan LRA dan Aset
- 5) Kegiatan dimaksud sudah di input pada Aplikasi SIPD Kemendagri TA 2022 untuk dilaksanakan, Agar Pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.
- 6) Menunggu arahan lebih lanjut dari BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Timur untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Agar koordinasi antar PD Teknis menjadi sinkron.

#### 8. Kecamatan Kuala Jambi

- 1) Pemerintah Kecamatan Kuala Jambi pada Prinsipnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis
- 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah-wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan
- 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat itu besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan
- 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Kuala Jambi mengalami Refocusing, ada kegiatan yang dikurangi anggarannya karena Refocusing, dan untuk Anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program yang Refocusing pada tahun 2020 agar dapat dianggarkan Kembali
- 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT

#### 9. Kecamatan Geragai

- 1) Pemerintah Kecamatan Geragai pada Prinsipnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis.
- 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah-wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan
- 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat itu besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan
- 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Geragai mengalami Refocusing, ada kegiatan yang dikurangi anggarannya karena Refocusing, dan untuk Anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program yang Refocusing pada tahun 2020 agar dapat dianggarkan Kembali
  - 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT
10. Kecamatan Mendahara
- 1) Kecamatan Mendahara tidak menganggarkan kembali Belanja Pemeliharaan Excavator
  - 2) Sangat Menyetujui karena kondisi alat berat/excavator saat ini sangat memperhatikan
11. Kecamatan Mendahara Ulu
- 1) Kecamatan Mendahara Ulu pada dasarnya setuju mengingat kondisi alat sudah banyak yang harus diservis
  - 2) Perlu ada alat berat excavator pengganti ukuran sedang untuk menjangkau ke wilayah-wilayah desa yang sulit dilalui dengan alat berat excavator yang besar. Alat berat excavator yang ukuran sedang lebih mudah dan efisien baik dari segi pemakaiannya dan juga biaya perawatan
  - 3) Mengingat beban kerja dan tanggung jawab Camat itu besar, tentu saja sangat berharap besarnya disamakan
  - 4) Pembuatan LKPJ Kecamatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
  - 5) Pada tahun 2020 Kecamatan Mendahara Ulu mengalami Refocusing, ada kegiatan yang dikurangi anggarannya karena Refocusing, yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan (operasional excavator) Rp. 188.450.000,00 dan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Pembinaan Adm Pengelolaan Keuangan Kelurahan Simpang Rp. 366.404.550,00, pada anggaran 2021 kegiatan yang ada pada program yang Refocusing pada tahun 2020 tidak dapat dianggarkan Kembali karena anggaran yang difloating hampir sama dengan pagu anggaran 2020 setelah di Refocusing
  - 6) Komunikasi/Koordinasi antara Kecamatan dengan Mitra kerja di DPRD selalu terjalin Bersama, berkesinambungan dan sehingga sasaran dapat terealisasi tepat waktu guna memberikan azas manfaat dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT

## BAB IV

# PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

*Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas pembantuan dan Dana Dekonsentrasi yang diterima dari pemerintah pusat dan Propinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021.*

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut :

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat.
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa.
3. Kepala Daerah memberitahukan Rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
4. Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/Lembaga.
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah.
7. Saldo kas dikembalikan ke kas umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut, disamping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Azas Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

## **4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

Pada Tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak mendapatkan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **4.2. DANA DEKONSENTRASI**

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Teknis yaitu Kementerian Tenaga Kerja melalui UPT Pusat Ketenagakerjaan dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;

### **4.2.1. Satuan Kerja Pelaksana**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan dana Dekonsentrasi yaitu :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Ketahanan Pangan

#### **4.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterima dari Balai Besar Pelatihan Pengembangan Pelatihan Kerja Medan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan DIPA No. SP. DIPA. 026.13.2.451094/2021 Program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Program yaitu : Program Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Total Jumlah anggaran pada program tersebut diatas sebesar Rp. 827.585.000,- (Delapan ratus dua puluh Tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 790.143.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan persentase 95,47%.

Selengkapnya Target dan Realisasi Belanja serta keluaran (Output) dan dampak (Outcome) dari Program Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 1.  
Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Pagu Anggaran
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	$6=3-4$
	<b>PROGRAM PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>	<b>827.584.000,00</b>	<b>818.054.000,00</b>	<b>95,47</b>	<b>9.530.000,00</b>
1.	<b>Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas</b>	<b>827.584.000,00</b>	<b>818.054.000,00</b>	<b>99,59</b>	<b>9.530.000,00</b>
1.2	Pelatihan Berbasis Kompetensi	707.350.000,00	704.518.000,00	71,21	2.832.000,00
1.3	Administrasi Kegiatan	120.234.000,00	113.536.000,00	94,43	6.698.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>827.584.000,00</b>	<b>818.054.000,00</b>	<b>95,47</b>	<b>9.530.000,00</b>

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.2.  
Target dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	<b>PROGRAM PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DISERTIFIKASI DAN BEKERJA SESUIA KOMPETENSI</b>	<b>PERSEN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	Paket	10 Paket	100%	100%
1.2	Sub Kegiatan Administrasi Kegiatan	Terlaksananya administrasi Kegiatan	Bulan	12 Bulan	100%	100%

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Tabel 4.3.  
Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi BLK  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TanjungJabung Timur

NO	KEJURUAN	SUB KEJURUAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PESERTA	SUMBER DANA
1	Garmen Apparel	Asisten Pembuatan Pakaian	2 Paket	32 Orang	APBN
2	Processing	Pembuatan Roti dan Kue	1 Paket	16 Orang	APBN
3	Tata Kecantikan	Junior Stylist	1 Paket	16 Orang	APBN
4	Tata Kecantikan	Junior Beutician	1 Paket	16 Orang	APBN

NO	KEJURUAN	SUB KEJURUAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PESERTA	SUMBER DANA
5	Garmen Apparel	Pembuatan Hiasan Busana Dengan Mesin Bordir	1 Paket	16 Orang	APBN
6	Refrigerasi	Perawatan AC Split	1 Paket	16 Orang	APBN
7	Basic Office	Operator Komputer	1 Paket	16 Orang	APBN
8	Otomotif	Service Sepeda Motor Konvensional	1 Paket	16 Orang	APBN
9	Listrik	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	1 Paket	16 Orang	APBN
<b>JUMLAH PAKET</b>			<b>10 Paket</b>	<b>176 Orang</b>	

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.4.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya sarana dan prasarana pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Tanjung Jabung Timur seperti Peralatan, Tempat ibadah, Gedung Workshop Pelatihan, parkir kendaraan dan kendaraan dinas.	Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelatihan di BLK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.	Masih kurangnya instruktur pelatihan ASN	Penambahan instruktur untuk mengisi jabatan instruktur

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

#### 4.2.1.2. Dinas Ketahanan Pangan

Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan diterima dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan DIPA Nomor 018.113.109019/2021 tanggal 15 Februari 2021 Program yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program yaitu Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

Untuk Pencapaian keberhasilan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1.1 Kegiatan Pemantapan ketersediaan dan penanganan Rawan Pangan

- 1.1.1 Sub Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan

- 1.2 Kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

1.2.1 Sub Kegiatan Pekarangan pangan Lestari

2. Program Dukungan manajemen

2.1 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan

2.1.1 Sub Kegiatan manajemen dan administrasi kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah Anggaran yang diberikan sebesar Rp. 785.060.000,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 100% atau Rp. 785.060.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh ribu rupiah). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 5.  
Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan  
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Pagu Anggaran
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas</b>	<b>785.060.000,00</b>	<b>785.060.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
1.1	Kegiatan Pemantapan ketersediaan dan penanganan Rawan Pangan	28.460.000,00	28.460.000,00	100	-
1.1.1	Sub Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan	28.460.000,00	28.460.000,00	100	-
1.2	Kegiatan pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	756.600.000,00	756.600.000,00	100	-
1.2.1	Sub kegiatan Pekarangan pangan Lestari	756.600.000,00	756.600.000,00	100	-
<b>2</b>	<b>Program Dukungan manajemen</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
2.1	Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	18.500.000,00	18.500.000,00	100	-
2.1.1	Sub kegiatan manajemen dan administrasi kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	100	-
<b>Jumlah</b>		<b>803.560.000,00</b>	<b>803.560.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Tabel 4. 6.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dana Dekonstrasi pada  
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</b>	<b>PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>PERSEN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan</b>	<b>Persentase Penyelesaian penyusunan Peta</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1	Sub kegiatan penyusunan Peta FSVA Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jumlah dokumen penyusunan peta FSVA	Dokumen	12	12	100
1.2	Kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Persentase Pembinaan, Pendampingan P2L dan Monev	Persen	100	100	100
1.2.1	Subkegiatan Pekarangan pangan Lestari	Jumlah Pembinaan, Pendampingan P2L dan Monev	Kelompok	14	14	100
2	Program Dukungan manajemen	Persentase Dukungan Manajemen	Persen	100	100	100
2.1	Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	Persentase penyelesaian manajemen dan teknis lainnya	Persen	100	100	100
2.1.1	Sub kegiatan manajemen dan administrasi kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	Pembayaran Honorarium pengelola keuangan	Bulan	12	12	100

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2021

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.7.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Rincian sub kegiatan pada POK tidak sesuai masalahnya untuk kegiatan monev kelapangan tidak sesuai dengan antara biaya perjalanan dinas dengan kondisi dilapangan	Perlunya perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk menyusun anggaran pada tahun yang datang, bila memungkinkan Dinas lingkup Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dilibatkan dalam menyusun DIPA/POK oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
2	Perlu ada koordinasi pada saat merevisi DIPA maupun POK	Perlunya koordinasi antara Dinas penerima dana dekonsentrasi sehingga capaian program dan kegiatan terukur dan tepat sasaran

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

## BAB V PENUTUP

*Bab ini memuat kata akhir dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021*

Kembali ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan perwujudan dan tekad dari setiap Kepala Daerah untuk menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 merupakan produk manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terus berkembang, LKPJ ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan manajemen pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Akhirnya, kami beserta segenap aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengharapkan agar LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Terima kasih

Muara Sabak, Maret 2022

Bupati Tanjung Jabung Timur

**H. ROMI HARIYANTO,SE**